



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

Menimbang : bahwa guna penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Timur (Lembaran Negara RI tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Nomor 9), Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemerintahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara RI Tahun 1972 Nomor 38);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
  - 1.4 Maksud dan Tujuan
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.4 Aspek daya Saing Daerah
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu
  - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu
  - 3.3 Kerangka Pendanaan
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- 4.1 Permasalahan Pembangunan
  - 4.2 Isu Strategis
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- 5.1 Visi
  - 5.2 Misi
  - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM  
PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP
- (2) Isi, uraian dan matriks RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 29 Juli 2019

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI  
JAWA TIMUR : 222-3/2019**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-8
1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RPJM Nasional .....	I-10
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jatim .....	I-12
1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Dengan RPJPD Kabupaten Situbondo .....	I-14
1.3.4 Hubungan P-RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RTRW Provinsi Jawa Timur.....	I-16
1.3.5 Hubungan P-RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RTRW Kabupaten Situbondo .....	I-17
1.3.6 Keterkaitan Sasaran P-RPJMD dengan RPJPD Kab. Situbondo.....	I-35
1.3.7 Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan .....	I-36
1.3.8 Hubungan RPJMMDP kabupaten Situbondo dengan Rencana Strategis PD .....	I-37
1.3.9 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RKPD .....	I-37
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-37
1.4.1 Maksud .....	I-37
1.4.2 Tujuan .....	I-37
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-38
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi .....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	II-21
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-24
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-24



2.2.2	Indikator Inflasi .....	II-29
2.2.3	Indeks Gini Rasio .....	II-30
2.2.4	Tingkat Kemiskinan .....	II-30
2.2.5	Indeks Pembangunan Manusia .....	II-33
2.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat .....	II-35
2.2.7	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-36
2.2.8	Indeks Pendidikan .....	II-37
2.2.9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah .....	II-37
2.2.10	Indeks Kesehatan .....	II-38
2.2.11	Prevalensi Balita Gizi Buruk .....	II-38
2.2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	II-40
2.3	Aspek Pelayanan Umum .....	II-42
2.3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-43
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....	II-61
2.3.3	Layanan Urusan Pilihan.....	II-83
2.3.4	Urusan Penunjang.....	II-93
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-96
2.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita.....	II-96
2.4.2	Angka Kriminalitas.....	II-97
2.4.3	Indikator Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) .....	II-98
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-3
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-16
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-21
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-24
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	III-29
3.3	Kerangka Pendanaan .....	III-33
3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.....	III-33
3.3.2	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah .....	III-35
3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-41
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.1.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	IV-1
4.1.2	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-10



4.2	Isu Strategis .....	IV-23
4.2.1	Dinamika Internasional .....	IV-24
4.2.2	Dinamika Nasional.....	IV-27
4.2.3	Dinamika Regional .....	IV-32
4.2.4	Isu-Isu Strategis Kabupaten Situbondo.....	IV-36
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Visi .....	V-13
5.2	Misi.....	V-15
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V-17
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM</b>	
	<b>PEMBANGUNAN.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-1
6.1.1	Arah kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Situbondo .....	VI-5
6.1.2	Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah.....	VI-5
6.2	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	VI-13
6.2.1	Kinerja BUMD .....	VI-15
6.2.2	Strategi dan Pengembangan BUMD.....	VI-17
6.3	Kebijakan terkait Pengelolaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	VI-24
6.4	Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (Nawa Cita).....	VI-25
6.5	Program Pembangunan Daerah.....	VI-55
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM</b>	
	<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>IX-1</b>
9.1	Pedoman Transisi .....	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan .....	IX-1



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keselarasan Visi RPJMDP Kabupaten Situbondo dengan RPJMN 2015-2019 .....	I-11
Tabel 1.2.	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Kesembilan agenda prioritas RPJMN 2015-2019 .....	I-11
Tabel 1.3	Keselarasan Visi Kabupaten Situbondo dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur .....	I-13
Tabel 1.4	Keselarasan Misi Kabupaten Situbondo dengan RPJMDP Propinsi Jawa Timur .....	I-13
Tabel 1.5	Keterkaitan Visi Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Situbondo .....	I-15
Tabel 1.6	Keterkaitan Misi RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Situbondo .....	I-16
Tabel 1.7	Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RTRW Kabupaten Situbondo 2013-2033 .....	I-22
Tabel 1.8	Keterkaitan Sasaran Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Situbondo .....	I-35
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo .....	II-2
Tabel 2.2	Data Kemiringan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Situbondo....	II-3
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo Tahun 2016.....	II-4
Tabel 2.4	Data Iklim Kabupaten Situbondo Perbulan Tahun 2013-2017 .....	II-4
Tabel 2.5	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan 2013-2017.....	II-7
Tabel 2.6	Produksi dan Produktivitas Tanaman Holtikultura Tahun 2013-2017	II-7
Tabel 2.7	Produksi Hasil Peternakan Tahun 2014-2017 .....	II-9
Tabel 2.8	Produksi Hasil Perikanan Tahun 2013-2017 .....	II-11
Tabel 2.9	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2013-2017 .....	II-12
Tabel 2.10	Lokasi Pengelolaan Tanaman Perkebunan .....	II-13
Tabel 2.11	Lokasi dan Komoditas Unggulan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Situbondo .....	II-16
Tabel 2.12	Rekap Kejadian Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2017 .....	II-21
Tabel 2.13	Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Situbondo Tahun 2013-2017 .....	II-21
Tabel 2.14	Indikator Kependudukan di Kabupaten Situbondo .....	II-23
Tabel 2.15	Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Situbondo Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-23
Tabel 2.16	PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	II-25



Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Situbondo ..	II-27
Tabel 2.18	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 .....	II-31
Tabel 2.19	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2012 – 2017.....	II-31
Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Kabupaten Situbondo 2013 – 2017 .....	II-33
Tabel 2.21	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo (Metode Baru) Tahun 2013 – 2017.....	II-35
Tabel 2.22	Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat .....	II-36
Tabel 2.23	Nilai Capaian IKM Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-36
Tabel 2.24	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017.....	II-41
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017 .....	II-43
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2017 (%).....	II-45
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Situbondo Tahun 2013– 2017 .....	II-47
Tabel 2.28	Presentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017 .....	II-49
Tabel 2.29	Presentase Angka Kelulusan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017.....	II-50
Tabel 2.30	Harapan lama Sekolah Metode Baru Kabupaten Situbondo 2012 – 2017 .....	II-51
Tabel 2.31	Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2013-2017.....	II-52
Tabel 2.32	Angka Kematian Bayi Tahun 2013 – 2017 .....	II-53
Tabel 2.33	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2013-2017 .....	II-54
Tabel 2.34	Perkembangan IKM Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2017.....	II-55
Tabel 2.35	Angka Harapan Hidup Metode Baru Kabupaten Situbondo 2012 – 2017 .....	II-55
Tabel 2.36	Data Capaian Panjang Jalan Kondisi Baik.....	II-56
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	II-57
Tabel 2.38	Rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2017.....	II-58
Tabel 2.39	Penegakan Peraturan Daerah, Rasio Linmas, dan Prosentase Tingkat Resptime Kabupaten Situbondo tahun 2016-2017 .....	II-59
Tabel 2.40	Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .....	II-61



Tabel 2.41	Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 – 2017 .....	II-61
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-62
Tabel 2.43	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017.....	II-62
Tabel 2.44	Ketahanan Pangan Tahun 2017.....	II-63
Tabel 2.45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-64
Tabel 2.46	Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup.....	II-64
Tabel 2.47	Rekapitulasi Luasan Ruang Terbuka Hijau .....	II-66
Tabel 2.48	Indeks Pencemaran Air.....	II-70
Tabel 2.49	Rasio TPS per satuan penduduk .....	II-71
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Kependudukan dan Pencacatan Sipil.....	II-73
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017 ...	II-74
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017 .....	II-74
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan .....	II-76
Tabel 2.54	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-76
Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017.....	II-79
Tabel 2.56	Nilai Realisasi PMDN (Milyar) Tahun 2013-2017 .....	II-79
Tabel 2.57	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-80
Tabel 2.58	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-80
Tabel 2.59	Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	II-80
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-81
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-82
Tabel 2.62	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-83
Tabel 2.63	Hasil Budidaya Perikanan.....	II-83





Tabel 2.64	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017 .....	II-85
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-86
Tabel 2.66	Kejadian Penyakit Hewan Tahun 2017 .....	II-88
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017 .....	II-89
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-91
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-92
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017 .....	II-92
Tabel 2.71	Persentase OPD yang selaras dengan RPJMD Tahun 2013 – 2017.....	II-93
Tabel 2.72	Capaian Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2013 – 2017.....	II-94
Tabel 2.73	Capaian Indikator Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2013 – 2017.....	II-95
Tabel 2.74	Capaian Nilai IKM Kecamatan Tahun 2016-2017 .....	II-95
Tabel 2.75	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2017 .....	II-96
Tabel 2.76	Rata-rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2017 .....	II-97
Tabel 2.77	Jumlah Kejahatan menurut Jenis dan Penyelesaian di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 – 2016.....	II-97
Tabel 2.78	Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2017...	II-99
Tabel 2.79	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Situbondo .....	II-99
Tabel 3.1	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III-5
Tabel 3.2	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	III-6
Tabel 3.3	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	III-7



Tabel 3.4	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III-10
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017.....	III-11
Tabel 3.6	Target Dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017.....	III-11
Tabel 3.7	Rasio Realisasi Pendapatan Dengan Realisasi Belanja Dalam Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2013–2017 .....	III-11
Tabel 3.8	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III-13
Tabel 3.9	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013–2017 .....	III-16
Tabel 3.10	Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	III-20
Tabel 3.11	Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	III-25
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2015.....	III-27
Tabel 3.13	Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III-28
Tabel 3.14	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	III-30
Tabel 3.15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Situbondo .....	III-32
Tabel 3.16	Pengeluaran Wajib, Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017.....	III-34
Tabel 3.17	Capaian dan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (juta rupiah) Tahun 2016-2021.....	III-36
Tabel 3.18	Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.....	III-40
Tabel 3.19	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo 2016 – 2021 .....	III-42
Tabel 3.20	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.....	III-44
Tabel 4.1	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017... ..	IV-15
Tabel 4.2	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017.... ..	IV-15
Tabel 4.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	IV-16
Tabel 4.4	Perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017.....	IV-17
Tabel 4.5	Perkembangan Besaran Pengeluaran Penduduk Kabupaten	



	Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017 .....	IV-17
Tabel 4.6	Indeks Gini Ratio Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017 .....	IV-18
Tabel 4.7	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 – 2017 .....	IV-18
Tabel 4.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013 – 2017 .....	IV-19
Tabel 4.9	Tingkat Kemiskinan Tahun 2013 – 2017 .....	IV-20
Tabel 4.10	Capaian IKM Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2017 .....	IV-22
Tabel 4.11	Capaian Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2015 – 2017 .....	IV-22
Tabel 4.12	Capaian Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur .....	IV-39
Tabel 5.1	Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Situbondo .....	V-3
Tabel 5.2	Penjelasan Visi .....	V-14
Tabel 5.3	Perumusan Misi RPJMD .....	V-15
Tabel 5.4	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD .....	V-16
Tabel 5.5	Keterkaitan Isu-Isu Strategis Kabupaten Situbondo dengan Misi .....	V-17
Tabel 5.6	Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Situbondo 2016-2021 .....	V-20
Tabel 5.7	Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Situbondo 2016-2021 .....	V-21
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Strategi Kabupaten Situbondo .....	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo .....	VI-3
Tabel 6.3	Rencana Jalan Lingkar (Ringroad) Utara .....	VI-37
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Situbondo .....	VI-56
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 .....	VII-8
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Situbondo .....	VII-9
Tabel 8.1	Komponen dan Sub Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi .....	VIII-6
Tabel 8.2	Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo .....	VIII-6
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Situbondo .....	VIII-7



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan P-RPJMD Kab. Situbondo dengan Dokumen Perencanaan Lain .....	I-9
Gambar 1.2.	Diagram Alur Hubungan antara Perencanaan Makro, Perencanaan Regional dan Spasial .....	I-9
Gambar 1.3.	Diagram Alur kedudukan RTRW kabupaten Situbondo dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	I-10
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Situbondo .....	II-1
Gambar 2.2	Balai Budidaya Air Payau di Desa Pathek .....	II-10
Gambar 2.3	Tambak di Kecamatan Bungatan .....	II-10
Gambar 2.4	TPI di Pelabuhan Jangkar di Desa Jangkar .....	II-10
Gambar 2.5	Peta Kawasan Perikanan.....	II-11
Gambar 2.6	Tanaman Perkebunan tembakau dan tebu di Kec. Asembagus.....	II-13
Gambar 2.7	Peta Kawasan Pertambangan di Kabupaten Situbondo.....	II-15
Gambar 2.8	Taman Teknologi Pertanian .....	II-17
Gambar 2.9	Green House sebagai sarana edukasi Hidroponik.....	II-18
Gambar 2.10	Cluster Perikanan dan Panen Udang Vannamae .....	II-18
Gambar 2.11	Penanganan sampah rumah Tangga .....	II-68
Gambar 2.12	Perilaku Praktik Pemilahan Sampah Rumah Tangga.....	II-69
Gambar 5.1	Pondasi dan Misi dalam Pencapaian Visi .....	V-17
Gambar 5.2	Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 1 .....	V-18
Gambar 5.3	Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 2.....	V-18
Gambar 5.4	Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 3 .....	V-19
Gambar 5.5	Desain <i>Logical Framework</i> Pencapaian Misi 4.....	V-19
Gambar 6.1	Konsep Pondasi dan Misi untuk Pencapaian Visi Kabupaten Situbondo .....	VI-4
Gambar 6.2	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo.....	VI-12
Gambar 6.3	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kab. Situbondo.....	VI-13
Gambar 7.1	Konsep Pembangunan Kabupaten Situbondo .....	VII-8



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2014-2017 .....	II-22
Grafik 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	II-23
Grafik 2.3	Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2013-2017 .....	II-24
Grafik 2.4	PDRB Kabupaten Situbondo (ADHK) Tahun 2013-2017 .....	II-26
Grafik 2.5	Inflasi Tahun 2011-2015.....	II-29
Grafik 2.6	Indeks Gini Rasio Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	II-30
Grafik 2.7	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017 .....	II-31
Grafik 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	II-34
Grafik 2.9	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 .....	II-38
Grafik 2.10	Prevalensi Balita Gizi Buruk Situbondo Th 2013-2017.....	II-38
Grafik 2.11	Prosentase Balita Stunting Situbondo Th 2016-2017.....	II-40
Grafik 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Situbondo .....	II-42
Grafik 2.13	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh .....	II-58
Grafik 2.14	Perkembangan Kinerja Persentase (%) Panti Sosial Skala Kabupaten yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2011- 2016.....	II-60
Grafik 2.15	Persentase Penduduk yang Ber-KTP dengan yang Wajib Ber KTP Tahun 2014-2017.....	II-72
Grafik 2.16	Rasio Bayi Berakte Kelahiran.....	II-73
Grafik 2.17	Persentase Koperasi Aktif .....	II-77
Grafik 2.18	Pertumbuhan Usaha Mikro.....	II-78
Grafik 2.19	Hasil Produksi Olahan Ikan .....	II-84
Grafik 2.20	Konsumsi Makan Ikan .....	II-85
Grafik 2.21	Jumlah Kunjungan Wisata .....	II-86
Grafik 2.22	Kelompok Tani Yang Dibina Melalui Penyuluhan Tahun 2013-2017 .....	II-87
Grafik 2.23	Hasil Produksi Peternakan.....	II-88
Grafik 2.24	Penerapan Teknologi Peternakan.....	II-89
Grafik 2.25	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017 (rupiah).....	II-96
Grafik 3.1	Perbandingan Kontribusi Pendapatan Daerah	



	Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017.....	III-6
Grafik 3.2	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017	III-8
Grafik 3.3	Perbandingan Total Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Situbondo.....	III-15
Grafik 6.1	Setoran PAD PDAM Tirta Baluran Kab. Situbondo tahun Tahun 2016-2018 .....	VI-15
Grafik 6.2	Setoran PAD Perusda Pasir Putih Kab. Situbondo Tahun 2016-2018 .....	VI-16
Grafik 6.3	Setoran PAD PT. Bank Syariah Kab. Situbondo.....	VI-17
Grafik 6.4	Prosentase Penduduk Miskin di Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2013-2017 .....	VI-28







## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012. Disamping itu RPJMD tersebut juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 berjalan yaitu pada masa kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Dadang Wigiarto, SH dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, MSi, pada 17 Februari 2016 Pemerintah



Kabupaten Situbondo dalam periode tahunan telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD tersebut. Selain itu didalam perkembangannya terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Situbondo serta adanya perubahan kebijakan nasional sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Adapun secara detail beberapa dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Pertama**, terdapat perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global dan regional yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, Jawa Timur dan Situbondo sehingga berpengaruh terhadap capaian target indikator utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Prediksi kemampuan keuangan khususnya dana perimbangan dan dana transfer yang realisasinya lebih kecil dengan target pada RPJMD mempengaruhi capaian kinerja pembangunan. Selanjutnya terjadinya perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (System National Account) 2008, maka cakupan sektor/kategori semakin luas, terbagi menjadi 17 sektor lapangan usaha, dan dampak dari perubahan ini capaian angka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Selanjutnya perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM lebih rendah dibanding metode lama.

**Kedua**, dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan sebagaimana amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional bahwa penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD provinsi. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan pengkajian kembali muatan substansi RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 untuk dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan melakukan harmonisasi terhadap program-program kabupaten Situbondo dengan Program-program pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dengan penyesuaian tersebut diharapkan mampu menghasilkan sinergi program yang berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.





**Ketiga**, bahwa RSUD sebagai UPTD dari Dinas Kesehatan, tentunya perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah pada dokumen perencanaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**Keempat**, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang menggantikan Permendagri 54 tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD tentunya akan berdampak pada perlunya penyesuaian kembali substansi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017.

**Kelima**, dari segi landasan hukum. sebagaimana permendagri 86 tahun 2017 pasal 342 bahwa perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Berdasarkan hal ini maka RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021 sisa masa berlakunya masih lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga bisa dilaksanakan perubahan RPJMD,

Berdasarkan lima hal tersebut diatas, menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan pemetaan kembali rumusan misi, tujuan dan sasaran dan turunannya ke PD sehingga dapat dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah kabupaten Situbondo.

Proses penyusunan Perubahan RPJMD tetap memperhatikan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik.

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan diskusi dengan tenaga ahli sesuai dengan substansi. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dilakukan dengan mengikut sertakan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki.

3. Pendekatan Politik

Perencanaan yang disusun merupakan amanat RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 dan merupakan wujud penjabaran visi, misi dan program pembangunan lima tahunan yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang



harus dilakukan oleh Bupati terpilih. Dalam melakukan penyusunan Bupati Kabupaten Situbondo melakukan konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

#### 4. Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*

Perencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dan perencanaan pembangunann Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta mandat maupun intruksi lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Situbondo, serta menggali aspirasi dari masyarakat tingkat desa, yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulaidari tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Kedudukan RencanaPerubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) 2016–2021 Kabupaten Situbondo merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012. RPJMDP 2016-2021 Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Keterkaitan dokumen RPJMDP dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten SitubondoTahun 2013-2033. Hal ini untuk menjamin:
  - a. Adanya keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. Adanya keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Situbondo.
2. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten SitubondoTahun 2016-2021. Hal ini bertujuan agar ada kesinambungan antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengahantara Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
4. Memperhatikan Road Map Nasional Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2016-2030. Hal ini penting untuk menjamin keselarasan



kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian 17 tujuanSDG's secara nasional, propinsi maupun daerah dengan melakukan integrasi indikator SDG's ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

5. Memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin pemenuhan SPM melalui integrasi indikator-indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
6. Memperhatikan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Situbondo. Hal ini penting untuk menjamin pengentasan kemiskinan penduduk Kabupaten Situbondo melalui integrasi indikator-indikator kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Situbondo harapannya akan mampu melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Situbondo serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dimasa yang akan datang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengesahan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;



29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

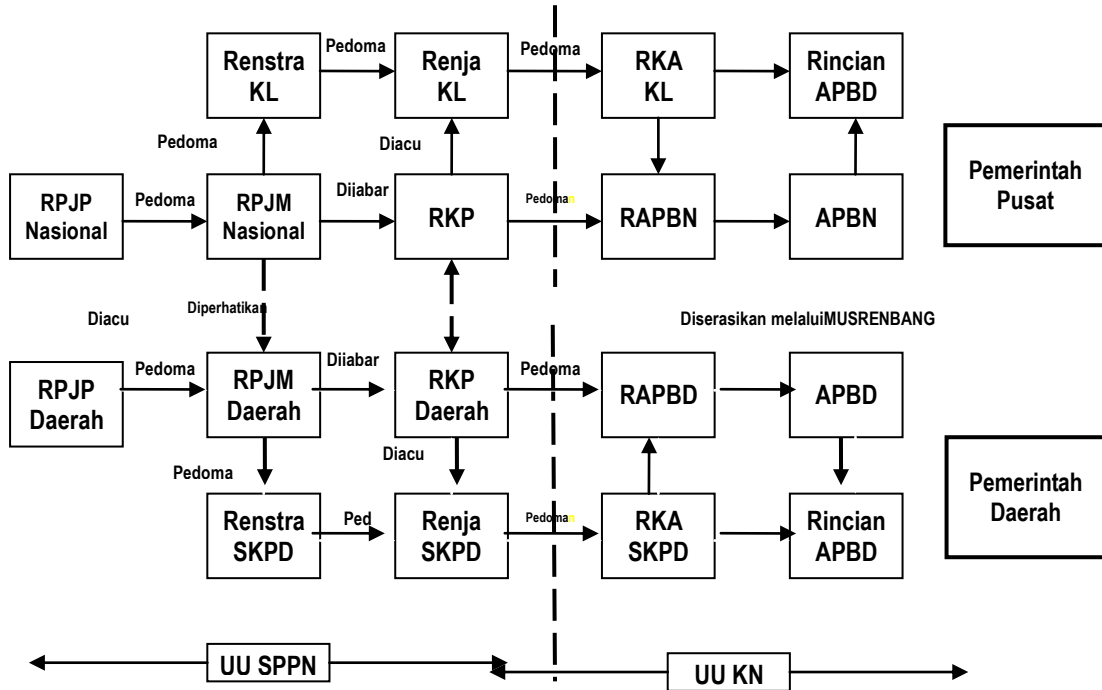
Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Perubahan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Perubahan RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021. Secara lebih lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya.
3. Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Situbondo.
4. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan: Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk program/kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN). Hubungan antara



RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.berikut:

**Gambar 1.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kab. Situbondo dengan Dokumen Perencanaan Lain**



Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional dan spasial.

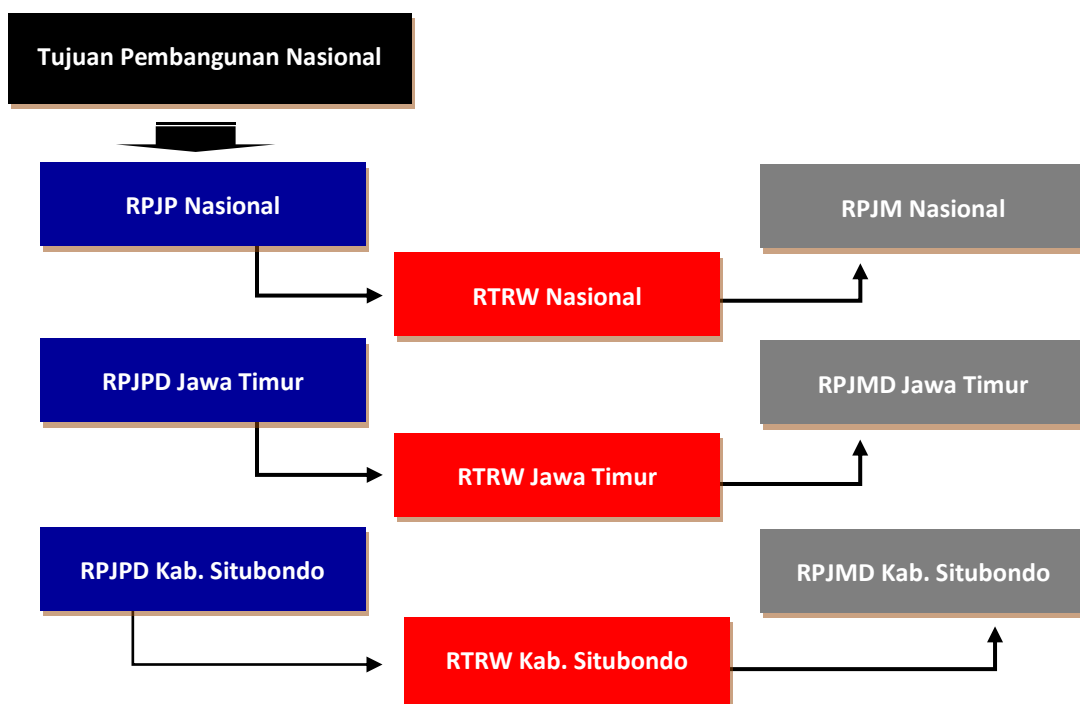
**Gambar 1.2. Diagram Alur Hubungan antara Perencanaan Makro, Perencanaan Regional dan Spasial**





Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Situbondo akan mempengaruhi perencanaan tata ruang kabupaten. Visi dan misi bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Sehubungan dengan penyusunan RPJMD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo yang sedang dilaksanakan Peninjauan Kembali, saat ini harus diselaraskan antara dokumen perencanaan dengan tata ruang kewilayahan. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Situbondo dalam sistem perencanaan pembangunan nasional:

**Gambar 1.3. Diagram Alur kedudukan RTRW kabupaten Situbondo dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**



### 1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RPJM Nasional.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong** dan 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera, (5) Mewujudkan bangsa berdaya saing, (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara





maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, (7) Mewujudkan masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 **“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”** didasarkan pada RTRW Kabupaten Situbondo dan Visi RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Keselarasan antara Visi RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RPJMN disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RPJMN 2015-2019**

<b>RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021</b>	<b>RPJM Nasional 2015-2019</b>
Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong
<b>Keselarasn Visi</b>	
Madani	Berdaulat
Beriman	Mandiri
Mandiri	Berkepribadian
Sejahtera	Gotong Royong
Berkeadilan	

Keterangan: —————> = Mendukung/Selaras

Adapun Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.2. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Kesembilan agenda prioritas RPJMN 2015-2019**

<b>Misi RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021</b>	<b>Nawa Cita/Agenda Prioritas RPJM Nasional 2015-2019</b>
Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan	➤ Melakukan revolusi karakter bangsa.
Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan	➤ Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal	➤ Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
	➤ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



Misi RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	Nawa Cita/Agenda Prioritas RPJM Nasional 2015-2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</li> </ul>
Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</li> </ul>

### 1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 juga memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur, Visi Provinsi Jawa Timur dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu: **Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak.** Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 5(lima) misi, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, (3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang, (4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, (5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Sedangkan Visi dan Misi RPJM Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong" dan memiliki 7 Misi Pembangunan yaitu: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatanwilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4)



Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Keselarasan Visi Kabupaten Situbondo dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur**

<b>RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021</b>	<b>RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019</b>
Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan	Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
Madani	Sejahtera
Mandiri	Berkeadilan
Beriman	Mandiri
Sejahtera	Berdaya Saing
Berkeadilan	Berakhlak

Keterangan: ————— ➔ Mendukung/Selaras

Adapun Keselarasan Misi Kabupaten Situbondo dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.4 Keselarasan Misi Kabupaten Situbondo dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur**

<b>RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021</b>	<b>RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019</b>
<b>MISI KE – 1</b>	<b>MISI KE – 3</b>
Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
<b>MISI KE – 2</b>	<b>MISI KE – 1</b>
Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan	Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
	<b>MISI KE – 5</b>
	Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
<b>MISI KE – 3</b>	<b>MISI KE – 2</b>
Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi local	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
<b>MISI KE – 4</b>	<b>MISI KE – 4</b>
Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

### 1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RPJPD Kabupaten Situbondo



Perubahan RPJMD kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 merupakan Rencana Pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD kabupaten Situbondo 2005-2025. Oleh sebab itu, Penyusunan Perubahan RPJMD selain memuat Visi, Misi dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, harus berpedoman pada RPJPD kabupaten Situbondo. Visi Kabupaten Situbondo dalam RPJPD kabupaten Situbondo 2005-2025 yaitu: **Membangun Kabupaten Situbondo Yang Maju, Religius Tangguh Dan Berkeadilan.** Visi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yaitu: **Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak** dan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang **diarahkan pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu: (1) Mengembangkan perekonomian berbasis agribisnis, (2) Mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya, (3) Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup, (4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan, (5) Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi, (6) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Agenda pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Situbondo tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perekonomian berbasis agribisnis
  - 1) Penyelarasan sistem agribisnis
  - 2) Penataan Sistem Informasi Agribisnis
  - 3) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
  - 4) Pengembangan Pariwisata
- b. Mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya
  - 1) Pembangunan Pendidikan
  - 2) Pembangunan Agama
  - 3) Pembangunan kebudayaan
  - 4) Pembangunan Pemuda
  - 5) Pemberdayaan Perempuan
- c. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup
  - 1) Pembangunan Kesehatan
  - 2) Pembangunan Kependudukan
  - 3) Pembangunan Ketenagakerjaan
  - 4) Pembangunan Kesejahteraan Sosial
  - 5) Penanggulangan Kemiskinan



- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan
  - 1) Pengembangan Keanekaragaman Hayati
  - 2) Pengembangan Potensi Sumberdaya Kelautan
  - 3) Penanganan Kebencanaan
- e. Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi
  - 1) Pembangunan Transportasi
  - 2) Pengelolaan Sumberdaya Air
  - 3) Pengembangan Wilayah
- f. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik
  - 1) Pembangunan Hukum
  - 2) Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 3) Pembangunan Politik
  - 4) Pembangunan Komunikasi dan Informasi
  - 5) Pembangunan Keamanan dan Ketertiban
  - 6) Pembangunan Keuangan Daerah

Agenda pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas Pembangunan Kabupaten Situbondo yang konsisten menuju terwujudnya Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Situbondo 2005-2025. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 selaras dengan dokumen RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.5 Keterkaitan Visi Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Situbondo**

RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	RPJPD Kabupaten Situbondo 2005-2025
<b>VISI</b>	<b>VISI</b>
Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan	Membangun Kabupaten Situbondo Yang Maju, Religius Tangguh Dan Berkeadilan
Madani	Maju
Mandiri	Religius
Beriman	Tangguh
Sejahtera	Berkeadilan
Berkeadilan	

Keterangan: → = Mendukung/Selaras

**Tabel 1.6 Keterkaitan Misi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Situbondo**



RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		RPJPD Kabupaten Situbondo 2005-2025	
<b>Keselerasan Misi</b>			
<b>MISI 1</b>	Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan	<b>MISI 2</b>	Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya
		<b>MISI 4</b>	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Buatan
		<b>MISI 5</b>	Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi
<b>MISI 2</b>	Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan	<b>MISI 3</b>	Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup
<b>MISI 3</b>	Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal	<b>MISI 1</b>	Mengembangkan Perekonomian Berbasis Agribisnis
<b>MISI 4</b>	Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	<b>MISI 6</b>	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

#### **1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD kabupaten Situbondo dengan RTRW Provinsi Jatim**

Arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Situbondo adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur.

Diharapkan dengan penetapan struktur pemanfaatan ruang tersebut mampu mendorong pemerataan pelayanan, khususnya pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Situbondo sendiri maupun daerah lain di lingkup wilayah Jawa Timur. Dalam rencana sistem perkotaan, Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL. PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Perwilayahan Jawa Timur juga direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan yang dibagi dalam 8 SWP yaitu 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP



Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, dan 8) SWP Banyuwangi.

### **1.3.5 Hubungan Perubahan RPJMD kabupaten Situbondo dengan RTRW Kabupaten Situbondo**

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021, juga berpedoman pada berbagai pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Situbondotahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi Program Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Situbondo.

Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo adalah kebijakan dan strategi penataan struktur ruang wilayah Kabupaten Situbondo, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Situbondo, kebijakan dan strategi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten Situbondo.

Beberapa hal yang mendasar di dalam struktur ruang Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

#### **1. Rencana Struktur Ruang**

Sistem perwilayahan yang terbentuk berdasarkan potensi sistem administrasi pemerintahan dan kelengkapan fasilitas yang terpusat pada bagian wilayah tengah, maka wilayah tengah diarahkan sebagai fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Situbondo. Sementara wilayah Besuki dan Asembagus mempunyai derajat yang setara diarahkan sebagai fokus penunjang wilayah utama dan pertumbuhannya dikembangkan sesuai potensi dan peran masing-masing wilayah.

Selanjutnya pola pengembangan wilayah Situbondo dengan kecenderungan perkembangannya dan fasilitas penunjang perkotaan menjadi diutamakan. Sedangkan wilayah Besuki yang mempunyai kecenderungan kuat sebagai pesaing wilayah Situbondo perlu dikendalikan perkembangannya agar tidak melampaui wilayah Situbondo. Untuk lebih memperkuat wilayah Situbondo, maka perlu direncanakan konsekuensi yang jelas dari arah wilayah Besuki ke wilayah Situbondo dengan ditandai oleh pusat-pusat kegiatan yang semakin memuncak kearah wilayah Situbondo.

Guna pemerataan pembangunan agar tidak terfokus hanya di sepanjang jalan negara maka perlu pengembangan Pusat Lokal-Pusat Lokal (PL) di wilayah (menjauh dari jalan negara) Kabupaten Situbondo.





Pusat Lokal – Pusat Lokal lebih diarahkan pada Pusat Ibukota Kecamatan yang mengarah pada pengembangan fasilitas guna menunjang kawasan permukiman. Selain Ibukota Kecamatan maka pemicu pertumbuhan perkembangan dapat terjadi karena pusat kegiatan lain akan tetapi tidak tergolong sebagai Pusat Lokal. Pusat kegiatan yang termasuk dalam golongan ini adalah titik kawasan wisata dan kawasan bersejarah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo. Salah satu pusat kegiatan yang punya potensi tinggi di wilayah timur adalah di area PTP XII Kayu Mas yang dapat dikembangkan sebagai area perkebunan kopi dan pariwisata beserta kelengkapan fasilitasnya termasuk akses jalan yang memadai. Fasilitas ini juga ditindak lanjuti melalui MOU 2005 tiga Bupati yaitu Bupati Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi sebagai sentra perkembangan wisata Kawah Ijen.

Di wilayah Situbondo bangkitan aktifitas dapat terjadi melalui kawasan Seliwung yang akan direncanakan jembatan yang menghubungkan dengan barat dan timur. Sementara di wilayah utara juga diperlukan jalan melingkar melalui fasilitas penyulingan minyak (oil refinery). Sedangkan pada wilayah barat dengan kekuatan dari sektor pertanian akan memicu pertumbuhan kegiatan yang menonjol seperti potensi tembakaunya, perkebunan kopi dan hortikultura.

## 2. Rencana Sistem perkotaan

Kajian terhadap sistem struktur perkotaan ini meliputi : penetapan orde perkotaan, rencana hierarki (besaran) perkotaan, rencana sistem dan fungsi perwilayahan, serta kebutuhan fasilitas pada setiap kawasan perkotaan dimaksud. Struktur ini akan menggambarkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perkotaan dengan perdesaan secara keseluruhan.

Pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat-pusat perdesaan yang diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehingga pembangunan perkotaan akan saling dukung dengan pembangunan perdesaan. Dalam mendorong pengembangan kawasan-kawasan perkotaan yang demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan sekitarnya.

Adapun mengenai wilayah perkotaan maupun perdesaan yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki, yaitu:

- 1) pusat kegiatan yang ada dan akan dikembangkan di Kabupaten Situbondo adalah memiliki skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang dimaksud





adalah: Perkotaan Situbondo, Perkotaan ini sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah di Kabupaten Situbondo.

Adapun fungsi dan perannya adalah;

- a. Sebagai pusat pelayanan umum bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.
- b. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.

Untuk mendukung adanya peran dan fungsi tersebut maka fasilitas yang harus ada adalah, fasilitas kesehatan serta perdagangan dan jasa skala kecamatan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

- 2) Selanjutnya adalah Pusat Pelayanan Lokal yang dipromosikan (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai sub pusat pengembangan wilayah dengan skala pelayanan beberapa kecamatan di sekitarnya.
- 3) Dan yang terakhir adalah pusat pelayanan kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau ibukota Kecamatan atau beberapa desa/kelurahan yakni seluruh ibukota kecamatan yang tidak termasuk dalam PKL yang memiliki fungsi dari masing-masing ibukota kecamatan tersebut antara lain :
  - a. Pusat pelayanan umum, dan pemerintahan bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya.
  - b. Pusat perdagangan dan jasa bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya.

### 3. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi meliputi rencana jaringan jalan, rencana terminal, rencana pengembangan angkutan umum, rencana jaringan rel kereta api, rencana system jaringan transportasi laut dan udara.

### 4. Rencana Jaringan Energi dan kelistrikan

Kebijakan dalam pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan antara lain:

- a. Pengembangan/peningkatan pelayanan energi listrik, meliputi :
  - 1) Peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman baru di kawasan wilayah pengembangan.
  - 2) Peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang diprioritaskan.
  - 3) Pengembangan Prioritas di Kecamatan Arjasa di kawasan Kayu Mas untuk menunjang Kegiatan pariwisata baik di Agrowisata Kayu Mas dan di Kawasan Segitiga Emas Gunung Ijen.



- b. rencana pengembangan mikrohidro pada kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai potensi sumber daya air;
  - c. rencana pengembangan Solar Cell pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik dan tidak mempunyai sumberdaya air;
  - d. rencana pengembangan energi alternatif panas bumi di Argopuro dan Belawan Ijen;
  - e. Pengembangan Gardu Induk (GI) 150/20 Kv di Kabupaten Situbondo
5. Rencana Jaringan telekomunikasi

Penggunaan fasilitas telematika oleh masyarakat meliputi prasarana telekomunikasi dan informatika. Rencana pengembangan prasarana telematika diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) sangat penting menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung.

Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon untuk rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler, sedangkan arahan pengembangan prasarana informatika, yaitu :

- 1. Rencana pengembangan prasarana telematika terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
  - 2. Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama-sama.
  - 3. Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika
6. Rencana system Jaringan Sumber daya air

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi air bersih, jaringan irigasi, drainase dan embung.

Kebijakan pengembangan utilitas air bersih di kabupaten Situbondo, antara lain :

- 1. Pengembangan fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah kecamatan yang belum terdapat instalasi pengelolaan air bersih
- 2. Pendistribusian air bersih yang merata di wilayah perwilayahan dengan penambahan jaringan distribusi
- 3. Pengembangan instalasi air bersih pada kawasan pariwisata potensial.

Upaya konservasi air dilakukan dengan cara:

- 1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
- 2. Perluasan daerah tanggapan air; serta



3. Pengembangan air baku dari air permukaan untuk penyediaan air bersih/minum

Untuk Pengembangan jaringan irigasi terkait dengan fungsi kawasan pertanian, dimana jaringan yang ada harus dapat menunjang dengan optimal dan efisien sistem pengairan yang ada. Adapun Upaya pengembangan pelayanan pengairan di daerah dilakukan dengan cara:

1. Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
2. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
3. Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
4. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh pdam dengan peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan

Sedangkan Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau). Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau. Rencana pengembangan embung di Kabupaten Situbondo adalah untuk pertanian, yang meliputi Embung Banyuputih, Embung Tunjang, Embung Wringinanom, Embung Nogosromo.

Pengembangan Drainase dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditunjang oleh tempat yang memenuhi, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Pengembangan drainase skala makro, meliputi Perencanaan teknis dan pengembangan drainase diluar kawasan perkotaan, antara lain pads jaringan jalan utama kawasan pengembangan, kawasan industri, dan sebagainya.
2. Pengembangan drainase skala mikro, merupakan perencanaan teknis dan pengembangan drainase di wilayah perkotaan , antara lain drainase pada kawasan perdagangan, jalan utama kota, permukiman, dan kawasan komersial lainnya.

Keterkaitan yang mendasar dalam dokumen Perubahan RPJMD dan RTRW Kabupaten Situbondo adalah keterkaitan antara visi dan misi serta arah Kebijakan dan strategi. Dimana kedua dokumen tersebut saling mendukung guna pencapaian Tujuan Pembangunan di Kabupaten SITubondo. Adapun hubungan keterkaitan dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:



**Tabel 1.7 Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RTRW Kabupaten Situbondo 2013-2033**

No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
1.	VISI	Terwujudnya Ruang Wilayah yang Seimbang berbasis Bahari	Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan
2.	MISI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;</li> <li>2. Mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari;</li> <li>3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;</li> <li>4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sdm yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan sdm yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan</li> <li>3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal</li> <li>4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> </ol>
3	Arah Kebijakan dan Strategi	<b>Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari</b>	<b>Meningkatkan kualitas SDM dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya pendapatan masyarakat</b>
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Mengembangkan sistem pusat pelayanan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal</p>	<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Penguatan kualitas dan kuantitas pendidikan SD dan SMP</p> <p>b. Penguatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran pendidikan</p> <p>c. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan</p>



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>(PKL) yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi;</p> <p>b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan dan prospeknya;</p> <p>c. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;</p> <p>d. mengembangkan perkotaan Situbondo sebagai pusat pelayanan sosial - ekonomi bagi area yang lebih luas; dan</p> <p>e. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk pengembangan perikanan</p>	<p>melalui pendidikan, pelatihan dan pemenuhan kesejahteraan dasar aparatur pendidikan</p> <p>d. Penguatan kualitas dan kuantitas PAUD &amp; penyediaan akses pendidikan Masyarakat</p> <p>e. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan</p> <p>f. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas</p> <p>g. Menguatkan advokasi dan KIE program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK ) pada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat</p> <p>h. Meningkatkan peluang usaha masyarakat</p> <p>i. Meningkatkan peluang pasar produk dan jasa masyarakat</p> <p>j. Meningkatkan Kemampuan daya beli masyarakat</p>
			<p><b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunnya angka pengangguran diimbangi dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sosial</b></p>
			<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Peningkatan peluang kerja dan usaha</p> <p>b. Meperluas akses permodalan bagi usaha mikro melalui lembaga keuangan maupun non perbankan</p>



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi dalam aktivitas ekonomi</li> <li>d. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam berusaha</li> <li>e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat</li> <li>f. Penciptaan wirausaha mandiri</li> <li>g. Pengembangan ekonomi kreatif produk unggulan local</li> <li>h. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan dalam rangka pengarusutamaan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa</li> <li>i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada PMKS</li> <li>j. Meningkatkan kualitas penanganan masyarakat miskin</li> </ul>
3		<p><b>Kebijakan pengendalian fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya</b></p>	<p><b>Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan sasaran Meningkatkan kinerja pemerintah melalui akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah</b></p>
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Memantapkan fungsi hutan</p>	<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Peningkatan system</p>



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>lindung dengan cara pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;</p> <p>b. Memantapkan fungsi lindung pada kawasan resapan air dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;</p> <p>c. Membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar dam, cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi;</p> <p>d. Perlindungan kawasan sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria serta penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman diijinkan dengan memperhatikan kaidah</p>	<p>akuntabilitas kinerja aparatur dan organisasi pemerintah daerah</p> <p>b. Peningkatan system keuangan dan asset pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah</p> <p>c. Meningkatkan kualitas pengawasan dan kompetensi auditor</p> <p>d. Pemanfaatan sarana, prasarana dan teknologi dalam pelaksanaan pengawasan</p> <p>e. Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)</p> <p>f. Meningkatkan fungsi koordinasi dan konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</p> <p>g. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi data informasi</p> <p>h. Mengadakan penelitian/kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah</p> <p>i. Penerapan TIK dalam layanan pemerintahan dan layanan publik pada setiap perangkat daerah dan unti kerja</p> <p>j. Meningkatkan komitmen para stake holders dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur</p> <p>k. Meningkatkan kinerja dan Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian</p> <p>l. Meningkatkan pembinaan aparatur yang professional</p>





No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>lingkungan dan ekosistem pesisir;</p> <p>e. Memantapkan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dengan memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;</p> <p>f. Menjaga dan melindungi kelestarian kawasan taman buru;</p> <p>g. Melestarikan kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah; dan</p> <p>h. Membatasi kegiatan pada wilayah rawan bencana;</p> <p>i. Memberikan perlindungan pada kawasan lindung geologi berupa pembatasan kegiatan;</p> <p>j. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa harus dijaga ekosistemnya guna menjaga keaslian serta keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua</p>	<p>m. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>n. Melakukan pemadaman kebakaran secara cepat tepat dan efisien serta melakukan penyelamatan dan pertolongan pada kejadian kebakaran atau kejadian darurat lainnya</p> <p>o. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan</p>
4		<p><b>Kebijakan penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif</b></p>	





No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan pelayanan jalan, kereta api dan pelabuhan;</p> <p>b. mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti telepon rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler yang menghubungkan seluruh wilayah;</p> <p>c. mengembangkan dan menyediakan tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sama dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata;</p> <p>d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir</p>	
		<p><b>Kebijakan pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana</b></p>	
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>b. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut dan ombak besar sebagai kawasan terbangun;</p> <p>c. Peringatan dini dari kemungkinan adanya</p>	



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>bencana angin ribut dan banjir; dan</p> <p>d. Mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimasi terjadinya bencana ombak besar dan mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa</p>	
5		<p><b>Kebijakan Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan</b></p>	<p><b>Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah dan investasi daerah bagi seluruh masyarakat</b></p>
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Mengembangkan hutan yang bernilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;</p> <p>b. Pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih fungsi pada kawasan budidaya, harus dilakukan pengganti;</p> <p>c. Peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta mengembangkan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan:</p>	<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah</p> <p>b. Peningkatan pelayan perizinan dan non perizinan dalam upaya peningkatan jumlah investor</p> <p>c. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan</p> <p>d. Meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan agribisnis melalui pelatihan pembinaan, tamu usaha, dan meningkatkan pemasaran hasil peternakan dan perikanan</p> <p>e. Meningkatnya ketersediaan pangan dan pemantapan penanganan kerentanan pangan melalui revitalisasi SKPG sistem kewaspadaan pangan dan gizi</p> <p>f. Meningkatkan rata-rata</p>



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;</li> <li>e. Mengembangkan dan mengelola hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan;</li> <li>f. Mengembangkan cluster sentra produksi peternakan terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak;</li> <li>g. Mengembangkan perikanan darat, mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;</li> <li>h. Peningkatan kualitas ekosistem, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk menjaga mata rantai perikanan laut;</li> <li>i. Menetapkan kawasan pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian;</li> <li>j. Mengembangkan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen amdal yang menyertainya;</li> <li>k. Mengembangkan permukiman perdesaan yang disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;</li> <li>l. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>produk hasil tanaman pertanian, perkebunan</li> <li>g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata</li> <li>h. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD</li> <li>i. Intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan</li> </ul>



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>perdesaan;</p> <p>m. Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan serta mengembangkan perumahan terjangkau dan layak huni;</p> <p>n. Melestarikan daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral;</p> <p>o. Melakukan reboisasi di daerah sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mempertahankan debit air yang ada;</p> <p>p. Menetapkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan; dan</p> <p>q. Menetapkan RTH privat pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sangat strategis, bernilai lahan sangat tinggi, dan/atau pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga atau kawasan lindung atau berfungsi konservasi maka komposisi RTH yang dipersyaratkan sebagai komposisi penyediaan RTH privat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya, dapat berupa taman dan hutan kota</p>	
6		<b>Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan</b>	



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p><b>pertanian</b></p> <p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan dan mengendalikan secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;</li> <li>Mengembangkan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>Mengembangkan sentra produksi dan agropolitan;</li> <li>Mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian; dan</li> <li>Menetapkan dan memasarkan sentra hasil produksi pertanian hortikultura</li> </ol>	
7		<p><b>Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan;</b></p>	
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Kecamatan Mangaran;</li> <li>Mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut;</li> <li>Peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;</li> <li>Pengadaan prasarana wilayah pada kawasan Kecamatan</li> </ol>	



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>Mangaran yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri untuk menarik investasi; dan</p> <p>e. Mengembangkan kawasan pedesaan pusat sentral hasil industri kecil kerajinan hasil laut sebagai penunjang pariwisata bahari</p>	
8		<p><b>Kebijakan pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan;</b></p>	
		<p>Strategi yang akan dilaksanakan</p> <p>a. Mengembangkan obyek wisata alam dan buatan berbasis bahari;</p> <p>b. Membentuk zona wisata yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala nasional dengan disertai mengembangkan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan</p> <p>c. Memasarkan hasil industri kecil kerajinan hasil laut dan hasil pengolahan produksi pertanian mangga</p>	
9		<p><b>Kebijakan peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis;</b></p>	
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Besuki, Kapongan, Panji, Mangaran, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih yang</p>	



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p>ditunjang dengan mengembangkan kawasan pelabuhan Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar;</p> <p>b. Mengembangkan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kawasan hatchery yang berada disepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Kendit, Mangaran, Panarukan, Kapongan, Jangkar dan Banyuputih;</p> <p>c. Meningkatkan pemanfaatan Bangunan Kuno dan Peninggalan Sejarah di Besuki dan Panarukan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;</p> <p>d. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan sosial budaya;</p> <p>e. Mengendalikan kawasan pendayagunaan sumber daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional berupa zonasi kawasan pemurnian minyak bumi (<i>Oil Refinery</i>) di Kecamatan Asembagus atau Mangaran; dan</p> <p>f. Mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang masuk dalam batas administrasi wilayah kabupaten</p>	
10		<b>Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk</b>	



No.	Substansi	RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033	Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
		<p><b>pertahanan keamanan Negara.</b></p>	
		<p>STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN</p> <p>a. Menetapkan fungsi dan peran Kawasan Latihan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kecamatan Asembagus dan Banyuputih dengan membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;</p> <p>b. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;</p> <p>c. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;</p> <p>d. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; serta</p> <p>e. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI</p>	

Bahwa kedua dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi dan saling mendukung, hal ini tertuang dalam visi dan misi RPJMD yang mengacu kepada visi dan





misi RTRW Kabupaten Situbondo yang mengutamakan peningkatan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo serta pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan dasar serta peluang investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo.

### 1.3.6 Keterkaitan Sasaran Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Situbondo

Keterkaitan antara Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Situbondo juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Sasaran Perubahan RPJMD dengan sasaran RPJPD yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.8 Keterkaitan Sasaran Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Situbondo**

Sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Situbondo 2005-2025
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Pendidikan</i></li> <li>➤ <i>Pembangunan agama</i></li> </ul>
Peningkatan akses dan kualitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Kesehatan</i></li> </ul>
Meningkatnya pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Ketenagakerjaan</i></li> </ul>
Menurunnya angka pengangguran diimbangi dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Penanggulangan Kemiskinan</i></li> <li>➤ <i>Pembangunan Kependudukan</i></li> </ul>
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Kebudayaan</i></li> <li>➤ <i>Pembangunan Pemuda</i></li> <li>➤ <i>Pemberdayaan Perempuan</i></li> </ul>
Meningkatnya kesejahteraan social	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Kesejahteraan Sosial</i></li> <li>➤ <i>Penanganan Kebencanaan</i></li> </ul>
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Penyelarasan Sistem Agribisnis</i></li> <li>➤ <i>Penataan Sistem Informasi Agribisnis</i></li> <li>➤ <i>Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</i></li> </ul>
Meningkatnya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pengembangan Pariwisata</i></li> <li>➤ <i>Pengembangan Keanekaragaman Hayati</i></li> <li>➤ <i>Pengembangan Potensi Sumberdaya Kelautan</i></li> </ul>
Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Transportasi</i></li> <li>➤ <i>Pengelolaan Sumberdaya Air</i></li> <li>➤ <i>Pengembangan Wilayah</i></li> </ul>
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Hukum</i></li> <li>➤ <i>Penyelenggaraan Pemerintahan</i></li> <li>➤ <i>Pembangunan Politik</i></li> <li>➤ <i>Pembangunan Keamanan dan Ketertiban</i></li> </ul>
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Komunikasi dan Informasi</i></li> </ul>
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pembangunan Keuangan Daerah</i></li> </ul>



### 1.3.7 Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU 32/2009 PPL).

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 juga memperhatikan isu lingkungan, isu ekonomi dan isu social budaya Penentuan/ penetapan dalam rangka menentukan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, selanjutnya disebut isu prioritas.

Penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan;
- b. Pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
- c. penelaahan cepat hasil pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
- d. pembentukan perkiraan mengenai potensi dampak dan keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
- e. penentuan isu strategis dan prioritas.

Perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan dibuat dalam bentuk prioritasisudengan memperhatikan unsur-unsur palingsedikit:

- a. karakteristik wilayah;
- b. tingkat pentingnyapotensidampakdan risiko;
- c. keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan;
- d. keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung

RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 telah memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategi mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses



kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

KLHS RPJMD Kabupaten Situbondo diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan Kebijakan, rencana dan program yang dihasilkan dan ditetapkan oleh menjadi lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Rencana Strategis PD**

RPJMD Kabupaten Situbondo menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten Situbondo dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo.

### **1.3.9 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo dengan RKPD**

Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo akan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kinerja (Renja) PD Kabupaten Situbondo.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan, dalam mewujudkan cita-cita masyarakat kabupaten Situbondo sesuai dengan dengan visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo, dan juga sebagai pedoman dan acuan dalam



penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Situbondo.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum;
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### **BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
- 3.3 Kerangka Pendanaan.

### **BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk



memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas.

4.1 Permasalahan Pembangunan;

4.2 Isu Strategis;

#### **BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

5.1 Visi;

5.2 Misi;

5.3 Tujuan dan Sasaran.

#### **BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan.

#### **BAB VII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

#### **BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

#### **BAB IX. PENUTUP**







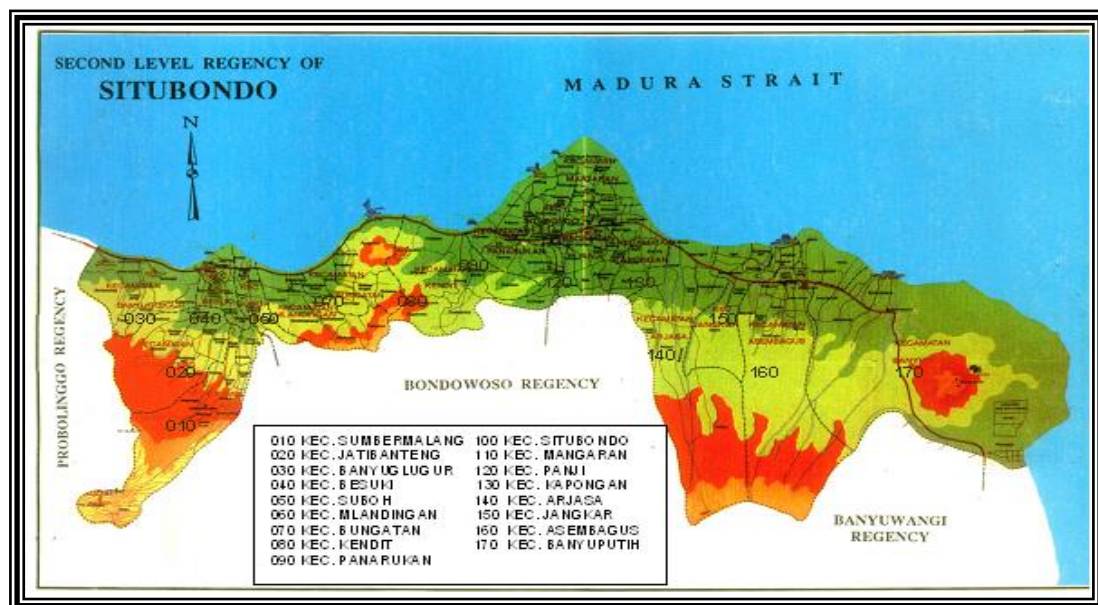
## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1 Aspek Geografi

#### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 158 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35' - 7° 44' Lintang selatan dan 113° 30' - 114° 42' Bujur Timur.

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Situbondo**



Sumber : LKPJ Kabupaten Situbondo Tahun 2018



Luas wilayah menurut Kecamatan,terluas adalah KecamatanBanyuputih 481,67 km2 disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km. Batas – batas administrasi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Selat Bali
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan KabupatenBanyuwangi
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 627 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km2 disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km. Pembagian administrasi dan luasnya sebagaimana tertera pada Tabel berikut :

**Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo**

No	Kecamatan	Jumlah					Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	
1	Sumbermalang	9	-	32	55	162	12.947
2	Jatibanteng	8	-	35	87	192	6.608
3	Banyuglugur	7	-	28	39	107	7.266
4	Besuki	10	-	45	116	308	2.641
5	Suboh	8	-	29	60	170	3.084
6	Mlandingan	7	-	28	58	128	3.961
7	Bungatan	7	-	34	59	141	6.607
8	Kendit	7	-	36	94	192	11.414
9	Panarukan	8	-	51	81	235	5.438
10	Situbondo	4	2	17	66	237	2.781
11	Panji	10	2	40	90	270	3.570
12	Mangaran	6	-	44	78	170	4.699
13	Kapongan	10	-	55	98	253	4.455
14	Arjasa	8	-	48	90	215	21.638
15	Jangkar	8	-	44	70	179	6.700
16	Asembagus	10	-	35	68	195	11.874
17	Banyuputih	5	-	26	56	174	48.167
<b>Jumlah</b>		<b>132</b>	<b>4</b>	<b>627</b>	<b>1.265</b>	<b>3.328</b>	<b>163.850</b>

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka (Tahun 2016)

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 %, tergolong halus 2,75 % dan tergolongkasar 0,99 %.



Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42 %, kadang-kadang tergenang 0,05 % dan selalu tergenang 0,53 %. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial. Regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah eksisting yaitu seluas 36.011,29 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07).

Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0<sup>o</sup>-45<sup>o</sup>, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%).

Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km<sup>2</sup> (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km<sup>2</sup> (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km<sup>2</sup> (0,53%) selalu tergenang.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian; dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

**Tabel 2.2 Data Kemiringan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Situbondo**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Ketinggian (m) dpl
1	Arjasa	216,38	0 - 7700
2	Asembagus	112,74	0 - 25
3	Banyuglugur	72,99	7 - 420
4	Banyuputih	481,66	0 - 10
5	Besuki	26,08	0 - 252
6	Bungatan	66,07	3 - 8
7	Jangkar	67	6 - 35
8	Jatibanteng	66,08	79 - 514
9	Kapongan	44,55	0 - 35
10	Kendit	114,78	3 - 8
11	Mangaran	35,7	2 - 7
12	Mlandingan	39,6	3 - 750
13	Panarukan	54,55	0 - 6
14	Panji	46,99	19 - 72
15	situbondo	27,57	21 - 58
16	Suboh	31,92	3 - 400
17	Sumbermalang	129,47	500- 950

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, 2018





Penggunaan Lahan di Kabupaten Situbondo di dominasi oleh penggunaan Lahan untuk hutan yaitu sebesar 46,33 dari total luas wilayah dan berupa sawah seluas 16,39%. Wilayah Kabupaten Situbondo merupakan wilayah pesisir sehingga di dominasi oleh hutan salah satunya hutan bakau, dikarenakan hutan bakau sebagai tempat tinggalnya ikan sehingga penggunaan lahan hutan bakau tetap di pertahankan.

**Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo tahun 2016**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Permukiman/ <i>Housing</i>	10.631,45	6,65
2	Sawah/ <i>Rice Field</i>	26.186	16,39
3	Pertanian Tanah Kering/ <i>Dry Field</i>	37.480,59	23,47
4	Kebun Campuran/ <i>Mixture Garden</i>	68.20	0,04
5	Perkebunan / <i>Plantation</i>	2.433,98	1,52
6	Hutan / <i>Wood</i>	73.994,90	46,33
7	Semak Belukar / <i>Cappice</i>		
8	Padang Rumput / <i>Grassland</i>	7.257,53	4,54
9	Tanah Rusak / <i>Moor Land</i>		
10	Tanah Tandus / <i>Desert</i>		
11	Tambak/ Kolam/ <i>Dam Out/Pool</i>	1.629,29	1,02
12	Rawa / <i>Bag</i>		
13	Lain-lain / <i>Others</i>	163.850,94	100

Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033

Kondisi iklim di Kabupaten Situbondo apabila ditinjau dari kondisi suhu udara, pada tahun 2016 di Kabupaten Situbondo suhu udara maksimum rata-rata mencapai 29,00 derajat Celcius dan suhu udara minimum rata-rata mencapai 21,68 derajat Celcius. Kelembaban udara maksimum rata-rata mencapai 99,00% dan kelembaban udara minimum rata-rata mencapai 43,50%. Jumlah curah hujan di Kabupaten Situbondo antara 29 – 355 mm<sup>3</sup>. Adapun Kondisi klimatologi per bulan secara rinci, pada tabel berikut :

**Tabel 2.4 Data Iklim Kabupaten Situbondo Perbulan Tahun 2013-2017**

DATA IKLIM TAHUN 2013

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	26,5	26,9	*	26,9	28,4	27,4	27,7	*	*	31,1	29,9	29,0
2	Temp. Maximum	°C	32,8	34,6	*	34,9	35,9	36,0	36,0	*	*	35,6	33,9	35,1
3	Temp. Minimum	°C	23,0	23,0	*	23,0	23,0	23,0	23,0	*	*	20,0	23,0	24,0
4	Temp. Maximum Absolute	°C	35,0	35,0	*	36,0	36,0	36,0	36,0	*	*	36,0	37,0	36,0
5	Temp. Minimum Absolute	°C	23,0	23,0	*	23,0	23,0	23,0	23,0	*	*	20,0	23,0	24,0
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	88	88	*	89	*	*	*	*	*	62	74	80
7	Lembab Nisbi Maximum	%	90	90	*	90	*	*	*	*	*	79	100	98
8	Lembab Nisbi Minimum	%	75	75	*	79	*	*	*	*	*	49	50	62
9	Curah Hujan	mm	343	220	*	169	156	181	47	*	*	-	215	280
10	Hari Hujan	Hari	14	10	*	7	9	15	3	*	*	-	7	11
11	Hujan Maximum	mm	56	57	*	48	53	36	27	*	*	-	88	91
12	Tanggal.Hujan Maximum		10	23	*	7	31	7	2	*	*	-	15	31

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, data diolah Tahun 2018



**DATA IKLIM TAHUN 2014**

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	27,4	28,6	29,1	29,4	29,6	29,0	29,1	29,5	*	29,3	26,7	26,2
2	Temp. Maximum	°C	34,0	33,7	35,8	36,3	37,2	38,0	37,9	38,0	*	37,3	30,2	32,3
3	Temp. Minimum	°C	24,5	23,3	23,3	23,6	23,8	23,8	23,4	23,0	*	23,6	30,2	26,0
4	Temp. Maximum Absolute	°C	35,0	34,0	37,0	37,0	38,0	39,0	38,0	38,0	*	38,0	33,0	33,0
5	Temp. Minimum Absolute	°C	23,0	22,0	21,0	23,0	23,0	22,0	23,0	22,0	*	22,0	29,0	0,0
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	84	81	76	77	76	73	75	68	*	71	75	86
7	Lembab Nisbi Maximum	%	98	98	97	95	97	90	91	87	*	88	92	100
8	Lembab Nisbi Minimum	%	62	59	53	50	52	51	49	46	*	45	56	62
9	Curah Hujan	mm	543	505	36	204	158	-	-	-	*	-	39	24
10	Hari Hujan	Hari	19	16	7	7	2	-	-	-	*	-	3	2
11	Hujan Maximum	mm	131	139	13	67	136	-	-	-	*	-	23	21
12	Tanggal.Hujan Maximum		31	1	21	26	13	-	-	-	*	-	29	17

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, data diolah Tahun 2018

**DATA IKLIM TAHUN 2015**

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	27,3	26,5	26,2	26,5	24,4	24,7	23,7	23,6	23,9	24,8	25,5	24,1
2	Temp. Maximum	°C	29,8	29,7	31,7	29,9	31,6	32,7	32,8	32,4	33,3	33,6	33,9	32,5
3	Temp. Minimum	°C	25,6	24,2	23,1	25,2	19,5	20,6	19,9	20,1	20,5	21,2	21,9	20,8
4	Temp. Maximum Absolute	°C	32,0	31,0	35,0	34,2	33,1	34,1	33,6	33,6	34,2	34,8	34,8	34,7
5	Temp. Minimum Absolute	°C	24,0	23,0	21,0	23,9	21,1	18,7	19,0	18,5	19,5	20,1	20,6	19,7
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	86	87	84	83	71	64	54	54	57	60	55	60
7	Lembab Nisbi Maximum	%	99	94	92	98	90	95	69	72	68	74	67	76
8	Lembab Nisbi Minimum	%	68	72	71	63	48	48	5	31	43	46	6	7
9	Curah Hujan	mm	402	16	15	341	97	-	-	-	-	-	-	24
10	Hari Hujan	Hari	19	12	11	12	3	-	-	-	-	-	-	10
11	Hujan Maximum	mm	103	5	4	74	55	-	-	-	-	-	-	5
12	Tanggal.Hujan Maximum		11	1	4	8	4	-	-	-	-	-	-	4

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, data diolah Tahun 2018

**DATA IKLIM TAHUN 2016**

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	25,1	23,7	26,7	24,5	25,3	26,3	23,7	25,8	26,5	*	*	24,8
2	Temp. Maximum	°C	32,9	31,3	32,8	32,8	33,0	32,9	32,8	33,2	32,9	*	*	31,6
3	Temp. Minimum	°C	21,7	20,2	21,6	21,5	22,1	22,1	19,9	21,4	22,1	*	*	21,0
4	Temp. Maximum Absolute	°C	35,3	32,8	34,6	33,7	33,5	33,9	33,6	33,7	33,5	*	*	32,8
5	Temp. Minimum Absolute	°C	18,6	19,3	20,0	20,0	21,0	20,0	19,0	20,2	21,1	*	*	20,0
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	55	75	64	62	59	62	54	58	59	*	*	73
7	Lembab Nisbi Maximum	%	82	86	78	78	83	79	69	78	75	*	*	86
8	Lembab Nisbi Minimum	%	40	59	50	45	45	48	45	48	46	*	*	55
9	Curah Hujan	mm	78	279	170	57	202	118	-	-	-	*	*	941
10	Hari Hujan	Hari	9	22	6	6	6	4	-	-	-	*	*	20
11	Hujan Maximum	mm	51	57	63	32	135	84	-	-	-	*	*	103
12	Tanggal.Hujan Maximum		30	11	19	18	31	30	-	-	-	*	*	22

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, data diolah Tahun 2018

**DATA IKLIM TAHUN 2017**

No	Unsur Klimatologi	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Temp. Rata-rata	°C	27,4	27,2	27,6	27,8	27,7	26,9	27,3	27,7	28,2	*	*	*
2	Temp. Maximum	°C	32,6	32,8	30,5	32,9	32,6	32,0	32,1	32,4	32,1	*	*	*
3	Temp. Minimum	°C	23,1	23,6	25,6	23,1	23,4	23,2	23,4	23,1	23,0	*	*	*
4	Temp. Maximum Absolute	°C	33,0	34,0	31,0	33,0	33,0	32,0	33,0	33,0	33,0	*	*	*
5	Temp. Minimum Absolute	°C	22,0	23,0	24,0	23,0	23,0	23,0	23,0	22,0	23,0	*	*	*
6	Lembab Nisbi Rata-rata	%	90	90	89	88	88	89	87	88	85	*	*	*
7	Lembab Nisbi Maximum	%	95	95	95	91	91	91	91	91	91	*	*	*



8	Lembab Nisbi Minimum	%	82	83	82	81	81	81	68	78	75	*	*	*
9	Curah Hujan	mm	204	46	5	-	5	-	-	-	-			
10	Hari Hujan	Hari	17	8	3	-	3	-	-	-	-			
11	Hujan Maximum	mm	70	11	2	-	2	-	-	-	-			
12	Tanggal.Hujan Maximum		12	2	4	-	12	-	-	-	-			

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, data diolah Tahun 2018

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Situbondo terdiri atas klasifikasi berdasarkan kawasan budidaya serta kawasan agropolitan dan minapolitan.

#### a. Pengembangan Wilayah berdasarkan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, dan kawasan pertambangan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berikut merupakan beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo dengan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan berdasarkan kawasan budidaya:

##### 1) Pertanian

###### a) Pertanian Lahan Basah

Kawasan pertanian untuk tanaman pangan merupakan kawasan yang memberikan kontribusi terbesar ditinjau dari sektor pertanian. Tanaman pangan yang mendominasi seluruh Kabupaten Situbondo, antara lain padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan di Kabupaten Situbondo tersebar secara merata di seluruh wilayah. Berdasarkan analisa tingkat pertumbuhan tanaman pangan, maka yang paling menonjol adalah jagung dan kedele, sedangkan pertumbuhan yang mengalami penurunan adalah padi, ubi kayu, kacang tanah dan kacang hijau. Besarnya tingkat penurunan produksi adalah sebagai berikut, produksi padi sawah menurun sebesar 8,09 persen, padi gogo menurun 26,20 persen, kacang tanah menurun 61,66 persen, ubi kayu hanya turun 6,27 persen, kacang hijau menurun sebesar 25,29 persen



**Tabel 2.5 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017**

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Padi	2013	295,109.70	6.03
	2014	253,918.10	5.73
	2015	324,891.10	5.53
	2016	346,735.63	5.64
	2017	313,824.00	5.10
Jagung	2013	360,388.00	5.21
	2014	256,626.40	5.07
	2015	241,068.40	4.97
	2016	289,931.85	4.92
	2017	248,467.00	5.00
Kacang Tanah	2013	1,584.30	2.86
	2014		
	2015	404.50	1.20
	2016	504.00	1.34
	2017	636.00	1.25

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

### b) Hortikultura

Komoditi tanaman hortikultura khususnya buah-buah berdasarkan kelas kesesuaian lahan termasuk dalam kelas S1 dan bahkan S2 dengan faktor pembatas ketersediaan air khususnya curah hujan, jumlah curah hujan yang optimum. Selain itu dengan lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Situbondo seluas 43.674 Ha.

**Tabel 2.6 Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2013-2017**

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Cabai Rawit	2013	3,497.00	4.15
	2014	3,646.00	4.67
	2015	5,032.10	10.02
	2016	10,351.80	13.22
	2017	9,629.40	6.15
Cabai Besar	2013	197.00	-
	2014	-	-
	2015	644.80	6.86
	2016	792.50	5.87
	2017	791.20	4.44
Bawang Merah	2013	756.20	7.55
	2014	1,114.00	7.57
	2015	1,417.40	7.58
	2016	2,312.60	7.89
	2017	3,153.90	7.83
Mangga	2013	21,081.00	65.98
	2014	39,730.00	82.56
	2015	22,247.10	-
	2016	21,127.50	-
	2017	16,530.60	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018



### **c) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

UU No. 41 tahun 2009 mengamanatkan perlindungan terhadap lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian. Dalam UU No.41 tahun 2009 pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak) dan lahan tidak beririgasi. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan seperti untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian (pasal 3).

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di Kabupaten Situbondo ditetapkan seluas 30.032 Ha (*tiga puluh ribu tiga puluh dua hektar*) yang terdiri dari:

- Sawah irigasi LP2B : 28,820 Ha
- Sawah Non-irigasi LP2B : 1,212 Ha



Yaitu pada kawasan dengan jenis tanah mengandung unsur alluvial, litosol, latosol dan gromosol yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo.

## 2) Peternakan

Kebutuhan akan ternak di Kabupaten Situbondo sampai dengan saat ini masih dipasok dari Palau Madura melalui Pelabuhan Kalbut Mangum, sedangkan ayam bibit dipasok dari Surabaya dan dari kabupaten lainnya. Peternakan yang ada di Kabupaten Situbondo masih merupakan peternakan perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sehingga sampai saat ini belum ada kawasan yang dijadikan sebagai area pengelolaan peternakan.

**Tabel 2.7 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2014-2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun Realisasi			
			2014	2015	2016	2017
1	<b>1. JumlahPopulasiTernak</b>					
	Sapi Potong	(Ekor)	169.978	175.115	176.398	165.539
	Sapi Perah	(Ekor)	213	235	218	216
	Kerbau	(Ekor)	199	199	280	225
	Kuda	(Ekor)	227	227	186	163
	Kambing	(Ekor)	49.977	50.614	73.780	40.601
	Domba	(Ekor)	62.537	63.461	88.324	55.243
	Ayam Buras	(Ekor)	671.453	626.177	995.554	420.486
	Ayam Ras Petelur	(Ekor)	37.250	42.250	42.073	25.110
	Ayam Ras Pedaging	(Ekor)	102.142	102.142	316.500	617.742
	Itik	(Ekor)	55.082	55.082	68.820	54.222
	Entok	(Ekor)	8.741	8.714	15.260	19.229
	<b>2. JumlahProduksiTernak</b>					
	Daging Sapi	(Ton)	1.361	1.416	1.458	1501
	Daging Kambing/Domba	(Ton)	72	83,42	85	85
Daging Ayam	(Ton)	4.873	2.584	2.584	5679	
Telur	(Ton)	3.431	4.320	2.952	10.596	
Susu	(Liter)	256.000	305.280	308.250	279.936	

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2017

## 3) Perikanan

### a) Perikanan Tangkap

Kondisi geografis yang dekat dengan daerah pantai menjadikan Situbondo kaya potensi sumberdaya air yang berasal dari laut. Upaya Pengelolaan potensi laut ini terkait dengan usaha Pemerintah Daerah untuk mengangkat kelompok nelayan dari jurang kemiskinan dan menggairahkan kondisi perekonomian Situbondo secara umum. Adapun lembaga yang mewadahi produksi perikanan di Kabupaten Situbondo salah satunya adalah balai budi daya air payau di Desa Pathek.





**Gambar 2.2**  
**Balai Budidaya Air Payau di Desa Pathek**



*Sumber : Dinas Perikanan Kab. Situbondo, 2018*

Produksi budidaya tambak, kolam dan penangkapan dari perairan umum, seperti ikan lele, mujair, udang windu putih, bandeng, gurami, tombro, nila, tawas dan lainnya mengalami kenaikan dari 322, 90 ton menjadi 539,70 ton dengan nilai produksi tahun 2004 mencapai Rp. 25,32 milyar.

**Gambar 2.3**  
**Tambak di Kecamatan Bungatan**



*Sumber : Dinas Perikanan Kab. Situbondo, 2018*

**Gambar 2.4**  
**TPI di Pelabuhan Jangkar di Desa Jangkar**



*Sumber : Dinas Perikanan Kab. Situbondo, 2018*

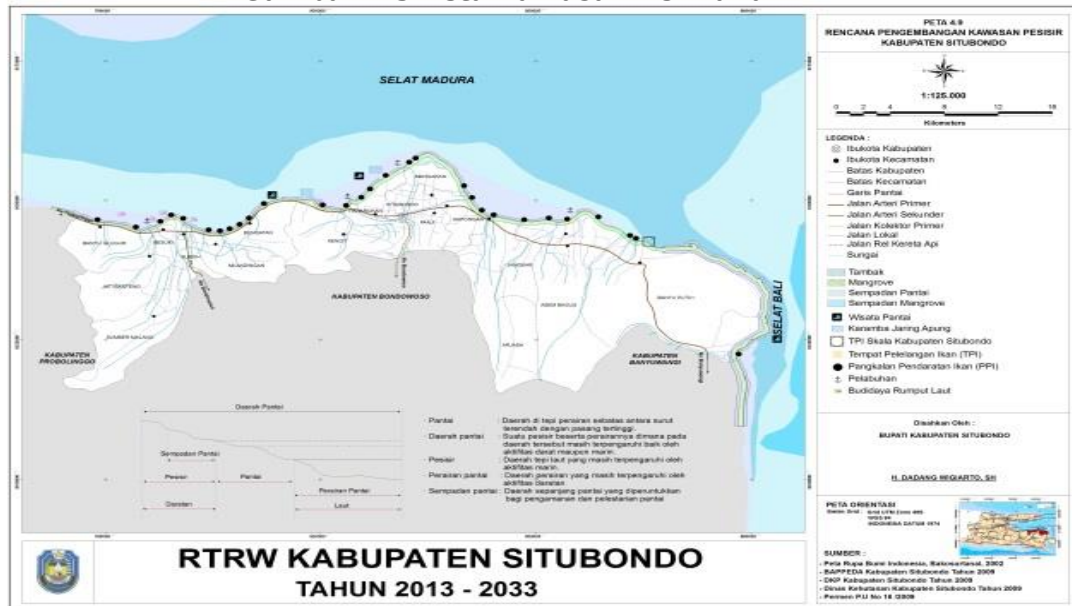
## **b) Budidaya Perikanan**

Peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten Situbondo meliputi:



1. Budidaya air tawar terdapat di seluruh kecamatan dengan luas areal kurang lebih 10 Ha (*sepuluh hektar*);
  2. Budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Situbondo terdapat di Kecamatan Besuki, Mlandingan, Kendit, Suboh, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa, dan Banyuputih dengan luas areal kurang lebih 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar);
  3. Budidaya air laut (marine culture) dan wilayah perikanan tangkap (fishing ground) terletak di seluruh wilayah perikanan laut Kabupaten Situbondo yang terdapat di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan, Mlandingan, Suboh, Besuki, dan Banyuglugur seluas 1.826,26 Ha (*seribu delapan ratus dua puluh enam koma dua puluh enam hektar*)
- Berikut merupakan peta kawasan perikanan di Kabupaten Situbondo:

**Gambar 2.5 Peta Kawasan Perikanan**



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Situbondo, 2018

**Tabel 2.8 Produksi Hasil Perikanan Tahun 2013-2017**

No	Jenis Produksi	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>3,682.78</b>	<b>5,460.41</b>	<b>6,802.13</b>	<b>7,669.07</b>	<b>8,552.19</b>
	a. Tambak (Ton)	3,103.40	4,784.00	6,010.48	7,217.77	8,005.38
	b. Kolam (Ton)	263,13	289,45	319,15	334,09	347,27
	c. Keramba Jaring Apung (Ton)	18,25	20,26	32,7	56,35	100,43
	d. Rumput Laut (Ton)	298	366,7	439,8	90,86	99,11
	e. Benih Air Laut/Payau (ekor)	1,774,475,000.00	2,160,881,800.00	2,508,231,000.00	4,485,170,000.00	7,574,510,200.00
	f. Benih Air Tawar (ekor)	3,179,200.00	3,723,200.00	4,111,500.00	2,996,850.00	3,744,750.00
<b>2</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>7,870.46</b>	<b>8,355.00</b>	<b>13,374.60</b>	<b>13,589.96</b>	<b>13,831.66</b>
<b>3</b>	<b>Produksi Olahan (Ton)</b>	<b>3,483.55</b>	<b>4,632.76</b>	<b>6,765.10</b>	<b>7,463.71</b>	<b>8,224.60</b>
	a. Kerupuk (Ton)	174,03	-	199,07	387,71	816,28
	b. Ikan Pindang (Ton)	2,451.32	2,696.42	3,765.29	3,793.73	3,978.25
	c. Ikan Asin/Kering (Ton)	858,2	1,936.34	2,681.78	2,681.78	2,126.18
	c. Jenis Olahan Lainnya (Ton)	-	-	118,96	600,49	1,303.90

Sumber : Dinas Perikanan, 2017





#### 4) Perkebunan

Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Situbondo adalah komoditi kelapa, kopi, tebu, tembakau, kapok, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jembu mete, pinang dan biji. Tanaman perkebunan pada dasarnya dapat dibedakan dalam tanaman semusim (*season plant*) dan tanaman tahunan (*annual plant*). Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Situbondo seluas 20.588 hektar.

Komoditi perkebunan di Kabupaten Situbondo meliputi :

- a) Komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- b) Komoditi kapas berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- c) Komoditi jambu mente berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- d) Komoditi tembakau berada di Kecamatan: Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih.
- e) komoditi tanaman jarak tersebar di berbagai wilayah kabupaten meliputi Kecamatan Banyuputih, Arjasa, Kapongan, Panji dan Panarukan, yang memiliki tanah-tanah marjinal/kritis dengan pengelolaan diarahkan pada kawasan industri

**Tabel 2.9 Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2013-2017**

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Tembakau	2013	2,122.00	0.69
	2014	2,228.00	0.71
	2015	3,314.00	1.01
	2016	2,389.34	0.60
	2017	3,379.31	1.14
Kopi	2013	523.00	0.42
	2014	565.00	0.50
	2015	1,722.00	1.20
	2016	675.90	0.36
	2017	332.10	0.18
Tebu	2013	63,517.74	7.17
	2014	61,382.00	7.23
	2015	57,521.60	7.17
	2016	57,527.00	5.75
	2017	140,029.00	14.82

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018



Lokasi pengembangan tanaman perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.10 Lokasi Pengelolaan Tanaman Perkebunan**

No.	Komoditi	Lokasi Pengelolaan
1.	Kelapa	Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus, Banyuputih
2.	Pinang	Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus, Banyuputih
3.	Tebu	Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus, Banyuputih
4.	Kopi Robusta	Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus, Banyuputih
5.	Cengkeh	Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus, Banyuputih
6.	Kapas	Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus, Banyuputih
7.	Jambu mete	Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Jangkar, Arjasa, Asembagus, Banyuputih
8.	Tembakau	Mlandingan, Jangkar, Arjasa, Asembagus, Banyuputih

Sumber: RTRW Kab. Situbondo, 2013

Peluang pembangunan sektor perkebunan di wilayah Pengelolaan Kabupaten Situbondo pada masa mendatang cukup cerah, seperti diketahui bahwa permintaan pasar merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga komoditi, selera, mutu dan citra produk pertanian yang dipasarkan.

**Gambar 2.6 Tanaman Perkebunan tembakau dan tebu di Kec. Asembagus**



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tahun 2018



## 5) Pertambangan

Sesuai dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a) Pertambangan mineral; dan
- b) Pertambangan batubara.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Pertambangan mineral digolongkan atas:

- a) Pertambangan mineral radioaktif;
- b) Pertambangan mineral logam;
- c) Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d) Pertambangan batuan.

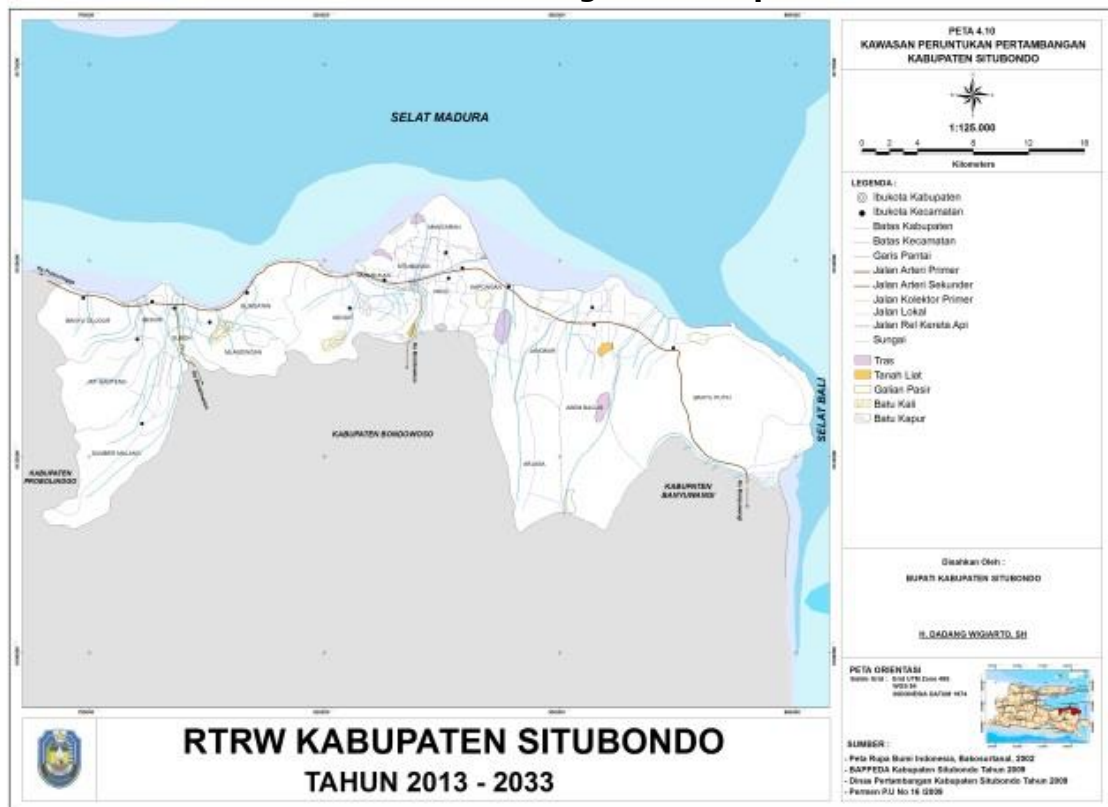
Potensi bahan tambang di Wilayah Kabupaten Situbondo meliputi:

- a) Kawasan pertambangan energi panas bumi di wilayah Gunung Argopuro dan Belawan – Ijen;
- b) kawasan pertambangan mineral logam di Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Jangkar;
- c) Kawasan pertambangan bukan logam berada di :
  - 1. Kecamatan Kendit;
  - 2. Kecamatan Bungatan;
  - 3. Kecamatan Asembagus;
  - 4. Kecamatan Situbondo;
  - 5. Kecamatan Arjasa; dan
  - 6. Kecamatan Sumbermalang.
- d) Kawasan pertambangan batuan berada di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Situbondo

Berikut merupakan peta kawasan pertambangan di Kabupaten Situbondo:



**Gambar 2.7**  
**Peta Kawasan Pertambangan di Kabupaten Situbondo**



Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo, tahun 2013

**b. Pengembangan Wilayah Agropolitan dan Minapolitan**

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui Program pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Situbondo. Program tersebut berdasarkan potensi pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Situbondo. Program pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Situbondo merupakan program percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota melalui pengembangan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan. Pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan berdasarkan SK Bupati Situbondo Nomor: 188/363/P/006.2/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang lokasi dan komoditas unggulan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana berikut:



**Tabel 2.11 Lokasi dan Komoditas Unggulan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Situbondo**

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KOMODITAS UNGGULAN
1.	Kapongan	1. Sletreng 2. Wonokoyo 3. Landangan	1. Padi Organik; 2. Mangga; 3. Sapi Potong; 4. Ayam Potong.
		1. Wonokoyo; 2. Landangan; 3. Kesambirampak; 4. Kapongan; 5. Peleyan; 6. Gebangan; 7. Pokaan.	1. Bawang Merah
2.	Arjasa	1. Kayumas	1. Kopi Arabika; 2. Jahe; 3. Jeruk; dan 4. Pisang Mas.
		2. Lamongan	Bawang Merah
3.	Mangaran	1. Tanjung Glugur 2. Tanjung Pecinan	Bawang Merah
4.	Situbondo	1. Kotakan 2. Patokan 3. Dawuhan 4. Talkandang 5. Olean	Bawang Merah

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tahun 2018

Bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan adalah berkaitan dengan pengembangan pada cluster pertanian dan perikanan.

### 1) Cluster Pertanian

Pengembangan pada cluster pertanian yang dilakukan oleh Kabupaten Situbondo adalah program Taman Teknologi Pertanian (TTP). Program TTP merupakan program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sejak tahun 2015. Program TTP ini bersumber dari program Jokowi-JK yang dikemas dalam Nawa Cita yang berisi sembilan agenda prioritas dan salah satunya "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional". Diantara optimalisasi pelaksanaan TTP pada 26 TTP se Indonesia di tahun 2016, Kabupaten Situbondo belum termasuk dalam sasaran Kementan tersebut. Namun Pemerintah Kabupaten Situbondo tetap berupaya dalam mewujudkan Nawacita ke 7 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Situbondo dengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat Inovasi bidang Pertanian,



Peternakan dan Perikanan serta peningkatan produktivitas lahan yang selaras dengan program pusat tersebut.

Taman Teknologi Pertanian juga menjawab tantangan swasembada pangan yang mau tidak mau harus menjadi perhatian hingga di tingkat daerah. Terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pertanian akhir-akhir ini menyadarkan masyarakat betapa pentingnya informasi budidaya komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tidak terbatas pada padi dan jagung saja, namun juga udang vaname, sapi potong, sapi perah, kerapu dan tanaman hortikultura. Pengembangan pertanian terpadu ini diharapkan menjadi salah satu penggerak perekonomian utama warga Situbondo yang mayoritas adalah petani. Sesuai konsep hilirisasi inovasi teknologi maka TTP mendekatkan teknologi pertanian pada penggunanya. TTP dapat difungsikan menjadi pola transfer teknologi atau bengkel kerja terapan bagi petani maupun pemuda tani mengingat petani harus juga mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian maka dapat meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan swasembada pangan.

Cluster Pertanian seluas 7,3 Ha telah direncanakan untuk *Landscape* Taman Teknologi Pertanian, Pengembangan Agen Hayati, Pengembangan jaringan irigasi yang ramah lingkungan, Pembangunan *Green House*, Pembangunan *Drip Irrigation*, Pelatihan Budidaya padi ramah lingkungan, Pelatihan Budidaya buah dan sayur yang sehat. Namun Jalan didalam TTP perlu penataan serta tanaman peneduh khas Situbondo. Berikut merupakan gambar cluster pertanian:

**Gambar 2.8 Taman Teknologi Pertanian**



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2018



**Gambar 2.9 Green House sebagai sarana edukasi Hidroponik**



*Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2018*

## **2) Cluster Perikanan**

Cluster Perikanan merupakan bentuk pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan selain cluster pertanian. Cluster perikanan diterapkan dalam bentuk Balai Benih Udang/Ikan (BBU/I) yang menempati lahan seluas 3 Ha. Kegiatan utama dari BBU/I tersebut adalah pembenihan udang. Melalui pembangunan BBU/I diharapkan Kabupaten Situbondo dapat memproduksi benih udang vaname dan benih kerapu untuk memasok kebutuhan benih para pembudidaya ikan atau udang di Situbondo maupun diluar Situbondo. Pada pengembangan BBU/BBI tersebut tersedia fasilitas bak pembenihan, laboratorium, petak penggondongan kerapu dan kolam terpal uji budidaya udang vaname di kolam terpal. Berikut merupakan gambar cluster perikanan di Kabupaten Situbondo:

**Gambar 2.10 Cluster Perikanan dan Panen Udang Vannamae**



*Sumber : Dinas Perikanan Kab. Situbondo, 2018*

## **3. Wilayah Rawan Bencana**

Bencana yang terjadi pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo dikarenakan perubahan iklim global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2017 terjadi beberapa bencana alam pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo sebagaimana di bawah ini:

- a. Bencana Tanah Longsor :
  - 1) Desa Bantal Kecamatan Asembagus;
  - 2) Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanten
  - 3) Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur;





- 4) Desa Taman Kecamatan Sumbermalang;
  - 5) Desa campoan Kecamatan Mlandingan;
  - 6) Desa Kali Rejo Kecamatan Sumbermalang
  - 7) Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa;
  - 8) Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus;
- b. Bencana Angin Puting Beliung :
- 1) Kelurahan Kesambirampak Kecamatan Kapongan;
  - 2) Desa Jetis Kecamatan Besuki;
  - 3) Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan;
  - 4) Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih;
  - 5) Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran;
  - 6) Desa Kendit Kecamatan Kendit;
  - 7) Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan;
  - 8) Desa Gudang Kecamatan Asembagus;
  - 9) Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
  - 10) Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh;
  - 11) Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa;
  - 12) Desa Demung Kecamatan Besuki;
  - 13) Desa cemara Kecamatan Suboh;
  - 14) Desa Buduan Kecamatan Suboh;
  - 15) Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng;
  - 16) Desa taman Kecamatan Sumbermalang;
  - 17) Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
  - 18) Desa Tanjung pecinan Kecamatan Mangaran;
  - 19) Desa Olean Kecamatan Situbondo;
  - 20) Desa Blimbing Kecamatan Besuki;
  - 21) Desa Kendit Kecamatan Kendit;
  - 22) Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
  - 23) Desa Semiring Kecamatan Mangaran;
  - 24) Desa Jangkar Kecamatan jangkar;
  - 25) Desa Jatisari Kecamatan Jangkar;
  - 26) Desa Sopet Kecamatan Jangkar;
  - 27) Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo;
  - 28) Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur;
  - 29) Desa kayumas Kecamatan Arjasa;
  - 30) Desa Taman Sari Kecamatan Sumbermalang;
  - 31) Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang;
  - 32) Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang;



- 33) Desa Badaran Kecamatan Sumbermalang;
  - 34) Desa Gunung malang Kecamatan Suboh;
- c. Bencana Banjir :
- 1) Desa Besuki Kecamatan Besuki;
  - 2) Desa Tenggir Wetan Kecamatan Panji;
  - 3) Desa Kendit Kecamatan Kendit;
  - 4) Desa Ardirejo Kecamatan Panji;
  - 5) Desa Pasir putih Kecamatan Bungatan;
  - 6) Desa Demung Kecamatan Besuki;
  - 7) Desa Jangkar Kecamatan Jangkar;
- d. Bencana Gelombang Rob :
- 1) Desa Besuki Kecamatan Besuki;
  - 2) Desa Jangkar Kecamatan jangkar;
- e. Bencana Kebakaran :
- 1) Desa Asembagus Kecamatan Asembagus;
  - 2) Desa Kayumas Kecamatan Arjasa;
  - 3) Desa Patokan Kecamatan Situbondo;
  - 4) Desa Battal Kecamatan Kapongan;
  - 5) Desa Kilensari Kecamatan Penarukan;
  - 6) Desa Tribungan Kecamatan Mangaran;
  - 7) Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo;
  - 8) Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo;
  - 9) Desa Mlandingan kulon Kecamatan Mlandingan;
  - 10) Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng;
  - 11) Desa Alasmalang Kecamatan Penarukan;
  - 12) Desa Plalangan Kecamatan Penarukan;
  - 13) Desa Sumberkolak Kecamatan penarukan;
  - 14) Desa Langkap Kecamatan Besuki;
  - 15) Desa Gudang Kecamatan Asembagus;
  - 16) Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo;
  - 17) Desa Kendit Kecamatan Kendit;
  - 18) Desa Blitok Kecamatan Bungatan;
  - 19) Desa Kotakan Kecamatan Situbondo;
  - 20) Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan;
  - 21) Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan;
  - 22) Desa Duwet Kecamatan Panarukan;
  - 23) Desa Demung Kecamtan Besuki;
  - 24) Desa Mangaran kecamatan Mangaran;



- 25) Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan;  
 26) Desa Gunung Malang kecamatan Suboh  
 f. Gempa Bumi : Tidak Ada

**Tabel 2.12 Rekap Kejadian Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2017**

No	Bulan	Jenis Kejadian						
		Angin Puting Beliung	Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Rob	Gempa Bumi	Kebakaran	SAR Laut dan Darat
1	Januari	13	6	6	1	0	2	0
2	Februari	14	1	1	0	0	1	0
3	Maret	1	0	0	0	0	0	1
4	April	5	0	5	0	0	4	0
5	Mei	1	0	0	0	0	1	0
6	Juni	1	1	0	0	0	3	0
7	Juli	1	0	0	0	0	3	1
8	Agustus	3	0	0	0	0	1	2
9	September	0	0	0	0	0	5	2
10	Oktober	1	0	0	0	0	4	0
11	November	2	0	0	0	0	3	0
12	Desember	1	3	4	2	0	1	0
<b>Total Kejadian</b>		<b>41</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>6</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Situbondo, 2017

### 2.1.2 Aspek Demografi

Paradigma baru tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan, sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumbermalang	26.661	26.430	26.422	26.408	26.386
2	Jatibanteng	22.180	22.130	22.171	22.206	22.236
3	Banyuglugur	22.945	23.278	23.456	23.628	23.797
4	Besuki	62.594	63.627	64.147	64.655	65.151
5	Suboh	26.686	26.878	27.014	27.144	27.268
6	Mlandingan	22.749	22.451	22.441	22.425	22.403
7	Bungatan	24.917	25.037	25.157	25.271	25.379
8	Kendit	28.657	28.491	28.531	28.566	28.591

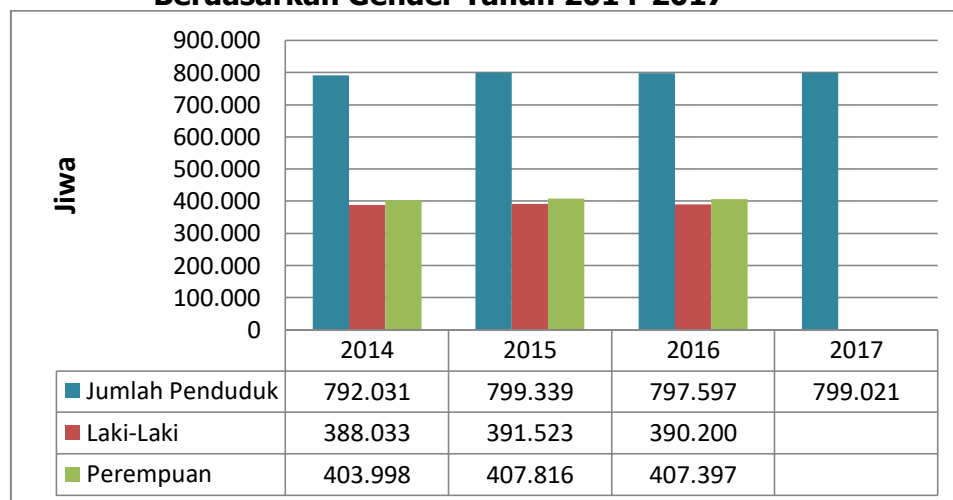


No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
9	Panarukan	54.297	55.328	55.829	56.322	56.805
10	Situbondo	47.720	47.764	47.924	48.073	48.212
11	Panji	69.987	71.233	71.874	72.507	73.123
12	Mangaran	32.575	32.762	32.922	33.075	33.221
13	Kapongan	37.787	38.018	38.172	38.417	38.604
14	Arjasa	40.385	40.440	40.567	40.685	40.792
15	Asembagus	48.019	47.850	47.933	48.300	48.061
16	Jangkar	36.920	26.930	37.030	37.121	37.203
17	Banyuputih	55.613	57.367	59.063	58.776	59.471
Jumlah		660.692	656.014	670.653	673.579	676.703

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, 2018

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun secara keseluruhan selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dari semula 660.692 pada tahun 2013 menjadi 656.014 pada tahun 2014.

**Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan Gender Tahun 2014-2017**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Situbondo, 2017

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo menurut jenis kelamin pada tahun 2016 terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Situbondo lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini sesuai dengan data yang ditunjukkan pada tahun 2016 bahwa terdapat 390.200 jiwa penduduk laki-laki dan 407.397 jiwa penduduk perempuan.

Dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 676.703 orang dan mendiami wilayah seluas 1.638,50 km<sup>2</sup> maka rata-rata kepadatan penduduk tahun 2017 adalah 411 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 sebesar 487 jiwa/km<sup>2</sup>. Dan di tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 799.021 jiwa. Kecamatan Besuki merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar



2.826,35 jiwa/km<sup>2</sup>, selanjutnya adalah Kecamatan Mangaran dengan tingkat kepadatan penduduk 2.319,64. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Banyuputih yaitu 143,88 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.14 Indikator Kependudukan di Kabupaten Situbondo**

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	656.014	670.653	673.579	676.703
2	Pertumbuhan Penduduk (%)			0,53	0,51
3	Kepadatan Penduduk			411	413
4	Sex Ratio			95,15	95,24

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2018

Selain itu, untuk persebaran jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo, daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Panji yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2016 berjumlah 82,811 jiwa sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah pada tahun 2016 adalah Jatibanteng yaitu sebanyak 27,375 jiwa. Sedangkan perkembangan jumlah penduduk Kab. Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013-2017 sebagai berikut:

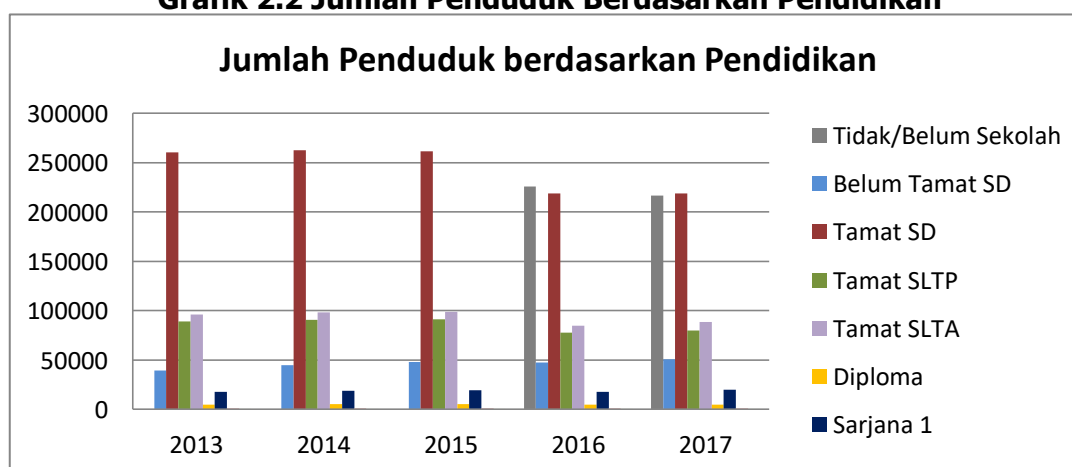
**Tabel 2.15 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Situbondo Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tahun	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Diploma	S1	S2	S3
2013		39,712	260,326	89,416	96,251	5,071	17,963	809	41
2014		45,080	262,423	90,701	98,127	5,267	18,747	829	49
2015		48,191	261,438	91,160	98,932	5,378	19,593	898	53
2016	225,897	47,333	218,725	78,045	84,801	4,803	17,782	854	58
2017	216,819	51,018	219,056	80,023	88,501	5,110	19,769	912	72

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2018

Berikut grafik perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013-2017:

**Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Situbondo, tahun 2018



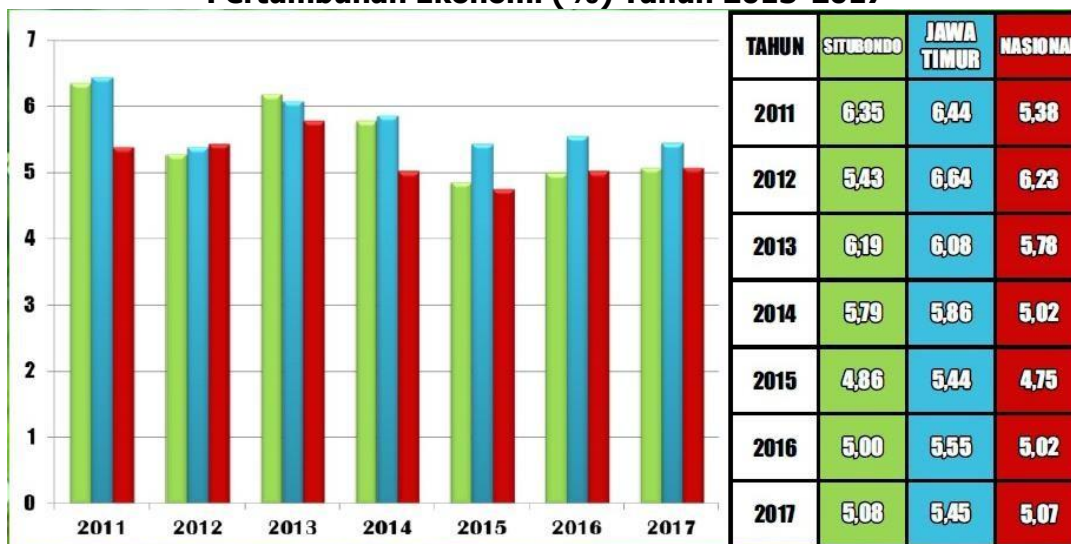
## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: 1) Faktor Sumber Daya Manusia; 2) Faktor Sumber Daya Alam; 3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Faktor Budaya; dan 5) Sumber Daya Modal. Adapun data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

**Grafik 2.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2013-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo tahun 2013 sebesar 6,19%, di tahun 2014 sebesar 5,79%, tahun 2015 sebesar 4,86%, pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,00%, dan di tahun 2017 menjadi sebesar 5,08%,. Sektor ekonomi yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,71%. Selain itu juga jika dilihat dari grafik bahwa pertumbuhan ekonomi Situbondo tahun 2017 di atas pertumbuhan ekonomi Nasional, namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo, baik faktor internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi



Kabupaten Situbondo diantaranya laju inflasi regional yang berhasil ditekan, pembangunan infrastruktur yang *massif* dan keberhasilan beberapa subsektor pertanian dalam meningkatkan produktivitasnya. Salah satunya alasan perlambatan ekonomi pada sektor pertanian adalah melambatnya subsektor perkebunan sebagai dampak dari regulasi dalam rencana revitalisasi industri gula.

**Tabel 2.16 PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta)
2013	18,03
2014	20,03
2015	22,09
2016	24,18
2017	25,93

*Sumber: Jatim Provinsi, Tahun 2018*

Pendapatan per kapita Kabupaten Situbondo berbanding lurus Selama kurun waktu tahun 2013–2017 perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Situbondo terus meningkat. PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo tahun 2013–2017 mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp. 18.030.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 25.930.000 pada tahun 2017.

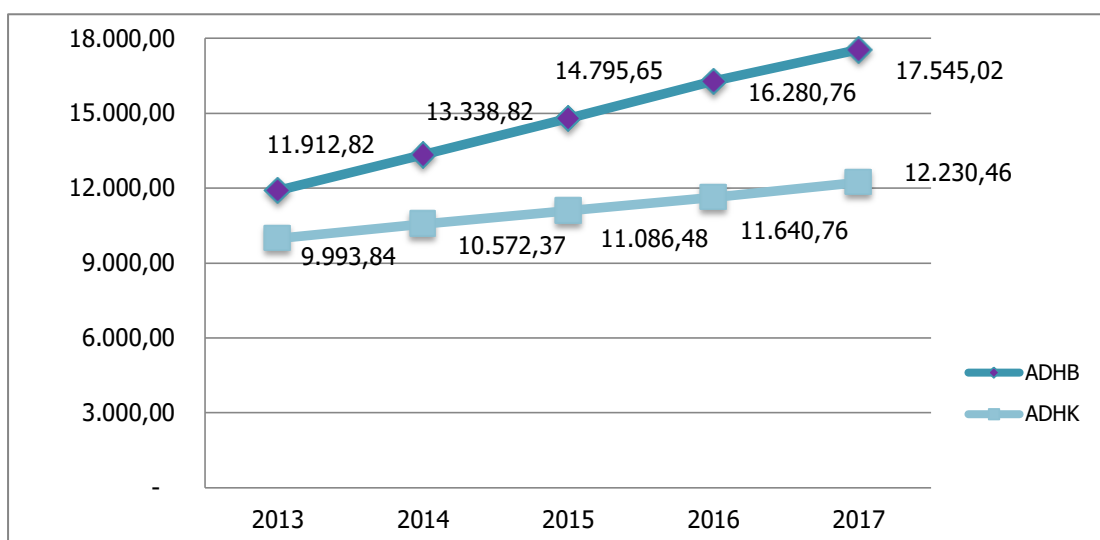
Pendapatan Domestik Rerigonal Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang timbul akibat aktivitas ekonomi. PDRB merupakan Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu Dengan diketahuinya peranan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terdapat pada distribusi presentase sumbangan sektor ekonomi tertentu terhadap nilai PDRB total dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor, maka dapat direncanakan kearah mana prioritas pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan. PDRB ini sendiri dibagi menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan juga PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi serta menunjukkan bahwa pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, kemudian untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut. PDRB per kapita Atas Dasar





Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

**Grafik 2.4**  
**PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Situbondo, Tahun 2018

Penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa data yang telah tergambar dalam Grafik 2.4 menunjukkan Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan yang baik dari struktur ekonominya dan pergeseran ekonomi yang terjadi maupun dalam pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya dan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ataupun per sektor.

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo, baik berdasarkan atas harga berlaku maupun atas harga konstan, terus meningkat. PDRB ADHB Kabupaten Situbondo tahun 2013–2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.632.200.000.000 atau meningkat sebesar 32,10% yaitu dari sebesar Rp. 11.912.820.000.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 17.545.020.000.000 pada tahun 2017. Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Situbondo pada tahun 2013–2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.236.620.000.000 atau 18,28% yaitu dari sebesar Rp. 9.993.840.000.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 12.230.460.000.000 pada tahun 2017.

Sampai dengan tahun 2016, perekonomian Kabupaten Situbondo bertumpu pada dua kategori utama, yakni sektor pertanian, kehutanan & perikanan, sebagai sektor terbesar dan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor terbesar kedua. Kedua sektor ini merupakan penyumbang nilai tambah terbesar dalam menyusun PDRB Kabupaten Situbondo.



Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan, rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan rata-rata pertumbuhan lapangan usaha lain relatif stabil.

**Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Situbondo (persen) 2013 – 2017**

Sektor/Sub Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,22	3,84	3,14	2,64	0,95
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	0,92	1,33	1,35	1,33	6,16
<b>C</b>	Industri Pengolahan	7,12	6,70	7,77	7,00	8,23
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	3,38	2,20	3,24	4,33
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,60	2,36	2,25	2,21	4,62
<b>F</b>	Konstruksi	7,58	7,47	- 0,80	3,16	6,46
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,65	7,40	6,35	6,78	7,79
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	8,12	7,79	7,39	6,85	7,49
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,05	8,49	8,53	8,78	9,02
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	10,76	6,61	6,50	7,20	7,04
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,63	8,68	8,61	8,06	6,60
<b>L</b>	Real Estate	8,26	8,05	8,04	8,66	6,43
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	6,14	6,67	6,70	6,62	6,74
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	1,75	2,76	3,46	3,16
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	6,89	7,92	7,93	6,66	4,39
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	12,71	2,48	2,45	4,83
<b>R,S, T,U</b>	Jasa lainnya	5,00	5,31	5,33	4,87	5,15



Sektor/Sub Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	5,43	5,79	4,86	5,00	5,07

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2018

Berdasarkan data distribusi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2017, distribusi perekonomian Kabupaten Situbondo bertumpu pada dua kategori utama. Sektor pertanian, kehutanan & perikanan, sebagai sektor terbesar dan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor terbesar kedua.

**Tabel 2.18 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (%)**

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	35,94	36,32	36,24	35,53	34,18
2.	Pertambangan dan penggalian	2,03	1,95	1,94	1,86	1,90
3.	Industri pengolahan	15,69	15,76	16,09	16,37	16,58
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
6.	Konstruksi	7,61	7,73	7,40	7,41	7,60
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	14,60	14,33	14,46	14,86	15,52
8.	Transportasi dan pergudangan	2,23	2,34	2,40	2,46	2,55
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,59	1,68	1,72	1,79	1,89
10.	Informasi dan komunikasi	5,00	4,74	4,71	4,74	4,78
11.	Jasa keuangan dan asuransi	2,80	2,89	2,97	3,07	3,16
12.	Real estate	1,40	1,35	1,40	1,42	1,44
13.	Jasa perusahaan	0,41	0,40	0,40	0,40	0,42
14.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	3,79	3,54	3,30	3,22	3,20
15.	Jasa pendidikan	3,95	3,98	3,94	3,87	3,79
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	0,83	0,84	0,84	0,81	0,82



No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
17	Jasa lainnya	1,94	1,96	2,01	2,00	2,00

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2018

\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

### 2.2.2 Indikator Inflasi

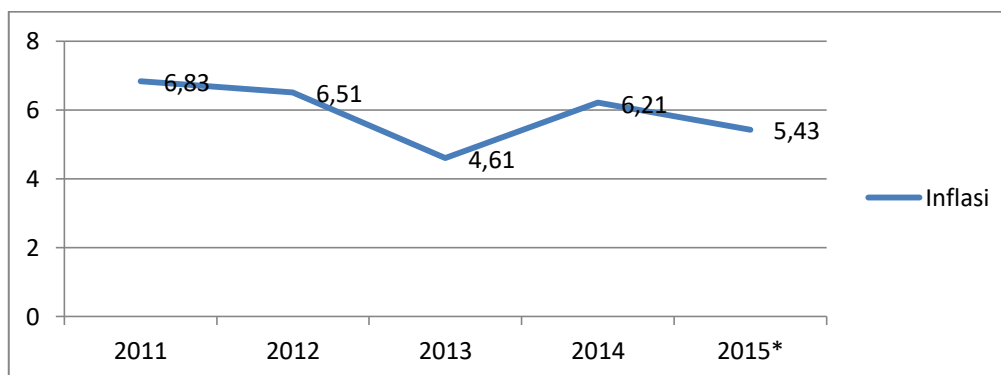
Beberapa indeks yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah :

1. Indeks Harga Konsumen (IHK), menunjukkan pergerakan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat
2. Indeks Perdagangan Besar, merupakan indikator yang menggambarkan pergeseran harga dari komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah
3. GDP (Gross Domestic Product) Deflator, merupakan harga barang/jasa yang didapatkan dari perbandingan Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku dengan Produk Domestik Regional Bruto Riel ( atas dasar harga konstan/ tahun dasar)

Berdasarkan Fundamentalitas penyebab inflasi :

1. Inflasi inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh factor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar dan dinamika harga komoditi internasional;
2. Inflasi non inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan barang/jasa seperti ketersediaan bahan pangan, gangguan alam/ bencana alam, wabah penyakit serta factor *Administered prices*, yaitu inflasi yang dipengaruhi kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM, tariff listrik, tariff transportasi, HET,dll. Berikut grafik perkembangan Inflasi Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015.

**Grafik 2.5**  
**Inflasi Tahun 2011-2015**



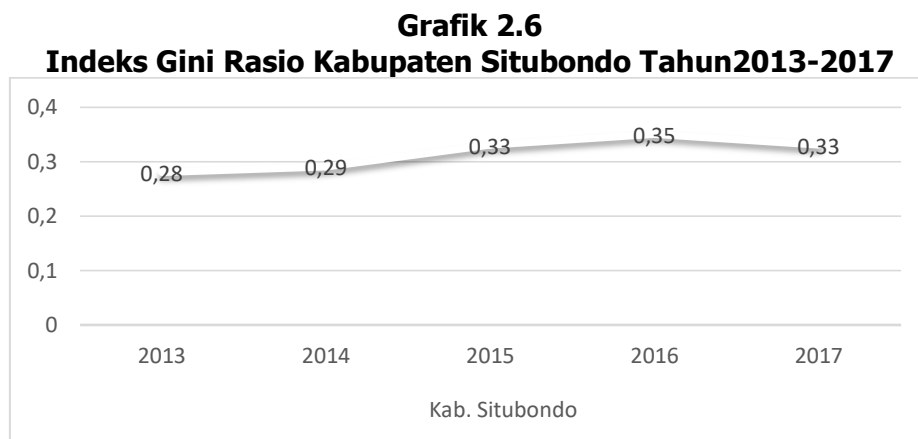
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2015



Data Inflasi yang di munculkan pada dokumen ini adalah data tahun 2015 yaitu inflasi tahun 2011-2015 karena Sejak Tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo tidak melakukan penghitungan tentang Inflasi

### 2.2.3 Indeks Gini Rasio

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Di Kabupaten Situbondo Indeks Gini Rasio dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi, namun masih di bawah angka 1. Tahun 2013 indeks gini rasio Kabupaten Situbondo sebesar 0.28, di tahun 2014 mengalai kenaikan sebesar 0,01, sehingga menjadi 0,29. Tahun 2015 indeks gini rasio Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan kembali sebesar 0,04, sehingga menjadi 0,33, tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,02 menjadi 0,35, dan di tahun 2017 indeks gini rasio di Kabupaten situbondo mengalami penurunan 0,02, sehingga menjadi 0,33. Berikut grafik perkembangan indeks gini rasio di Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017:



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

### 2.2.4 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin (Headcount Indes/Po) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Sedangkan garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

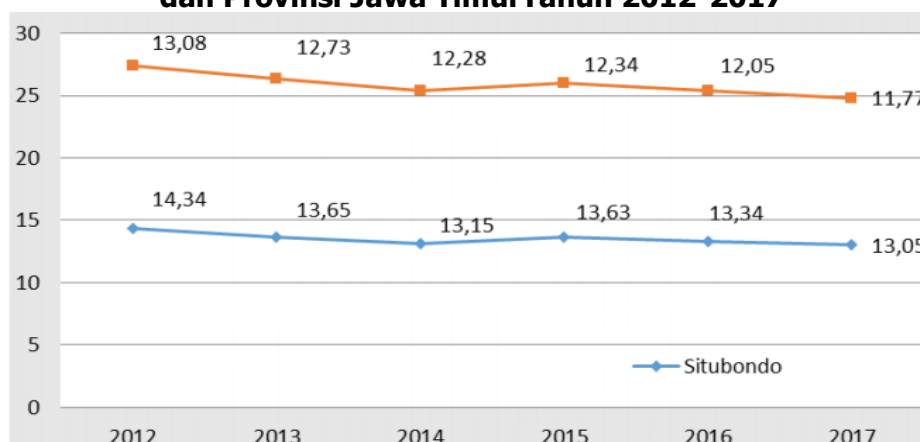


**Tabel 2.19 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2012-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	%
2012	225.582	94.460	14.34
2013	240.085	90.341	13.65
2014	246.483	87.670	13.15
2015	254.656	91.170	13.63
2016	270.406	89.680	13.34
2017	276.924	88.230	13.05

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2018

**Grafik 2.7 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2018

Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, angka kemiskinan Kabupaten Situbondo masih lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan capaian pada tahun 2012 adalah 14,34; menurun menjadi 13,65 pada tahun 2012; pada tahun 2014 menjadi 13,15 dan pada tahun 2015 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 13,63%. Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo di Tahun 2016 sedikit menurun di angka 13,34 % dibanding Tahun 2015 dan sudah keluar dari 10 besar Kabupaten / Kota termiskin di Jawa Timur (posisi ke-13 dari bawah). Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya yakni menjadi 88.230 ribu jiwa atau sebesar 13,05%. Persentase tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Situbondo terdapat 13-14 orang yang miskin. Penurunan persentase penduduk sebelum pada tahun 2016 merupakan dampak dari keberhasilan program pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun angka penurunan tersebut tidak menunjukkan angka yang cukup signifikan, perbandingannya sangat tipis apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari



38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Situbondo menduduki peringkat ke 27.

Masih tingginya persentase kemiskinan tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya harga – harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif dasar listrik (TDL) yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah, pembukaan lapangan kerja yang luas serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo sampai ke perdesaan. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan.

Selain berbagai upaya sebagaimana di atas, pada tahun 2016 Kabupaten Situbondo telah melakukan validasi data kemiskinan dengan menggunakan metode Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) terhadap Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2015 yang dilakukan di seluruh Desa dan Kelurahan se Kabupaten Situbondo. Validasi data ini dilakukan secara berjenjang dimulai dari musyawarah tingkat RT, musyawarah tingkat dusun, dan musyawarah tingkat desa. Setelah disepakati tentang calon rumah tangga miskin di masing-masing desa/kelurahan, maka akan dilakukan pendataan dengan menggunakan 61 indikator kemiskinan dan di entry kedalam aplikasi SID yang akan menghasilkan data rumah tangga miskin dan penduduk miskin dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin. Karena karakteristik wilayah Kabupaten Situbondo yang meliputi wilayah pegunungan, pesisir dan daratan, maka dalam melakukan pendataan penduduk miskin dibagi menjadi 4 klaster sesuai dengan karakteristik wilayahnya yaitu Klaster pegunungan, klaster pesisir, klaster perkotaan, dan klaster antara. Dari hasil validasi data ini akan menghasilkan data tunggal kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan sebuah terobosan untuk menyelesaikan kemiskinan di Situbondo melalui aplikasi *E-DesaNow* yang merupakan basis data spasial desa agregat, yang disusun dengan metode partisipatif sebagai dasar perencanaan pembangunan Desa dan Kabupaten. Dengan data spasial yang jelas (*by name by address*) bisa diketahui dengan jelas siapakah calon Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga diharapkan program kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dengan peta prioritas.





## 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yaitu 2012 – 2017, pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan, hanya saja peningkatannya masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Level Nasional. Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 adalah 62,23; pada tahun 2013 adalah 63,43; tahun 2014 adalah 63,91 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 64,53, 65,08 di tahun 2016, dan di tahun 2017 65,68.

**Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Kabupaten Situbondo 2013 – 2017**

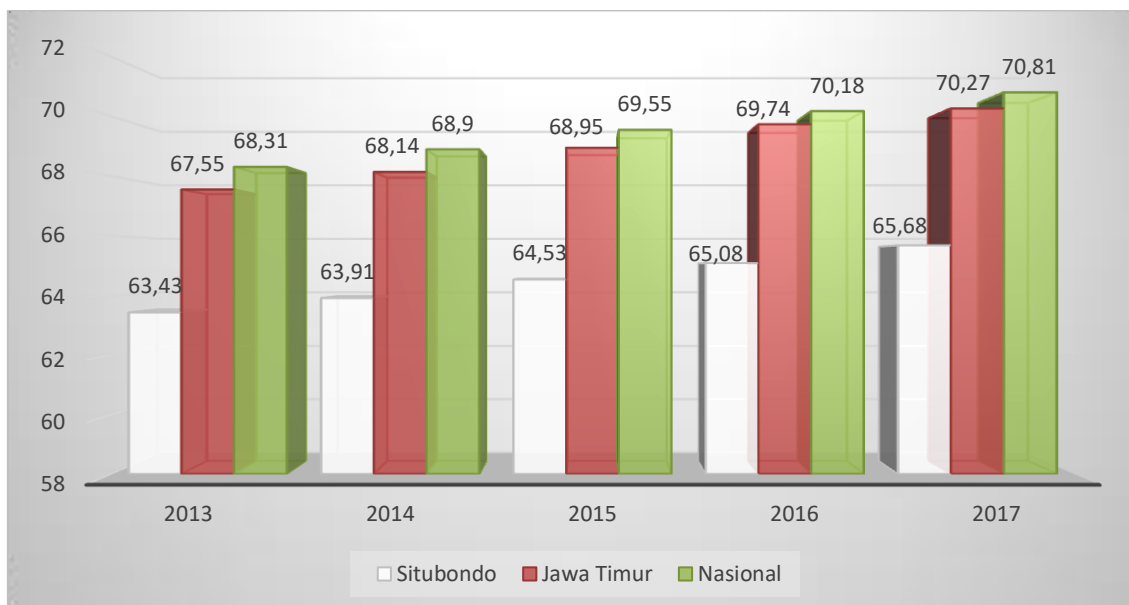
Tahun		Indeks Pembangunan Manusia
1	2013	63.43
2	2014	63.91
3	2015	64.53
4	2016	65.08
5	2017	65.68

*Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka, Tahun 2018*

Peningkatan IPM Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo berpedoman pada kinerja pemerintahan yang saling berintegrasi dengan masyarakat. Meskipun angka pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo belum menyamai angka provinsi dan Nasional namun setidaknya terjadi peningkatan minimal 1,0 pada setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya menunjukkan ada perubahan kesejahteraan pada masyarakat Situbondo, angka harapan hidup, dan peningkatan kualitas pendidikan pada tiap tahunnya. IPM Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 masuk pada kategori **sedang**.



**Grafik 2.8**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo**  
**Tahun 2013-2017**



*Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2018*

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (e0) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni :

1. Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS).
2. Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Secara lebih rinci capaian indikator-indikator dari capaian IPM tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.21 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo (Metode Baru) Tahun 2013 – 2017**

No	INDIKATOR MAKRO	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>63,43</b>	<b>63,91</b>	<b>64,53</b>	<b>65,08</b>	<b>65,68</b>
1	Angka Harapan Hidup	68,03	68,08	68,28	68,41	68,53
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,90	12,97	12,98	12,99	13,00
3	Rata-rata Lama Sekolah	5,28	5,54	5,67	5,68	6,03
4	Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)	8.350,9	8.382,83	8.676,63	9106	9178

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2017

Pencapaian IPM Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 6 tahun terakhir masuk kedalam kategori Sedang dengan angka capaian  $\geq 60$ . Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

### 2.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei terhadap masyarakat Kabupaten Situbondo sebagai pengguna jasa layanan pemerintah daerah merupakan kegiatan utama dari penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini. Dari survei ini diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa yang diterima dari pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai penyedia jasa. Survei ini juga mengidentifikasi harapan masyarakat akan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo.



Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat lebih ditekankan pada bidang pelayanan, yakni 4 (Empat) bidang pelayanan, yaitu: (1)Layanan Dasar Kesehatan; (2)Layanan Dasar Pendidikan; (3) layanan dasar Infrastruktur; (4) layanan dasar Kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disusun dengan tujuan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, sedangkan bagi masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Penilaian kualitas pelayanan publik menggunakan pedoman sebagai berikut:

**Tabel 2.22 Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat**

KATEGORI MUTU PELAYANAN	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	KINERJA BIDANG PELAYANAN
D	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	TIDAK BAIK
C	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	KURANG BAIK
B	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	BAIK
A	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	SANGAT BAIK

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2017

Kabupaten Situbondo mengadakan penilaian survey IKM sejak tahun 2016 dengan capaian nilai sebagai berikut :

**Tabel 2.23 Nilai Capaian IKM Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2017**

Tahun	Capaian Nilai IKM	Keterangan Kinerja
2016	76,13	Baik
2017	80,46	Baik

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2017

## 2.2.7 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran **Grand design Reformasi Birokrasi** Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Pada tahun 2017, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo meraih nilai 65,91 dan termasuk dalam kategori Baik. Sehingga masih diperlukan perbaikan di beberapa sektor pemerintahan.

### **2.2.8 Indeks Pendidikan**

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pendidikan diperoleh dari Indeks Harapan lama sekolah ditambah dengan Indeks Rata-rata lama sekolah dibagi 2. Indeks Pendidikan dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Indeks pendidikan yang terdiri dari 2 komponen yaitu angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang (dari angka harapan lama sekolah), Sedangkan cerminan angka rata-rata lama sekolah merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Pada tahun 2016, Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo berada pada angka 0,55 dan sedikit meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,56 sehingga masih termasuk kategori rendah. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah menjadi faktor rendahnya indeks pendidikan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program – program prioritas pembangunan.

### **2.2.9 Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

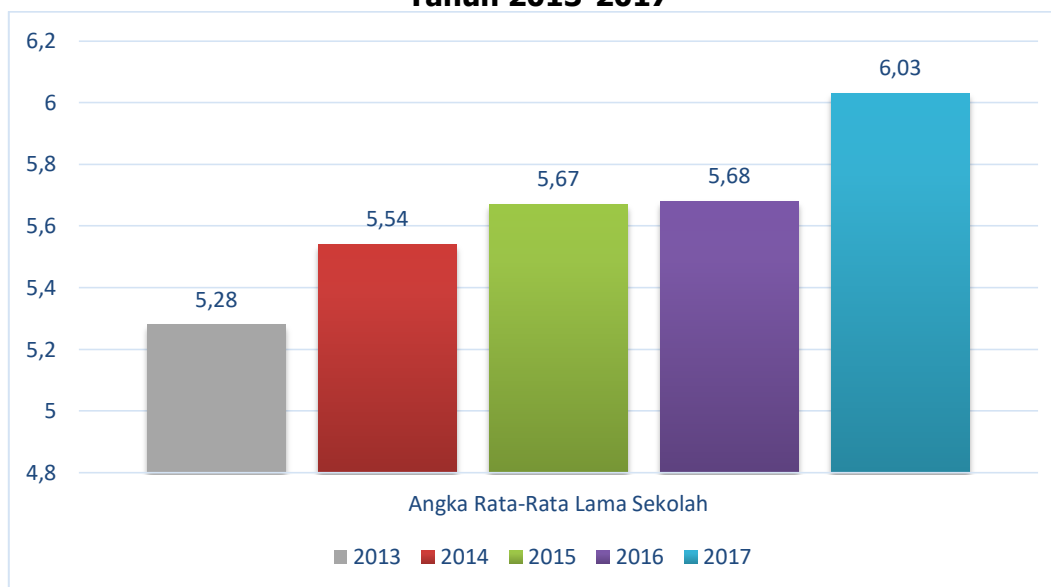
Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Situbondo kecenderungan mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni: sebesar 0,13. Pada tahun 2013 sebesar 5,28, pada tahun 2014 sebesar 5,54, pada tahun 2015 sebesar 5,67 dan pada tahun 2016 sebesar 5,68, dan pada tahun 2017 sebesar 6,03. Hal ini masih sangat perlu



ditingkatkan karena data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Situbondo hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Berikut merupakan grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Situbondo tahun 2013 hingga 2017:

**Grafik 2.9**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Kabupaten Situbondo dan DISDIKBUD data diolah, Tahun 2018

### 2.2.10 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Kesehatan dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Komponen penghitungannya menggunakan Angka harapan hidup yang merupakan rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo sebesar 0,75 dan termasuk dalam kategori rendah. Pemerintah kabupaten Situbondo berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan kepada masyarakat.

### 2.2.11 Prevalensi Balita Gizi Buruk

KEP merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi zat energi dan zat protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). KEP merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia, begitu juga di Kabupaten Situbondo juga masih mengalami masalah KEP terutama pada balita. Prevalensi KEP di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2011-2014 masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2011 baik dari APBD II



maupun APBD I tidak ada dana khusus untuk survey pemantauan status gizi, yang *output*-nya berupa data prevalensi KEP, pada Tahun 2012 sebesar 18,26% (120 balita gizi kurang dan gizi buruk dari 657 balita yang diukur). Tahun 2013 sebesar 21.3% (139 balita gizi kurang dan gizi buruk dari 654 balita yang diukur), sementara tahun 2014 sebesar 18.4% (120 balita gizi kurang dan gizi buruk dari 654 balita yang diukur). Tahun 2015 dan 2016 angka gizi buruk tidak mengalami pergeseran yaitu di angka 1.2% (461 balita gizi buruk) dan angka prevalensi Gizi mengalami penurunan dari 9.2% ke angka 8.3%, hal ini menyebabkan turunnya angka kejadian KEP yang ada di Kabupaten Situbondo yaitu 9.5%.

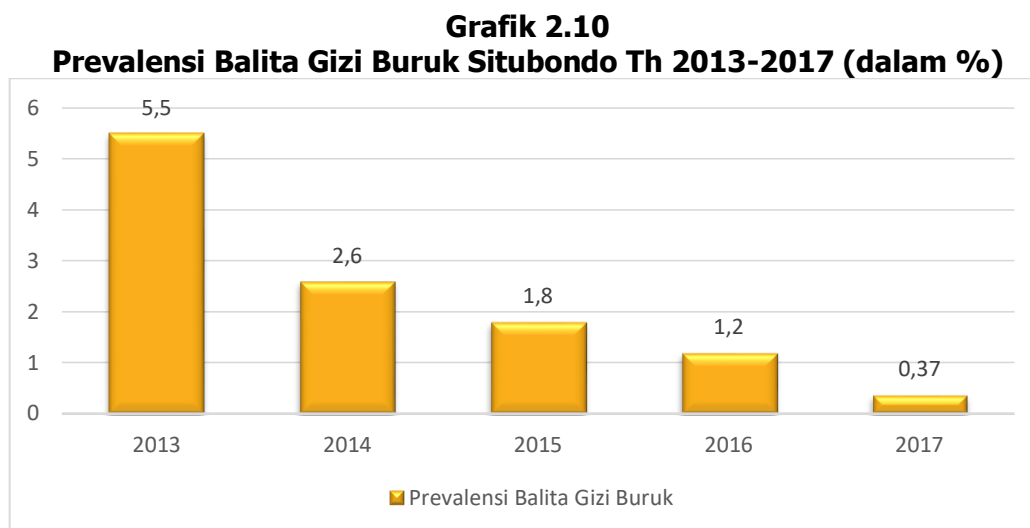
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan dirawat pada tahun 2011 sebanyak 204 balita, dan tahun 2012 sebanyak 175 balita. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 191 balita dan tahun 2014 menjadi 251 balita. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut balita gizi buruk yang ditemukan 100% mendapat perawatan. Keberhasilan indikator ini tentunya harus diikuti dengan surveilans gizi yang dilaksanakan, semakin dini ditemukan semakin mudah intervensinya. Kegiatan ini berupa Taman Pemulihan Gizi, pemberian makanan tambahan untuk gizi kurang dan pemberdayaan keluarga sadar gizi dalam bentuk salah satunya lomba balita mantan gizi kurang dan adanya Rumah Pemulihan Gizi. Kegiatan tersebut berupa intervensi, edukasi dan pengobatan untuk terjadinya gizi buruk.

Prevalensi gizi buruk adalah jumlah balita yang mengalami gizi buruk dibandingkan dengan seluruh balita yang diperiksa atau total balita. Prevalensi KEP adalah jumlah balita gizi buruk ditambah dengan jumlah balita gizi kurang yang dibagi seluruh jumlah balita yang diperiksa. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa prevalensi gizi buruk di Kabupaten Situbondo tahun 2012-2017 kecenderungan mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013. Prevalensi gizi buruk yang menurun secara signifikan dari tahun 2014-2017 menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan telah berhasil. Prevalensi gizi buruk Kabupaten Situbondo Tahun 2013 hingga 2017 yakni sebesar 5,5%; 2,6%; 1,8%, 1,2% dan 0,37%. Jumlah gizi buruk pada tahun 2017 sebanyak 170 balita yang tersebar di seluruh Kabupaten Situbondo. Tersebar di 17 Kecamatan dengan jumlah gizi buruk tertinggi berturut-turut yakni Mlandingan (26); Situbondo (20); Bungatan (19); Banyuglugur (15); Mangaran (6); Panji (16); Suboh (10); Arjasa (7); Kapongan (5), Jangkar (5); Asembagus (5); Besuki (5); Banyuputih (3) dan Sumbermalang (2). Prevalensi balita



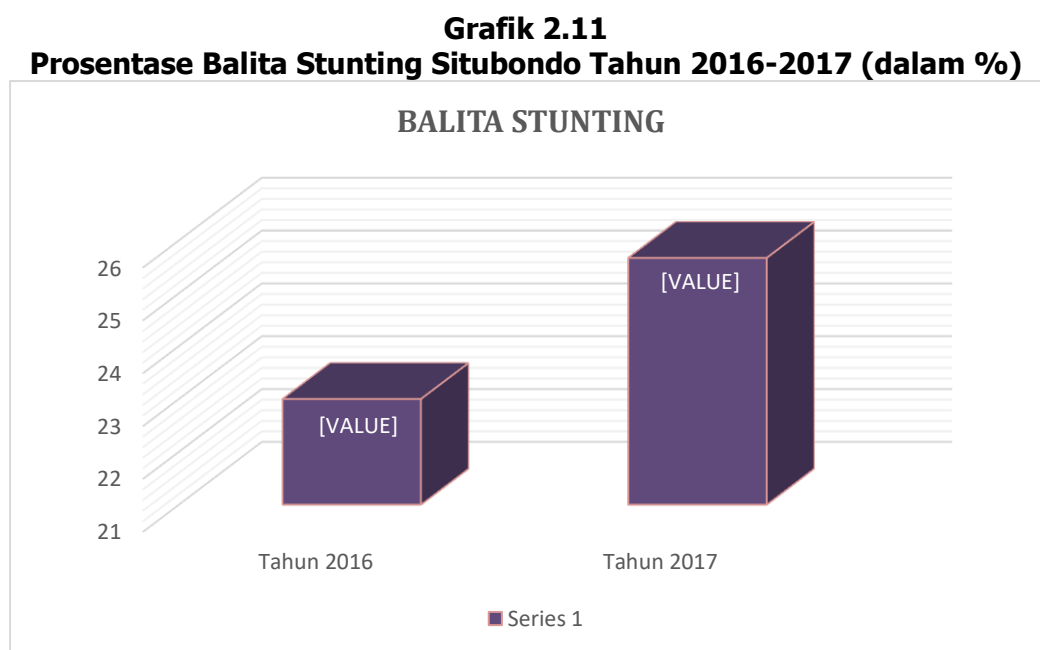


gizi buruk Kabupaten Situbondo tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Laporan LP3Gizi, Tahun 2018

Situbondo yang merupakan tertinggi ketiga kasus "stunting" di Jatim, lanjut dia dikarenakan ibu hamil asupan gizi kurang mencukupi (berawal sejak berada dalam kandungan) dan pola hidup, sehingga balitanya cenderung menjadi calon "stunting".



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2018

### 2.2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan di Kabupaten Situbondo, penduduk dikelompokkan menjadi (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)dibedakan menjadi 2 (dua)kelompok yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja (mereka yang bekerja



dan mencari pekerjaan) dan penduduk bukan angkatan kerja (orang yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya diluar bekerja dan mencari kerja). Upaya perluasan lapangan kerja perlu dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk melaksanakan amanat UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka perlu upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Beberapa indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan wajib ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.24 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No	Indikator Ketenaga kerjaan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan Kerja	355.849	348.546	364.834	371.361	378.549
	- Bekerja	345.122	334.065	351.821	358.872	366.056
	- Penganggur	10.727	14.481	13.013	12.759	12.493
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,01	4,15	3,57	3,98	1,49

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah angkatan kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 menunjukkan kecenderungan kenaikan kecuali tahun 2014. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah angkatan kerja tahun 2013-2017 yakni sebesar 355.849; 348.546; 364.834; 371.361 dan 378.549 orang. Jumlah masyarakat yang bekerja juga menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan kecuali tahun 2014. Hal tersebut sejalan dengan jumlah masyarakat yang penganggur kecenderungan mengalami penurunan namun pengecualian untuk tahun 2014. Jumlah penganggur Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 yakni sebanyak 10.727; 14.481; 13.013; 2.759 dan 12.493 orang.

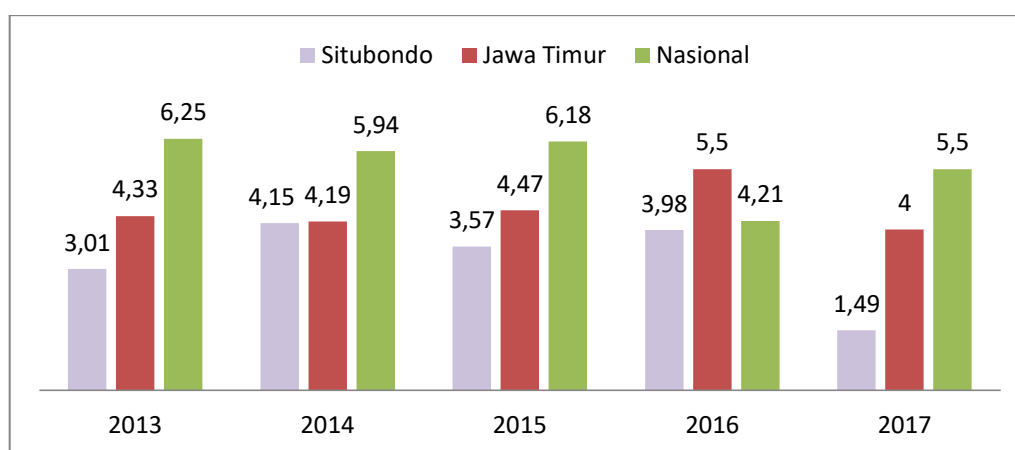
Indikator utama ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Situbondo Tahun 2013 sebesar 3,01%, kemudian meningkat pada 2014 menjadi 4,15%, menurun kembali menjadi 3,57% pada 2015, kemudian angka TPT meningkat kembali pada



2016 menjadi 3,98% dan menurun secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,49%.

Adanya penurunan TPT yang cukup signifikan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pengangguran di Kabupaten Situbondo. Atas dasar tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menangani masalah pengangguran sudah menampakkan hasil yang semakin baik. Menurunnya angka TPT di Kabupaten Situbondo salah satunya ditunjang oleh perkembangan industri di Kabupaten Situbondo yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri di Kabupaten Situbondo terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sektor industri mampu menyerap tenaga kerja sebesar 45.225 orang dan meningkat pada tahun 2016 menyerap tenaga kerja sebesar 66.515 orang. Bahkan angka TPT di Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan dari 4,21 menjadi 4,00.

**Grafik 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Situbondo (%) Tahun 2013-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Situbondo, 2018

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum disusun tabel capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari urusan berikut ini.



## 2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

### 2.3.1.1 Pendidikan

#### A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berikut data APK di Kabupaten Situbondo:

**Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Kasar:						
1	SD/MI/Paket A	105,14%	105.27%	105.09%	103.87%	95.36%
2	SMP/MTs/Paket B	106.62%	110.51%	110.68%	112.61%	107.68%
3	SMA/SMK/MA/Paket C	74.73%	77.47%	78.99%	85.64%	

Sumber : BPS, KEMDIKBUD, data diolah 2018

Pada tabel di atas capaian kinerja indikator perkembangan kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017 untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Situbondo, perkembangannya cukup bervariasi.

#### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Pada tabel di atas capaian kinerja indikator perkembangan kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 untuk jenjang



pendidikan SD menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. APK tahun 2013-2017 sebesar 105,14%; 105,27%; 105,09%; 103,87% dan 95,36%. Pada tahun 2017 jumlah siswa SD di Kabupaten Situbondo sebanyak 54.485 siswa dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sejumlah 57.139 orang.

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B

Capaian kinerja APK untuk jenjang pendidikan SMP Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 kecenderungan mengalami fluktuatif naik dan turun. Capaian kinerja APK tahun 2013-2017 sebesar 106,62%; 110,51%; 110,68%; 112,61% dan 107,68%. Pada tahun 2017 jumlah siswa SMP di Kabupaten Situbondo sebanyak 33.968 siswa dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 31.544 orang. Pada tahun 2017 capaian kinerja APK untuk jenjang pendidikan SMP mengalami penurunan sebesar 4,93% dibandingkan tahun 2016. Upaya dalam pencapaian kinerja APK untuk jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Situbondo ditunjang oleh Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi Ruang Kelas serta Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Satu Atap yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo, APBD Provinsi Jawa Timur dan dari APBN.

## 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

Capaian kinerja APK untuk jenjang pendidikan SMA Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2016 kecenderungan mengalami kenaikan. Capaian kinerja APK Tahun 2013-2016 sebesar 74,73%; 77,47%; 78,99% dan 85,64%.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Capaian perkembangan kinerja APK untuk jenjang SD didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Berupa kegiatan Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 7 lembaga SD yaitu SDN 5 Sopet, 8 Mimbaan, 1 Curah Jeru, 4 selomukti, 3 Sumberanyar, 2 Alas tengah, 3 Patemon, rehab ruang kelas rusak sedang 8 lembaga, rehab ruang kelas rusak



berat sebanyak 18 lembaga terdiri dari SDN 1 Alas Tengah, 4 Wringinanom, 4 Seletreng, 5 Paowan, 3 Bungatan, 3 Buduan, 1 Kembangsari, 3 Sumberanyar, 3 Seletreng, 2 Sumberejo, 5 Banyuputih, 3 Banyuputih, 1 Trigonco, 2 Sopet, 7 Curah Tatal, 1 Ketowan, 2 Jatisari, 2 Kesambirampak, 1 Landangan, 4 Peleyan, 3 Semiring, 5 Tj.Kamal, 2 Tj.Glugur, 4 Dawauhan, 3 Patokan, 2 Dawuan, 2 Blimbing Second City (wilayah barat dan timur) dan Percepatan SPM Pendidikan Dasar.

Untuk perkembangan kinerja APK jenjang SMP didukung oleh faktor adanya Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi Ruang Kelas serta Pembangunan Unit sekolah baru (USB) SMP Satu Atap.

Sedangkan untuk jenjang SMA capaian perkembangan APK didukung oleh faktor Program Pendidikan menengah dengan 78 kegiatan termasuk pembelian tanah untuk 2 lembaga yaitu SMAN Banyuputih 6.800 M<sup>2</sup> dan SMKN 2 Situbondo luas 7.370 m<sup>2</sup>, pembangunan gedung SMKN 1 Asembagus dan rehab gedung.

## B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Berikut data APM di Kabupaten Situbondo:

**Tabel 2.26 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2017 (%)**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Murni:						
1	SD/MI/Paket A	95.95	96.67	96.25	92.81	84.02
2	SMP/MTs/Paket B	91.58	88.43	88.85	85.08	79.35
3	SMA/SMK/MA/Paket C	62.3	61.71	61.29	63.18	

Sumber : BPS, KEMDIKBUD, data diolah 2018



## 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Pada tabel di atas capaian kinerja indikator perkembangan kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2017 untuk jenjang pendidikan SD menunjukkan kecenderungan fluktuatif naik dan turun. Tahun 2013 APM pada jenjang SD sebesar 95,95%. Dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan sebesar 0,28% dengan nilai APM 2014 sebesar 96,67%. Pada tahun 2015 terjadi penurunan hingga mencapai 0,42% dengan nilai APM 2015 sebesar 96,25%. Penurunan terjadi kembali pada tahun 2016 yakni sebesar 3,44% dengan nilai APM 2016 sebesar 92,81%. Pada tahun 2017 jumlah siswa SD usia 7-12 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 48.006 siswa dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sejumlah 57.139 orang. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan nilai APM dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai APM tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SD sebesar 84.02%. Perkembangan kinerja indikator APM ditingkat SD ditunjang oleh adanya Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Berupa kegiatan Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 7 lembaga SD, rehab ruang kelas rusak sedang 8 lembaga, rehab ruang kelas rusak berat sebanyak 18 lembaga, Second City (wilayah barat dan timur) dan Percepatan SPM Pendidikan Dasar.

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM salah satunya adalah Urusan Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyusun target dan capaian kinerja selama 5 tahun juga telah memperhatikan Standar Pelayanan Minimal yang telah diatur dan dituangkan dalam indikator kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Pada tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2017 untuk jenjang pendidikan SMP cenderung fluktuatif naik dan turun. Selama kurun 2013-2015 APM jenjang pendidikan SMP berturut-turut sebesar 91,58%, 88,43% dan 88,85%. Pada tahun 2016 terjadi penurunan hingga 3,77%, menjadi 85,08%. Pada tahun 2017 jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 25.031 siswa dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 31.544 orang. Capain kinerja APM untuk jenjang pendidikan SMP Tahun 2017





mengalami penurunan sebesar 5,73% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi 79,35%.

### 3. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Pada tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2016 untuk jenjang pendidikan SMA cenderung fluktuatif namun pada tahun 2015 menuju 2016 mengalami kenaikan. Capaian APM jenjang SMA Tahun 2013-2016 berturut-turut sebesar 62,3%, 61,71%, 61,29% dan 63,18%. Sedangkan Perkembangan kinerja indikator APM ditingkat SMA ditunjang dengan Program Pendidikan menengah dengan 78 kegiatan termasuk pembelian tanah untuk 2 lembaga yaitu SMAN Banyuputih dan SMKN 2 Asembagus, pembangunan gedung SMKN 1 Asembagus dan rehap gedung.

### C. Angka Putus Sekolah (APS)

Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu pendidikan SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajib sekolah adalah 7–15 tahun. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak yang wajib dipenuhi dengan kerjasama dari orang tua masyarakat dan pemerintah Namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah. Kemiskinan karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah.

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam menekan jumlah anak yang putus sekolah sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Perkembangan angka putus sekolah untuk setiap jenjang pendidikan dalam tahun 2013-2017 disajikan di tabel berikut:

**Tabel 2.27 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Situbondo Tahun 2013– 2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
	Juml. Putus sekolah SD/MI	88	74	53	65	66
	Juml. Siswa SD/MI	62.888	61.541	60.422	60.887	48.006
	APS SD/MI	0,14%	0,12%	0,09%	0,11%	0,14%
2	SMP/MTs					
	Juml. Putus sekolah SMP/MTs	244	160	179	93	66
	Juml. Siswa SMP/MTs	30.977	32.363	33.718	34.956	25.031
	APS SMP/MTs	0,79%	0,49%	0,53%	0,27%	0,26%



No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
3.	SMA/MA/SMK					
	Juml. Putus sekolah SMA/MA/SMK	64	65	197	100	-
	Juml.Siswa SMA/MA/SMK	23.869	25.666	27.140	29.257	-
	APS SMA/MA/SMK	0,27%	0,25%	0,73%	0,34%	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, BPS Kab. Situbondo 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah anak putus sekolah pada setiap jenjang Pendidikan mengalami penurunan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 persentase angka putus sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat Kabupaten Situbondo sebesar 0,14%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan terjadi penurunan persentase APS sebesar 0,3%. Persentase APS untuk jenjang SD/MI/ sederajat tahun 2016 adalah sebesar 0,11%. Untuk jenjang SD/MI/ sederajat dapat dijelaskan bahwa sebanyak 65 siswa mengalami putus sekolah pada tahun 2016, atau dapat dikatakan naik 34% dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2015, dari 60.422 siswa SD/MI sebanyak 53 siswa atau 0,09% diantaranya putus sekolah. Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus siswa miskin (BKSM) dari APBN. Tahun 2014, dari 61.541 siswa SD/MI sebanyak 74 siswa atau 0,12% diantaranya putus sekolah, pada Tahun 2013 dari 62.888 siswa SD/MI sebanyak 88 siswa atau 0,14% diantaranya putus sekolah.
2. Pada tahun 2017 persentase angka putus sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Situbondo sebesar 0,26%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan terjadi peningkatan persentase APS sebesar 0,1%. Untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 dari 23.640 siswa sebanyak 93 siswa atau 0,27% diantaranya putus sekolah. Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus siswa miskin (BKSM) dari APBN. Pada tahun 2014 dari 32.363 siswa sebanyak 160 siswa atau 0,49% diantaranya putus sekolah, Pada tahun 2013 dari 30.977 siswa SMP/MTs sebanyak 244 siswa atau 0,79% diantaranya putus sekolah.
3. Pada tahun 2016 angka putus sekolah untuk jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 100 siswa, berkurang 97 dari tahun 2015, yang mana pada tahun 2015 Untuk jenjang SMA/MA/SMK dari 27.140 siswasebanyak 197 siswa atau 0,73% diantaranya putus sekolah. Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus siswa miskin (BKSM) dari APBN. Tahun 2014 untuk jenjang SMA/MA/SMK dari 25.666siswa sebanyak 65 siswa atau 0,25% diantaranya putus



sekolah, dan pada tahun 2013 untuk jenjang SMA/MA/SMK dari 23.869 siswa sebanyak 64 siswa atau 0,27% diantaranya putus sekolah.

#### **D. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Pada tahun 2012 capaian kinerja mencapai 45,07%, tahun 2013 capaian kinerja naik secara drastis menjadi 109,85%, dan tahun 2014 mencapai 111,05%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 57,57%. Perkembangan APK PAUD di Kabupaten Situbondo ditunjang oleh tingginya partisipasi masyarakat yang terus meningkat disetiap tahun, dan ditunjang dengan dibukanya kelompok PAUD baru yang tersebar diberbagai desa maupun kelurahan, serta adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAUD.

Pada tahun 2017, jumlah siswa PAUD di Kabupaten Situbondo sebanyak 27.539 siswa. Jumlah penduduk usia 4-6 tahun sejumlah 25.891 orang. Berdasarkan hal tersebut maka APK untuk jenjang pendidikan PAUD sebesar 106,37%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 106,37% anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 telah menempuh pendidikan PAUD (PAUD Non Formal, PAUD Formal/TK dan RA) sehingga capaian kinerja indikator APK untuk jenjang pendidikan PAUD sebesar **96,51%**. Ketercapaian tersebut karena didukung salah satunya oleh program PAUD berupa kegiatan Bantuan Operasional PAUD (BOP) yang bersumber dari DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat.

**Tabel 2.28 Presentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	109,85%	111,05%	57,57%	109,91%	110,21%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Tahun 2018



## E. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Kelulusan terkait dengan erat dengan mutu proses pembelajaran. Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap mereka bagus sehingga lulus ujian akhir. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan parallel dengan peningkatan mutu proses pembelajaran.

**Tabel 2.29 Presentase Angka Kelulusan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	100	100	100	100	100
2.	SMP/MTs	99,75	99,97	100	100	100
3.	SMA/MA/SMK	99,94	99,92	99,03	100	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Tahun 2017

### 1. Persentase Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI/Sederajat

Persentase angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 menunjukkan nilai yang stabil yakni sebesar 100%. Pada tahun 2013 dari sejumlah 10192 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 10192 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah. Tahun 2014 dari 9606 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9606 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah. Pada tahun 2016 dari 9848 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9848 siswa atau 100% lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 98,30%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SD/MI/ sederajat dikalikan 100% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,72% (termasuk kategori sangat berhasil). Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus siswa miskin (BKSM) dari APBN. Pada tahun 2017 dari 9.429 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9.429 siswa atau 100% seluruhnya lulus sekolah. Pencapaian tersebut didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

### 2. Persentase Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SMP/MTs/Sederajat

Pada tahun 2013 dari sejumlah 9044 siswa peserta ujian nasional sebanyak 9021 siswa atau 99,75% diantaranya lulus sekolah. Tahun 2014 dari 9056 siswa peserta ujian nasional sebanyak 9059 siswa atau 99,97% diantaranya lulus



sekolah. Pada tahun 2016 untuk jenjang SMP/MTs dari 9853 siswa peserta ujian nasional sebanyak 9853 siswa atau 100,00% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 99,13%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SMP/MTs/ sederajat dikalikan 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100,87% (termasuk kategori sangat berhasil). Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus siswa miskin (BKSM) dari APBN. Tahun 2017 dari 10.046 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 10.046 siswa atau 100% seluruhnya lulus sekolah. Pencapaian tersebut didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar (PIP).

#### F. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

**Tabel 2.30 Harapan lama Sekolah Metode Baru Kabupaten Situbondo 2012 – 2017**

Tahun		Harapan Lama Sekolah
1	2012	12.5
2	2013	12.9
3	2014	12.97
4	2015	12.98
5	2016	12.99
6	2017	13

*Sumber : BPS Kabupaten Situbondo tahun 2018*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Situbondo semakin tahun semakin meningkat yang mengindikasikan bahwa pendidikan di Kabupaten Situbondo semakin baik. Dengan HLS yang semakin meningkat setiap tahun maka kualitas Sumber daya Manusia juga semakin baik dan akan dapat mengembangkan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## G. Angka Melanjutkan

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah angka Melanjutkan sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Perkembangan angka melanjutkan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA dalam tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.31 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2013-2017**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	SD/MI ke SMP/MTs	107.03%	115,14%	118,19%	100%	100%
2	SMP/MTsKe SMA/MA/SMK	99.07%	105,40%	102,81%	100%	100%

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Tahun 2017*

### 2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang Kesehatan, sehingga Kesehatan merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan masa depan masyarakat, harapan bangsa dan negara.

Adapun capaian Indikator Kinerja Daerah penyelenggaraan urusan Kesehatan sebagaimana berikut:

## A. Angka Kematian Bayi

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tentu diperlukan upaya pembangunan sistem pelayanan



kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut data angka kematian bayi di Kabupaten Situbondo dari tahun 2013-2017:

**Tabel 2.32 Angka Kematian Bayi Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kematian Bayi	48,92	48,76	48,62	48,47	53,84
2.	Angka Kematian Bayi / 1.000 KH	15	13	11	12	16

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 angka kematian bayi di Kabupaten Situbondo selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Di Tahun 2013 angka kematian bayi mencapai 48,92% dari bayi yang ada. Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 48,76% dari total bayi. Di tahun 2015 angka kematian bayi mengalami penurunan kembali menjadi 48,62%, dan 2016 menurun kembali menjadi 48,47%. Namun, pada tahun 2017 angka kematian bayi mengalami peningkatan sebesar 53,84% meskipun demikian peningkatan ini masih dibawah angka kematian bayi Provinsi.

## B. Angka kelangsungan hidup bayi

Data kematian bayi yang terdapat pada suatu komunitas dapat terjadi di rumah, rumah bidan dan di rumah sakit. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB.

Capaian kinerja penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2012-2016 Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Tahun 2012 capaian kinerja dapat menekan angka kematian bayi/balita sebesar 49,48, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 48,92, tahun 2014 mengalami menurun kembali menjadi 48,76, tahun 2015 menurun kembali menjadi 48,62. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,15 menjadi 48,47. Meski demikian AKB Kabupaten Situbondo ini masih dibawah AKB Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 yakni sebesar 25,50; 25,00; 24,50; 24,00 dan 23,60. Angka Kematian Bayi sangat dipengaruhi oleh Kualitas pelayanan penanganan Komplikasi Neonatal yang ditangani, Pelayanan Kunjungan Neonatal dan Pelayanan Bayi Paripurna.

Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2013-2015 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai AKB tahun 2013 yakni sebesar 15/1.000 KH; AKB tahun 2014 yakni sebesar 13/1.000 KH dan AKB tahun





2015 sebesar 11/1.000 KH. Namun penurunan AKB pada 3 tahun tersebut berbeda dengan tahun berikutnya. AKB pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 12/1.000 KH dari 8.961 Kelahiran Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, AKB mengalami peningkatan yang signifikan kembali menjadi 16/1.000 KH dari 9.058 Kelahiran Hidup (KH). Meski demikian AKB Kabupaten Situbondo ini masih berada di bawah AKB Provinsi dan Nasional yakni sebesar 24/1.000 KH.

### C. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.

Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah terpencil atau sangat terpencil. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan.

Capaian kinerja penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2013-2017 Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Tahun 2013 capaian kinerja dapat menekan angka kematian ibu sebesar 192,00%, tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 185,00%, tahun 2015 menurun kembali menjadi 137,78% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 132,00%. Sedangkan pada tahun 2017, AKI mengalami penurunan yang signifikan kembali menjadi 126/100.000 KH.

**Tabel 2.33 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2013-2017**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Angka kematian Ibu (AKI)	192	185	138	132	126

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Situbondo, Tahun 2017*



#### D. IKM Pelayanan Kesehatan

Hasil survei kepuasan masyarakat di 17 Puskesmas pada tahun 2017 adalah 76,88%. Target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 77%, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Situbondo belum mencapai target. Terdapat 9 puskesmas mencapai target dan 8 puskesmas belum mencapai target IKM pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.34 Perkembangan IKM Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2017**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	IKM Pelayanan Kesehatan	B 75	B -74	B -77

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Situbondo, Tahun 2017

#### E. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel 2.35 Angka Harapan Hidup Metode Baru Kabupaten Situbondo 2012 – 2017**

Tahun		Harapan Lama Sekolah
1	2012	67.93
2	2013	68.03
3	2014	68.08
4	2015	68.28
5	2016	68.41
6	2017	68.53

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo tahun 2018

Perkembangan Angka Harapan Hidup semakin tahun semakin meningkat, walaupun masih di bawah provinsi Jawa Timur dan nasional, namun hal ini menunjukkan bahwa program kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah berjalan kearah yang benar. Program rumah pemulihan gizi telah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Situbondo sehingga juga menyumbang naiknya angka harapan hidup.



### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, dalam upaya menumbuhkan daerah-daerah yang masih tertinggal, serta pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan derajat hidup masyarakat secara berkeadilan.

#### A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Salah satu standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah penyediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik. Guna memenuhi SPM dimaksud, Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah.

Di Kab. Situbondo tahun 2012 sampai pada tahun 2016 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik selalu mengalami peningkatan, tahun 2012 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 66,81%, tahun 2013 meningkat lagi menjadi 74,66% dan pada tahun 2014 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,24%. Serta pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan 80,24%. Pada tahun 2016 panjang jalan yang mengalami perbaikan sebesar 79,51%, dengan volume target 25 km dan realisasi 50,15 km dari panjang total keseluruhan jalan kabupaten 1.043,934 km. di tahun 2017 jalan kabupaten yang dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 7,34 km atau jalan di kabupaten dalam kondisi baik sebesar 77,86% dari total keseluruhan jalan kabupaten kabupaten sebagaimana Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/337/P/004.2/2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten Situbondo sebesar 1.043,934 km. Data series capaian panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Situbondo, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 2.36 Data Capaian Panjang Jalan Kondisi Baik**

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan Kondisi Baik	66,81%	74,66%	80,24%	80,24%	79,51%	77,86%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Situbondo, Tahun 2017

#### B. Drainase dalam kondisi baik

Salah satu upaya untuk menjaga dan mempertahankan kondisi perkerasan jalan, umur teknis dan fungsi jalan adalah menjaga badan jalan dari genangan air. Oleh



karena itu, salah satu pendukung jalan yang harus ada adalah saluran drainase jalan yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan dari badan jalan.

Panjang drainase 1,97 km dalam kondisi baik tahun 2015 realisasi sebesar 594,8 meter atau 0,59 km dari panjang total keseluruhan drainase 1,97 km. Namun pada tahun 2016 mengalami perbaikan dimana panjang saluran jaringan drainase dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar 55,38% atau 11,49 km dari panjang total keseluruhan saluran jaringan drainase kabupaten 1.043,934 km. Di tahun 2017 saluran drainase di Kabupaten Situbondo mengalami perbaikan lagi sebesar 12.039 km dari total seluruh drainase sebesar 1.043,934 km.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Daerah urusan Pekerjaan Umum, sebagaimana berikut:

**Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	69,72%	70,50%
2	Indeks Kinerja Irigasi	28,54%	28,95%
3	Persentase Rumah Tangga yang terlayani infrastruktur dasar (jalan lingkungan, air/spam)	57,05%	57,54%
4	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2017*

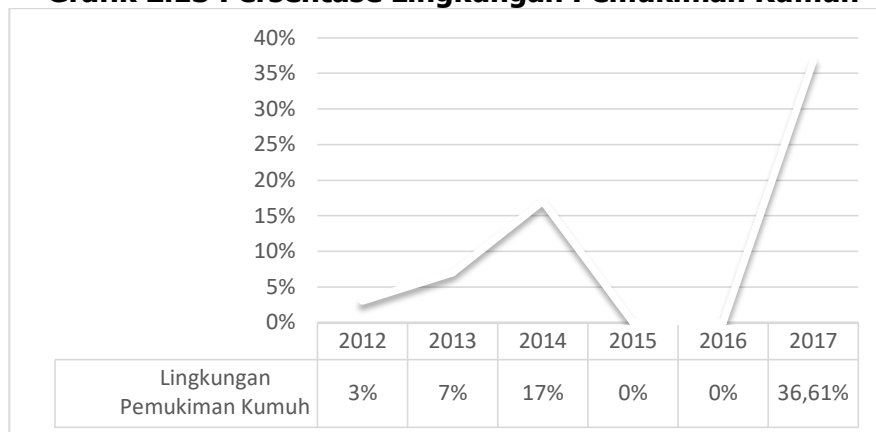
#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas yang menangani Urusan Perumahan di Kabupaten Situbondo. Urusan Perumahan mencakup penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, pemenuhan air bersih khususnya untuk daerah rawan air, jalan lingkungan, sistem drainase dan pengolahan limbah.

Lingkungan permukiman kumuh di Kab.Situbondo dari tahun 2012 sampai 2014 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2012 lingkungan permukiman kumuh sebesar 3%, tahun 2013 meningkat menjadi 7%, dan tahun 2014 lingkungan permukiman kumuh mengalami peningkatan kembali yang cukup tinggi menjadi sebesar 17%.



**Grafik 2.13 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh**



*Sumber :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2017*

Pada tahun 2015 Kegiatan ini tidak terealisasi karena penentuan kawasan kumuh yang ada diKabupaten Situbondo baru ditetapkan dengan SK Bupati dan barudianggarkan pada program/kegiatan pada tahun anggaran 2016. Di tahun 2016Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak melaksanakan secara khusus program terkait perumahan. Namun program yang terkait dengan perumahan telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya guna mencapai sasaran pembangunan perumahan dan permukiman. Di tahun 2017 Persentase Perumahan dan Permukiman yang Lingkungannya Sehat di Kabupaten Situbondo sebesar 36,61%.

Adapun capaian Indikator Kinerja Daerah urusan perumahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.38 Rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2017**

NO.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat miskin	32%	32%	35.80%
2.	Prosentase penurunan kawasan permukiman kumuh		100%	80%

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2017*

### **2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Adapun hasil capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.39 Penegakan Peraturan Daerah, Rasio Linmas, dan Prosentase Tingkat Resptime Kabupaten Situbondo tahun 2016-2017**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%	100%
2	Rasio Linmas	0.02	0.04
3	Prosentase Tingkat Resptime	80%	86%

*Sumber : Satuan Polisi dan Pamong Praja, dan LKPJ 2017*

### 2.3.1.6 Sosial

Pembangunan urusan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi berkejahteraan sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Situbondo diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan.

Selain itu pembangunan urusan sosial juga diarahkan untuk mensikapi bencana yang kemungkinan terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif dan penanganan selama bencana serta pasca bencana yang terjadi.

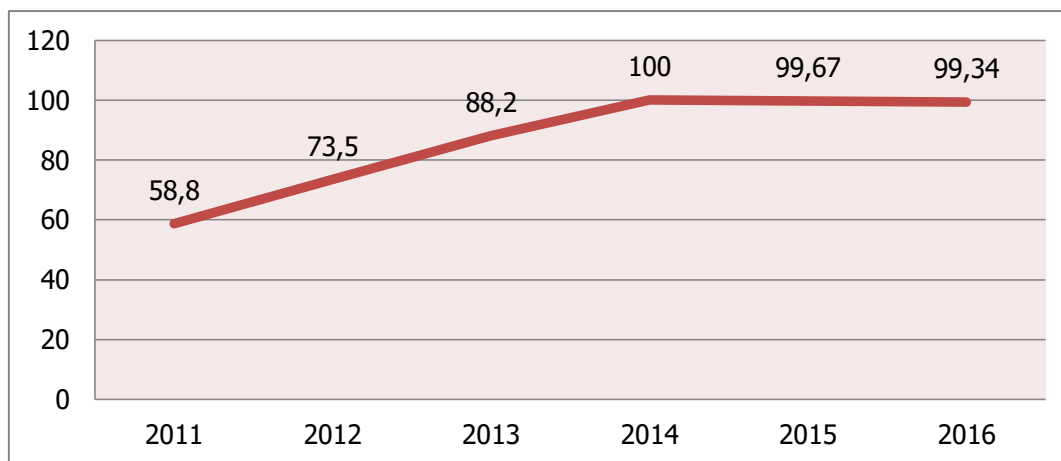
#### **A. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi**

Salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Sosial dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi masyarakatnya yang tergolong memiliki keterbatasan yakni dengan menyediakan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten. Panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yaitu Panti Sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang terdaftar pada database Dinas Sosial. Perkembangan kinerja persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan



kesejahteraan sosial di Kabupaten Situbondo pada tahun 2011-2016 dapat tergambar dalam grafik berikut:

**Grafik 2.14**  
**Perkembangan Kinerja Persentase (%) Panti Sosial Skala Kabupaten yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2011-2016**



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, data diolah 2017

Pada grafik Perkembangan kinerja persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten Situbondo pada tahun 2011-2016 menunjukkan tren yang positif, yakni selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya rata-rata sebesar 14%. Pada Tahun 2011 realisasi sebesar 58,8%, tahun 2012 meningkat menjadi 73,5%, tahun 2013 meningkat menjadi 88,2%, dan pada tahun 2014 peningkatan menjadi 100% dan pada tahun 2015 turun kembali di angka 99,67%. Pada tahun 2016 sebesar 99,34%. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Kabupaten Situbondo telah melakukan koordinasi secara intensif dan baik kepada pemilik panti sosial yang ada di Kabupaten Situbondo.

#### **B. PMKS yg memperoleh bantuan sosial**

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah konsisten dalam menanggulangi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2013-2017. Hal ini dapat terlihat dari capaian indikator PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk penumbuhan dasar selama tahun 2013-2017. Artinya Pemerintah Kabupaten telah melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada setiap tahunnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Pemerintah





bertanggung jawab untuk memberikan dan menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk dalam hal ini adalah PMKS di Kabupaten Situbondo. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2013-2017 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong dalam PMKS yakni dengan memberikan bantuan sosial untuk penumbuhan dasar.

**Tabel 2.40 Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 – 2017**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS	180.385	180.385	180.385	180.385	1.200
2	Jumlah Penduduk	660.760	660.760	666.013	673.282	676.703
3	Rasio PMKS	27,29	27,66	27,08	26,79	0.178

Sumber: Dinas Sosial Kab. Situbondo, Tahun 2017

**Tabel 2.41 Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penanganan PMKS	3.083 orang	2.361 orang	2.107 orang	800 orang	1.200 orang
2	Jumlah PMKS	180.385 orang	180.385 orang	180.385 orang	180.385 orang	48.386 orang
3	Rasio penanganan PMKS	1,70%	1,11%	0,78%	0,44%	2,48%
4	Persentase Penurunan PMKS				0,98	0,99
5	pemenuhan kebutuhan dasar				1,6%	2,43%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Situbondo, Tahun 2017

## 2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

Upaya perluasan lapangan kerja perlu dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk melaksanakan amanat UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja.



**Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Prosentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	96,00%	96,50%
2	Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	81,00%	82,00%
3	Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	99,00%	99,10%

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja kab. Situbondo, 2017*

### **2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan yang sangat penting. Sasaran program adalah perempuan dan anak yang rentan terhadap tindakan pidana kekerasan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak melalui upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan sosialisasi serta advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang mendukung yaitu : Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, orientasi UU tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta relawan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dan hasilnya adalah terpecahkannya dan terselesaikannya beberapa permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Adapun capaian kinerja daerah urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,07	67,25
2	Persentase Kecamatan Layak Anak	20%	40%
3	Persentase korban kasus KDRT, non KDRT dan trafiking yang tertangani	100%	100%

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2017*

### **2.3.2.3 Pangan**

Ketahanan Pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab I pasal 1 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya panganyang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta



tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,merata,dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,dan Ketahanan Pangan. Hal ini berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai tingkat perorangan, Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, maka untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar indikator kinerja perlu mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

**Tabel 2.44 Ketahanan Pangan Tahun 2017**

No	Indikator	Realisasi
1.	Jumlah ketersediaan Energi	3998,78/kkl /kapita/ hr
2.	Jumlah ketersediaan protein	155,69 gr/kapita/hr
3.	Persentase desa yang mempunyai cadangan pangan masyarakat	23,08 %
4.	Prosentase koefisien keragaman harga bahan pangan masyarakat	13,54 %
5.	Persentase Keragaman Konsumsi Pangan	84 %

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2017*

#### 2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Pembangunan Perumahan yang sedang berada pada tren menaik dapat dikatakan sebagai keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Situbondo. Hal ini berarti investor sudah percaya terhadap iklim investasi. Tetapi di sisi lain, ada banyak persoalan yang masih harus kita perhatikan sebagai efek dari pembangunan perumahan tersebut. Salah satunya adalah alih fungsi lahan, dari yang semula lahan pertanian maupun pekarangan menjadi perumahan, yaitu arus ada lahan pertanian pengganti. Hal lain yang harus pula mendapat perhatian adalah kepedulian dari pihak pengembang untuk tetap dapat memperhatikan lingkungan, atau dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan harus tetap berwawasan lingkungan.

Kabupaten Situbondo memiliki indeks Rawan Bencana Banjir termasuk kelas tinggi (Peringkat 9 Nasional), indeks rawan bencana tanah longsor dalam kelas sedang (Peringkat 161 Nasional), Indeks rawan bencana kekeringan dalam kategori sedang (Peringkat 198 Nasional) dan Indeks Rawan Bencana Angin Topan dalam Kategori Tinggi (Peringkat 19 Nasional).



1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target Indikator Tujuan yang menjadi ukuran kinerja OPD pada Dinas Lingkungan Hidup dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dibandingkan dengan target dan capaian Pusat dan Propinsi hingga saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.45 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pusat	62%	62,96%	65%	66,19%	67%		68,5%		69,5%		70%	
Jawa Timur	66%	66,81%	66,5%	66,29%	67%		68,5%		69,5%		70%	
Situbondo	71%	71,39%	71,5%	71,73%	72%		72,25%		72,50%		72,75%	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Sasaran yang menjadi ukuran kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indicator sasaran seperti dalam tabel 2.45 berikut:

**Tabel 2.46 Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup**

Indikator Sasaran	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air	55,50%	51,05%	56%	68,33%	68,50%		68,75%		69%		69,25%	
Indeks Kualitas Udara	91,50%	03,89%	92%	77,71%	78%		78,25%		78,50%		78,75%	
Indeks Kualitas Tutupan lahan	68,30%	69,78%	68,60%	69,80%	70%		70,25%		70,50%		70,75%	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Salah satu langkah nyata dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Situbondo dalam melakukan upaya pelestarian dan penambahan ruang terbuka hijau di Kabupaten Situbondo yang merupakan Indeks Tutupan vegetasi sebagai perbandingan langsung antara luas tutupan vegetasi dengan luas wilayah administrative Kabupaten / Kota.



Tahun 2017 Capaian tutupan vegetasi adalah baik, yaitu sebesar 101,75% dari target 68,60% terealisasi 69,80%. Hal ini didapat karena adanya perhatian lebih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo bersama Dinas/Instansi terkait maupun Stake Holder lingkungan yang ada untuk menambah luasan tutupan vegetasi yang ada di Kabupaten Situbondo.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian indikator tersebut adalah:

- a) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (Pengadaan Pohon Penghijauan).

Adapun jumlah pohon yang ditanam adalah sebanyak 173 batang, Dengan jarak tanam 10 meter, jadi luasan yang di tanam adalah  $173 \text{ btg} \times 10 \text{ m}^2 = 1.730 \text{ m}^2 = \mathbf{0,173 \text{ ha}}$ .

Sedangkan Jenis pohon yang ditanam adalah:

- 30 batang pohon Pulai;
- 65 batang pohon Sepatu Dea;
- 35 batang pohon Tabebuia Rosea;
- 35 batang pohon Bungur;
- 8 batang pohon Kurma.

- b) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (Penghijauan Kota)

Adapun jumlah pohon yang ditanam adalah sebanyak 300 batang, Dengan jarak tanam 10 meter, jadi luasan yang di tanam adalah  $300 \text{ btg} \times 10 \text{ m}^2 = 3.000 \text{ m}^2 = \mathbf{0,3 \text{ ha}}$ .

Sedangkan Jenis pohon yang ditanam adalah:

- 20 batang pohon Pulai;
- 155 batang pohon Sepatu Dea;
- 75 batang pohon Tabebuia Rosea;
- 50 batang pohon Bungur.

- c) Kegiatan Pengadaan Pohon Penghijauan (Pengadaan Pohon Penghijauan Second City Besuki)

Adapun jumlah pohon yang ditanam adalah sebanyak 240 batang, Dengan jarak tanam 10 meter, jadi luasan yang di tanam adalah  $240 \text{ btg} \times 10 \text{ m}^2 = 2.400 \text{ m}^2 = \mathbf{0,24 \text{ Ha}}$ .

Sedangkan Jenis pohon yang ditanam adalah:

- 20 batang pohon Pulai;
- 100 batang pohon Sepatu Dea;



- 60 batang pohon *Tabebuia Rosea*;
- 60 batang pohon Bungur.

d) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (Pengadaan Bibit Mangrove)

Adapun bibit yang ditanam adalah Bibit Mangrove sejumlah 9.000 batang jenis bibit *Rhizophora*, dengan jarak tanam  $2 \times 2 \text{ M} = 4 \text{ M}^2$ . jadi luasan yang ditanam adalah  $9.000 \times 4 \text{ M}^2 = 36.000 \text{ M}^2 = \mathbf{3,6Ha}$ .

Pemerintah Kabupaten telah menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau berupa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Hingga saat ini rekapitulasi Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Situbondo dituangkan dalam Tabel 2.47 berikut ini.

**Tabel 2.47 Rekapitulasi Luasan Ruang Terbuka Hijau**

No	Nama RTH	Jenis RTH	Luas RTH (M2)
1	Alun Alun	Taman Kota	35,000
2	Taman PKK	Taman Kota	10,000
3	Taman Sucipto	Taman Kota	56,000
4	Taman Pancing	Taman Kota	27,000
5	Taman Lanceng	Taman Kota	45,000
6	Taman Trotoar	Lainnya	105,000
7	Taman Bantaran Sungai	Lainnya	165,000
8	Taman Tirtoyoso	Taman Kota	5,000
9	Taman Seroja	Taman Kota	25,000
10	Taman Panji Permai	Lainnya	75,000
11	Taman Panji Mulia	Lainnya	40,000
12	Taman Ayuban	Lainnya	40,000
13	Taman Bumi Ayu	Lainnya	35,000
14	Taman Karangpolo	Lainnya	45,000
15	Taman Baiti Jannati	Lainnya	48,000
16	Taman Istana Mutiara	Lainnya	50,000
17	RTH Pertokoan Mimbaan	Lainnya	55,000
18	RTH Kelurahan Patokan	Lainnya	750,000
19	RTH Kelurahan Dawuhan	Lainnya	650,000



No	Nama RTH	Jenis RTH	Luas RTH (M2)
20	RTH Kelurahan Mimbaan	Lainnya	980,000
21	RTH Desa Ardirejo	Lainnya	850,000
22	RTH Desa Talkanddang	Lainnya	1,000,000
23	RTH Desa Olean	Lainnya	1,000,000
24	RTH Kotakan	Lainnya	950,000
25	RTH Kalibagor	Lainnya	1,250,000
26	Hutan Kota Situbondo	Hutan Kota	50,000
<b>Luas RTH</b>			<b>8,341,000</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

## 2. Persentase Pengelolaan sampah

Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini meliputi 6 kecamatan/ 18 Desa/Kelurahan, yakni Kecamatan Situbondo (meliputi Patokan, Kalibagor, Kotakan, Talkandang, Dawuhan), Kecamatan Panarukan (meliputi Sumberkolak, Kilensari, Paowan, Wringinanom), Kecamatan Besuki (meliputi Besuki), Kecamatan Asembagus (meliputi Asembagus, Trigonco, Gudang), Kecamatan Panji (meliputi Mimbaan, Ardirejo, Sliwung, Curah Jeru) serta Kecamatan Kapongan (meliputi Seletreng). Sedangkan diluar wilayah/kawasan tersebut masyarakat melakukan pengelolaan/penanganan sampah secara mandiri dengan cara ditimbun, dibakar atau cara lainnya.

Kecamatan Besuki dan Kecamatan Asembagus yang merupakan kawasan CBD belum terlayani secara optimal dalam pengelolaan persampahan, saat ini kedua kecamatan tersebut harus mengangkut sampah dari TPS ke TPA Sliwung dengan jarak 45 Km sehingga tidak efektif dan tidak efisien dari segi waktu, biaya dan operasional. Dengan latar belakang ini maka pemerintah Kabupaten Situbondo merencanakan pembangunan TPA baru di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Asembagus untuk mempermudah akses layanan pengelolaan persampahan serta guna peningkatan cakupan layanan persampahan di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

Pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Situbondo menggunakan sistem *Controlled Landfill*, Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan, Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Pemrosesan akhir sampah dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk





memproses dan mengembalikan sampah ke lingkungan secara aman. TPA Kabupaten Situbondo beroperasi sejak tahun 2005, namun teknik operasional *controlled landfill* mulai diterapkan pada tahun 2009, Fasilitas yang dimiliki oleh TPA Siliwung antara lain: fasilitas pembuatan kompos, pengolahan lindi (IPL), jembatan timbangsaluran drainase, rumah jaga, alat berat, tempat parkir alat berat, terminal dumping, dan sumur pantau. TPA Siliwung juga telah memiliki instalasi penangkapan gas metan, gas inidapat dipergunakan sebagai sumber energi misalnya untuk memasak dll. Dalam rangka inovasi energy baru, gas metan memiliki potensi untuk bisa menggantikan peran LPG yang notabene persediaan bahan bakar fosil sudah mulai menipis. Inisiatif yang dilakukan SKPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan sampah : dibentuknya dasawisma di setiap kelurahan untuk memilah sampah, dibentuknya THL (Tenaga Harian Lepas) sebagai pesapon jalan, dibentuknya bank sampah, dilakukan penyuluhan-penyuluhan di desa, sekolah-sekolah dan ibu-ibu PKK dan lain-lain.

Hasil studi EHRA 2017 pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Situbondo disajikan pada Gambar 2.11 Cara pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat sebagian besar adalah dibakar sebesar 79,54% sisanya dibuang ke galian tanah namun tidak ditutup dengan tanah, dikumpulkan lalu dibuang ke TPS dan lain-lain. Dari hasil survei tersebut bahwa sebagian besar masyarakat belum menjadi bagian dari pelayanan sampah dan belum melakukan mengelola sampah (konsep 3R) sehingga sampah dapat mencemari tanah, air dan udara (sampah yang dibakar menghasilkan gas dioxin).

**Gambar 2.11**  
**Penanganan sampah rumah tangga**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Praktek pemilahan sampah rumah tangga skala Kabupaten Situbondo, yang telah melakukan pemilahan sampah sebesar 28,2% dan yang belum melakukan



pemilahan sampah sebesar 71,2%. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut ini.

**Gambar 2.12**  
**Perilaku Praktik Pemilahan Sampah Rumah Tangga**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

#### A. Pencemaran air

Indikator Kinerja Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dengan target 100% dan realisasinya juga 100%, sehingga capaian targetnya adalah sebesar 100%. Dari hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan, Pemantauan kualitas air dan evaluasi pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Tahun 2016 disimpulkan bahwa kegiatan/usaha yang telah memenuhi kriteria pencegahan dan pencemaran air sejumlah 10 kegiatan/usaha. Dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran air dilakukan uji laboratorium pada 10 titik pantau kegiatan/usaha yang menjadi prioritas.

Dengan demikian pada Tahun 2015 pencapaian pelayanan dasar pencegahan pencemaran air terpantau 10 kegiatan/usaha 100 % yang mentaati secara administrasi dan teknis. Dari 10 kegiatan usaha tersebut, dalam melaksanakan kegiatannya telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indicator kinerja telah tercapai 100%. Adapun Kegiatan Usaha dimaksud adalah :

- a. Industri ( 5 titik yaitu 4 pabrik gula, 1 pengolahan ikan )
- b. Rumah Sakit ( 2 titik yaitu RS Abdoer Raheem dan RS Elizabeth )
- c. Domestik ( 2 titik yaitu Pondok Pesantren Sabilal Muhtodin dan Pemukiman Mimbaan)
- d. Rumah Makan ( 1 titik yaitu rumah makan di kawasan pasir putih)

Untuk menentukan status mutu air sudah tercemar atau belum harus dilakukan uji laboratorium. Indikator Kinerja ini merupakan gambaran dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dalam hal upaya mengetahui



indeks pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Penentuan indeks pencemaran air dilakukan dengan cara melakukan uji sampling terhadap beberapa Sungai Utama yang ada di Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk mengetahui status mutu airnya. Status mutu air sendiri merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman penentuan status mutu air, Pasal 1 ayat b). Pemerintah Kab. Situbondo dari tahun 2013 sampai 2017 sudah melakukan uji untuk melihat pencemaran status mutu air dengan menggunakan jumlah sampel, data status mutu air lima tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.48 Indeks Pencemaran Air**

No	Tahun	Jumlah Sampel	Indkes Pencemaran Air
1	2013	24 Sungai	51,67 %
2	2014	19 Sungai	53,16 %
3	2015	15 Sungai	51,33 %
4	2016	19 Sungai	51,05 %
5	2017	14 Sungai	68,33 %

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo 2018*

Dari data di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dalam hal pencapaian Indeks Pencemaran Air adalah sangat baik, hal ini terindikasi dari status mutu air pada sungai utama yang ada di Kabupaten Situbondo yang masih berada di bawah ambang batas status mutu air. Sangat berhasilnya Sangat berhasilnya pencapaian indikator tersebut mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup baik berupa kegiatan pembangunan fisik maupun sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat utamanya yang berada di sekitar bantaran sungai telah berhasil. Kesadaran warga masyarakat di sekitar wilayah sempadan sungai terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar terutama sungai sudah sangat baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran sungai. Di tahun 2017 nilai status mutu air yang statusnya memenuhi adalah 64,17% dan tercemar ringan 4,17%, jadi mutu air yang status memenuhi sebesar 68,33%, dan yang tercemar di Kabupaten Situbondo tahun 2017 sebesar 30,67%.

## **B. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk**

Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk kali 100%. Rasio TPS per satuan



penduduk untuk lima tahun terakhir di Kabupaten Situbondo ditampilkan dalam data berikut ini:

**Tabel 2.49 Rasio TPS per satuan penduduk**

No	Tahun	Rasio TPS per satuan penduduk (%)
1	2013	1 : 2111
2	2014	1 : 2017
3	2015	1 : 1932
4	2016	1 : 1826
5	2017	1 : 2.715

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo 2018

Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 0,002m<sup>3</sup>/penduduk, dan pada tahun 2014 tempat pembuangan sampah per satuan penduduk sebesar 0m<sup>3</sup>/penduduk, hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Kab. Situbondo yang semakin meningkat tetapi jumlah TPS tidak bertambah luas. Di tahun 2017 rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah 76.91% atau 0,769, jadi setiap 1 penduduk berhak atas TPS 0,769 m<sup>3</sup>. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** sebagai indikator capaian kinerja pemerintah urusan lingkungan hidup pada tahun 2016 mencapai **71** dan meningkat pada tahun 2017 sebesar **71,5**.

### 2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang cukup substansial. Dewasa ini telah banyak memunculkan berbagai masalah lain yang cukup mendasar. Pada awalnya pembangunan kependudukan hanya tertuju pada bagaimana menekan angka kelahiran serendah mungkin. Namun kemudian sudah tidak relevan lagi karena masalah yang dihadapi semakin luas dan kompleks.

Upaya dan langkah strategis untuk memaksimalkan pelayanan pencatatan sipil melalui penertiban akta pencatatan sipil, pengumpulan dan penyajian data hasil pencatatan sipil, pendokumentasian akta pencatatan sipil, serta optimalisasi penyempurnaan sistem penyelenggaraan pencatatan sipil terus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Padadardanya Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tolak ukur dukungan yaitu berupa sarana dan prasarana perkantoran akan turut berperan dalam keberhasilan pembangunan bidang kemasayarakatan dan sosial di suatu daerah.

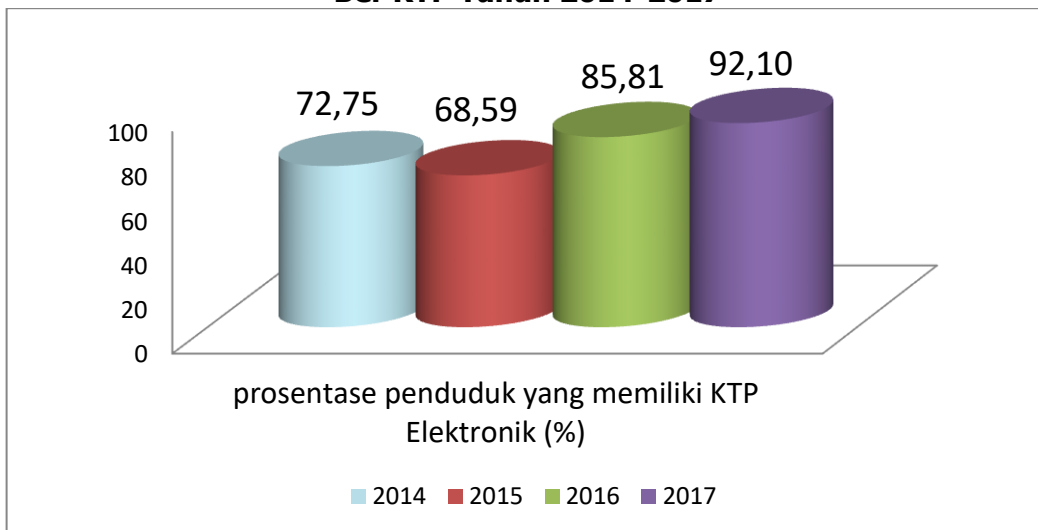
#### A. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Indikator ini menggambarkan presentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), yang pengukurannya



didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el dari seluruh wajib KTP-el yang ada. Tahun 2014 prosentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik sebesar 72,75%, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 68,59% dari seluruh penduduk. Tahun 2016 penduduk yang mempunyai KTP elektronik mengalami kenaikan menjadi sebesar 85,81%, dan tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 92,10% dari seluruh penduduk yang berkewajiban mempunyai KTP Elektronik.

**Grafik 2.15**  
**Persentase Penduduk yang Ber-KTP dengan yang Wajib Ber KTP Tahun 2014-2017**



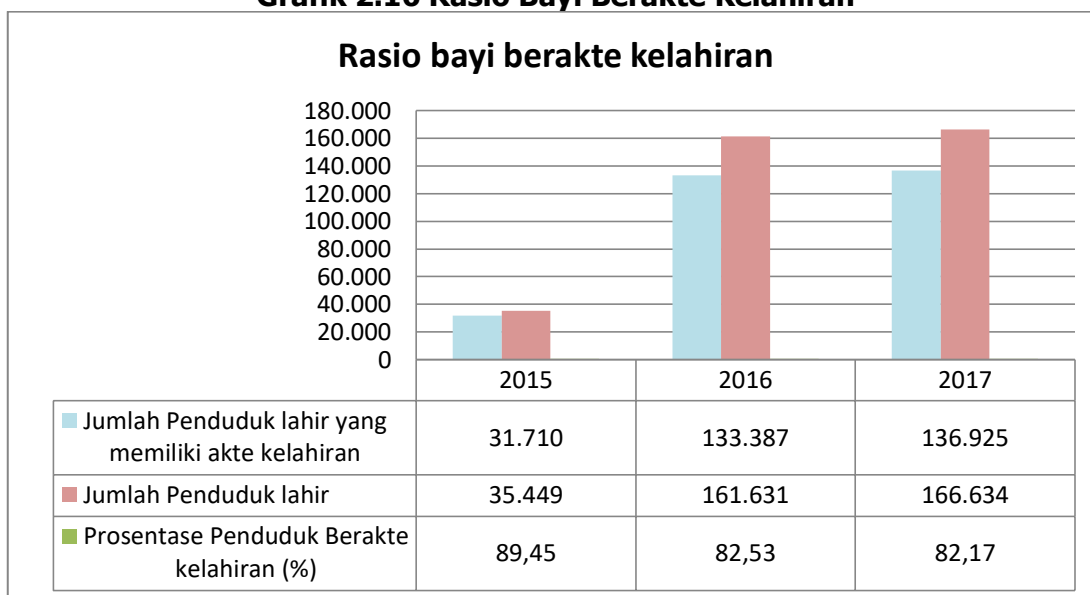
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo, Tahun 2017

## B. Rasio bayi berakte kelahiran

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah kelahiran. Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo terdapat 35.449 jiwa bayi yang lahir, dan 89,45% dari seluruh bayi yang lahir sudah berakte. Tahun 2016 sebesar 82.53 % dari seluruh bayi yang lahir pada tahun 2016 sebesar 161.631 bayi. Tahun 2017 rasio bayi berakte mengalami penurunan dari 2016, di tahun 2017 dari 166.634 jiwa bayi yang lahir, 82,17% sudah berakte.



**Grafik 2.16 Rasio Bayi Berakte Kelahiran**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2017

Adapun capaian kinerja pemerintah urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.50 Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	C -75	C -76
2	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga ( KK )	90	90,8
3	Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)	80	82,4
4	Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	80	82
5	Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	32	39,6

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

### 2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Ditinjau dari segi kewilayahan, desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan



dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Adapun capaian kinerja pemerintah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Desa Maju	12 desa	15 desa
2	Rata – rata Indeks Desa Membangun	0,6193 30%	0,6391 50%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tahun 2018

### 2.3.2.7 Pengendalian Pernduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

Dalam rangka mengatur kelahiran/kehamilan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, telah dilaksanakan pemasangan alat kontrasepsi KB kepada pasangan usia subur ( PUS ), baik itu kepada suami maupun kepada istri (salah satu dalam keluarga) secara umum pasangan usia subur (PUS) telah ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program KB artinya telah menjadi Akseptor KB Aktif tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Adapun capaian kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai 2011 – 2016 yang dilaksanakan di Kab. Situbondo sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Laju Pertumbuhan penduduk					0,53	0,51
2	TFR (Total Fertilitate Reate)					1,84	1,84
3	Cakupan PUS yang Istrinya dibawah usia 20 tahun (3.5%)	%	29,97	41,97	11,70	11,70%	11,20
4	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta	%	105,22	105,22	86,00	73,00%	80,00%





No	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
	KB aktif (65%)						
5	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 5%	%	15,81	19,37	11,09		
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB (70%)	%	111,94	111,94	86,0	84,17%	
5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	%	107,31	107,31	80,9		
6	Ratio Petugas Lapangan Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	%	71,94	71,94	3,09		
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) Petugas di setiap Desa/Kelurahan	%	1	1	1	1	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, data diolah 2016

### 2.3.2.8 Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya. Meningkatnya kebutuhan transportasi sebagai akibat meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi memerlukan kelancaran mobilitas. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.

Untuk mengaktualisasikannya khususnya urusan wajib bidang perhubungan di Kabupaten Situbondo, maka perlu meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau di wilayah Kabupaten Situbondo. Di tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan mencapai 76,58 atau sudah masuk dalam kategori Baik. Terdapat 3 (tiga) pelayanan yang diukur dalam survey kepuasan masyarakat tersebut yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Pelabuhan, dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Pencapaian kinerja sasaran urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.53 Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	IKM Perhubungan	74	76
2	Keselamatan Transportasi	2,60%	2,45%

*Sumber : Dinas perhubungan Kab. Situbondo, Tahun 2017*

### 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program dapat membantu masyarakat dalam menampung informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e - government sampai tingkat daerah. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah serta cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat yang sejahtera dan memiliki daya saing.

Adapun capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2016 – 2017 yang dilaksanakan di Kab. Situbondo sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase aplikasi E-GOV yang terintegrasi	26,24%	50,99%
2	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	79%

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tahun 2017*

### 2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang cukup besar dalam menopang perekonomian sebagai penggerak roda perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Situbondo. Sesuai Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan UKM (Usaha Kecil Menengah) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan urusan Usaha Mikro ada di Kab/Kota. Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro yang lingkupnya kecil dan terfokus serta di dukung dengan kemandirian usaha mampu menjadi pondasi perekonomian kuat daerah. Peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya disegala sektor kegiatan ekonomi dan penciptaan iklim usaha

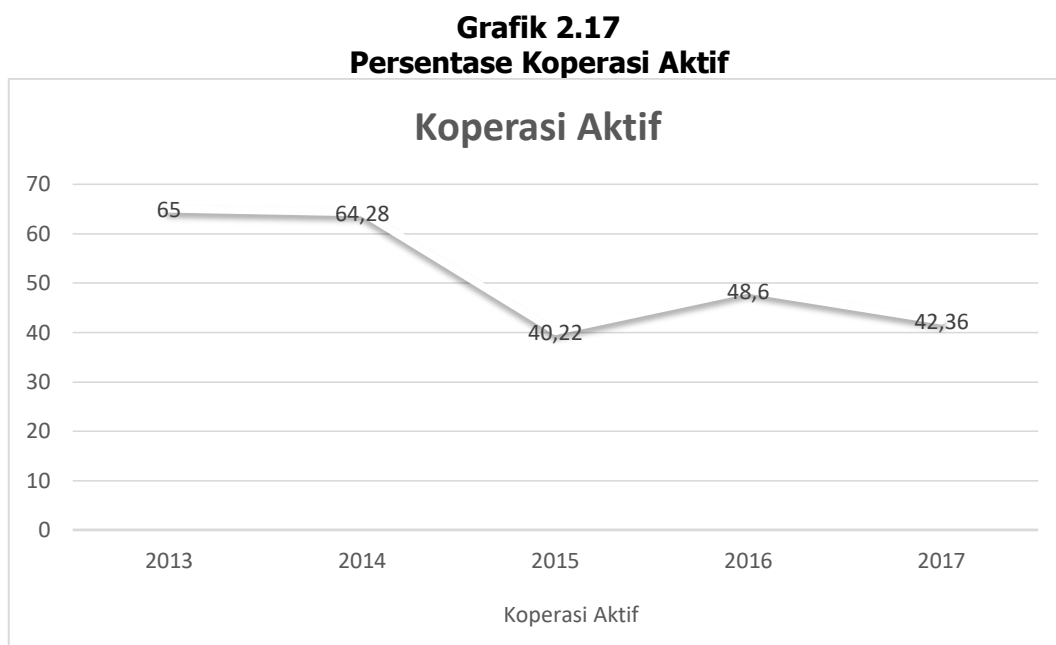


yang kondusif dan dukungan kemudahan untuk memperoleh permodalan. Kerjasama antarkoperasi, dan antara koperasi dengan usaha swasta lainnya sebagai mitrausaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan menguntungkan.

Beberapa indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan wajib koperasi usaha kecil dan menengah antara lain sebagai berikut :

#### A. Persentase koperasi aktif

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi kalau aktif atau masih berjalan mempunyai manfaat dapat membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran. Jumlah koperasi aktif tahun 2013-2017 sebagaimana grafik berikut:



Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kab. Situbondo, Tahun 2017

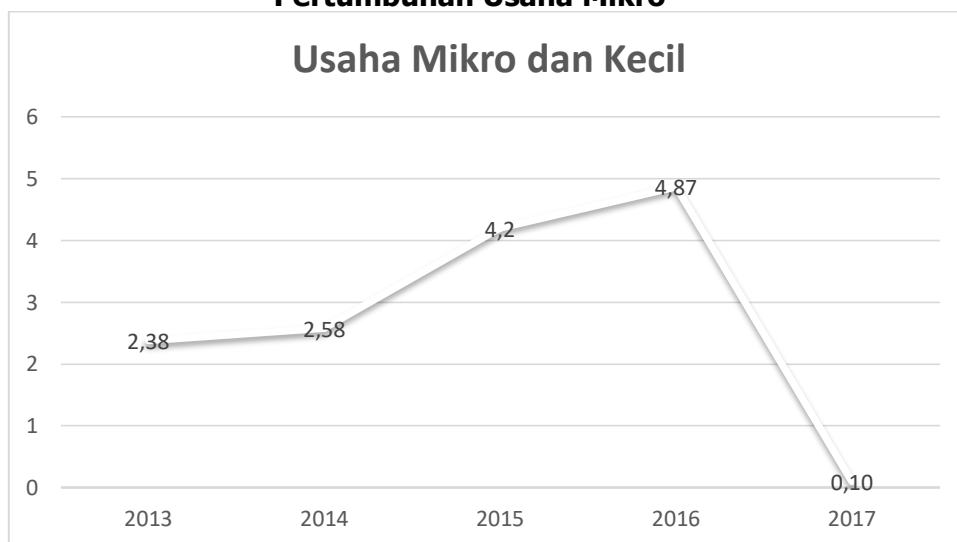
Koperasi aktif setiap tahun dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami naik turun. Tahun 2013 koperasi aktif sebesar 65%, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 64,28%, tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 40,22% atau koperasi yang aktif di tahun 2015 sebanyak 249. dan tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 menjadi sebesar 48,60% atau koperasi yang aktif menjadi 350 koperasi dan menurun kembali di tahun 2017 menjadi 42,36% atau 305 koperasi yang aktif di Kabupaten Situbondo.



## B. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu asset maksimal 50 Juta dan omzet maksimal 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu asset 50 juta - 500 juta dan omzet 300 juta - 2,5 Miliar rupiah. Adanya usaha mikro dan kecil bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah selain itu juga membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Usaha mikro dan kecil di Kab. Situbondo, sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 2.18**  
**Pertumbuhan Usaha Mikro**



*Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kab. Situbondo, Tahun 2017*

Setiap tahun usaha mikro dari 2013-2017 selalu mengalami kenaikan, tahun 2013 naik lagi menjadi 2,38%, dan tahun 2014 naik lagi menjadi sebesar 2,58% dan pada tahun 2015 yakni 4,20%, dan naik kembali 4,87% pada tahun 2016 atau tahun 2016 jumlah usaha mikro sebanyak 57.285. di tahun 2017 usaha mikro mengalami kenaikan kembali sebesar 0,10% atau 59 unit usaha mikro, sehingga di tahun 2017 jumlah usaha mikro di Kabupaten Situbodo sebesar 57.343.

Adapun capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sejahtera sesuai 2013 – 2017 yang dilaksanakan di Kab. Situbondo sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	8,70%	8,70%
2	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,09%	0,10%

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kab. Situbondo, Tahun 2017

### 2.3.2.11 Penanaman Modal

Dalam rangka mengimplementasikan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo menyerahkan Urusan Penanaman Modal Kepada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan maksud:

1. Terwujudnya pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang mudah,cepat, Tepat,akurat, transparandan akuntabel.
2. Terwujudnya hak-hak Penanaman Modal untuk mendapatkan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dibidang Penanaman Modal.

Salah satu indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan wajib penanaman modal yaitu kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Nilai realisasi PMDN dari tahun 2013-2017 setiap tahunnya mengalami naik turun, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.56 Nilai Realisasi PMDN (Milyar) Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Nilai Realiasasi PMDN (Milyard)
1.	2013	670
2.	2014	881
3.	2015	2822
4.	2016	3977
5.	2017	4327

Sumber : Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kab. Situbondo, 2018

Tahun 2013 nilai realisasi PMDN sebesar 670 milyar, dan tahun 2014 nilai realisasi PMDN naik lagi, naik menjadi 881 milyar, dan kenaikan tertinggi pada tahun 2015 yakni 2822 milyar. Tahun 2016 nilai realisasi PMDN naik lagi menjadi



sebesar 3977 milyar atau 3,97 Triliun, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 4327 milyar atau 4,32 Triliun.

Adapun capaian kinerja urusan penanaman modal kabupaten situbondo sesuai 2016 – 2017 yang dilaksanakan di Kab. Situbondo sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	IKM Pelayanan Terpadu	B (75,05)	B (76,61)
2	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	760 M	350 M

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2018

### 2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan kepemudaan dan olahraga antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase pemuda yang berprestasi	n/a	24,00%
2	Persentase prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional, Internasional	n/a	28,57%

Sumber : Dinas Pariwisata, 2017

### 2.3.2.13 Statistik

Urusan Statistik di Kabupaten Situbondo berkaitan dengan pengelolaan data analisis penanggulangan kemiskinan. Analisis penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan wajib statistik antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.59 Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			2013	2014	2015	2016	2017
Buku Angka	"Situbondo Dalam		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



<b>Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Situbondo, 2017

#### 2.3.2.14 Perpustakaan

Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat perlu diarahkan agar dapat membangun masyarakat untuk selalu membaca. Masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi/well-informed, kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Sebagai upaya akselerasi agenda pembangunan untuk mendukung upaya proses reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mengarahkan sektor program kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Adapun capaian kinerja urusan perpustakaan kabupaten situbondo tahun 2016 – 2017 yang dilaksanakan di Kab. Situbondo sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
1	IKM Perpustakaan	B -76	B -78

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Situbondo, Tahun 2017

#### 2.3.2.15 Kearsipan

Arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu organisasi, berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip merupakan memori organisasi, tanpa arsip kita akan mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan dimasa mendatang. Dari semua asset negara yang ada, arsip termasuk asset yang paling berharga, mengingat arsip merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa





dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan berbagai upaya untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan dengan menggiatkan kegiatan kearsipan ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya arsip juga mempunyai peran yang sangat penting, terlebih pada era informasi dilihat dari karakteristik arsip yang khusus, yaitu informasi arsip yang melekat pada fisik arsip asli adalah merupakan yang syah secara hukum.

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan Kearsipan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	55%	64%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Situbondo, Tahun 2017

### 2.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, disamping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata masih banyak masalah dan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran. Bidang Pengembangan Budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat.

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan kebudayaan antara lain sebagai berikut:



**Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah seni dan budaya lokal diakui Tingkat Provinsi dan Nasional	9,60%	9,70%

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Tahun 2017*

### 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan dan kelautan seringkali dipandang sebelah mata sehingga hanya menjadi isu minor saja dalam wacana nasional. Padahal, perikanan dan kelautan memiliki potensi luar biasa meskipun juga memiliki tantangan yang tidak sedikit. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar meliputi pembenihan, budidaya air payau, budidaya laut, penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Kabupaten Situbondo mempunyai 13 Kecamatan yang merupakan Kecamatan berpantai dengan total panjang pantai ± 155 Km. Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat Nelayan, pelaku usaha pembudidaya ikan dan pelaku usaha pengolah hasil perikanan.

#### A. Produksi perikanan

**Tabel 2.63 Hasil Budidaya Perikanan**

Jenis Budidaya	2013	2014	2015	2016	2017
Tangkap	7,870.40 ton	8,354.61 ton	13,373.60 ton	13,589.97 ton	13,831.66 ton
Tambak	3,103.41 ton	4,783.66 ton	6,010.48 ton	7,217.77 ton	8,005.38 ton
Kolam	263.14 ton	289.45 ton	319.14 ton	334.09 ton	347,274 ton
Rumput Laut	298.00 ton	366.70 ton	439.80 ton	90.86 ton	99.11 ton
KJA	18.25 ton	20.26 ton	32.70 ton	56.35 ton	100.43 ton
Benih Air Laut	2,035 ton	2,255 ton	2,510 ton	4,786 ton	7,574,510,200 Ekor
Benih Air Tawar	3,179 ton	3,723 ton	4,111 ton	2,996 ton	3,744,750 Ekor

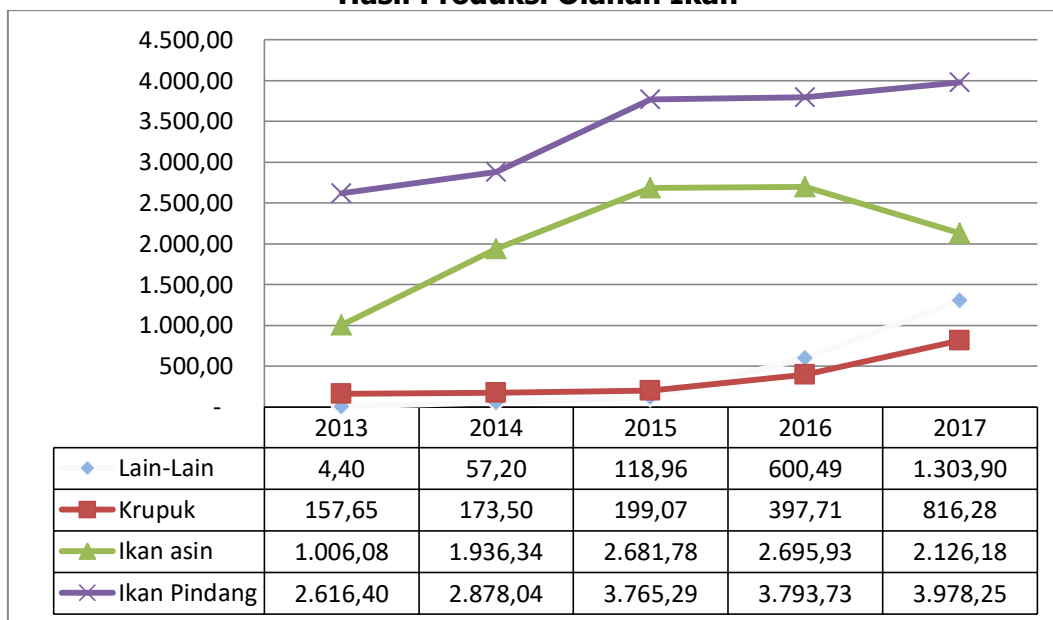
*Sumber: Dinas Perikanan kab. Situbondo, Tahun 2017*

Keberhasilan indikator produksi yang berasal dari budidaya antara lain disebabkan oleh harga yang membaik, harga pakan yang relatif stabil, tersedianya bibit unggul, meningkatnya permintaan pasar, tersedianya lokasi budidaya yang representatif, adanya bantuan Poverty Solution Program (PSP), bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Budidaya,



bantuan hibah Kegiatan Pengadaan Sarana Prsarana Budidaya Perikanan, dan peningkatan sarana prasarana budidaya.

**Grafik 2.19**  
**Hasil Produksi Olahan Ikan**



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Situbondo, Tahun 2017

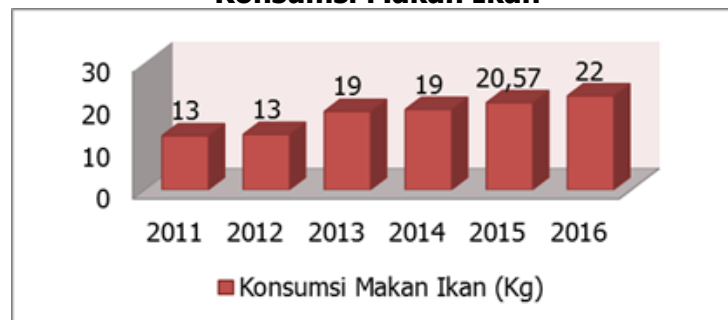
Hasil produksi olahan ikan secara umum mengalami kenaikan, kecuali pada olahan kerupuk, hal ini disebabkan adanya ketersediaan bahan baku yang cukup, permintaan pasar yang cenderung meningkat, adanya penyuluhan kepada POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar), adanya bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP, dan adanya peningkatan permintaan olahan ikan.

## B.Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Kab.Situbondo tidak pernah mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011 dan 2012 konsumsi ikan per kapita sebesar 13kg, tahun 2013 dan 2014 konsumsi ikan perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 19kg per kapita, dan pada tahun 2015 konsumsi ikan meningkat menjadi 20,57 kg per kapita.ada tahun 2016 konsumsi ikan meningkat menjadi 22 kg per kapita.



**Grafik 2.20**  
**Konsumsi Makan Ikan**



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Situbondo, Tahun 2016

Peningkatan konsumsi makan ikan pada tahun 2016 terjadi karena adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Situbondo antara lain dilaksanakannya penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, dilaksanakan kegiatan lomba masak ikan, serta promosi dan kegiatan gemar makan ikan.

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan kelautan dan perikanan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan				4,02%	4,08%
2	Produksi Perikanan Tangkap	7.780,40 ton	8.354,61 ton	13.374,60 ton	13.575,22 ton	13.778,85 ton
3	Produksi perikanan Budidaya	3682,79 ton	5460,13 ton	6802,12 ton	7.482,33 ton	8.230,57 ton
4	Produksi olahan	3780,13 ton	4987,88 ton	6646,14 ton	7.411,61 ton	8.185,77 ton
5	Nilai Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan (Milyar Rupiah)				929,92	1.069,21

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Situbondo, Tahun 2017

### 2.3.3.2 Pariwisata

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas, pemasaran obyek pariwisata, kunjungan wisata, pelayanan pariwisata dan kelestarian obyek pariwisata maka pembangunan kepariwisataan memerlukan koordinasi, komunikasi dan networking yang kuat sementara kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Situbondo yang baru mengenal pariwisata diperlukan kehati-hatian di dalam membangun brand and image daerah sebagai daerah pariwisata.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kab. Situbondo selama 2013 sampai 2017 sebagaimana grafik berikut:



**Grafik 2.21**  
**Jumlah kunjungan Wisata**



Sumber: Dinas Pariwisata, Tahun 2017

Tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata di Kab. Situbondo sebanyak 280.166 orang, tahun 2014 meningkat kembali menjadi sebanyak 354.650 orang, namun pada tahun 2015 menurun kembali menjadi 350.161 orang. Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi sebanyak 345.672 orang, dan di tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebanyak 471.840 orang.

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan Pariwisata antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi	8,78%	9,02%
2	Jumlah kunjungan wisatawan	n/a	400.000
3	Lama kunjungan wisatawan	n/a	1,6
4	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	n/a	Rp568.400,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Situbondo, Tahun 2017

### 2.3.3.3 Pertanian

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertanian Berkelanjutan adalah keberhasilan dalam mengelola sumberdaya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pada perkembangan kinerja urusan pertanian tahun 2013-2017 Kabupaten Situbondo, data berdasarkan indikator yang tersaji cukup fluktuatif.



## A. Presentase Kelompok Tani yang Dibina Melalui Penyuluhan

Indikator ini menggambarkan kegiatan pembinaan rutin untuk memenuhi kebutuhan petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha terhadap perkembangan informasi teknologi pertanian yang dilakukan melalui forum penyuluhan pedesaan dan rembug tani tingkat kecamatan. Lokasi di 17kecamatan dengan sasaran kelompok tani. Pelaksanaan pembinaan untuk kelompok tani pada tahun 2015 adalah sebesar 685 kelompok. Berikut adalah capaian (%) indikator.

**Grafik 2.22**  
**Kelompok Tani Yang Dibina Melalui Penyuluhan Tahun 2013-2017**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tahun 2017

## B. Persentase kejadian penyakit menular pada hewan

Selama tahun 2016 situasi penyakit hewan menular di Kabupaten Situbondo cukup terkendali, hal ini ditandai dengan berhasilnya mempertahankan status bebas beberapa penyakit hewan yang strategis dan mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti: Apthae Epizootica (AE/PMK), Rabies, Anthrax, Tuberculosis. Disamping itu juga ditandai dengan semakin rendahnya prevalensi penyakit Avian Influenza (AI), Malignant Chataral Fever (MCF), Septicemia Epizotica (SE/Ngorok), Orf. Bahkan beberapa daerah tidak lagi ditemukan kasus penyakit-penyakit diatas (zero case). Namun beberapa Penyakit Hewan Menular lainnya yang masih berstatus endemis dan mempunyai dampak nilai ekonomi yang cukup tinggi perlu mendapat perhatian yang serius yakni: Penyakit Flu Burung, Helminthiasis, Scabiosis, Bovine Ephemerial Fever (BEF). Di tahun 2017 untuk mencegah berbagai macam penyakit pada hewan, pemerintah Kabupaten Situbondo menyelenggarakan beberapa kegiatan yaitu Penolakan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular termasuk yang Zoonosis dan Eksotik. Sehingga di tahun 2017 kejadian penyakit pada hewan ternak sangat rendah. Berikut data penyakit hewan ternak di 2017:



**Tabel 2.66 Kejadian Penyakit Hewan Tahun 2017**

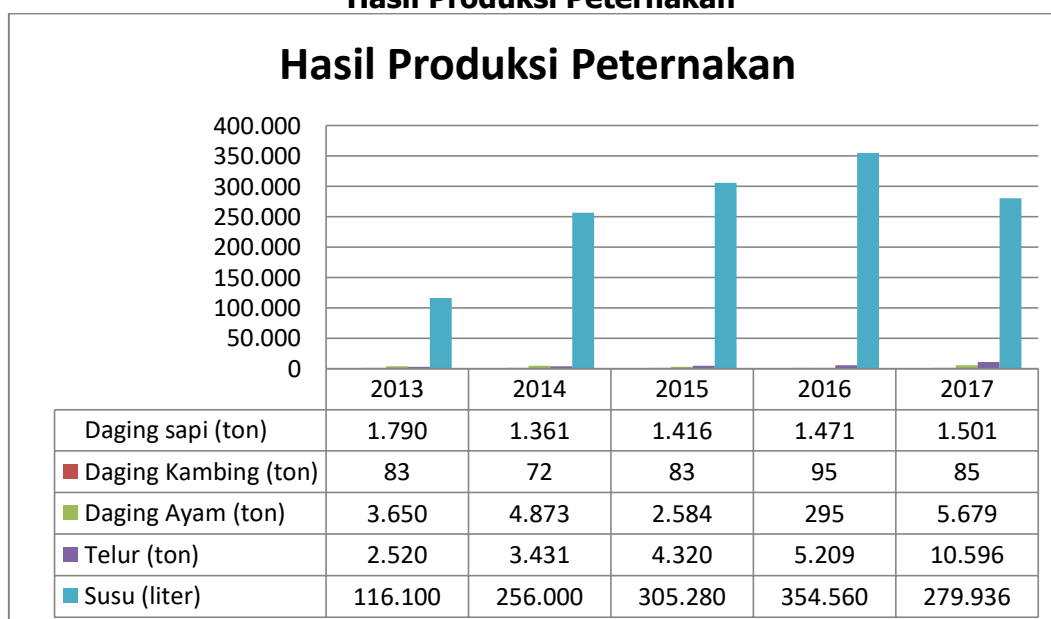
No	Kejadian Penyakit	Realisasi
1.	AI	0,00000%
2.	BEF	1,1%
3.	Scabiosis	0,18%
4.	Helmintiasis	0,11%
5.	Brucella	0,00%
6.	Rabies	0,00%
7.	Anthrax	0,00%

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Situbondo, Tahun 2017

### C. Jumlah Produksi Peternakan

Program Pembangunan Peternakan di Kabupaten Situbondo yang selama ini dilaksanakan secara sistematis telah memberi kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan taraf ekonomi peternak maupun pemenuhan kebutuhan daging yang asuh (aman, sehat, utuh dan halal).

**Grafik 2.23 Hasil Produksi Peternakan**



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2017

Populasi ternak di Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan karena letak geografis Kabupaten Situbondo sangat cocok untuk budidaya ternak. Guna mendukung peningkatan populasi ternak diperlukan suatu manajemen dan pemanfaatan teknologi yang didukung dengan inseminasi buatan, penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas, serta sumber daya manusia yang berkompeten.

### D. Penerapan Teknologi Peternakan

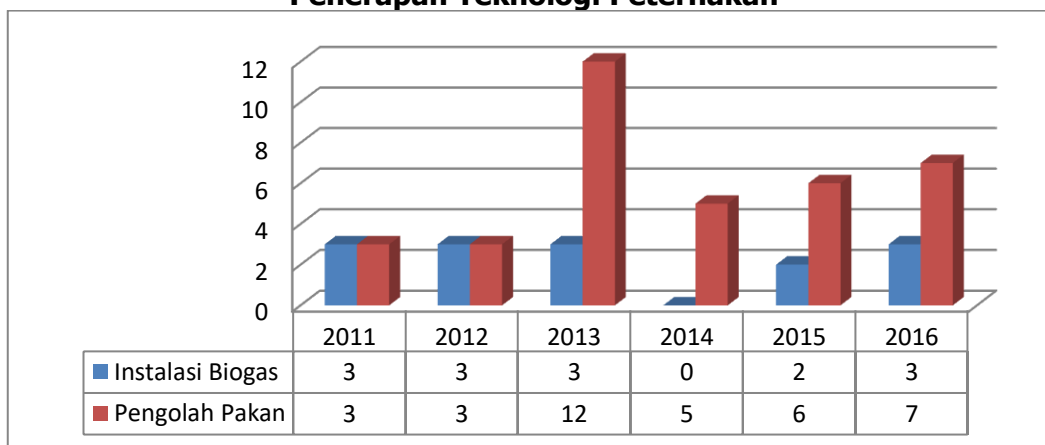
Guna memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan tenaga energi alternatif, Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan





Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik dan pengolahan limbah ternak untuk biogas. Pada tahun 2015 instalasi biogas terealisasi sebanyak 2 unit, sedangkan sarana pengolah pakan UPPO sebanyak 6 unit. Pada tahun 2016 instalasi biogas terealisasi sebanyak 3 unit, sedangkan sarana pengolah pakan UPPO sebanyak 7 unit. Perkembangan kinerja indikator disajikan sebagai berikut.

**Grafik 2.24**  
**Penerapan Teknologi Peternakan**



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kab. Situbondo, Tahun 2017

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan pertanian antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian				2,42%	2,46%
2	Pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan				1,13%	1,40%
	<b>Produksi Tanaman Pangan:</b>					
1	Padi	297.910,50	253.918,06 ton	324.891,06 ton	346.753,63 ton	313.824 ton
2	Jagung	360.394,20	256.626,41 ton	241.068,12 ton	289.931,85 ton	248.467 ton
3	Kacang Tanah	1.584,26	467,00 ton	404,51 ton	504 ton	636 ton
	<b>Produksi Hortikultura :</b>					
1	Cabai Rawit	3.497,00 ton	3.646,00 ton	5.032,1 ton	10.351,80 ton	9.620,40 ton



No .	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
2	Cabai Besar				792,50 ton	791,20 ton
3	Bawang Merah	756,2 ton	1.114,00 ton	1.417,4 ton	2312,6 ton	3.153,90 ton
4	Mangga				224,69 ton	224,92 ton
	<b>Produksi Perkebunan:</b>					
1	Tembakau				2.380,39 ton	3.379,31 ton
2	Kopi				675,90 ton	332,10 ton
3	Tebu				57.527 ton	140.029 ton
4	Nilai pendapatan pelaku usaha Tani (Milyar Rupiah)				n/a	n/a
	<b>Jumlah Produksi ternak :</b>					
1	Daging Sapi	1,790.00	1,361.00	1.416	1.416	1.458
2	Deging Kambing	82,73	72	83.42	83	85
3	Daging Ayam	3,65	4,873	2,584	2.195	2.267
4	Telur	2.520	3.431	4.320	2.919	2.920
5	Susu	116.100	256.000	305.280	305.280	383.040
6	Nilai pendapatan pelaku usaha Ternak(Milyar Rupiah)				3.129.267,00	3.211.721,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2017

#### 2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa urusan ESDM sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten/kota hanya mempunyai kewenangan penerbitan izin pemanfaatan panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Namun pengawasan bidang pertambangan yang berwawasan lingkungan terus dilakukan sehingga kegiatan eksploitasi pertambangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam. Selain itu pemerintah kabupaten/ kota juga memanfaatkan potensi energi sumber daya alam daerah yang dimiliki Kabupaten Situbondo untuk meminimalisir kerusakan ekosistem akibat kegiatan pertambangan.



### A. Presentase Peningkatan Listrik Pedesaan dan Energi Baru Terbarukan

Indikator peningkatan listrik pedesaan dan energi baru terbarukan dimaksudkan untuk mengetahui cakupan dusun se Kabupaten Situbondo yang belum terpasang jaringan listrik dan penggunaan potensi energi baru terbarukan dibandingkan dengan jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Situbondo. Jumlah dusun di Kabupaten Situbondo berjumlah 660 dusun, sehingga beberapa dusun di desadesa tersebut masih ada yang belum mendapatkan jaringan listrik dan menggunakan energi baru terbarukan dikarenakan terbatasnya dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), sulitnya medan atau lokasi serta infrastruktur yang belum memadai untuk dibangunnya sarana prasarana listrik, potensi energi baru terbarukan meliputi : jaringan listrik, PLTS, Biogas dan PLTMH. Pada tahun 2015 peningkatan listrik pedesaan dan energi terbarukan terlaksana 47,22%, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 2.3.3.5 Perdagangan

Urusan perdagangan di arahkan kepada penciptaan iklim usaha yang kondusif, terbuka peluang usaha, perlindungan konsumen, ketersediaan dan terjangkaunya kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan perdagangan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	8,47%	9,45%
2	Nilai Ekspor bersih perdagangan	1.002.962.682.557	1.010.083.717.603
3	Volume Perdagangan dalam negeri	265.524.475.314	267.409.699.089

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Situbondo, Tahun 2017

#### 2.3.3.6 Perindustrian

Peningkatan pembangunan perindustrian diarahkan pada peningkatan pengusaha kecil dan menengah, promosi serta peningkatan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi di bidang industri di Kabupaten Situbondo, memiliki peranan yang berarti sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Situbondo, dan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada penambahan bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas



kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah untuk urusan Pilihan Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	7,89%	8,25%
2	Persentase Pertumbuhan Industri	2.96 %	2,98%
3	Prosentase peningkatan produksi industri pengolahan	24,31%	24,50%

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Situbondo, Tahun 2017*

### 2.3.3.7 Ketransmigrasian

Dalam rangka persebaran penduduk dan pengentasan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran di Kabupaten Situbondo, maka penyelenggaraan urusan transmigrasi dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan persebaran penduduk dan stabilitas sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terlaksananya pembangunan yang baik di daerah asal maupun di daerah tujuan transmigrasi.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memberangkatkan transmigran ke daerah tujuan telah berhasil ditempatkan sebanyak 10 KK. Jumlah ini meningkat 100% jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2014 yaitu sebanyak 5 KK. Pada tahun 2016 transmigran yang berhasil berangkat dan ditempatkan sebanyak 28 orang ke lokasi transmigrasi, dan di Tahun 2017 transmigran yang berhasil diberangkatkan hanya 2 KK. Sedikitnya jumlah penduduk yang diberangkatkan tersebut disebabkan oleh keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengenai jatah (quota) yang ditetapkan, yang di Tahun 2017 ditetapkan hanya 2KK untuk Kabupaten Situbondo.

Beberapa capaian indikator pembangunan daerah Situbondo pada urusan transmigrasi antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2017**

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Prosentase calon transmigran yang terseleksi	80,00%	84,00%

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2017*



## 2.3.4 Urusan Penunjang

### 2.3.4.1 Perencanaan

#### A. Capaian Nilai Pangripta

Untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, Bappeda Provinsi Jawa Timur memilih Kabupaten/Kota yang memiliki perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan serta mampu berinovasi dalam peningkatan capaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Kabupaten / kota yang terpilih akan mewakili Provinsi Jawa timur sebagai peserta Penghargaan Pembangunan Daerah di Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas RI. Kabupaten Situbondo berpartisipasi dalam Penilaian Pangripta Propinsi sejak tahun 2016. Pada tahun pertama berpartisipasi, Situbondo sudah melengkapi dokumen persyaratan, namun baru pada tahun 2017 bisa lolos seleksi administrasi. Dan pada tahun 2018, kabupaten Situbondo menjadi terbaik ke 3 se Jawa Timur.

Tujuan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Pangripta Nusantara kepada daerah dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Serta mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

### 2.3.4.2 Keuangan

Untuk urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, capaian indikator kinerja sarannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.71 Persentase Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD Tahun 2013 – 2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini laporan keuangan oleh BPK	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
Persentase Penyerapan Belanja APBD	94,07%	92,00%	87.79%	91,39%	91,63%

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Situbondo, 2018

### 2.3.4.3 Kepegawaian

Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Pada tahun 2016, indeks profesionalisme ASN Kabupaten Situbondo sebesar 70% kemudian meningkat menjadi 75% pada tahun 2017.



Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip *good governance*.

#### 2.3.4.4 Pengawasan

Inspektorat diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat memberikan informasi umpan balik kepada Bupati Situbondo melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut ini adalah capaian indikator sasaran dari urusan pengawasan :

**Tabel 2.72 Capaian Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2013 – 2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A	n/a	n/a	n/a	60,38	82,61
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	n/a	n/a	89,22%	70,87%	64,37%
Persentase penyelesaian kasus/pengaduan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	n/a	n/a	n/a	92,45%	100%

Sumber : Inspektorat Kab. Situbondo, 2018

#### 2.3.4.5 Sekretariat Daerah

Capaian indikator sasaran untuk urusan Sekretariat Daerah dari Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.73 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2013 – 2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kategori Evaluasi LPPD/EKPPD Kabupaten Situbondo	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
Predikat Nilai Sakip Pemerintah Daerah	C	C	CC	CC	B
Persentase PD dan UPP yang memiliki pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Situbondo

#### 2.3.4.6 Sekretariat DPRD

Urusan sekretariat DPRD dengan indikator capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kinerja DPRD IKM atas kinerja Sekretariat DPRD baru akan diukur pada tahun 2018. Sehingga sampai dokumen ini disusun, belum tersedia data yang dapat ditampilkan.

#### 2.3.4.7 Kecamatan

Kinerja urusan kecamatan yang diukur dengan nilai capaian IKM dari tahun 2016 – 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.74 Capaian Nilai IKM Kecamatan Tahun 2016 - 2017**

Kecamatan	Tahun	
	2016	2017
Banyuglugur	B (73)	B (74)
Jatibanteng	B (72,45)	B (75,78)
Sumbermalang	B (76,56)	B (76,56)
Besuki	B (72,56)	B (80,05)
Suboh	B (72,5)	B (73,75)
Mlandingan	B (76)	B (76,64)
Bungatan	B (72)	B (73,56)
Kendit	B (78,34)	B (74,72)
Panarukan	B (71,37)	B (87,75)
Situbondo	B (75,71)	B (77,25)
Panji	B (72)	B (72)
Mangaran	B (78,34)	B (74,72)
Kapongan	B (72)	B (72)
Arjasa	B (78,42)	B (82)
Asembagus	B (72,05)	B (73,80)
Jangkar	B (76)	B (76)
Banyuputih	B (73)	B (74,80)

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, Tahun 2017



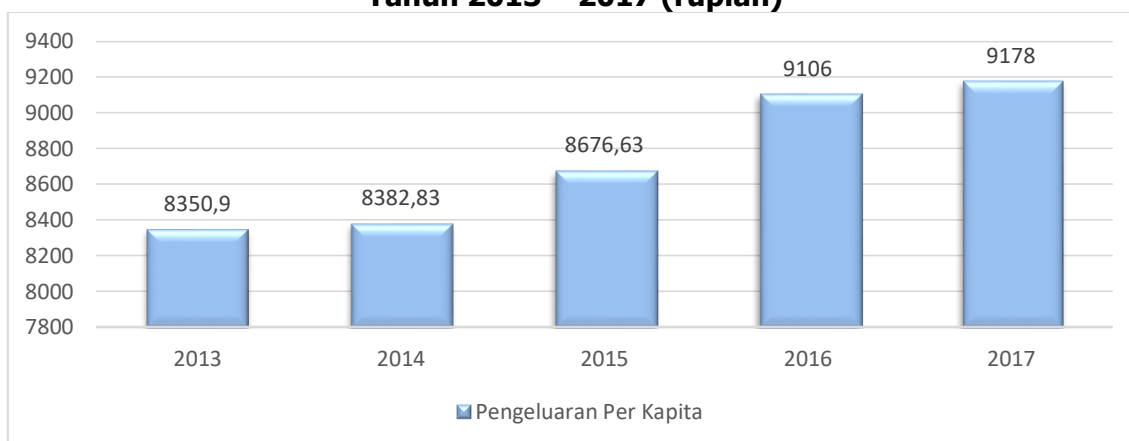


## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita

Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

**Grafik 2.25**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita Kabupaten Situbondo**  
**Tahun 2013 – 2017 (rupiah)**



Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka 2018, Data Diolah

**Tabel 2.75 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Situbondo (rupiah) Tahun 2015-2017**

Kelompok Makanan	Tahun		
	2015	2016	2017
Padi-padian	70.492	66.992	54.505
Umbi-umbian	828	2.034	1.469
Ikan	22.509	24.796	22.221
Daging	10.033	12.136	11.602
Telur dan Susu	18.750	16.938	15.665
Sayur-sayuran	16.420	23.372	23.391
Kacang-kacangan	15.420	16.381	15.208
Buah-Buahan	10.579	10.778	9.418
Minyak dan Lemak	10.347	11.094	11.106
Bahan minuman	13.276	16.309	14.456
Bumbu-bumbuan	8.020	10.676	8.721
Konsumsi lainnya	6.944	8.868	7.282
Makanan dan Minuman Jadi	70.156	96.431	88.492
Tembakau dan Sirih	44.145	64.296	53.724
<b>TOTAL</b>	<b>317.919</b>	<b>381.101</b>	<b>337.260</b>

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, tahun 2018



**Tabel 2.76 Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Situbondo (Rp) Tahun 2015-2017**

Kelompok Non Makanan	Tahun		
	2015	2016	2017
Perumahan dan Fasilitas Rumah	132.689	136.453	113.851
Aneka Barang dan Jasa	65.387	81.449	63.498
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	21.044	24.794	20.960
Barang yang tahan lama	32.106	24.760	37.396
Pajak dan asuransi	13.328	9.162	12.817
Keperluan pesta dan upacara	10.013	9.321	15.619
<b>TOTAL</b>	<b>274.567</b>	<b>285.939</b>	<b>264.141</b>

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, tahun 2018

#### 2.4.2 Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kabupaten Situbondo yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 3 tahun dari tahun 2014 – 2016, jumlah tindak pidana/kejahatan menonjol (*crime index*) menurut jenis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.77 Jumlah Kejahatan menurut Jenis dan Penyelesaian di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 - 2016**

No	Jenis Kejahatan	2014			2015			2016		
		Lap or	Sele sai	%	Lapo r	Seles ai	%	Lap or	Seles ai	%
1	Kebakaran/ Pembakaran	10	5	50	10	7	70	28	28	100,00
2	Kejahatan Mata Uang	1	1	100	1	1	100	-	-	-
3	Pemalsuan Surat/ Merk	12	11	91.67	16	14	87	-	-	-
4	Perkosaan	1	1	100	1	1	100	-	-	-
5	Perjudian	22	19	86.36	23	19	82	28	25	89,29
6	Pembunuhan	-	-	-	2	2	100	4	4	100
7	Penganiayaan Berat	126	116	92.06	131	115	87	15	15	100
8	Pencurian Dengan Pemberatan	167	36	21.55	144	73	50,69	67	24	35,82
9	Pencurian Kayu Jati	13	9	69.23	10	9	90	6	6	100



No	Jenis Kejahatan	2014			2015			2016		
		Lap or	Sele sai	%	Lapo r	Seles ai	%	Lap or	Seles ai	%
10	Pencurian Kendaraan Bermotor	31	4	12.90	46	3	6,52	41	24	58,54
11	Pencurian Kawat Telepon	6	-	-	5	-	-	-	-	-
12	Pencurian Hewan	9	2	22.22	14	3	21,42	21	4	19,05
13	Pencurian Biasa	104	35	33.65	12	7	58,33	62	24	38,71
14	Dengan Kekerasan	18	2	11.11	295	245	83	15	7	46,67
15	Penipuan	217	183	84.33	84	72	85	139	49	35,25
16	Penggelapan	98	79	80.61	24	15	62	43	25	58,14
17	Pengrusakan	30	22	73.33	18	15	83	28	12	42,86
18	Sengketa Tanah	13	13	100	495	353	71,31	-	-	-
19	Lain-lain Kejahatan	66	53	80.30	-	-	-	36	15	41,67
<b>Jumlah</b>		<b>944</b>	<b>591</b>	<b>62.60</b>	<b>1331</b>	<b>954</b>	<b>71,67</b>	<b>533</b>	<b>234</b>	<b>43,90</b>

Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka Tahun 2017 dan 2018

Selama kurun waktu 2 tahun (2014 – 2015) di wilayah Kabupaten Situbondo terjadi peningkatan jumlah tindak kejahatan dari total 944 kasus menjadi 1.331 kasus pada tahun 2015. Akan tetapi tingkat penyelesaian kasusnya mengalami peningkatan dari 62,60% menjadi 71,67%. Selama tahun 2016, jumlah kasus tindak pidana di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan sejumlah 533 kasus, akan tetapi tingkat penyelesaian kasus mengalami penurunan dari 71,67% pada tahun 2015 menjadi 43,90% (234 kasus dari 533 kasus). Yang mana pada tahun 2016 kasus yang paling menonjol adalah tindak pidana penipuan sebanyak 139 kasus.

#### 2.4.3 Indikator Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi



demografi. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 2.78 Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo Tahun 2015 - 2017**

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk Usia 15 -64 tahun	478.317	481.464	481.464
2	Jumlah Penduduk < 15 tahun	146.193	146.193	146.193
3	Jumlah Penduduk > 64 tahun	49.046	48.767	49.046
4	Jumlah Penduduk Tidak Produktif	195.239	194.960	195.239
5	Rasio Ketergantungan	2,5 : 1	2,5 : 1	2,5 : 1

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka, 2018

Nilai Rasio Ketergantungan di Kabupaten Situbondo adalah 2,5 : 1, dari tabel diatas menjelaskan bahwa di Kabupaten Situbondo setiap lima orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban dua orang penduduk yang tidak produktif.

**Tabel 2.79 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Situbondo**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>							
<b>Otonomi daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>							
Pertumbuhan Ekonomi	6,19	5,79	4,86	5,00	5,07	6,38	Belum tercapai
PDRB Perkapita	18,03	20,03	22,09	24,18	25,93	31,9	Belum tercapai
Indeks Gini Ratio	0,28	0,29	0,33	0,35	0,33	0,262	Belum tercapai
Persentase Penduduk Miskin	13,65	13,15	13,63	13,34	13,05	8,5	Belum tercapai
Indeks Pembangunan	63,43	63,91	64,53	65,08	65,68	71,76	Belum tercapai
Indeks Kepuasan	N/A	N/A	N/A	B ( 76.13	B ( 80.46	A ( 81.26 )	Belum tercapai
Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	n/a	65,91	-	-
<i>Fokus Kesejahteraan</i>							



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI Belum tercapai ( ) Sesuai (= ) Melampaui (> )
	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>1. Pendidikan</b>							
Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	0,55	0,56	-	-
<b>2. Kesehatan</b>							
Indeks Kesehatan	N/A	N/A	N/A	0,75	0,75	-	-
<b>3. Ketenagakerjaan</b>							
Tingkat Pengangguran	3,01	4,15	3,57	3,43	1,49	2,57	Melampaui
<b>ASPEK PELAYANAN</b>							
<i>Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib</i>							
<b>1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	n/a	B (77,3)	-	-
<b>2. Sosial</b>							
Persentase Penurunan PMKS	N/A	N/A	N/A	0,98	0,99	-	-
<b>Fokus Layanan Wajib Non Dasar</b>							
<b>3. Lingkungan Hidup</b>							
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	N/A	71	71,39	71,73	73,5	Belum tercapai
<b>4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
Jumlah Desa Maju	N/A	N/A	N/A	12 desa	15 desa	-	-
<b>5. Penanaman Modal</b>							
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	N/A	N/A	N/A	350 M	385 M	-	-
<b>Fokus Layanan Urusan</b>							
<b>1. Pariwisata</b>							
Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi	7,05%	8,49%	8,53	8,78%	9,02%	-	-
<b>2. Pertanian</b>							
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,22%	3,84%	3,14%	2,64%	0,95%	-	-
<b>3. Perdagangan</b>							
Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar	7,6%	7,40%	6,35%	8,47%	9,45%	-	-
<b>4. Perindustrian</b>							
Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	7,12%	6,70%	7,77%	7,89%	8,25%	-	-
<b>Fokus Layanan Urusan</b>							
<b>1. Keuangan</b>							
Opini Laporan Keuangan	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
<b>2. Sekretariat Daerah</b>							
Kategori Evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sesuai
Capaian Nilai Sakip Pemerintah Daerah	C	C	CC	CC	B	A	Belum Tercapai



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA					STANDAR	INTERPRETASI Belum tercapai ( < ) Sesuai ( = ) Melampaui ( > )
	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>ASPEK DAYA SAING</b>							
<i>Kemampuan ekonomi</i>							
<b>Otonomi daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>							
Pengeluaran per kapita (dalam ribuan)				9.106	9.178	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2018





Keuangan daerah adalah merupakan komposisi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis untuk mengetahui keadaan keuangan daerah perlu dilakukan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis keuangan daerah ini dilakukan analisis melalui kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan di masa depan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa merencanakan program dan kebijakan yang akan dilakukan di suatu daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Dengan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo, dimana kebijakan pembangunan telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun fiskal dan satu tahun fiskal sedang berjalan, maka analisis gambaran umum kinerja keuangan dilakukan terhadap realisasi APBD tahun 2016, realisasi APBD tahun 2017, penetapan APBD 2018, serta proyeksi APBD 2018-2021. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan dalam rangka memperkaya analisis. Data dan informasi dimaksud digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, khususnya pada tahun 2019-2021. Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan pondasi untuk perencanaan pembangunan daerah harus tercantum di RPJMD daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam penyusunan RPJMD. Hal





ini dikarenakan gambaran pengelolaan keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di RPJMD akan bisa mendeskripsikan keuangan yang digunakan dalam suatu pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. Dengan demikian APBD yang tercantum di RPJMD akan menggambarkan program prioritas pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan dapat dianalisis melalui keuangan yang digunakan.

Demi mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan lima tahunan melalui RPJMD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk masyarakat umum. Arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka APBD. APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. APBD disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam; (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan; (7) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk penyelerasan sumber dana yang tersedia sesuai kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kondisi pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Kinerja keuangan APBD dianalisis dari sisi kinerja pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, analisis proporsi pemenuhan belanja aparatur, pengelolaan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi belanja dan pembiayaan daerah.

Kinerja Keuangan Kabupaten Situbondo disajikan untuk periode Tahun 2013 – 2017. Data kinerja keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diperoleh dari beberapa data keuangan, diantaranya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah lainnya. Adapun aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selanjutnya untuk aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Arah pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada upaya pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD harus terealisasi secara efektif dan efisien.

Struktur APBD Kabupaten Situbondo terdiri atas : (1) Pendapatan, yang di dalamnya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; (2) Belanja, yang di dalamnya terdiri dari Belanja Tidak



Langsung dan Belanja Langsung. Adapun gambaran Pendapatan Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.1.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.

Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, di samping juga yang berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di daerah tetap kondusif terutama pada saat perekonomian sedang lesu. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum Dan Dana Transfer Khusus. Hal inilah yang menjadi persoalan yang penting bagi penerimaan daerah.

Berikut merupakan realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017.



**Tabel 3.1**  
**Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017**

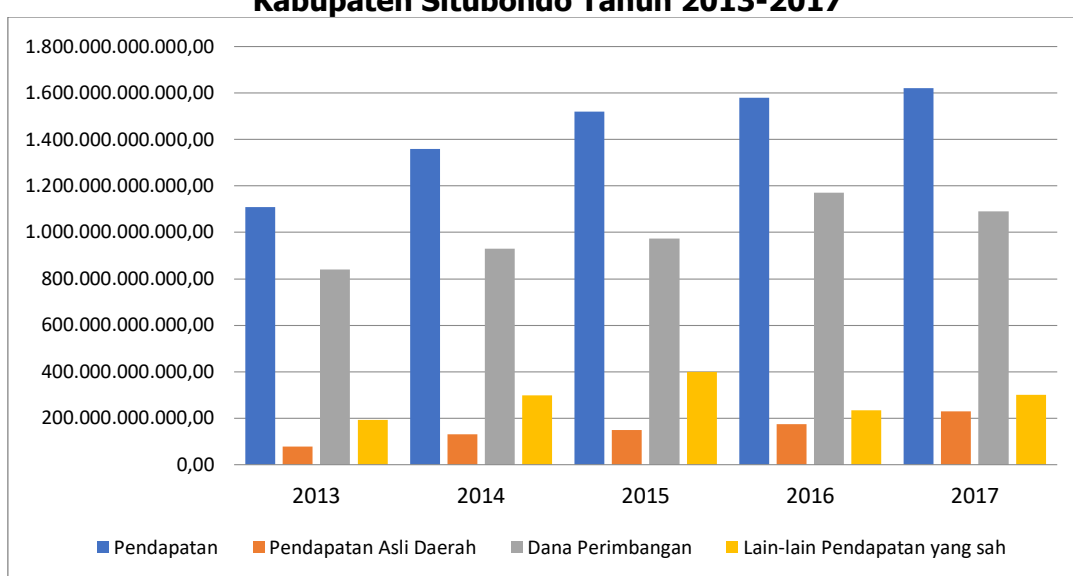
No.	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,109,471,305,726.91</b>	<b>1,359,193,724,048.62</b>	<b>1,520,359,975,571.47</b>	<b>1,580,583.084.970,12</b>	<b>1,620,456,354,002.13</b>	<b>10.21%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>78,043,407,931.91</b>	<b>129,640,577,933.62</b>	<b>148,507,958,983.47</b>	<b>173.836.184.925,12</b>	<b>228,523,663,374.13</b>	<b>32.25%</b>
1.1.1.	Pajakdaerah	17,188,209,719.65	24,287,378,394.47	26,451,180,607.73	30.080.834.208,29	38,950,555,757.34	23.35%
1.1.2.	Retribusi daerah	16,014,432,520.00	15,183,322,856.00	21,245,936,586.96	13,682.597.701,00	9,402,292,498.00	-8.01%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4,292,216,221.02	4,092,920,658.98	4,233,412,108.98	4,316,450,161.00	4,047,068,403.64	-1.37%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	40,548,549,471.24	86,076,956,024.17	96,577,429,679.80	125.756.302.854,83	176,123,746,715.15	48.65%
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>839,722,211,740.00</b>	<b>930,133,128,794.00</b>	<b>973,536,392,479.00</b>	<b>1.171.851.135.392,00</b>	<b>1,091,000,194,656.00</b>	<b>6.95%</b>
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak (1%)	65,745,895,740.00	71,518,089,794.00	69,352,663,479.00	-	-	1.87%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	692,549,026,000.00	766,542,999,000.00	787,728,919,000.00	-	-	3.98%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	81,427,290,000.00	92,072,040,000.00	116,454,810,000.00	-	-	31.46%
1.2.1.	Dana Transfer Umum	-	-	-	895.113.268.610,00	876.972.621.008,00	-
1.2.2.	Dana Transfer Khusus	-	-	-	276.737.866.782,00	214.027.573.648,00	-
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>191,705,686,055.00</b>	<b>299,420,017,321.00</b>	<b>398,315,624,109.00</b>	<b>291,436,357,653.00</b>	<b>300,932,495,972.00</b>	<b>16.41%</b>
1.3.1	Hibah	361,837,300.00	265,488,000.00	4,958,901,000.00	6,709,843,000.00	-	419.13%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya***)	44,685,358,755.00	75,372,229,321.00	73,891,540,109.00	78,067,243,653.00	101,312,838,972.00	25.53%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	129,940,985,000.00	150,779,050,000.00	242,278,310,000.00	144,000,871,000.00	111,434,587,000.00	3.39%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	16,717,505,000.00	73,003,250,000.00	77,186,873,000.00	62,658,400,000.00	88,185,070,000.00	91.08%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2013-2017



Dilihat dari tabel 3.1 di atas rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 realisasi pendapatan mencapai Rp. 1.109.471.305.726,91 sedangkan tahun 2014 realisasi pendapatan mencapai Rp. 1.359.193.724.048,62, di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1,520,359,975,571.47, di tahun 2016 pendapatan meningkat menjadi Rp. 1,580,583.084.970,12, di tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 1,620,456,354,002.13 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 10,21%.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Kontribusi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2013-2017

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penyumbang terbesar dalam komponen pendapatan daerah adalah dana perimbangan, yang disusul dengan lain-lain pendapatan yang sah, dan terakhir adalah pendapatan asli daerah. Ini artinya pada 5 tahun terakhir ini Kabupaten Situbondo belum mampu menghidupi kebutuhan daerahnya, dan masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat maupun provinsi. Namun meskipun demikian, upaya untuk peningkatan kemandirian terus dilakukan, hal tersebut dapat dinilai dari kenaikan jumlah PAD yang terus meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 3.2**  
**Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017**

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Struktur				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pendapatan Asli Daerah	7.03%	9.54%	9.77%	11.00%	14.10%
2	Dana Perimbangan	75.69%	68.43%	64.03%	74.14%	67.33%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.28%	22.03%	26.20%	14.86%	18.57%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2013-2017



**Tabel 3.3**  
**Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017**

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Pertumbuhan			
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
	<b>Pendapatan</b>	22.51%	11.86%	39,69%	2.52%
1	Pendapatan Asli Daerah	66.11%	14.55%	17.06%	31,46%
2	Dana Perimbangan	10.77%	4.67%	20,37%	-6,90%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.19%	33.03%	-41,03%	28.11%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan dari sisi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2013-2014 adalah sebesar 22,51 %, kemudian pada tahun 2014-2015 turun menjadi sebesar 11,86% dan kemudian pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,96%. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2017 turun mencapai 2,53%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017 yakni 10,21%. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan pada tahun anggaran 2013-2017 tersebut apabila dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan belanja pada waktu anggaran yang sama masih cukup tinggi.

#### **B. Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan untuk diperhatikan dalam menentukan belanja daerah yaitu: masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pembangunan serta DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dibidang penyusunan peraturan daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan. Hakekat anggaran belanja daerah adalah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk

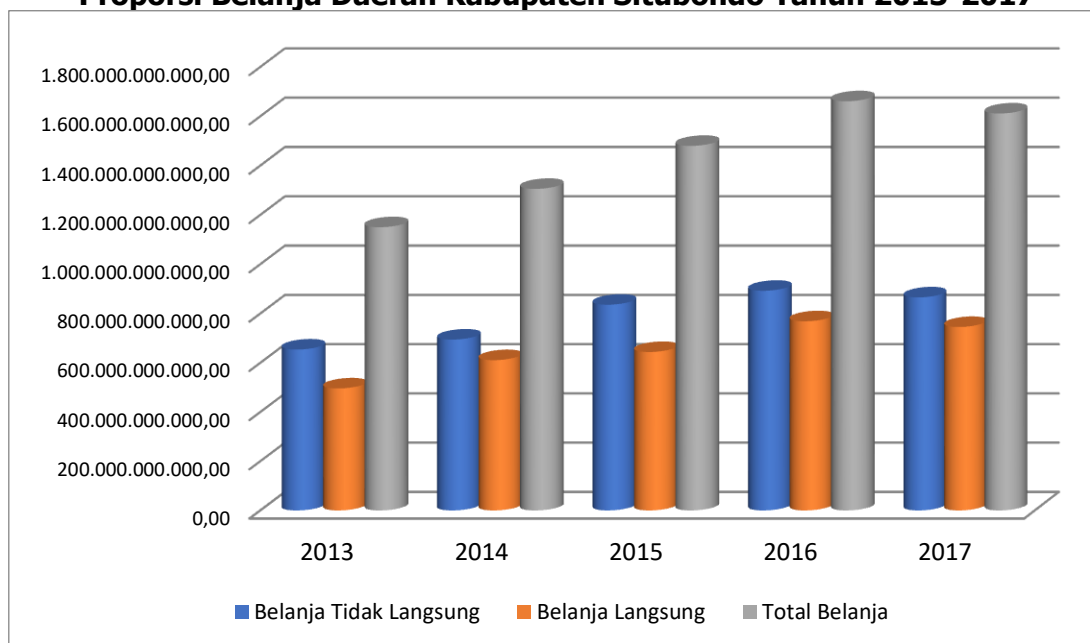


kesejahteraan rakyat. Namun demikian anggaran belanja daerah hingga saat ini masih dirasakan sangat terbatas, sehingga diperlukan skala prioritas dalam penggunaannya. Secara garis besar kendala utama dalam menyusun belanja daerah adalah tajamnya perbedaan antara kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan strategi dalam penyusunan Anggaran Belanja Daerah yaitu:

1. Penajaman skala prioritas pada kebutuhan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap capaian tingkat kesejahteraan;
2. Prioritas pada urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan arahan perencanaan baik RPJMD maupun RKPD; dan
3. Memperhatikan aspek politik dan sosial kemasyarakatan baik berskala daerah, regional maupun nasional.

Untuk memperjelas penggunaannya, anggaran belanja dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

**Grafik 3.2**  
**Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2013-2017

Total belanja Kabupaten Situbondo terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 total belanja Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1,150,103,067,652.69 sedangkan di tahun 2014 sebesar Rp. 1,305,647,017,406.14 Di tahun 2015 meningkat menjadi Rp.





1.480.028.872.078,88, terus meningkat di tahun 2016 menjadi Rp. 1.661.059.098.687,78, di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 1,611,319,203,889.22. Total belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2013 sebesar Rp. 654,029,661,711.57 kemudian tahun 2014 sejumlah Rp. 694,566,689,604.42 di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 835,926,080,646.00 di tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 892,406,965,058.00, di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 865,645,559,005.39.

Sama halnya dengan belanja tidak langsung, belanja langsung Kabupaten Situbondo juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 belanja langsung Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 496,073,405,941.12 sedangkan tahun 2014 Rp. 611,080,327,801.72, di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 644,081,791,432.88, di tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 768,652,160,248.78 dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi Rp. 745,673,644,883.83.



**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017**

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>654,029,661,711.57</b>	<b>694,566,689,604.42</b>	<b>835,926,080,646.00</b>	<b>892,406,965,058.00</b>	<b>865,645,559,005.39</b>	<b>7.58%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	571,581,417,372.00	631,245,632,268.42	653,572,031,084.00	682,415,250,181.00	616,790,808,882.39	2.19%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	37,477,962,940.00	19,254,915,000.00	40,743,020,800.00	21,802,863,000.00	31,224,614,000.00	14.93%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,488,500,000.00	5,257,780,000.00	5,792,140,000.00	609,200,000.00	7,280,000,000.00	244.41%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil ke Pemdes	-	-	2,147,725,000.00	2,298,245,000.00	2,506,981,000.00	0.00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	35,420,850,977.00	37,043,573,336.00	133.671.163.762,00	184,011,655,893.00	207,518,974,893.00	78.97%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,060,930,422.57	1,764,789,000.00	21,000,000.00	1,269,750,984.00	324,180,230.00	1459.87%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>496,073,405,941.12</b>	<b>611,080,327,801.72</b>	<b>644,081,791,432.88</b>	<b>768,652,160,248.78</b>	<b>745,673,644,883.83</b>	<b>11.23%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	47,700,670,032.00	51,322,713,542.00	55,128,659,106.00	64,674,913,944.00	79,553,679,248.00	13.83%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183,801,741,012.85	234,704,576,636.72	248,269,958,970.25	287.113.702.025,51	320,737,549,617.85	15.21%
2.2.3	Belanja Modal	264,570,994,896.27	325,053,037,623.00	340,683,173,356.63	416,863,544,279.36	345,382,416,017.98	8.22%
<b>Total Belanja</b>		<b>1,150,103,067,652.69</b>	<b>1,305,647,017,406.14</b>	<b>1.480.028.872.078,88</b>	<b>1.661.059.098.687,78</b>	<b>1,611,319,203,889.22</b>	<b>9.03%</b>

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
1	2013	1,222,569,896,213.52	1,150,103,067,652.69	(72,466,828,560.83)	94.07%
2	2014	1,419,118,441,083.88	1,305,647,017,406.14	(113,471,423,677.74)	92.00%
3	2015	1,685,811,770,372.47	1.480.028.872.078,88	(205,782,898.293,59)	87.79%
4	2016	1.817.579.694.220,75	1.661.059.098.687,78	(156,520.595.532,97)	91.39%
5	2017	1,758,561,684,179.41	1.611.319.203.889,22	(147,242.480.290,19)	91.63%
<b>Rata-rata Prosentase Realisasi Belanja Daerah</b>					<b>91.38%</b>

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo

**Tabel 3.6**  
**Target Dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017**

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
1	2013	654,662,407,345.67	619,282,087,404.00	(35,380,319,941.67)	94.60%
2	2014	728,620,886,427.73	682,568,345,810.42	(46,052,540,617.31)	93.68%
3	2015	795,388,410,570.75	708,700,690,190.00	(86,687,720,380.75)	89.10%
4	2016	829.461.220.912,12	747,090,164,125.00	(82.371.056.787,12)	90.07%
5	2017	764,276,661,586.23	696,344,488,130.39	(67,932,173,455.84)	91.11%
<b>Rata-rata Prosentase Realisasi Belanja pegawai</b>					<b>91.71%</b>

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo

**Tabel 3.7**  
**Rasio Realisasi Pendapatan Dengan Realisasi Belanja Dalam Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2013–2017**

No.	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pendapatan Daerah	1,109,471,305,726.91	1,359,193,724,048.62	1,520,359,975,571.47	1,580,583,084,970.12	1,620,456,354,002.13
2	Belanja Daerah	1,150,103,067,652.69	1,305,647,017,406.14	1,480,028,872,078.88	1,661,059,098,687.78	1,611,319,203,889.22
3	Persentase	96.47%	104.10%	102.73%	95.16%	100.57%

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



### **C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 dan rata-rata perkembangan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:



**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013-2017**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	<b>Pembiayaan</b>						
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	127,645,485,684.10	82,557,126,214.32	128,956,511,627.98	191,177,365,876.98	110,931,022,606.73	6.79
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	23,019,770,710.02	-	39,697,266.00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	943,402,456.00	261,804,110.00	107,215,127.00	229,875,164.00	203,295,601.00	-7.11
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>128,588,888,140.10</b>	<b>82,818,930,324.32</b>	<b>152,083,497,465.00</b>	<b>191,407,241,040.98</b>	<b>111,174,015,473.73</b>	<b>6.66</b>

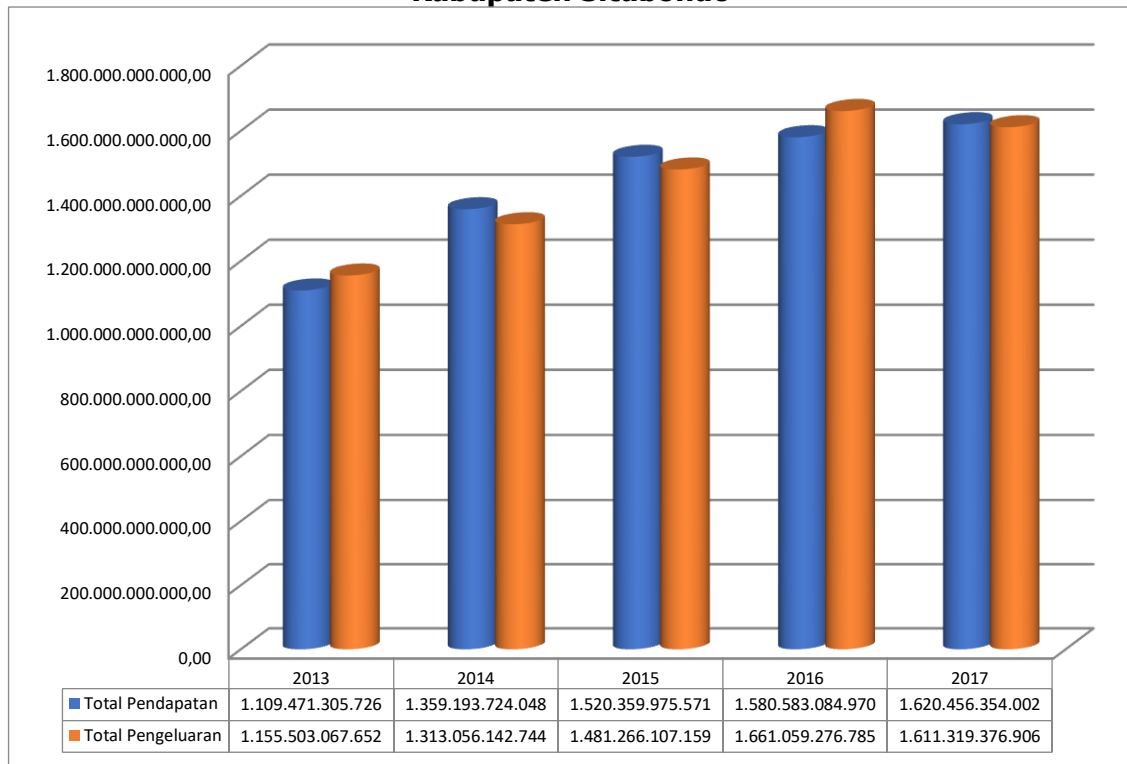


No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5,000,000,000.00	6,342,417,128.47	687,235,080.61	178,097.50	173,017.45	-41.29
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	400,000,000.00	900,000,000.00	550,000,000.00	-	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	166,708,210.35	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.2.5	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>5,400,000,000.00</b>	<b>7,409,125,338.82</b>	<b>1,237,235,080.61</b>	<b>178,097.50</b>	<b>173,017.45</b>	<b>-37.23</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>123,188,888,140.10</b>	<b>75,409,804,985.50</b>	<b>150,846,262,384.39</b>	<b>191,407,062,943.48</b>	<b>111,173,842,456.28</b>	<b>9.64</b>

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



**Grafik 3.3**  
**Grafik Perbandingan Total Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**  
**Kabupaten Situbondo**



Sumber: Data Keuangan DPPKAD Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2017

Dari grafik 3.3 tersebut dapat terlihat bahwa Kabupaten Situbondo masih memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan anggaran yang dimiliki sehingga jumlah Pendapatan masih mampu membiayai kebutuhan Kabupaten Situbondo. Namun selisih yang cukup kecil perlu menjadi perhatian bagi Kabupaten Situbondo untuk dapat meningkatkan kembali pendapatan yang dimiliki, dan menekan belanja serta pembiayaan, agar tidak terjadi defisit anggaran. Untuk melihat kemampuan anggaran dan keuangan pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dapat hanya dilihat dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, namun juga harus mampu dilihat dari harta atau aset yang dimiliki, adapun gambaran aset yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo akan dibahas pada sub bab berikut ini yaitu sub bab tentang Neraca Daerah.





### 3.1.2 Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu waktu tertentu. Laporan neraca daerah memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah dan pihak kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta kepada masyarakat luas tentang posisi atau keadaan aset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Beberapa bagian dari neraca daerah diturunkan menjadi beberapa sub-sub rekening yang lebih rinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013–2017**

No	Uraian	Jumlah					Rata-Rata Pertumbuhan
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
11101	Kas di Kas Daerah	79,992,497,583.78	116,116,870,760.26	179,382,007,292.25	95,005,617,060.78	106,165,466,813.87	55.54
11102	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2,564,628,630.54	10,997,213,651.58	9,096,388,171.35	15,683,929,420.95	10,901,017,391.28	376.31
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	231,971,959.63	0.00
11104	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	6,111,000.00	11,096,700.00	19,661,500.00	241,476,125.00	6,120,500.00	1,262.57
11105	Kas di Bendahara Kapitasi	0.00	1,842,427,216.14	2,679,308,913.38	0.00	0.00	0.00
11106	Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	961,695,250.09	3,342,736,094.95	0.00
11107	Setara Kas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Piutang Pajak	1,361,776,996.50	25,563,635,424.85	31,020,378,870.04	34,542,701,095.01	38,240,042,812.47	1,812.60
11302	Piutang Retribusi	87,035,252.00	100,559,972.00	899,994,092.00	755,522,192.00	2,407,820,482.00	849.14
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304	Piutang Dana Bagi Hasil	11,822,610,209.00	8,136,825,216.00	14,087,368,727.00	18,396,682,591.00	17,870,752,618.00	71.83
11305	Piutang Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	424,380,000.00	424,380,000.00	0.00	2,361,212,639.00	8,969,914,351.00	0.00



No	Uraian	Jumlah					Rata-Rata Pertumbuhan
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
11410	Piutang Lainnya	4,167,584,382.93	8,083,241,490.00	8,117,243,409.57	424,380,000.00	424,380,000.00	(0.40)
11501	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(163,920,956.68)	(14,920,994,036.20)	(17,638,999,366.20)	(20,939,274,976.10)	(24,181,176,563.23)	9,043.35
11601	Belanja Dibayar Dimuka	0.00	4,484,400.00	4,083,333.33	0.00	2,173,400.00	0.00
11701	Persediaan	11,898,450,557.86	17,084,038,732.70	29,841,253,531.68	54,461,162,227.47	37,708,384,258.35	193.07
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>112,161,153,655.93</b>	<b>173,443,779,527.33</b>	<b>257,508,688,474.40</b>	<b>201,895,103,625.20</b>	<b>202,089,604,118.33</b>	81.53
<b>12</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>121</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>1,490,057,282.19</b>	<b>1,296,719,898.50</b>	<b>1,150,550,715.00</b>	<b>1,030,061,233.00</b>	<b>921,938,732.50</b>	(37.34)
12101	Pinjaman Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	Investasi Dana Bergulir	2,637,119,798.00	2,378,274,357.00	2,277,048,230.00	2,047,173,066.00	1,843,877,465.00	(26.65)
12105	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(1,147,062,515.81)	(1,081,554,458.50)	(1,126,497,515.00)	(1,017,111,833.00)	(921,938,732.50)	(13.61)
12106	Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>122</b>	<b>Investasi Permanen</b>	<b>45,314,079,497.88</b>	<b>46,069,668,344.58</b>	<b>45,266,385,685.20</b>	<b>45,393,144,569.58</b>	<b>45,923,504,415.52</b>	0.50
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	45,314,079,497.88	46,069,668,344.58	45,266,385,685.20	45,393,144,569.58	45,923,504,415.52	0.50
12202	Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>46,804,136,780.07</b>	<b>47,366,388,243.08</b>	<b>46,416,936,400.20</b>	<b>46,423,205,802.58</b>	<b>46,845,443,148.02</b>	(0.56)
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>						
13101	Tanah	206,457,604,056.00	941,310,385,506.00	954,576,757,506.00	1,120,929,893,506.00	1,124,032,683,106.00	374.84
13201	Peralatan dan Mesin	227,804,424,720.18	258,944,266,369.93	353,992,926,168.95	400,025,176,149.87	485,542,167,164.86	68.72
13301	Gedung dan Bangunan	575,898,657,069.84	661,410,983,319.18	746,877,065,986.69	901,504,383,781.59	926,799,072,433.74	49.17
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	741,027,749,799.31	1,022,367,054,275.51	1,158,739,149,246.98	1,401,612,923,818.98	1,565,815,919,214.48	75.19
13501	Aset Tetap Lainnya	33,481,848,535.36	22,022,904,802.23	34,223,428,004.95	44,420,192,995.63	27,997,820,466.26	41.73
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	731,894,000.00	1,547,178,750.00	7,236,390,563.00	4,489,448,071.00	14,602,448,850.00	497.46
13701	Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	(796,038,927,189.48)	(928,868,821,170.37)	(1,201,156,794,972.52)	0.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>1,785,402,178,180.69</b>	<b>2,907,602,773,022.85</b>	<b>2,459,606,790,287.09</b>	<b>2,944,113,197,152.70</b>	<b>2,943,633,316,262.83</b>	67.14
<b>14</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						
14101	Dana Cadangan	16,029,464,651.99	22,371,881,780.46	39,346,151.05	39,524,248.55	0.00	(84.80)
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>16,029,464,651.99</b>	<b>22,371,881,780.46</b>	<b>39,346,151.05</b>	<b>39,524,248.55</b>	<b>0.00</b>	(84.80)
<b>15</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
15102	Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR)	1,554,170,830.00	1,536,017,130.00	1,516,695,170.00	1,477,640,000.00	1,892,085,706.00	2.01
15301	Aset Tak Berwujud	2,269,465,968.18	2,824,466,383.18	3,843,103,483.18	4,439,029,483.18	5,327,540,483.18	81.03



No	Uraian	Jumlah					Rata-Rata Pertumbuhan
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	(2,843,703,120.68)	(3,380,194,914.43)	(4,113,484,958.18)	0.00
15401	Aset Lain-lain	98,482,507,561.42	129,029,360,752.54	112,568,340,150.57	113,694,896,318.11	193,827,077,115.27	36.88
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,617,248,933.37)	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>102,306,144,359.60</b>	<b>133,389,844,265.72</b>	<b>115,084,435,683.07</b>	<b>116,231,370,886.86</b>	<b>180,315,969,412.90</b>	31.44
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2,062,703,077,628.28</b>	<b>3,284,174,666,839.44</b>	<b>2,878,656,196,995.80</b>	<b>3,308,702,401,715.89</b>	<b>3,372,884,332,942.08</b>	62.29
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00	0.00	83,683,982.84	750,765,896.54	0.00
21201	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	300,000,000.00	180,278,344.10	761,327,331.23	461,280,421.96	2,504,707,186.09	353.74
21501	Utang Belanja	0.00	0.00	0.00	5,949,715,070.46	8,232,591,645.12	0.00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	4,648,540,611.35	4,121,243,061.00	5,978,833,436.00	12,299,054,503.95	0.00	114.44
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>4,948,540,611.35</b>	<b>4,301,521,405.10</b>	<b>6,740,160,767.23</b>	<b>18,793,733,979.21</b>	<b>11,488,064,727.75</b>	212.73
<b>22</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
22101	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22105	Utang Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22107	Utang Dalam Negeri Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4,948,540,611.35</b>	<b>4,301,521,405.10</b>	<b>6,740,160,767.23</b>	<b>18,793,733,979.21</b>	<b>11,488,064,727.75</b>	212.73
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>						
31101	Ekuitas	2,057,754,537,016.93	3,279,873,145,434.34	2,871,916,036,228.57	3,289,908,667,736.68	3,361,396,268,214.33	62.05
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2,057,754,537,016.93</b>	<b>3,279,873,145,434.34</b>	<b>2,871,916,036,228.57</b>	<b>3,289,908,667,736.68</b>	<b>3,361,396,268,214.33</b>	62.05
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2,062,703,077,628.28</b>	<b>3,284,174,666,839.44</b>	<b>2,878,656,196,995.80</b>	<b>3,308,702,401,715.89</b>	<b>3,372,884,332,942.08</b>	62.29

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah Kabupaten Situbondo dapat diketahui dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

- 1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain :
  - a. Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
  - b. Rasio *quick* = ( aktiva lancar – persediaan ) : kewajiban jangka pendek
- 2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain:
  - a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
  - b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas
- 3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.
  - a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.  
Rata-rata umur piutang =  $365 : \text{perputaran piutang}$   
Dimana :  
Perputaran piutang =  $\text{pendapatan daerah} / \text{rata-rata piutang pendapatan daerah}$ .  
Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah =  $(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}) : 2$
  - b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.  
Rata-rata umur persediaan =  $365 : \text{perputaran persediaan}$   
Dimana :  
Perputaran persediaan =  $\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun} : \text{rata-rata nilai persediaan}$ .  
Sedangkan, rata-rata nilai persediaan =  $(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}) : 2$

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada tahun 2013-2017 yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas disajikan sebagai berikut:



**Tabel 3.10**  
**Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
<b>A</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>					
1	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	16.68	29.98	28.36	5.95	10.50
2	Rasio Cair ((Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	20.26	36.35	33.78	7.84	14.31
<b>B</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>					
1	Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio) (Total Kewajiban/Total Aset)	0.0024	0.0013	0.0023	0.0057	0.0034
2	Rasio Hutang Terhadap Modal (Total Kewajiban/Equitas)	0.0024	0.0013	0.0023	0.0057	0.0034
<b>C</b>	<b>Rasio Aktivitas</b>					
1	Rata-rata Umur Piutang	14.11	14.80	14.65	14.34	15.32
2	Rata-rata Umur Persediaan	760.88	585.32	413.11	308.86	365.00

Sumber : Data diolah, 2018

Dari Tabel 3.10 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 16,68 menjadi 29,98 pada tahun 2014, dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan, namun masih diatas angka 5. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik, karena Pemerintah Kabupaten Situbondo menerapkan kebijakan pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati.
- b. Rasio Cair (*Quick Ratio*) selama lima tahun juga mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2013 sebesar 20,26 meningkat menjadi sebesar 36,35 pada tahun 2014, dan cenderung turun pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.
- c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kabupaten Situbondo cenderung rendah sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, yaitu sebesar 0,0024 pada tahun 2013 dan turun menjadi 0,0013 pada tahun 2014, dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/ donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.
- d. Rasio Hutang terhadap Modal (*Total Debt Equity Ratio*) Pemerintah Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir cenderung kecil, yaitu sebesar 0,0024 pada



tahun 2013 dan 0,0034 pada tahun 2017. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga.

- e. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Analisa rata-rata umur piutang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung tetap dan mengalami kenaikan walaupun sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengubah piutang menjadi kas masih diatas berkisar antara 14,34 pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi 15,32 hari pada tahun 2017.
- f. Rasio Aktivitas-umur persediaan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (merubah persediaan menjadi penjualan). Dari data di atas, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melakukan perputaran persediaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif yang masih tinggi. Persediaan yang ada, masih mengendap hampir 1,5 tahun dilihat dari nilai rata-rata umur persediaan dari tahun 2014, yaitu 585,32 hari sampai dengan tahun 2015, yaitu 413,11 hari.

Sesuai data neraca Kabupaten Situbondo diatas serta dari hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam kondisi sehat, ditunjukkan oleh rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas yang positif.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Situbondo secara umum bisa dilihat pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan APBD.

#### **a. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kebijakan pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan keuangan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui
  - a) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB dan Pajak Reklame.
  - b) Pembinaan manajemen penerimaan PAD



- c) Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif,
  - d) Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah
  3. Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber PAD serta perbaikan manajemen, dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek PAD.
  4. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) pada sektor-sektor penghasil.
  5. Perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola. Tidak semata-mata didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun demikian sangat didasari bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi belum sepenuhnya optimal karena peta potensi atas sektor tersebut masih dalam proses *up dating* dan validasi.
  6. Melakukan upaya perbaikan system pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah;
  7. Optimaslisasi pemanfaatan asset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
  8. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
  9. Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada.
  10. Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen agar Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha





Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

11. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
12. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, kebijakan belanja tertuang pada RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021, adapun kebijakan belanja tersebut adalah

1. Melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan program prioritas.
2. Mendukung program pembangunan yang menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat yang wajib dilaksanakan di daerah.
3. Membiayai program prioritas pembangunan daerah dan penunjang prioritas pembangunan daerah.
4. Melaksanakan kegiatan regular atau tahunan untuk mendukung capaian kegiatan prioritas pembangunan daerah.

c. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.
4. Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk:
  - a) Pembentukan dana cadangan;
  - b) Pembayaran Pokok utang;
  - c) Penyertaan modal (investasi daerah dengan memilih instrument investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial);
5. Apabila APBD diperkirakan defisit, maka kebijakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran antara lain:
  - a) Penggunaan SiLPA tahun anggaran yang lalu;
  - b) Pencairan dana cadangan;
  - c) Divestasi, yaitu menjual kembali investasi pemerintah daerah/kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d) Melakukan pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan bank/bukan bank maupun pihak lainnya;



e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari pihak lain/masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang rasional maka akan menghasilkan optimalisasi pendapatan daerah yang dapat digunakan dengan efisien untuk pembelanjaan dan pembiayaan daerah. Penggunaan pendapatan daerah harus digunakan dengan efektif dan efisien sehingga segala kebijakan maupun program prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara baik melalui keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi: proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dalam analisis ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Kebutuhan belanja untuk aparatur dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan belanja tak langsung. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut:



**Tabel 3.11**  
**Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

No.	URAIAN	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>709,880,778,765.96</b>	<b>798,237,183,530.24</b>	<b>761,029,763,612.25</b>	<b>978,051,213,191.02</b>	<b>1,015,665,531,670.94</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>570,568,837,553.00</b>	<b>631,245,632,268.42</b>	<b>653,572,031,084.00</b>	<b>682,415,250,181.00</b>	<b>616,790,808,882.39</b>
<b>A.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>570,568,837,553.00</b>	<b>631,245,632,268.42</b>	<b>653,572,031,084.00</b>	<b>682,415,250,181.00</b>	<b>616,790,808,882.39</b>
A.1.1	Gaji dan Tunjangan	442,862,148,084.00	462,173,939,049.00	487,558,835,989.00	502,275,641,915.00	449,606,133,313.00
A.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	123,525,332,425.00	164,838,288,035.00	161,665,338,330.00	174,366,258,401.00	158,586,745,751.39
A.1.3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,731,895,000.00	2,643,065,000.00	2,582,006,620.00	3,685,737,300.00	6,541,825,000.00
A.1.4	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	1,449,462,044.00	1,590,340,184.42	1,765,850,145.00	2,087,612,565.00	2,056,104,818.00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>139,212,041,212.96</b>	<b>163,515,264,261.82</b>	<b>106,965,170,028.25</b>	<b>246,084,340,832.66</b>	<b>310,299,030,979.55</b>
<b>B.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,039,245,665.00</b>	<b>36,090,297,815.00</b>	<b>32,119,982,940.00</b>	<b>39,890,451,486.00</b>	<b>47,760,720,349.00</b>
B.1.1	Honorarium PNS/Non PNS	33,051,937,665.00	32,634,118,415.00	32,119,982,940.00	36,161,808,427.00	43,820,347,200.00
B.1.2	Uang Lembur	2,987,308,000.00	3,456,179,400.00	3.501.061.800,00	3,728,643,059.00	3,940,373,149.00
<b>B.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>103,072,895,547.96</b>	<b>123,948,679,446.82</b>	<b>74,352,624,588.25</b>	<b>156,642,267,169.30</b>	<b>173,962,618,821.55</b>
B.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	8,015,562,129.00	11,062,337,223.00	11.690.892.906,00	12,772,898,342.00	13,268,355,452.00
B.2.2	Belanja Bahan/Material	7,870,584,726.96	11,954,201,074.00	10.549.047.399,00	13,938,932,960.31	17,554,205,250.31
B.2.3	Belanja Jasa Kantor	19,479,060,091.00	27,047,623,952.40	35.304.774.601,00	39,524,614,491.00	40,831,770,955.00
B.2.4	Belanja Premi Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan	222,488,225.00	56,250,000.00	-	-	63,030,352.00
B.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,488,604,481.00	8,800,224,182.00	8,777,729,850.00	8,233,116,075.00	9,302,267,230.00
B.2.6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,632,838,515.00	9,908,147,069.00	11,081,106,470.00	11,930,438,518.00	11,833,610,484.00



No.	URAIAN	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
B.2.7	Belanja Makanan dan Minuman	13,290,717,112.00	15,374,705,357.00	16,943,625,512.00	20,082,907,070.00	21,954,068,195.24
B.2.8	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	3,104,069,642.00	3,045,141,900.00	2,591,123,150.00	3,240,912,050.00	3,804,350,320.00
B.2.9	Belanja Pakaian dan Atributnya	1,675,025,975.00	1,556,101,275.00	1,875,522,250.00	2,678,105,855.00	1,290,835,098.00
B.2.10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,641,326,200.00	1,041,573,100.00	891,195,800.00	987,110,830.00	866,234,800.00
B.2.11	Belanja Perjalanan Dinas	21,325,698,406.00	23,857,637,703.42	21,133,689,606.25	28,735,174,951.99	37,584,764,164.00
B.2.12	Belanja Pakaian Dinas	973,693,400.00	679,909,400.00	613,603,650.00	609,166,870.00	1,263,691,120.00
B.2.13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	1,713,182,400.00	1,095,093,400.00	1,335,404,050.00	1,595,961,810.00	2,149,149,530.00
B.2.14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS	245,000,000.00	75,000,000.00	156,460,000.00	25,050,000.00	47,300,000.00
B.2.15	Belanja Jasa Konsultasi	4,445,745,245.00	5,964,670,811.00	7,011,174,250.00	10,003,311,646.00	9,569,890,871.00
B.2.16	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1,949,299,000.00	2,430,063,000.00	1,941,990,000.00	2,206,314,000.00	2,579,095,000.00
B.2.17	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	78,251,700.00	-
<b>B.3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>99,900,000.00</b>	<b>3,476,287,000.00</b>	<b>492,562,500.00</b>	<b>49,551,622,177.36</b>	<b>88,575,691,809.00</b>
B.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	99,900,000.00	3,476,287,000.00	452,912,500.00	3,175,325,000.00	200.491.800,00
B.3.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	39,650,000.00	46,376,297,177.36	88,575,691,809.00

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



**Tabel 3.12**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2015**

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2013	709,880,778,765.96	1,155,503,067,652.69	61.43%
2	Tahun Anggaran 2014	798,237,183,530.24	1,313,056,142,744.96	60.79%
3	Tahun Anggaran 2015	761,029,763,612.25	1,481,266,107,159.49	51.38%
4	Tahun Anggaran 2016	978,051,213,191.02	1,661,059,276,785.28	58.88%
5	Tahun Anggaran 2017	1,015,665,531,670.94	1,611,319,376,906.67	63.03%

Sumber: Data Keuangan DPPKAD Kabupaten Situbondo

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan, hanya saja terdapat sedikit kenaikan prosentase dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada Tahun 2013, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 61.43% di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 60.79% di tahun 2015 turun menjadi 51.38%, di tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 58.88%, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2017 menjadi 63.03%.

Jika dikaitkan dengan realisasi belanja daerah Kabupaten Situbondo di tahun 2013 sampai dengan 2017, kualitas realisasi belanja daerah Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan karena pada tahun 2013 sampai dengan 2015 terlihat bahwa prosentase proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Situbondo mengalami penurunan tiap tahunnya hanya saja di tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sedikit mengalami kenaikan prosentase antara total belanja dengan pembiayaan pengeluaran, hal itu membuktikan bahwa Kabupaten Situbondo berhasil menekan belanja pemenuhan aparatur dan memfokuskan pada belanja modal untuk pembangunan Kabupaten Situbondo.



**Tabel 3.13**  
**Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo**  
**Tahun Anggaran 2013-2017**

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>654,029,661,711.57</b>	<b>694,566,689,604.42</b>	<b>835,947,080,646.00</b>	<b>892,406,965,058.00</b>	<b>865,645,559,005.39</b>	<b>7.58%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	571,581,417,372.00	631,245,632,268.42	653,572,031,084.00	682,415,250,181.00	616,790,808,882.39	2.19%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	37,477,962,940.00	19,254,915,000.00	40,743,020,800.00	21,802,863,000.00	31,224,614,000.00	14.93%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,488,500,000.00	5,257,780,000.00	5,792,140,000.00	609,200,000.00	7,280,000,000.00	244.41%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil ke Pemdес	-	-	2,147,725,000.00	2,298,245,000.00	2,506,981,000.00	0.00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	35,420,850,977.00	37,043,573,336.00	133,671,163,762.00	184,011,655,893.00	207,518,974,893.00	78.97%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,060,930,422.57	1,764,789,000.00	21,000,000.00	1,269,750,984.00	324,180,230.00	1459.87%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>496,073,405,941.12</b>	<b>611,080,327,801.72</b>	<b>644,081,791,432.88</b>	<b>768,652,160,248.87</b>	<b>745,673,644,883.83</b>	<b>11.23%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	47,700,670,032.00	51,322,713,542.00	55,128,659,106.00	64,674,913,944.00	79,553,679,248.00	13.83%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183,801,741,012.85	234,704,576,636.72	248,269,958,970.25	287,113,702,025.51	320,737,549,617.85	15.21%
2.2.3	Belanja Modal	264,570,994,896.27	325,053,037,623.00	340,683,173,356.63	416,863,544,279.36	345,382,416,017.98	8.22%
<b>Total Belanja</b>		<b>1,150,103,067,652.69</b>	<b>1,305,647,017,406.14</b>	<b>1,480,028,872,078.88</b>	<b>1,661,059,125,306.87</b>	<b>1,611,319,203,889.22</b>	<b>9.03%</b>

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan seluruh belanja yang harus tersedia anggarannya setiap tahun dengan baik serta bersifat rutin.

### **3.2.2 Analisis Pembiayaan**

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan Kabupaten Situbondo dalam waktu 2013-2017 dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja dan yang menyebabkan defisit riil pada tahun 2013 sebesar Rp. 40.631.761.925,788 dan tahun 2016 defisit sebesar Rp. 80.476.191.815,16. Rinciannya sebagai tabel berikut ini:





**Tabel 3.14**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,109,471,305,726.91	1,359,193,724,048.62	1,520,359,975,571.47	1,580,583,084,970.12	1,620,456,354,002.13
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,150,103,067,652.69	1,305,647,017,406.14	1,480,028,872,078.88	1,661,059,098,687.78	1,611,319,203,889.22
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,400,000,000.00	7,409,125,338.82	1,237,235,080.61	178,097.50	173,017.45
	<b>Surplus/Defisit riil</b>	<b>(46,031,761,925.78)</b>	<b>46,137,581,303.66</b>	<b>39,093,868,411.98</b>	<b>(80,476,191,815.16)</b>	<b>9,136,977,095.46</b>

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



Dari tabel 3.14 di atas dapat diketahui bahwa untuk menutup defisit riil pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan strategi pemakaian penerimaan pembiayaan, penggunaan SiLPA tahun lalu 2013-2017, pencairan dana cadangan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Selama waktu 2013-2017, penerimaan pembiayaan bersifat fluktuatif dengan perencanaan penganggaran yang dilakukan rasional dan detail sehingga pada beberapa tahun memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih tinggi daripada defisit riil.

Berikut ini merupakan data penutup defisit riil anggaran Kabupaten Situbondo pada tahun 2013-2017, rinciannya pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.15**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	127,645,485,684.10	82,557,126,214.32	128,956,511,627.98	191,177,365,876.98	110,931,022,606.73
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	23.019.770.710,02	0	39.697.266,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	943,402,456.00	261,804,110.00	107,215,127.00	229,875,164.00	203,295,601.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0			

Sumber : LKPD Kabupaten Situbondo



### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

#### **3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pada tabel berikut akan dipaparkan data mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama:



**Tabel 3.16**  
**Pengeluaran Wajib, Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

No.	URAIAN	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>585,481,985,594.57</b>	<b>645,850,059,068.42</b>	<b>781,986,615,084.00</b>	<b>863,350,324,165.00</b>	<b>821,155,675,112.39</b>	<b>9.27%</b>
1	Belanja Pegawai	571,581,417,372.00	631,245,632,268.42	653,572,031,084.00	682,415,250,181.00	616,790,808,882.39	2.19%
2	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	2,147,725,000.00	2,298,245,000.00	2,506,981,000.00	0.00%
3	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	12,839,637,800.00	12,839,637,800.00	126,245,859,000.00	177,367,078,000.00	201,533,705,000.00	234.34%
4	Belanja Tidak Terduga	1,060,930,422.57	1,764,789,000.00	21,000,000.00	1,269,750,984.00	324,180,230.00	1459.87%
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>28,828,244,699.00</b>	<b>41,490,896,509.00</b>	<b>55,063,726,782.00</b>	<b>81,849,520,924.83</b>	<b>92,447,712,871.50</b>	<b>34.56%</b>
1	BLUD	28,828,244,699.00	41,490,896,509.00	55,063,726,782.00	81,849,520,924.83	92,447,712,871.50	34.56%
	<b>TOTAL</b>	<b>614,310,230,293.57</b>	<b>687,340,955,577.42</b>	<b>837,050,341,866.00</b>	<b>945,199,845,089.83</b>	<b>913,603,387,983.89</b>	<b>10.85%</b>

Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Tim Tahun 2018



Total pengeluaran Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama yang dikeluarkan Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 relatif mengalami kenaikan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, pada tahun 2013 belanja tidak langsung Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 585,481,985,594.57, di tahun 2014 naik menjadi Rp. 645,850,059,068.42, mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi Rp. 781,986,615,084.00, di tahun 2016 meningkat kembali menjadi Rp. 863,350,324,165.00 dan di tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 821,155,675,112.39. Sama halnya dengan belanja tidak langsung, tidak demikian dengan belanja langsung Kabupaten Situbondo yang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 28,828,244,699.00, ke tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 41,490,896,509.00, di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 55,063,726,782.00, di tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 81,849,520,924.83 dan tahun 2014 Rp. 50.116.474.750,07 di tahun 2015 menjadi Rp.56.887.208.726,77.

### **3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah**

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2013-2017 sebesar 10,21% per tahun. Pencapaian realisasi tersebut disamping karena adanya kebijakan keuangan yang sumbernya adalah penerimaan daerah termasuk pendapatan daerah. Sedangkan proyeksi pendapatan daerah 2018-2021 sebesar 10-15% diasumsikan tidak adanya perubahan signifikan terhadap kebijakan keuangan daerah Kabupaten Situbondo sehingga berdampak terhadap penerimaan daerah. Maka proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018-2021 Kabupaten Situbondo sebagai berikut:



**Tabel 3.17**  
**Capaian dan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (juta rupiah) Tahun 2016-2021**

No.	Uraian	Tahun 2016 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018 (Perda RPJMD)	Raperda P- APBD Tahun 2018	Tahun 2019 (Perda RPJMD)	Raperda APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Rata- rata Pertum- bahan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,650,555.10</b>	<b>1,580,583.08</b>	<b>1,788,208.19</b>	<b>1,620,456.35</b>	<b>1,930,854.01</b>	<b>1,729,391.76</b>	<b>2,035,971.16</b>	<b>1,685,683.32</b>	<b>1,990,144.97</b>	<b>2,065,681.41</b>	<b>5.71%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>163,808.26</b>	<b>173,836.18</b>	<b>162,503.98</b>	<b>228,523.66</b>	<b>170,260.54</b>	<b>178,279.87</b>	<b>178,455.18</b>	<b>189,329.08</b>	<b>190,216.42</b>	<b>192,118.58</b>	<b>3.43%</b>
1.1.1.	Pajak daerah	26,499.88	30,080.83	31,074.04	38,950.56	34,181.45	38,317.09	37,599.59	38,449.89	37,975.89	38,355.65	5.59%
1.1.2.	Retribusi daerah	13,843.16	13,682.60	15,428.30	9,402.29	17,272.50	12,392.96	18,999.75	14,682.14	14,579.05	14,724.84	3.86%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4,301.57	4,316.45	5,095.99	4,047.07	5,221.38	4,261.37	5,359.31	4,243.13	4,285.56	4,328.41	0.13%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	119,163.64	125,756.30	110,905.65	176,123.75	113,585.21	123,308.45	116,496.54	131,953.92	133,375.92	134,709.68	3.83%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,064,336.95</b>	<b>1,171,851.14</b>	<b>1,143,005.75</b>	<b>1,091,000.19</b>	<b>1,227,627.75</b>	<b>1,224,084.67</b>	<b>1,299,506.96</b>	<b>1,274,091.87</b>	<b>1,359,701.60</b>	<b>1,421,649.61</b>	<b>4.13%</b>
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	81,941.76	74,028.88	86,858.26	70,312.04	92,069.76	93,095.18	97,593.95	133,117.89	93,095.18	94,095.18	8.28%
1.2.2.	Dana alokasi umum	821,084.39	821,084.39	886,771.14	806,660.58	957,712.84	806,660.58	1,015,175.61	831,861.64	868,168.45	889,872.66	1.65%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	161,310.80	276,737.87	169,376.34	214,027.57	177,845.15	324,328.90	186,737.41	309,112.35	398,437.97	437,681.77	12.59%
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>422,409.90</b>	<b>234,895.76</b>	<b>482,698.47</b>	<b>300,932.50</b>	<b>532,965.72</b>	<b>327,027.22</b>	<b>558,009.01</b>	<b>222,262.37</b>	<b>440,226.95</b>	<b>451,913.22</b>	<b>21.09%</b>
1.3.1	Hibah	6,224.33	6,709.84	-	-	-	52,042.45	-	-	52,042.45	52,042.45	0.00%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	77,598.25	78,067.24	83,806.11	101,312.84	90,510.59	85,067.52	97,751.44	76,622.20	93,786.94	98,476.29	6.24%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	275,928.92	87,460.28	333,101.04	111,434.59	373,374.24	141,880.39	387,722.64	145,640.17	149,063.08	152,789.66	12.45%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	62,658.40	62,658.40	65,791.32	88,185.07	69,080.89	48,036.87	72,534.93	-	145,334.48	148,604.82	0.00%





No.	Uraian	Tahun 2016 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018 (Perda RPJMD)	Raperda P- APBD Tahun 2018	Tahun 2019 (Perda RPJMD)	Raperda APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Rata- rata Pertum- buan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,757,230.90</b>	<b>1,661,059.13</b>	<b>1,832,958.19</b>	<b>1,611,319.20</b>	<b>1,967,604.01</b>	<b>1,849,288.30</b>	<b>2,067,721.16</b>	<b>1,749,683.32</b>	<b>1,962,594.96</b>	<b>2,020,831.41</b>	<b>4.30%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>980,076.11</b>	<b>892,406.97</b>	<b>1,076,471.71</b>	<b>865,645.56</b>	<b>1,175,335.44</b>	<b>965,422.43</b>	<b>1,251,056.59</b>	<b>1,015,684.55</b>	<b>1,015,326.34</b>	<b>1,033,256.22</b>	<b>3.09%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	783,384.92	682,415.25	813,730.23	616,790.81	863,314.72	708,491.50	917,102.52	720,486.33	739,092.87	746,483.80	2.11%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	4,496.99	21,802.86	5,061.81	31,224.61	5,697.58	32,646.76	6,413.19	32,421.93	39,502.58	43,452.84	15.78%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,000.00	609.2	1,100.00	7,280.00	1,200.00	8,432.50	1,300.00	14,185.00	10,203.33	11,223.66	232.20%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil ke Pendes	2,298.25	2,298.25	4,051.35	2,506.98	4,706.32	2,929.19	5,176.95	5,431.76	2,988.07	3,017.95	13.47%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	184,395.95	184,011.66	248,028.32	207,518.97	295,916.84	210,864.47	316,563.93	241,217.39	221,539.49	227,077.97	4.62%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,500.00	1,269.75	4,500.00	324.18	4,500.00	2,058.01	4,500.00	1,942.14	2,000.00	2,000.00	91.54%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>777,154.78</b>	<b>768,652.16</b>	<b>756,486.48</b>	<b>745,673.64</b>	<b>792,268.56</b>	<b>883,865.88</b>	<b>816,664.56</b>	<b>733,998.77</b>	<b>947,268.63</b>	<b>987,575.18</b>	<b>6.38%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	73,055.65	64,674.91	71,112.75	79,553.68	74,476.41	81,727.57	76,769.73	80,915.49	87,930.69	89,689.31	7.08%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293,915.32	287,113.70	286,098.69	320,737.55	299,631.26	386,954.80	308,857.68	370,415.53	412,642.00	428,855.14	8.68%
2.2.3	Belanja Modal	410,183.81	416,863.54	399,275.04	345,382.42	418,160.90	415,183.51	431,037.15	282,667.75	446,695.94	469,030.73	6.83%
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>											
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	106,675.79	191,177.37	44,750.00	110,931.02	36,750.00	119,896.55	31,750.00	64,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00%



No.	Uraian	Tahun 2016 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018 (Perda RPJMD)	Raperda P- APBD Tahun 2018	Tahun 2019 (Perda RPJMD)	Raperda APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Rata- rata Pertum- buan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	229.88	-	114.84	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>106,675.79</b>	<b>191,407.25</b>	<b>44,750.00</b>	<b>111,045.86</b>	<b>36,750.00</b>	<b>119,896.55</b>	<b>31,750.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>											0.00%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.5	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>106,675.79</b>	<b>191,407.07</b>	<b>44,750.00</b>	<b>111,045.86</b>	<b>36,750.00</b>	<b>119,896.55</b>	<b>31,750.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00%</b>

Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Tim Tahun 2018



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo 2016-2021 mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Nilai proyeksi pendapatan belanja daerah Kabupaten Situbondo meliputi 3 hal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan Tahun 2016 sebesar Rp. 1,580,583,084,970.12, realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 1,620,456,354,002.13, pada Raperda P-APBD Tahun 2018 pendapatannya sebesar Rp 1,729,391,756,376.90, sedangkan pada RAPBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.685.683.318.801,95, untuk proyeksi Tahun 2020 sebesar Rp. 1,952,144,964,415.84 dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2,025,681,406,004.36. Total pendapatan tersebut terdiri dari jumlah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan perkiraan Dana transfer masih mendominasi sumber pendapatan Kabupaten Situbondo. Besaran PAD yang muncul dari tahun 2016-2021 tidak hanya diprediksikan melalui rata-rata pertumbuhan masa lalu saja, melainkan melihat perkembangan potensi daerah yang dimiliki. Sehingga tahun 2016 PAD Kabupaten Situbondo Rp. 173,836,184,925.12, tahun 2017 sebesar Rp. 228,523,663,374.13, tahun 2018 turun menjadi Rp. 178,279,865,796.90, tahun 2019 sebesar Rp. 189.329.081.154,95, tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 190,216,411,966.56, dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 192,118,576,086.23.

Adapun proyeksi belanja Kabupaten Situbondo tahun 2016 hingga tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Total belanja di tahun 2016 mencapai Rp. 1,661,059,125,306.87, di tahun 2017 turun menjadi Rp. 1,611,319,203,889.22, di tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1,849,288,303,240.09, di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.749.683.318.801,95 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp. 1,962,594,964,415.84, dan tahun 2021 mencapai Rp. 2,020,831,406,004.36. Total belanja tersebut diperoleh dari total belanja tidak langsung dan belanja langsung Kabupaten Situbondo. Belanja tidak langsung Kabupaten Situbondo diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Adapun belanja langsung Kabupaten Situbondo juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sesuai dengan tabel 3.18. Sedangkan proyeksi pengeluaran periodik dan mengikat yang tidak dapat dihindari untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.



**Tabel. 3.18**  
**Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Situbondo (juta rupiah) Tahun 2016-2021**

No.	URAIAN	Tahun 2016 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018 (Perda RPJMD)	Raperda P- APBD Tahun 2018	Tahun 2019 (Perda RPJMD)	Raperda APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Rata- rata Pertum- buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>967,946.06</b>	<b>863,350.33</b>	<b>1,062,306.65</b>	<b>821,155.68</b>	<b>1,158,198.69</b>	<b>918,096.53</b>	<b>1,232,490.77</b>	<b>958,002.78</b>	<b>958,507.48</b>	<b>971,156.22</b>	<b>2.53%</b>
1	Belanja Pegawai	783,384.92	682,415.25	813,730.23	616,790.81	863,314.72	708,491.50	917,102.52	720,486.33	739,092.87	746,483.80	2.11%
2	Belanja Bagi Hasil	2,298.25	2,298.25	4,051.35	2,506.98	4,706.32	2,929.19	5,176.95	5,431.76	2,988.07	3,017.95	13.47%
3	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	177,762.89	177,367.08	240,025.07	201,533.71	285,677.65	204,617.83	305,711.30	230,142.54	214,426.54	219,654.47	4.65%
4	Belanja Tidak Terduga	4,500.00	1,269.75	4,500.00	324.18	4,500.00	2,058.01	4,500.00	1,942.14	2,000.00	2,000.00	91.54%
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>102,841.69</b>	<b>103,152.15</b>	<b>100,514.29</b>	<b>99,407.22</b>	<b>103,514.29</b>	<b>111,798.71</b>	<b>106,014.29</b>	<b>114,611.78</b>	<b>115,757.90</b>	<b>116,915.48</b>	<b>2.67%</b>
1	BLUD	102,841.69	103,152.15	100,514.29	99,407.22	103,514.29	111,798.71	106,014.29	114,611.78	115,757.90	116,915.48	2.67%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,070,787.75</b>	<b>966,502.48</b>	<b>1,162,820.94</b>	<b>920,562.90</b>	<b>1,261,712.98</b>	<b>1,029,895.24</b>	<b>1,338,505.06</b>	<b>1,072,614.56</b>	<b>1,074,265.38</b>	<b>1,088,071.70</b>	<b>2.54%</b>

Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Tim Tahun 2018



### **3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Situbondo diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2017 daya serap anggaran, pada belanja langsung realisasinya cukup tinggi dari anggaran yang ada.

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari akumulasi pendapatan, pencairan dana cadangan, SiLPA dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Adapun gambaran kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.19**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (juta rupiah)**  
**Tahun 2016 – 2021**

No.	Uraian	Tahun 2016 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018 (Perda RPJMD)	Raperda Perubahan APBD Tahun 2018	Tahun 2019 (Perda RPJMD)	RKPD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Rata- rata Pertum- buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan	1,650,555.10	1,580,583.08	1,788,208.19	1,620,456.35	1,930,854.01	1,729,391.76	2,035,971.16	1,685,683.32	1,990,144.97	2,065,681.41	5.71%
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	106,675.79	191,177.37	44,750.00	110,931.02	36,750.00	119,896.55	31,750.00	64,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00%
	<b>Total penerimaan</b>	<b>1,757,230.89</b>	<b>1,771,760.45</b>	<b>1,832,958.19</b>	<b>1,731,387.37</b>	<b>1,967,604.01</b>	<b>1,849,288.31</b>	<b>2,067,721.16</b>	<b>1,749,683.32</b>	<b>2,050,144.97</b>	<b>2,115,681.41</b>	<b>3.90%</b>
	Dikurangi:											
4	Belanja Tidak Langsung	967,946.06	863,350.33	1,062,306.65	821,155.68	1,158,198.69	918,096.53	1,232,490.77	958,002.78	958,507.48	971,156.22	2.53%
5	Pengeluaran Pembiayaan											
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>789,284.83</b>	<b>908,410.12</b>	<b>770,651.54</b>	<b>910,231.70</b>	<b>809,405.32</b>	<b>931,191.78</b>	<b>835,230.39</b>	<b>791,680.54</b>	<b>1,091,637.49</b>	<b>1,144,525.19</b>	<b>6.05%</b>

Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Tim Tahun 2018



Total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia tersebut, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja operasional kantor (Rutin) dan belanja-belanja tidak langsung seperti:; belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Adapun gambaran pembagian tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.20**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo (juta rupiah) Tahun 2016-2021**

No.	URAIAN	Tahun 2016 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018 (Perda RPJMD)	Raperda P- APBD Tahun 2018	Tahun 2019 (Perda RPJMD)	RKPD Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertum- buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	<b>Kapasitas Riil</b>	<b>789,284.83</b>	<b>908,410.12</b>	<b>770,651.54</b>	<b>910,231.70</b>	<b>809,405.32</b>	<b>931,191.78</b>	<b>835,230.39</b>	<b>791,680.54</b>	<b>1,091,637.49</b>	<b>1,144,525.19</b>	<b>5.29%</b>
1	Prioritas I	408,656.65	413,523.86	531,108.04	438,425.61	524,676.01	486,306.04	556,360.87	438,855.39	623,693.92	648,894.58	10.67%
2	Prioritas II	128,298.21	153,412.64	132,653.39	124,991.77	167,477.85	148,303.05	154,913.39	185,857.54	160,211.60	159,649.12	2.26%

Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Tim Tahun 2018







## **4.1 Permasalahan Pembangunan**

### **4.1.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **4.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih Rendahnya angka rata-rata lama sekolah.
- b. Belum teridentifikasinya kebutuhan guru agama disetiap jenjang pendidikan.
- c. Tingginya angka putus sekolah pada tingkat SMA karena faktor ekonomi.
- d. Masih melekat kuat budaya masyarakat untuk menikahkan anak-anak pada usia muda.
- e. Tenaga pendidik yang berkompeten/profesional belum merata.
- f. Perencanaan pembelajaran belum dilakukan secara benar.
- g. Pelaksanaan pembelajaran kurang didukung oleh Modul, buku yang cukup.
- h. Rendahnya Dunia usaha dalam pengembangan pendidikan.
- i. Belum terpenuhinya sarana pembelajaran.
- j. Belum terpenuhinya Prasarana (ruang kelas, ruang penunjang pembelajaran) yang standar sesuai dengan SPM.
- k. Rendahnya pemanfaatan dan penyebaran Pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan.

##### **2. Kesehatan**

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurang optimalnya pemanfaatan kartu BPJS oleh masyarakat.



- b. Tenaga paramedis banyak yang belum memiliki standart kompetensi kinerja.
- c. Pola asuh dan kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab adanya gizi buruk.
- d. Adanya penolakan orang tua bayi terhadap pentingnya imunisasi sehingga imunisasi dilakukan secara tidak lengkap.
- e. Sebagian masyarakat masih enggan memeriksakan kehamilannya pada usia muda, dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di usia kehamilan yang masih muda itu pamali dan mengakibatkan akan kehilangan bayinya.
- f. Kondisi geografis yang sulit khususnya di wilayah terpencil.
- g. Tidak semua bidan terlatih SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang).
- h. Kurangnya tenaga kesehatan, meliputi: dokter spesialis (anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan & kandungan, anestesi, jantung, radiologi, rehabilitasi medik), dokter umum, apoteker, analis farmasi, radiografer, dan ahli madya fisioterapi di RSUD.

### **3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah:

- a. Terdapat ruas jalan kabupaten yang merupakan akses pusat perekonomian, pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan dan usulan masyarakat.
- b. Produk hukum terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang sangat diperlukan mengingat perkembangan investasi dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Situbondo semakin hari semakin berkembang dengan pesat, sementara RTRW yang ada belum bisa menjangkau secara detail mengatur tentang pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Situbondo.
- c. Ketersediaan peta skala besar dalam penyusunan rencana rinci.

### **4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Terdapat beberapa permasalahan perumahan diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk RTH
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penanganan sampah
- c. Masih banyak penduduk yang menggunakan sungai sebagai fasilitas MCK
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sistem drainase perumahan.
- e. Belum ada pemisahan antara drainase air limbah dan drainase air hujan.
- f. Masih rendahnya akses sanitasi layak di Kabupaten Situbondo.
- g. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.



## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah:

- a. Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang masa berlakunya sudah habis dan Ormas baru juga tidak memberitahukan keberadaannya/ belum mendaftar.
- b. Masih lemahnya pemahaman tentang sejarah Bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari sikap, tingkah laku dan perbuatan yang timbul hanya didasarkan pada kepentingan tertentu.
- c. Kesadaran masyarakat dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat masih rendah.
- d. Terdapat Peraturan Daerah lama yang harus direvisi dan dibenahi.
- e. Kurang adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang mempunyai Sertifikat PPNS, sehingga penindakan untuk pelanggaran perda tidak menimbulkan efek jera.
- f. Pemadam Kebakaran hanya berada di daerah kota saja, sehingga jangkauan tidak mencapai target waktu yang telah ditentukan.
- g. Kurangnya personil yang memiliki keahlian di bidang kebencanaan.
- h. Kurangnya kemampuan/ keahlian kebencanaan yang dimiliki.
- i. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- j. Pemetaan daerah-daerah rawan bencana terutama daerah rawan longsor dan banjir.

## **6. Sosial**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah:

- a. Terbatasnya waktu dalam penyerapan anggaran berakibat pada minimnya penyerapan anggaran.
- b. Dukungan administrasi kurang lengkap dalam pelaksanaan bantuan sosial pada masyarakat.
- c. Data PMKS masih belum valid.

### **4.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan tenaga kerja di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Informasi pasar kerja belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat, latar pendidikan yang rendah.
- b. Sumber daya manusia pencari kerja masih rendah.

#### **2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Situbondo, diantaranya :



- a. Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan.
- b. Minimnya pendidikan, pengetahuan dan skill kaum perempuan sehingga kurang memiliki daya saing di dunia kerja.
- c. Kurangnya pemahaman tentang pemenuhan hak, tumbuh kembang dan perlindungan anak dimasyarakat.
- d. Belum semua pemangku kepentingan/pengelola pembangunan yang memahami Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan.
- e. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **3. Pangan**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan pangan di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Anomali iklim berdampak pada para pelaku usaha dan pelaku utama enggan untuk meningkatkan produksi padi sebagai ketersediaan pangan.
- b. Dukungan lintas sektor masih belum optimal.

### **4. Lingkungan Hidup**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Keterbatasan pelaku usaha/kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan sekitar tempat usahanya berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki.
- b. Terbatas abrasi pantai yang disebabkan karena terkikisnya tanah oleh ombak sehingga pantai tidak terlindungi oleh tanaman mangrove.
- c. Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat tanaman peneduh di bahu jalan.

### **5. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dokumen kependudukan masih rendah.
- b. Ketidaksamaan data penduduk antara yang ada di Kartu Keluarga dengan data pendukung lainnya.
- c. Pindah datang penduduk tidak melapor sehingga terjadi data ganda.
- d. Ada beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan desa dan pusat pemerintahan kecamatan.
- e. Kapasitas sumber daya aparatur yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas.



## **6. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Pemerintahan Desa kurang berfungsi dengan baik.
- b. Desa tidak berbasis teknologi informasi/ *E-Government*.
- c. Partisipasi masyarakat terhadap peran pembangunan masih sedikit.
- d. Masih rendahnya tingkat Pendidikan di desa.
- e. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

## **7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Masih tingginya jumlah anak dalam keluarga yaitu berkisar 2,8 per keluarga
- b. Tingginya angka usia pernikahan pertama di bawah 20 tahun.
- c. Masyarakat masih banyak menggunakan kontrasepsi non MKPJ (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti kondom, pil dan suntik.

## **8. Perhubungan**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan perhubungan di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Belum adanya database dan peta sarana prasarana lalu lintas yang lengkap
- b. Belum adanya Ring Road (Jalan Lingkar Kabupaten).
- c. Kurangnya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Situbondo.

## **9. Komunikasi dan Informatika**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Kurangnya Pembinaan terhadap masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.
- b. Kurangnya peran serta SDM yang tersedia dalam memasyarakatkan teknologi pada masyarakat.

## **10. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran koperasi untuk melaksanakan RAT, padahal RAT hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap koperasi.
- b. Aspek Manajemen dan Permodalan serta Aspek Usaha yang dijalankan oleh Koperasi masih rendah.
- c. Rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikro untuk beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi.



## **11. Penanaman Modal**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan penanaman modal di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Masih minimnya sosialisasi ketingkat pelaku usaha selaku penanaman modal khususnya di luar daerah dan juga pelaku usaha mikro khususnya yang ada di daerah-daerah.
- b. Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi khususnya informasi.

## **12. Kepemudaan dan Olah Raga**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Belum optimalnya pencapaian prestasi yang dapat diinginkan dikarenakan kurangnya sumber daya atlet.
- b. Belum bisa mengikutsertakan semua cabang olahraga.

## **13. Statistik**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan statistik di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Data-data statistik yang disajikan merupakan data pencapaian tahun sebelumnya sehingga belum bisa melihat data kondisi terkini.
- b. Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh Statistik dengan data yang disajikan oleh OPD.

## **14. Kebudayaan**

Ada permasalahan untuk urusan kebudayaan di Kabupaten Situbondo yaitu: belum optimalnya pengakuan jumlah seni dan budaya lokal pada jenjang regional.

## **15. Perpustakaan**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan perpustakaan di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Koleksi buku yang dimiliki masih kurang.
- b. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung.
- c. Tenaga pustakawan masih kurang.

## **16. Kearsipan**

Ada permasalahan untuk urusan kearsipan di Kabupaten Situbondo, yaitu: ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih terbatas dari kualitas dan kuantitas (terutama tenaga Arsiparis) dalam mengembangkan konsep birokrasi sebagai informasi yang terdiri dari elemen regulasi, teknologi informasi dan kontrol masyarakat dalam rangka mendukung pelayanan publik.





#### **4.1.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

##### **1. Kelautan dan Perikanan**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Terdapat kecenderungan menurunnya produksi perikanan tangkap sebagai dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.
- b. Kurangnya kesadaran nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang mengakibatkan potensi menurunnya plasma nutfah sumberdaya ikan dan terjadinya *overfishing*.

##### **2. Pariwisata**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan pariwisata di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Kompetensi SDM yang masih terbatas dalam bidang kepariwisataan.
- b. Masih belum maksimalnya promosi kepariwisataan.
- c. Masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata dalam pengembangan wisata.

##### **3. Pertanian**

Ada beberapa permasalahan urusan pertanian, diantaranya:

- a. Anomali iklim merupakan masalah yang sulit diatasi dalam permasalahan penurunan produksi.
- b. Serangan hama pada tanaman.
- c. Kelembagaan dan SDM kelompok tani masih kurang dalam penerapan teknologi budidaya pertanian.
- d. Penyembelihan betina produkti.
- e. Kesadaran pelaku usaha bidang peternakan (jagal) masih rendah.
- f. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan.
- g. Rendahnya pemanfaatan limbah ternak.

##### **4. Perdagangan**

Ada beberapa permasalahan untuk perdagangan di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kemetrolgian belum memadai (Penera dan Penera Ahli).
- b. Banyak beredar mamin yang tidak memiliki PIRT dan standar label.
- c. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan pihak ke 3 atau suplier besar untuk melakukan transaksi ekspor impor karena kurangnya pemahaman terhadap aturan regulasi ekspor impor.



- d. Penataan pedagang pasar yang masih kurang teratur dan minimnya fasilitas penunjang sarana perdagangan.

## **5. Perindustrian**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan perindustrian di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Minimnya akses permodalan dan sarpras produksi bagi IKM.
- b. Kurangnya diversifikasi produk.
- c. Kurangnya pengetahuan manajemen produksi dan usaha.
- d. Kurangnya kesadaran IKM atas pentingnya legalitas usaha.
- e. Kurangnya akses informasi pasar perdagangan, promosi dan pameran IKM.

## **6. Transmigrasi**

Ada beberapa permasalahan untuk urusan transmigrasi di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Bila dilihat formasi dari Petugas Lapangan dan Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi/Posyantrans bahwa secara umum animo pendaftar calon transmigrasi masih memilih lokasi transmigrasi.
- b. Alokasi target penempatan transmigrasi yang diberikan dari Provinsi Jawa Timur belum sesuai dengan volume pendaftar calon transmigrasi sehingga pendaftar calon transmigrasi semakin menumpuk dan tidak menutup kemungkinan banyak pendaftar calon transmigrasi yang mengundurkan diri.

### **4.1.1.4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan senantiasa berkembang dan dinamis yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Situbondo dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Berbagai permasalahan baik dari pendekatan perencanaan *bottom up*, *top down*, politis maupun teknokratis harus terus diminimalisir dengan peningkatan kinerja yang ada. Ada beberapa permasalahan untuk urusan transmigrasi di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Peningkatan SDM perencana pada lembaga perencanaan dan PD.
- b. Kurang optimalnya fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan.
- c. Pengelolaan data yang kurang memadai.

#### **2. Keuangan**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak semua SDM perencana perangkat daerah memiliki kompetensi dalam bidang penganggaran.





- b. OPD sering mengalami keterlambatan dalam melakukan rekonsiliasi aset tetap.
- c. Terdapat OPD yang tidak melaporkan hal-hal yang terjadi terkait penggunaan Barang Milik Daerah.
- d. Terbatasnya biaya untuk pemeliharaan aset tetap yang telah memiliki usia ekonomis di atas 10 tahun.
- e. Adanya data PBB yang belum valid sehingga ada ketetapan yang tidak terealisasi.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak & retribusi.
- g. Lemahnya penegakan sanksi bagi WP/ WR yang melanggar ketentuan.

### **3. Penelitian dan Pengembangan**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Terbatasnya data terkini yang terkendala rilis oleh BPS ataupun oleh OPD terkait sehingga penelitian pengembangan tahun berjalan seringkali menggunakan data tahun n-1.
- b. Belum adanya pemetaan penelitian.

### **4. Pengawasan**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Obyek pemeriksaan meningkat sedangkan jumlah Aparat Pengawasan Fungsional terbatas.
- b. Rendahnya pemahaman pimpinan entitas untuk menindaklanjuti Rekomendasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan manajemen.

### **5. Sekretariat Daerah**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Masih belum sepenuhnya ASN dalam OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo memahami tentang SAKIP.
- b. Hampir semua OPD telah menyusun Perjanjian Kinerja hingga ke level staf, namun sasaran program maupun sasaran kegiatan, serta indikatornya masih belum benar.
- c. Kurang maksimalnya PAD yang disetoroleh BUMD ke Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- d. Banyaknya penambang ilegal.
- e. PAD dari sektor pertambangan masih rendah.
- f. Berubahnya Peraturan Perundang-undangan.
- g. Kesulitan dalam penanganan kasus perdata terkait dengan aset daerah.
- h. Belum optimalnya Jaringan Wabsite JDIH.



- i. Peran OPD dalam percepatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
- j. Peran serta pengelola pengadaan dan penyedia barang/ jasa dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan barang/ jasa.
- k. Peran OPD dalam perencanaan paket pekerjaan yang akan dilelang.

## **6. Sekretariat DPRD**

Permasalahan yang dihadapi adalah perlu meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Solusi ditawarkan atas permasalahan tersebut adalah mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi kinerja DPRD.

### **4.1.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan capaian kinerja yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi: kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Adanya keterbatasan kapasitas keuangan daerah maka tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat.

Adanya integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah lainnya merupakan prasyarat terwujudnya perencanaan yang ideal. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap pemerintah di bidang pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Penelaahan kebijakan pembangunan



nasional dan daerah lainnya merupakan salah satu indentifikasi faktor-faktor eksternal yang memiliki tujuan untuk memperoleh poin-poin kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional selama kurun waktu tahun 2015-2019 difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan beberapa wilayah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Secara spesifik, RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali meliputi:

- a. Lumbung pangan nasional;
- b. Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
- c. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Kebijakan nasional tersebut, menjadi dasar telaahan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 yang dirumuskan melalui kebijakan umum dan kebijakan kewilayahan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan umum perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan;
- b. Mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil Negara;
- c. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan *Skill* dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat);
- d. Optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Sedangkan kebijakan kewilayahan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur meliputi:

- a. Pemerataan pembangunan antarwilayah dengan memperkecil dikotomi antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan melalui keterkaitan kegiatan



ekonomi antara perkotaan dan perdesaan serta keseimbangan pengembangan wilayah utara-selatan Jawa Timur dan Pulau Madura dengan tetap didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki;

- b. Peningkatan pembangunan kewilayahan melalui pembangunan infrastruktur yang saling terkait sehingga meningkatkan daya saing daerah terutama pada wilayah yang relatif tertinggal dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan menyeimbangkan pengembangan ekonomi wilayah;
- c. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi pada wilayah-wilayah terpencil dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Peningkatan fungsi kawasan lindung, kelestarian sumber daya alam dan optimasi fungsi kawasan budidaya sebagai upaya perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan;
- e. Peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
- f. Pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam rangka meningkatkan;
- g. Kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat perkembangan wilayah dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan;
- h. Peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan wilayah, agar terjadi keselarasan didalam pembangunan kawasan perbatasan antar provinsi dan antar kabupaten/kota sesuai dengan potensi daerah.

Adapun pembagian *cluster* kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur adalah *Cluster Agropolitan Madura*, *Cluster Agropolitan Ijen*, *Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru*, *Cluster Agropolitan Wilis*, *Cluster Metropolitan*, *Cluster Segitiga Emas*, *Cluster Regional Kelud*, *Cluster Pesisir* dan *Pulau-pulau Kecil*. Secara spesifik arahan pengembangan kewilayahan kawasan Ijen yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Ijen (terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi), serta Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso) sehingga *Cluster Agropolitan Ijen* ditetapkan pada Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi dengan arahan sebagai berikut:



- a. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan untuk memperkuat peran sebagai kawasan agropolitan;
- b. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal secara optimal dan mendukung industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional;
- c. Pengembangan perdagangan dan jasa agribisnis yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di kawasan Gunung Ijen;
- d. Pengembangan klaster komoditi unggulan guna percepatan pertumbuhan komoditi dan pengorganisasian pengembangan komoditi di kawasan agropolitan Ijen;
- e. Perluasan pemasaran produk dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional;
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi dengan fokus pada sektor agrobisnis, khususnya inovasi riset yang mampu membuat keunggulan kompetitif pada sektor unggulan;
- g. Penguatan koordinasi kelembagaan didalam *cluster* agropolitan Ijen untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan;
- h. Peningkatan kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan;
- i. Peningkatan kerjasama dengan Provinsi Bali dalam pengembangan ekonomi diwilayah perbatasan;
- j. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia;
- k. Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian.

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan secara internal identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berasal dari internal meliputi:

#### **4.1.2.1 Permasalahan Sumber Daya Manusia**

Keberadaan sumber daya manusia dalam proses pembangunan daerah memiliki peran yang penting, dikarenakan kedudukan mereka dalam pembangunan adalah sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri. Sumber daya



manusia yang berkualitas akan menjadi daya ungkit utama bagi Pemerintah Daerah untuk mampu bersaing dalam pembangunan daerah, sehingga diharapkan dimasa datang dapat meningkatkan daya saing yang lebih tinggi.

Berbicara tentang kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan permasalahan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk mampu menyediakan layanan dasar tersebut dalam rangka mendukung cita-cita Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketercapaian pembangunan sumber daya manusia oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)/ Angka Harapan Hidup; Pengetahuan (*knowledge*); Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perkembangan IPM Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal demikian menunjukkan ketercapaian pembangunan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Situbondo selalu mengalami peningkatan. Meskipun demikian, ketercapaian IPM Kabupaten Situbondo tersebut masih berada dibawah ketercapaian IPM Provinsi Jawa Timur sehingga masih menempatkan Kabupaten Situbondo pada peringkat di kelompok bawah dari seluruh Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Keadaan yang demikian tentu membutuhkan perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Terlebih Pemerintah Daerah dihadapkan pada kondisi diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang menuntut adanya daya saing yang tinggi karena dengan diberlakukannya MEA maka perdagangan barang atau jasa dan pasar tenaga kerja profesional dibuka secara bebas antar wilayah dan antar negara.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan komposit dari dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak masyarakat. IPM berdasarkan sudut pandang dimensi pendidikan dapat dilihat berdasarkan 2 variabel yaitu angka rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*/MYS) dan angka harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling*/EYS).

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dipergunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat pula didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang



telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Adapun capaian angka rata-rata lama Sekolah masyarakat Kabupaten Situbondo tertuang dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kabupaten Situbondo	5.28	5.54	5.67	5.68	6.03
Provinsi Jawa Timur	6.90	7.05	7.10	7.23	7.34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Situbondo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah masyarakat hanya mencapai tingkat pendidikan kelas 5 sekolah dasar. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten mampu meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah sampai pada tingkat pendidikan dasar kelas 6 (6,03). Meskipun setiap tahun capaian rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Situbondo selalu mengalami peningkatan, namun capaian tersebut masih berada di bawah ketercapaian rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur yang berada pada kisaran angka 6.9 - 7.34. Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah sehingga masyarakat dapat mencapai pendidikan dasar 9 tahun.

**Tabel 4.2**  
**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

<b>Angka Harapan Lama Sekolah</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kabupaten Situbondo	12,90	12,97	12,98	12,99	13,00
Provinsi Jawa Timur	12,17	12,45	12,66	12,98	13,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018

Selanjutnya capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Situbondo sampai dengan Tahun 2016 berada di atas capaian angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Timur. Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Di asumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan lama sekolah dipergunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Secara umum dapat dijelaskan bahwa ketercapaian pembangunan sumber daya manusia berdasarkan dimensi pendidikan di Kabupaten





Situbondo sudah menunjukkan adanya *trend* positif, namun masih membutuhkan peningkatan diberbagai sektor.

Selain dimensi pendidikan, pembangunan sumberdaya manusia juga dipengaruhi oleh capaian kinerja dimensi kesehatan. Dimana secara umum capaian kinerja dimensi kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

**Tabel 4.3**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kabupaten Situbondo	68,03	68,08	68,28	68,41	68,53
Provinsi Jawa Timur	70,34	70,45	70,68	70,74	70,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018

Adapun capaian AHH Kabupaten Situbondo masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur yaitu pada angka 68 tahun. Terus bertambahnya angka harapan hidup di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya perbaikan kesehatan dan kualitas hidup yang semakin baik di Kabupaten Situbondo. Meskipun demikian, capaian tersebut masih membutuhkan peningkatan karena ketercapaian AHH Kabupaten Situbondo masih berada di bawah capaian AHH Provinsi Jawa Timur.

#### **4.1.2.2 Perekonomian dan Daya Saing**

Sesuai dengan misi ke 5 dan misi ke 6 Pemerintah Pusat yaitu mewujudkan bangsa berdaya saing dan Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mendukung ketercapaian misi tersebut dengan tetap memperhatikan potensi daerah yang dimiliki. Salah satu karakteristik tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) adalah terselenggaranya perekonomian dengan baik yang dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan daya saing masyarakat.

Pembangunan sektor ekonomi di daerah harus dapat di ukur untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian kinerja sebagai bahan evaluasi pembangunan ekonomi dan sebagai bahan perencanaan di masa akan datang. Salah satu indikator untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan takaran/indikator makro yang dipergunakan untuk mengamati perekonomian suatu wilayah atau daerah. Bagi Pemerintah Daerah seperti Kabupaten Situbondo, PDRB dipergunakan sebagai alat untuk mengukur/mengevaluasi perekonomian dan sebagai landasan untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.





Berdasarkan penghitungannya, terdapat 2 jenis PDRB yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan PDRB yang perhitungannya berdasarkan harga tahun yang sedang berjalan atau harga tahun yang sedang berlaku (*at current in*), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan harga suatu tahun yang tetap/konstan yang dipakai sebagai tahun dasar. Tujuan menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah untuk melihat perkembangan PDRB/ perekonomian secara riil yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, baik inflasi maupun deflasi. Perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 2013-2017 tersaji dalam table 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	11,912,823.60	13,338,818.10	14,795,652.70	16,280,584.40	17,545,000
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	9,993,845.70	10,572,373.70	11,086,483.20	11,640,578.60	12,230,500

Sumber: Buku PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal demikian berarti secara riil perekonomian Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya peningkatan meskipun besaran belum terlalu signifikan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Situbondo yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, mampu membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Besaran pendapatan penduduk sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi jumlah pendapatan masyarakat maka akan semakin tinggi pula kemampuan daya beli masyarakat begitu pula sebaliknya.

**Tabel 4.5**  
**Perkembangan Besaran Pengeluaran Penduduk Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Situbondo	8.350,9	8.382,83	8.676,63	9.106	9.178
Provinsi Jawa Timur	9.978	10.012,16	10.383,37	10.715	10.973

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Situbondo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun angka peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan besaran pendapat yang diterima oleh masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat pula dipengaruhi oleh perkembangan laju inflasi yang terjadi di suatu wilayah. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga – harga secara umum dan terus menerus. Dengan kata lain bahwa inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara *continue*. Berdasarkan parah atau tidaknya, inflasi yang terjadi di Kabupaten Situbondo masih dalam kategori ringan yaitu dibawah 10% setahun. Terjadinya inflasi dapat



membawa perubahan pendapatan bagi masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Seperti halnya perkembangan inflasi di Kabupaten Situbondo yang termasuk dalam kategori ringan, maka dapat mendorong perkembangan ekonomi, karena inflasi dapat mendorong para pengusaha untuk memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru dan sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap maka inflasi menyebabkan terjadinya kerugian dikarenakan penghasilan tetap itu akan ditukarkan dengan barang/ jasa yang semakin sedikit.

Besaran pendapatan perkapita atas dasar harga konstan penduduk Kabupaten Situbondo memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian peningkatan pendapatan tersebut ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan gini rasio (koefisien gini) di Kabupaten Situbondo. Gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan secara sempurna, sedangkan koefisien gini 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

**Tabel 4.6**  
**Indeks Gini Ratio Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Situbondo	0,28	0,29	0,33	0,35	0,33
Provinsi Jawa Timur	0,37	0,40	0,40	0,40	0,41

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur

Indeks gini rasio yang terjadi di Kabupaten Situbondo cenderung mengalami peningkatan, artinya bahwa setiap tahun kesenjangan/ketimpangan pendapatan masyarakat dirasakan bertambah semakin tinggi. Adanya peningkatan kesenjangan pendapatan masyarakat Kabupaten Situbondo, dapat mempengaruhi tingkat kerawanan sosial seperti kemiskinan.

Fenomena yang menarik di Kabupaten Situbondo adalah adanya peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yang ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mampu mengendalikan tingkat kemiskinan tersebut adalah pemerintah mampu mengendalikan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai situasi agar tidak terjadi keterpurukan secara signifikan. Adapun rincian pertumbuhan perekonomian Kabupaten Situbondo terjadi dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 – 2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Situbondo	6,19	5,79	4,86	5,00	5,07
Provinsi Jawa Timur	6,08	5,86	5,44	5,57	5,45
Nasional	5,78	5,02	4,88	5,02	5,07

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo yang cenderung mengalami pelambatan, telah mempengaruhi terhadap presentase tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka kabupaten Situbondo turun secara signifikan menjadi 1,49. Hal ini dipengaruhi oleh adanya program padat karya yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sebagaimana data tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013 – 2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Situbondo	3,07	4,15	3,57	3,43	1,49
Provinsi Jawa Timur	4,30	4,19	4,47	4,21	4,00
Nasional	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur

Permasalahan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah adalah adanya fluktuasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan investasi di Kabupaten Situbondo. Perkembangan investasi di Kabupaten Situbondo masih mengalami fluktuasi. Realisasi PMDN yang masih fluktuasi mengindikasikan terdapat beberapa unsur-unsur penunjang pertumbuhan ekonomi yang belum dikelola secara baik.

#### **4.1.2.3 Kualitas Hidup Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

Sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dimaknai sebagai keberdayaan secara fisik (jasmani) dan secara rohani. Secara fisik kondisi kesejahteraan masyarakat ditandai dengan rendahnya permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan, secara rohani tingkat kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya perasaan aman, tenteram dan nyaman dari segala ancaman.

Dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan demi terwujudnya tatanan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan dengan berbagai cara meliputi:

1. Peningkatan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu/miskin khususnya dibidang perumahan;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian pelatihan dan bantuan alat kerja bagi kemandirian usaha kelompok masyarakat di desa-desa yang berpenduduk miskin; dan
3. Peningkatan fungsi dan fasilitas infrastruktur di perdesaan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan, infrastruktur Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.



Namun, ketercapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat masih belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Meskipun demikian, trend angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo sendiri mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga hal tersebut menjadi nilai positif bagi Pemerintah Kabupaten. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo, Provinsi dan Nasional secara berurutan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Tingkat Kemiskinan Tahun 2013 – 2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Situbondo	13,65	13,15	13,63	13,34	13,05
Provinsi Jawa Timur	12.73	12.28	12.34	12.05	11.77
Nasional	11.47	10.96	11.13	10.70	10.12

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur

Walaupun demikian Kabupaten Situbondo masih di kelompok Kabupaten yang masih berjumlah penduduk miskin yang diatas rata-rata Kabupaten/Kota lainnya di Jawa timur. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan diketahui bahwa sebagian besar jumlah penduduk miskin didominasi di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik penduduk berpendidikan rendah dan memiliki latar belakang pekerjaan disektor agraris seperti pertanian.

Selain permasalahan tingginya angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Situbondo dihadapkan pada kondisi peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Terdapat beberapa jenis PMKS yang mengalami kenaikan dari setiap tahunnya meliputi keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, anak jalanan, tuna susila dan pengemis. Kemiskinan pula yang menyebabkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah. Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat *gap* yang signifikan pada angka partisipasi untuk jenjang pendidikan menengah atas dengan jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Daya serap pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah masih minim apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Situbondo harus tetap optimis untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi saat ini yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Sebab, dimasa akan datang akan selalu ada kebutuhan terhadap sumber daya manusia pada usia produktif sehingga menjadi peluang bagi Pemerintah untuk menata kembali tatanan kehidupan sosial masyarakat agar mampu bersaing dalam dunia usaha yang dirasakan semakin berat.



Dalam rangka menjaga kestabilan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan sosial Kabupaten Situbondo untuk mampu bersaing dalam dunia usaha, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki kemampuan untuk menjaga laju pertumbuhan penduduk yang masuk dalam kategori ideal yaitu 0,5. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang ideal maka Pemerintah Daerah telah membuktikan mampu untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk akan membawa dampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan berpotensi munculnya kerawanan serta kesenjangan sosial.

Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk yang ideal tersebut tidak diikuti oleh pemerataan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Situbondo. Kesenjangan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi faktor kelahiran, faktor iklim dan tempat strategis, faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor kelahiran menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kesenjangan kepadatan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dalam suatu wilayah dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk wilayah tersebut jauh lebih pesat daripada wilayah lainnya pun demikian sebaliknya.

Faktor iklim dan tempat strategis menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk karena dengan kondisi iklim yang nyaman dan letak yang strategis membuat penduduk lebih nyaman untuk menetap di wilayah tersebut. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus menerus maka secara perlahan akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. Faktor ekonomi turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya kepadatan penduduk dikarenakan dengan adanya keterbukaan ekonomi akan membuka peluang dan kesempatan kerja (ketersediaan lapangan pekerjaan) yang lebih banyak sehingga penduduk akan berbondong-bondong untuk menetap pada wilayah tersebut. Hal demikian yang menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk disuatu wilayah. Biasanya kondisi ini terjadi di wilayah/pusat pemerintahan. Faktor yang terakhir adalah faktor sosial, dimana penduduk akan merasa senang dengan suatu wilayah yang memiliki kondisi aman, tenteram dan nyaman. Sehingga membuat masyarakat yang tinggal menjadi lebih tenteram.

Seharusnya pertumbuhan penduduk yang ideal harus mampu membawa dampak terhadap kualitas hidup masyarakat untuk peduli terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo di hadapkan pada permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan air bersih. Hal demikian ditandai dengan masih rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Situbondo. Selama kurun waktu tahun 2011-2013 rumah tangga yang menggunakan air bersih



memang menunjukkan *trend* yang positif, namun demikian capaian tersebut masih dibawah 50%. Selain itu, faktor kepadatan penduduk yang terjadi di beberapa wilayah dan adanya peningkatan jumlah rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketersediaan air bersih menjadi lebih sulit.

Kepadatan penduduk yang tidak disertai dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan telah menjadi penyebab adanya peningkatan pemukiman kumuh di Kabupaten Situbondo. Selama kurun tahun 2011 sampai 2014, setiap tahunnya perkembangan pemukiman kumuh mengalami peningkatan. Tahun 2011 lingkungan pemukiman kumuh sebesar 0%, tahun 2012 meningkat menjadi 3%, tahun 2013 meningkat lagi menjadi 7%, dan tahun 2014 lingkungan pemukiman kumuh mengalami peningkatan kembali yang cukup tinggi menjadi sebesar 17%.

#### 4.1.2.4 Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat wajib bagi terselenggarakannya proses pembangunan daerah yang baik. Karena dengan tata pemerintahan yang baik, pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan yang terbaik pula. Indikator tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat antara lain dari nilai survey Indeks kepuasan Masyarakat serta capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Untuk kedua indikator tersebut, kabupaten Situbondo mencapai nilai sebagaimana berikut :

**Tabel 4.10**  
**Capaian IKM Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2017**

	2015	2016	2017
Kabupaten Situbondo	n/a	76,13	80,46
Provinsi Jawa Timur	80	81	81.33

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur

**Tabel 4.11**  
**Capaian Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2015 – 2017**

	2015	2016	2017
Kabupaten Situbondo	C	CC	B

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo dan BPS Jawa Timur

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari capaian kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat baik dalam hal pelayanan kesehatan, kependudukan, perijinan dan layanan lainnya baik dalam lingkup kecamatan maupun kabupaten. Nilai evaluasi implementasi SAKIP yang meningkat dari tahun ke tahun juga dapat diinterpretasikan bahwa Kabupaten Situbondo telah memiliki akuntabilitas kinerja baik serta didukung oleh sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.



## 4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dalam merumuskan isu-isu strategis dibutuhkan analisis terhadap fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk kemudian dipilih menjadi isu strategis. Selain itu, dibutuhkan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih dan kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Adapun sumber informasi atau isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal adalah masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Berikut sumber informasi/isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun kedepan meliputi:





#### 4.2.1 Dinamika Internasional

##### a. Asean Economic Community (AEC)/ Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Kemajuan di bidang teknologi saat ini telah diikuti oleh semakin terbukanya hubungan antar Negara yang mengakibatkan adanya saling ketergantungan dipelbagai bidang terutama ekonomi antar Negara Asean. Dengan adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Perekonomian global memberikan peluang terhadap adanya jalinan kerjasama antar Negara dalam membentuk regionalisasi seperti AEC. Meskipun demikian patut untuk diantisipasi bahwa adanya perekonomian global akan membawa berbagai ancaman seperti adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif *barriers* seperti standarisasi produk melalui ISO, *Eco Labelling*, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

##### b. Millenium Development Goals (MDG's) dan Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau *Millenium Development Goal's* (MDG's) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana





hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidakpedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicetuskannya MDG's.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015. Agenda pembangunan Pasca-Millennium Development Goals (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kemajuan pesat telah dibuat demi meraih MDGs. Kemiskinan dunia terus menurun. Semakin banyak anak mengikuti pendidikan dasar. Jumlah kematian anak telah berkurang secara drastis. Akses terhadap air minum yang aman meluas dengan sangat pesat. Pendanaan yang ditujukan untuk memerangi malaria, AIDS, dan TBC telah menyelamatkan jutaan jiwa. Tetapi dengan berakhirnya agenda MDGs pada akhir tahun 2015, Para pemimpin dunia telah menyerukan agenda ambisius baru untuk meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi bumi bagi generasi masa depan.

Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030 PBB mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah pasca-2015. Sekretaris-Jenderal PBB telah mengajukan 6 kerangka elemen SDGs: Kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia. Ke-17 tujuan spesifik itu adalah :

- 1) Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia,



- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan,
- 3) Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun,
- 4) Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua,
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan,
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua,
- 7) Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua,
- 8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua,
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi,
- 10) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan,
- 11) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati,
- 12) Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara,
- 13) Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan,
- 14) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya,
- 15) Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan,
- 16) Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan,
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

SDGs ini merupakan lanjutan dari program yang telah ada dalam MDGs. Tema menarik baru yang dimasukkan dalam SDGs adalah tentang bumi dan manusia serta lingkungan. Tanpa menampik permasalahan paling mengakar



sampai hari ini adalah mengakhiri kemiskinan. Oleh karena itu, konsep ambisius ini semakin membutuhkan komitmen dari negara-negara untuk saling peduli dan menciptakan sebuah perdamaian.

#### **4.2.2 Dinamika Nasional**

##### **a. Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Kelompok penduduk penyandang disabilitas dan lanjut usia memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Penyandang disabilitas dengan dukungan alat bantu misalnya, sejatinya memiliki peluang yang sama besar untuk bekerja dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Jika akses dan berbagai kesempatan ini diciptakan, maka penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat hidup mandiri.

Amanat konstitusi mendorong Pemerintah untuk memenuhi hak-hak setiap penduduk, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19/2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya untuk merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, seperti akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan; transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungan sosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukum, politik, dan kewarganegaraan; informasi dan komunikasi; serta sistem sosial di masyarakat.

Selanjutnya penyandang disabilitas dan lansia sering menghadapi resiko kerentanan karena belum adanya kebijakan yang terstruktur, masif dan berpihak. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, saat ini terdapat 10,6 juta penduduk penyandang disabilitas dan 18 juta lansia. Banyak dari mereka sering menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan berusaha. Layanan publik dan lingkungan masyarakat yang tidak inklusif juga sering menghambatnya untuk mandiri. Keterbatasan data terkait keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas dan lansia merupakan salah satu penyebab sering terabaikannya pemenuhan hak mereka. Hal inilah yang sering kali menghambat penyediaan layanan dan akses bagi penyandang disabilitas yang akhirnya berdampak pada risiko ketelantaran dan kemiskinan.

Penyandang disabilitas dan lanjut usia yang sehat dan mandiri berpotensi untuk tetap produktif sebagai bagian dari sumberdaya ekonomi. Kesempatan yang sama dan setara akan membawa penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada kehidupan



sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Lanjut usia juga berpotensi memperkuat kohesi atau modal sosial antar kelompok penduduk maupun lintas generasi.

## **b. Pembangunan Sumber Daya Manusia**

### **1. Kesehatan**

Pada tahun 2012, pembiayaan kesehatan pemerintah (*public health expenditure*) baru mencapai USD 43 per kapita atau 1,2 persen dari PDB. Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaan kesehatan terendah di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad dan Myanmar. Isu lainnya adalah terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. Pada tahun 2014, hanya 15 persen alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanja sektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang bersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatan masyarakat.

Periode 2015-2019 merupakan periode krusial dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai *universal health coverage* pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah meningkatkan kepesertaan, mengembangkan manfaat jaminan, kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran penyedia layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas pelayanan dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, dan penyediaan fasilitas dan ketenagaan.

Sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN), JKN merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan finansial serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok isu kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatnya status



kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan.

Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan. Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah. Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung *evidence based planning* yang belum didukung sistem informasi yang kuat; kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal; sinkronisasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah; dan tingkat pelaksanaan riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah.

## **2. Pendidikan**

Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to be*, dan (iv) *learning to live together*. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, dalam kenyataan pada tahun 2012, sebagian dari mereka yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 7-12 dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Sebagian kecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah sekolah. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dalam rangka menuntaskan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk pemenuhan hak anak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sehingga dapat menurunkan kesenjangan akses pendidikan antardaerah, antar status sosial ekonomi, dan antar jenis kelamin.



Dalam tes internasional seperti dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*, hasil belajar siswa Indonesia juga tidak menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA 2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD.

Belanja rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009, meskipun anggaran Pemerintah untuk pendidikan meningkat lebih dari 75 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terjadi pada semua jenjang pendidikan. Bantuan operasional yang disediakan oleh Pemerintah belum signifikan mengurangi pengeluaran untuk berbagai keperluan sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mengingat bantuan operasional baru mencakup sebagian dari biaya operasional, kenaikan komponen pengeluaran sangat terlihat.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaannya, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Banyak daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya. Pada tahun 2013, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah untuk membiayai program-program pembangunan pendidikan lainnya.

### **c. Universal access air minum dan sanitasi.**

Di era saat ini masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan. Air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia. Pemerintah Indonesia bercita-cita di akhir tahun 2019 dapat mencapai *universal access* air minum dan sanitasi. Ini dimaknai bahwa 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. Lalu kemudian RPJPN mengamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019, dimana secara nasional telah ditetapkan gerakan *Universal Access* tahun 2015–2019 melalui program 100-0-100. Program 100-0-100 merupakan program dengan target yakni 100 % terpenuhinya air minum yang layak, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.



Air minum layak adalah akses air minum dari sisi ketersediaan, kontinuitas, keterjangkauan (jarak kurang dari 300 meter), kualitas (memenuhi baku mutu air minum). Akses air minum layak seringkali disebut dengan air minum yang terlindungi. Total jumlah penduduk Kabupaten Situbondo adalah 229.515 KK dan capaian akses terhadap air minum layak tahun 2017 adalah sebanyak 172.364 KK atau sebesar 75,10%, sisanya sebanyak 57.151 KK atau sebesar 24,90% masih menjadi isu yang harus ditangani pada tahun-tahun mendatang.

Permukiman kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan dan sarana prasarana yg tidak memenuhi syarat. Kriteria Permukiman kumuh menentukan kondisi kekumuhan ditinjau dari : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Di Kabupaten Situbondo Kawasan permukiman kumuh sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/396/P/006.2/2014 Tentang Lokasi Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Situbondo, luasnya adalah sebesar 109,94 Ha tersebar di 5 kecamatan. Capaian penanganan kumuh sampai dengan tahun 2017 adalah 13,83 ha atau sekitar 12,6% dan sisa kawasan kumuh yang harus ditangani seluas 96,11 Ha atau sekitar 87,4%.

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Unsur-unsur dalam dalam penanganan sanitasi yaitu : air limbah domestik [tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS)], persampahan dan drainase. Capaian penanganan sanitasi di Kabupaten Situbondo sampai dengan tahun 2017 yaitu :

1. Air Limbah Domestik

Capaian penanganan air limbah domestik sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah penduduk yang tidak BABS sebanyak 97.544 KK atau sekitar 42,5%, sisanya sebesar 47,5% masih teridentifikasi BABS.

2. Persampahan

Capaian jumlah sampah yang tertangani sampai dengan tahun 2017 adalah 60,13%, sisanya sebesar 39,87% belum tertangani.

3. Drainase

Penanganan drainase dimaksudkan agar tidak terjadi genangan setinggi lebih dari 30 Cm dengan waktu lebih dari 2 jam. Dan di Kabupaten Situbondo capaian penanganan drainase sampai dengan tahun 2017 mencapai 100%, artinya bahwa tidak ada genangan setinggi lebih dari 30 Cm dengan waktu lebih dari 2 jam.





### 4.2.3 Dinamika Regional

#### a. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan". Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah adalah faktor pertumbuhan UMKM dan Koperasi. Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya; (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

Selain UMKM dan Koperasi sebagai penunjang positifnya isu ekonomi adalah pada bidang ketahanan pangan dan pertanian. Sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini





memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48juta ton. Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Selanjutnya faktor yang menjadi nilai negatif dari isu perekonomian adalah isu pengangguran dan kemiskinan. Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim. Selain masalah tersebut, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama *stake holder* dalam upaya penanganan masalah kemiskinan.

#### **b. Infrastruktur**

Beberapa permasalahan infrastruktur di Jawa Timur terdiri dari permasalahan transportasi seperti dibutuhkannya penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa. Permasalahan manajemen di bandara, tol, jalan raya, pelabuhan, stasiun, menjadi perhatian khusus untuk segera masuk dalam perencanaan yang terpadu pada masa yang akan datang.

Permasalahan infrastruktur lain yang ada di Jawa Timur adalah mengenai bencana banjir dan kekeringan, serta ketersediaan air bersih. Selain pembangunan infrastruktur kebutuhan air bersih pengembangan sarana



infrastruktur PDAM dan sanitasi lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

### **c. Lingkungan Hidup**

Pembangunan secara berkelanjutan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemerintah Jawa Timur Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanat Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sektor utama yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah.

Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO<sub>2</sub>. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO<sub>2</sub> eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO<sub>2</sub> eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Terdapat 112 sumber mata air di kabupaten Situbondo, adapun yang memiliki debit diatas 5 liter/detik adalah 81 sumber mata air (*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017*). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industri. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD



Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

#### **d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang di ikuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan daripada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dimana pembangunan desa lebih mengedepankan aspek kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sehingga, dimasa depan Pemerintah Desa mampu untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, mampu mengelola keuangan, Aset dan BUM desa, mampu untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, mampu meningkatkan kerjasama antar desa serta mampu mengelola lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa.

#### **e. Menuju Target 100-0-100**

Program pemerintah 100-0-100 sudah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Jawa Timur tentang ketersediaan sanitasi dasar. Oleh karena itu, kampanye sanitasi yang diselenggarakan setiap tahun perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mencari solusi alternatif yang memperhatikan kondisi lokal agar program sanitasi yang dilaksanakan dapat bermanfaat maksimal.

Secara umum, program sanitasi di Provinsi Jawa Timur akan terus didorong secara massif. Program-program skala regional seperti Pengelolaan Sampah Metropolitan Jawa Timur pada Gerbangkertasusila, IPAL maupun IPLT diharapkan mampu bergerak maju dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dan potensi kebutuhan pendanaan di Provinsi Jawa Timur serta pencapaian target 100-0-100, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Jawa Timur akan segera menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) 100 – 0 – 100 Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk



mengintegrasikan rencana pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara rencana pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam pencapaian Program Pemerintah Pusat 100-0-100 di tahun 2019.

#### **f. Rencana pembangunan jalan tol**

Pembangunan infrastruktur konektivitas Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan dapat rampung seluruh pekerjaannya pada akhir 2019. Salah satu titik tol adalah Tol Probolinggo – Banyuwangi yang mempunyai panjang 172,90 Km dengan melewati wilayah Situbondo. tentunya hal ini akan memberikan dampak kepada Kabupaten Situbondo yang salah satunya dikhawatirkan adalah Kabupaten Situbondo menjadi kota mati, aktifitas ekonomi semakin menurun.

Dengan adanya adanya jalan tol merupakan ancaman yang sekaligus tantangan bagi pemerintah kabupaten situbondo. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi dampak dari pembangunan jalan tol Probowangi, Pemerintah Kabupaten Situbondo harus mempunyai strategi dan kebijakan yang tepat sehingga dampak negatif dimaksud bisa diminimalisir dan menumbuhkan peluang aktifitas ekonomi baru. dengan melakukan pengembangan sektor pariwisata yang akan memacu sektor-sektor lain untuk tumbuh.

#### **4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Situbondo**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo dirumuskan melalui dua metode yaitu metode *Focussed Group Discussion* (FGD) dan pembobotan. Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi, RPJMN, lingkungan eksternal baik dalam skala regional, nasional, dan internasional dirumuskan isu-isu strategis perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

##### **a. Peningkatan Kualitas SDM**

Kesejahteraan masyarakat memiliki banyak komponen diantaranya menyangkut kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tiga komponen tersebut dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten



Situbondo masih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo masih perlu berupaya meningkatkan pembangunan manusia baik dari sisi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.

Selain IPM, salah satu indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. AHH merupakan salah satu variabel dari indeks kesehatan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM, indikator yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia. Tingginya AHH merupakan salah satu representasi dari tingginya kualitas hidup masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, isu kesejahteraan yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial ini menjadi penting untuk diperhatikan. Alat ukur kesejahteraan mengharuskan banyak indikator pendukung demi tercapainya validitas kesejahteraan yang lebih baik. Konsep kesejahteraan menginduk pada bidang yang lain, jadi jika ingin mendapatkan indikator kesejahteraan dengan nilai yang baik dukungan isu strategis yang lain harus baik.

Selain kesehatan pembangunan manusia juga dapat dilihat dari dimensi pendidikan. Dimana Pendidikan merupakan komponen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk itu pembangunan dalam bidang pendidikan perlu diupayakan guna sejalan dengan esensinya bahwa pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantab dan mandiri. Pembangunan pendidikan diharapkan mampu dalam mencapai pemerataan kesempatan memperolehnya bagi seluruh penduduk.

Isu bidang pendidikan memiliki beberapa ukuran indikator kinerja. Diantaranya adalah indikator APM, APK dan APS. Kabupaten Situbondo pada kurun waktu lima tahun terakhir angka indikator APM, APK, dan APS cenderung naik turun karena sangat dipengaruhi oleh belum meratanya akses dan kualitas pendidikan di setiap daerah.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu Angka Partisipasi Pendidikan, Angka rata-rata lama sekolah serta Angka harapan lama sekolah digunakan sebagai salah satu variable dalam menghitung Indeks



Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di kabupaten Situbondo, selaras dengan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global.

#### **b. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negaran-negara eropa yang berakibat pelemahan terhadap permintaan ekspor. Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, apabila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penguatan daya saing perekonomian adalah daya saing perekonomian akan semakin kuat oleh terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

#### **c. Penurunan Kemiskinan**

Program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Situbondo dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara yaitu (1) mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan



sebagainya. (2) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

**d. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar**

Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar, salah satunya diukur dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). IKLI merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. IKLI disusun atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yaitu sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga Perubahan RPJMD 2016-2021. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu *tools* yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (*outcome*). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi. Adapun capaian IKLI pada tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.12**

**Capaian Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	B (77,3)

Isu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, juga dapat diukur melalui indikator penyediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik. Penyediaan infrastruktur jalan di Kab. Situbondo tahun 2012 sampai pada tahun 2016 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik selalu mengalami peningkatan, tahun 2012 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 66,81%, tahun 2013 meningkat lagi menjadi 74,66% dan pada tahun 2014 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi sebesar 85,24%. Serta pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan 89,2%. Pada tahun 2016 panjang jalan yang mengalami perbaikan sebesar 79,51%, dengan volume target 25 km dan realisasi 50,15 km dari panjang total keseluruhan jalan kabupaten 1.043,934 km. di tahun 2017 jalan kabupaten yang dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 7,34 km atau jalan di kabupaten dalam kondisi baik sebesar 77,86% dari total keseluruhan jalan kabupaten sebesar 1.043,934 km.





Isu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar juga dapat digambarkan pada Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). RAD AMPL merupakan rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

#### **e. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Perencanaan dan program pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip pelaksanaan *good governance* adalah adanya transparansi, responsifitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Terselenggarakannya *good governance* akan mendorong kemudahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketersediaan birokrasi yang memadai akan dapat mendukung dan mendorong terlaksananya program pembangunan dan pelayanan secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.

Tantangan Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan *good governance* bukan pekerjaan yang mudah, terlebih ditengah isu-isu tentang rendahnya kapasitas aparatur, lemahnya kapasitas birokrasi pemerintah daerah, dan rendahnya kapasitas keuangan daerah. Sektor keuangan daerah Pemerintah daerah dihadapkan pada sebuah tuntutan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjamin efektifitas dan efisiensi pemanfaatannya. Di pihak lain, pembiayaan pembangunan perlu diarahkan pada optimalisasi peningkatan pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana.

Kaitannya dengan aparatur, Pemerintah kabupaten Situbondo dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana upaya pengembangan sistem perencanaan SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi berdasarkan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Pun demikian dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).





Selain itu, dibutuhkan pengembangan terhadap kemampuan dalam sistem perencanaan SDM aparatur sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Memperbaiki lemahnya upaya pembentukan disiplin, etika dan moral, produktivitas kerja serta tuntutan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam aspek kelembagaan, persoalan yang dihadapi adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tantangan ke depan adalah membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

Tantangan selanjutnya adalah masih kurangnya fungsi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat termasuk legislatif, sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum efektif. Sehingga diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif dengan membangun suatu sistem monitoring dan pengawasan dengan sebaik mungkin.





Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 yang telah mengalami beberapa penyesuaian dan perubahan perencanaan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana alasan-alasan yang telah disampaikan di Bab I, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2005-2025, sehingga Visi dalam Perubahan RPJMD juga tetap berkaitan erat dengan Visi RPJPD Kabupaten Situbondo. Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Situbondo tahun 2005-2025. Berikut ini uraian dokumen-dokumen yang menjadi acuan, pedoman dan pertimbangan dalam Visi dan Misi Kabupaten Situbondo 2016-2021.

Visi harus memperhatikan RTRW Kabupaten Situbondo yang memiliki visi penataan ruang Kabupaten Situbondo **"Terwujudnya Ruang Wilayah yang Seimbang berbasis Bahari"**

Dengan Misi penataan ruang sebagai berikut

1. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari;
3. mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;
4. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.



Mempertimbangkan Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan memiliki Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Visi Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu: **Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak**. Visi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong** dan 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera, (5) Mewujudkan bangsa berdaya saing, (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, (7) Mewujudkan masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, (3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan



ruang, (4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, (5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Visi merupakan gambaran capaian pembangunan untuk lima tahun kedepan yang mempertimbangkan arah kebijakan dan agenda pembangunan serta prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo terutama pada periode 2016-2020. Adapun rincian arah kebijakan, agenda dan prioritas pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada Tahun 2016-2021 RPJPD**  
**Kabupaten Situbondo**

<b>MISI KE 1 : Mengembangkan Perekonomian Berbasis Agribisnis</b>		
<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>AGENDA :</b>	
1. <i>Penyelarasan Sistem Agribisnis</i> , diarahkan pada penyelarasan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal dan nasional.	1   Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional di bidang pertanian tanaman pangan perikanan dan kelautan.	
	2   Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.	
	3   Penguatan agribisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agribisnis berbasis keunggulan kompetitif.	
	4   Penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan meka-nisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah.	
	5   Pengembangan agroindustri yang berbasis pada keunggulan komparatif dengan teknologi yang ramah lingkungan.	
	<b>PRIORITAS LOKASI:</b>	
	Kawasan strategis ekonomi di perdesaan	
2. <i>Penataan Sistem Informasi Agribisnis</i> diarahkan pada pembangunan sistem informasi prasarana, produksi, proses produksi, distribusi, dan pengolahan serta informasi pasar.	<b>AGENDA :</b>	
		Penguasaan akses informasi produksi, distribusi, dan informasi pasar sampai wilayah kecamatan.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
		Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan pesisir



<p>3. <b>Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</b> dalam sistem agribisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.</p>	<b>AGENDA :</b>	
	1	Penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
	2	Penguatan usaha skala mikro untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (miskin).
	3	Peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi SDM koperasi dan UKM berwasasan gender.
<b>PRIORITAS LOKASI :</b>		Kawasan strategis ekonomi di perdesaan dan perkotaan
<p>4. <b>Pengembangan Pariwisata</b>, diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi, kesenian dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata serta lama tinggalnya.</p>	<b>AGENDA :</b>	
	1	Penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata
	2	Promosi pariwisata daerah.
	3	Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten
<b>PRIORITAS LOKASI :</b>		Kawasan pariwisata
<b>MISI KE 2 : Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya</b>		
<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>		<b>AGENDA :</b>
<p>1. <b>Pembangunan Pendidikan</b>, diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan outputnya mampu menciptakan kewirausahaan dan terserap dalam lapangan kerja.</p>	1	Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.
	2	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agribisnis.
	3	Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> .
	4	Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
	5	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.



	6	Melibatkan perguruan tinggi setempat dan perguruan tinggi lain sesuai kompetensinya.
	7	Penuntasan wajar 9 tahun
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	1	Kecamatan dengan angka buta
	2	huruf tinggi dan IPM Rendah, baik perkotaan maupun perdesaan
2. <b>Pembangunan Beragama</b> , diarahkan pada upaya perluasan dan pemertaan kesempatan memperoleh pendidikan agama dan kerukunan beragama dan dapat melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etik dalam pembangunan, serta pembentukan ahlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi	<b>AGENDA :</b>	
	1	Pengutan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama.
	2	Pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah.
	3	Pemantapan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
	4	Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
		Daerah rawan konflik umat beragama
	3. <b>Pembangunan Kebudayaan</b> , diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.	<b>AGENDA :</b>
1		Penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda.
2		Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional.
3		Mengembangkan publikasi, sosialisasi, apresiasi seni budaya.
4		Mengembangkan budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat.
5		Pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai aset pendidikan dan ilmu pengetahuan.
<b>PRIORITAS LOKASI :</b>		
		Daerah rawan konflik umat beragama
4. <b>Pembangunan Pemuda dan olah</b>	<b>AGENDA :</b>	





<p><i>raga</i>, diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.</p>	1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda dan olahraga.
	2	Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda.
	3	Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
	4	Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang
	5	Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga.
	6	Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
<p>5. <b>Pemberdayaan Perempuan</b>, diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak dan perempuan pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan haknya serta menjamin tumbuh kembang anak secara wajar dan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta pemberdayaan ekonomi perempuan</p>	<b>AGENDA :</b>	
	1	Penguatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
	2	Pencegahan <i>trafficking</i> dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	3	Penguatan lembaga kesetaraan gender.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
1	Daerah dengan ketimpangan gender tinggi.	
2	Daerah dengan kasus KDRT dan <i>trafficking</i> tinggi.	
<b>MISI KE 3 : Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup</b>		
<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>		<b>AGENDA :</b>
<p>1. <b>Pembangunan Kesehatan</b>, diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.</p>	1	Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan.
	2	Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
	3	Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan.
	4	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.



	5	Dampak lingkungan bagi kesehatan
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	Wilayah kota dan perdesaan	
2. <b>Pembangunan Kependudukan</b> , diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.	<b>AGENDA :</b>	
	1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
	2	Peningkatan persebaran penduduk.
	3	Peningkatan kualitas keluarga dan lansia.
	4	Penataan administrasi kependudukan.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	Wilayah kota dan perdesaan	
3. <b>Pembangunan Ketenagakerjaan</b> , diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif.	<b>AGENDA :</b>	
	1	Pemantapan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial.
	2	Pemantpan kompetensi tenaga kerja melalui kurikulum yang berdaya saing.
	3	Penanganan pengangguran melalui padat karya.
	4	Perlindungan tenaga kerja.
	5	Pelatihan tenaga kerja sesuai Negara tujuan bagi TKI.
<b>PRIORITAS LOKASI :</b>		
	Perkotaan dan perdesaan	
4. <b>Pembangunan Kesejahteraan Sosial</b> , diarahkan pada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ke tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik.	<b>AGENDA :</b>	
	1	Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
	2	Peningkatan fasilitasi pelayananan sosial dasar untuk PMKS.
	3	Sistem pembiayaan jaminan sosial dan perlindungan sosial daerah bagi PMKS.
<b>PRIORITAS LOKASI :</b>		
	Perkotaan dan perdesaan	
5. <b>Penanggulangan Kemiskinan</b> , diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup berbasis keluarga.	<b>AGENDA :</b>	
	1	Peningkatan akses pelayananan kesehatan bebas biaya bagi masyarakat miskin berbasis individu(tanpa melihat status penyakit).





	2	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat miskin.
	3	Fasilitas akses anak masyarakat miskin yang berprestasi ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
	4	Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
	5	Fasilitas kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif.
	6	Penguatan lembaga masyarakat (organisasi Masyarakat Warga).
	7	Sinkronisasi, optimalisasi dan sinergitas program pemberdayaan masyarakat.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
		Kawasan perdesaan dan perkotaan, terutama Kawasan perdesaan tertinggal dan kawasan kumuh perkotaan
<b>MISI KE 4 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan</b>		
<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>AGENDA :</b>	
1. <b><i>Pengembangan Keanekaragaman Hayati</i></b> , diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumberdaya alam hayati secara efisien dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.	1	Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati dan nabati dengan teknologi bio (biotech) dan peningkatan perlindungan dan pengawasan potensi plasma nutfah atas klaim – klaim yang dilakukan pengusaha multinasional (MNSc).
	2	Konservasi dan pengawasan pengelolaan keanekaragaman hayati dan nabati untuk pemanfaatan secara lestari.
	3	Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan nabati secara lestari. Pengelolaan dan pengendalian
	4	Konservasi keanekaragaman hayati dan nabati.
	5	Peningkatan pengawasan laut berbasis masyarakat pesisir.
	6	Upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, nabati dan lingkungan hidup.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	



		Daerah pantai lahan kritis
<p>2. <b>Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan</b>, diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek – aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi.</p>	<b>AGENDA :</b>	
	1	Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi habitat ekosistem yang rusak.
	2	Peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia beserta kelembagaannya di bidang kelautan.
	3	Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan.
	4	Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
	5	Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dalam sumberdaya laut.
	6	Peningkatan keselamatan, keamanan, mitigasi bencana pesisir dan pencemaran laut.
	7	Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil laut
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
		Daerah pantai
<p>3. <b>Penanganan Kebencanaan</b>, diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam penanganan pra darurat dan pasca bencana. Perlunya energi alternatif.</p>	<b>AGENDA :</b>	
	1	Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana.
	2	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
	3	Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat.
	4	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
	5	Penataan kelembagaan kebencanaan.
	6	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	1	Kawasan rawan bencana alam
	2	DAS
3	Perdesaan.	
<b>MISI KE 5 : Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi</b>		
<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>		<b>AGENDA :</b>
1. <b>Pembangunan Transportasi</b> , diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi	1	Meningkatkan kemantapan jaringan jalan dan jembatan.



masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan	2	Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.
	3	Pemeliharaan, peningkatan, pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antar dan intermodal. Termasuk transportasi laut.
	4	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik perumahan, permukiman dan penerangan jalan
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	Kawasan strategis perdesaan dan perkotaan	
2. <b>Pengelolaan Sumber Daya Air</b> , diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya air.	<b>AGENDA :</b>	
		Peningkatan konservasi sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
		Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan memelihara) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri).
		3. Pengendalian daya rusak air melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta perbaikan manajemen daerah aliran sungai (DAS)
		4. Penataan kelembagan, keterpaduan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	1	Sentra produksi pangan (lumbung padi)
2	Kawasan strategis	
3	Kawasan rawan bencana alam dan kekeringan	
4	Kawasan tertinggal	
5	DAS	
3. <b>Pengembangan Wilayah</b> , diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur	<b>AGENDA :</b>	



<p>dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perumahan dan permukiman.</p>	1	Pengembangan kawasan strategis utamanya kawasan tertinggal.
	2	Pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis.
	3	Pengembangan kawasan andalan.
	4	Pengelolaan kawasan lindung.
	5	Pengembangan kawasan religi dan segitiga emas.
	6	Peningkatan dan penataan kota
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	Kawasan lindung, andalan dan strategis	
<b>MISI KE 6: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>		
<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>		<b>AGENDA :</b>
<p>1. <b>Pembangunan Hukum</b> diarahkan untuk mewujudkan keterlibatan sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskrimatif.</p>	1	Penegakan supremasi hukum dan HAM.
	2	Penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.
	3	Penegakan supremasi hukum dan HAM.
	4	Pembangunan budaya hukum.
	5	Harmonisasi dan dokumentasi produk hukum.
	6	Pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat.
	7	Penguatan profesionalisme aparat hukum dan optimalisasi peran linmas.
<b>PRIORITAS LOKASI :</b>		
	Daerah perdesaan dan perkotaan terutama daerah kriminalitas tinggi.	
<p>2. <b>Penyelenggaraan Pemerintahan</b>, diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good government).</p>	<b>AGENDA :</b>	
	1	Pengawasan aparatur.
	2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	3	Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga.
	4	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
5	Penyelenggaraan administrasi tertib dan baik.	



	6	Evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah.
	7	Pengembangan kelembagaan, kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
		Ibukota Kecamatan, Kabupaten
3. <b>Pembangunan Politik</b> , diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui kelembagaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai – nilai agama, kesantunan sosial, dan Budaya, hak – hak azasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh teguhnya Negara Kesatuan Republik.	<b>AGENDA :</b>	
	1	Pelebagaan nilai – nilai demokrasi.
	2	Pemantapan peran masyarakat madani.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
		Daerah dengan tingkat partisipasi politik rendah
4. <b>Pembangunan Komunikasi dan Informasi</b> , diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	<b>AGENDA :</b>	
	1	Pelayanan informasi multimedia yang berkualitas.
	2	Perluasan jaringan dan layanan informasi.
	3	Fasilitas masyarakat sadar informasi.
	4	Pengembangan media tradisional.
	5	Fasilitas masyarakat sadar informasi.
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	1	Daerah akses informasi rendah.
	2	Daerah diluar daya pancar alat telekomunikasi.
	5. <b>Pembangunan Keamanan dan Ketertiban</b> , diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegak tertibnya tatanan sosial kemasyarakatan	<b>AGENDA :</b>
1		Pengembangan sistim deteksi dini.
2		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
3		Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba miras dan pekat.
4		Peningkatan kesadaran masyarakat atas peraturan-peraturan daerah.
5		Menjaga, mengamankan, menegakkan perda.
<b>PRIORITAS LOKASI :</b>		
1		Daerah rawan konflik.



	2	Daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi.
	3	Daerah rawan bencana
6. <b>Pembangunan Keuangan Daerah</b> , diarahkan untuk meningkatkan, memperkuat pendapatan keuangan daerah	<b>AGENDA :</b>	
	1	Mengembangkan potensi untuk keuangan daerah.
	2	Menarik investor untuk menambah pendapatan daerah.
	3	Meningkatkan sistem pendapatan asli daerah untuk pengelolaan sumber-sumber keuangan dari dalam dan dari luar daerah
	<b>PRIORITAS LOKASI :</b>	
	1	Kawasan perdesaan dan perkotaan.
	2	Kawasan pantai, wisata, hiburan yang sah

Berdasarkan berbagai telaahan dari dokumen-dokumen tersebut maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut.

### 5.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”**

Pernyataan Visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Situbondo. Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Situbondo dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Situbondo pada tahun 2016-2021. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut saling berkait satu sama lain, dijelaskan dalam tabel berikut ini:



**Tabel 5.2**  
**Penjelasan Visi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan</b>	Madani	Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi suatu masyarakat yang memiliki tujuan yang visioner dan positif dalam membangun dan menjalani kehidupan yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi dalam keragaman masyarakat
	Mandiri	kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri serta memiliki daya saing dan kesiapan menghadapi era globalisasi
	Lebih Beriman	Pada pokok pemikiran ketiga ini mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja
	Sejahtera	Makna yang terkandung di dalam pokok pemikiran ini bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti oleh nilai-nilai luhur keagamaan yang menjadi landasan. Rakyat Situbondo sebagai masyarakat yang agamis, maka untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang sejahtera (yaitu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;), harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dan peningkatan ke-shaleh-an sosial masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama. Kesejahteraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan ini, pada gilirannya akan mengarah pada kondisi masyarakat sejahtera yang bermartabat
	Berkeadilan	Pokok pemikiran ini mengandung makna bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi kesenjangan sosial





Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender

## 5.2 Misi

Usaha-usaha untuk mewujudkan visi Kabupaten Situbondo 2016-2021 dijabarkan dalam misi pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera, dan berkeadilan;
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi local;
4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 5.3**  
**Perumusan Misi RPJMD**

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi
1	Sumber Daya Manusia	Madani & Beriman	Rendahnya Daya Saing	Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan
2	Kesejahteraan Masyarakat	Sejahtera	Kemiskinan	Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan
3	Perekonomian	Mandiri	Rendahnya pertumbuhan & pemerataan ekonomi	Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal
4	Tata Kelola Pemerintahan	Berkeadilan	Kualitas pelayanan & akuntabilitas kinerja	Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan



**Tabel 5.4**  
**Perumusan Penjelasan Misi RPJMD**

<b>Pernyataan Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>
Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan	Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama melalui upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat
	Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan	Pengentaskan masyarakat dari kemiskinan menjadi prioritas utama melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan berkeadilan
	Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal	Peningkatan perekonomian yang stabil dan dinamis melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat yaitu hasil usaha masyarakat lokal yang mampu bersaing didalam negeri dan luar negeri .
	Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa secara lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator pencapaian ke empat misi berdasarkan visi tersebut adalah pembangunan Kabupaten Situbondo tersebut dapat dinilai dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Persentase Kemiskinan
3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Indeks Gini Ratio
5. Indeks Reformasi Birokrasi

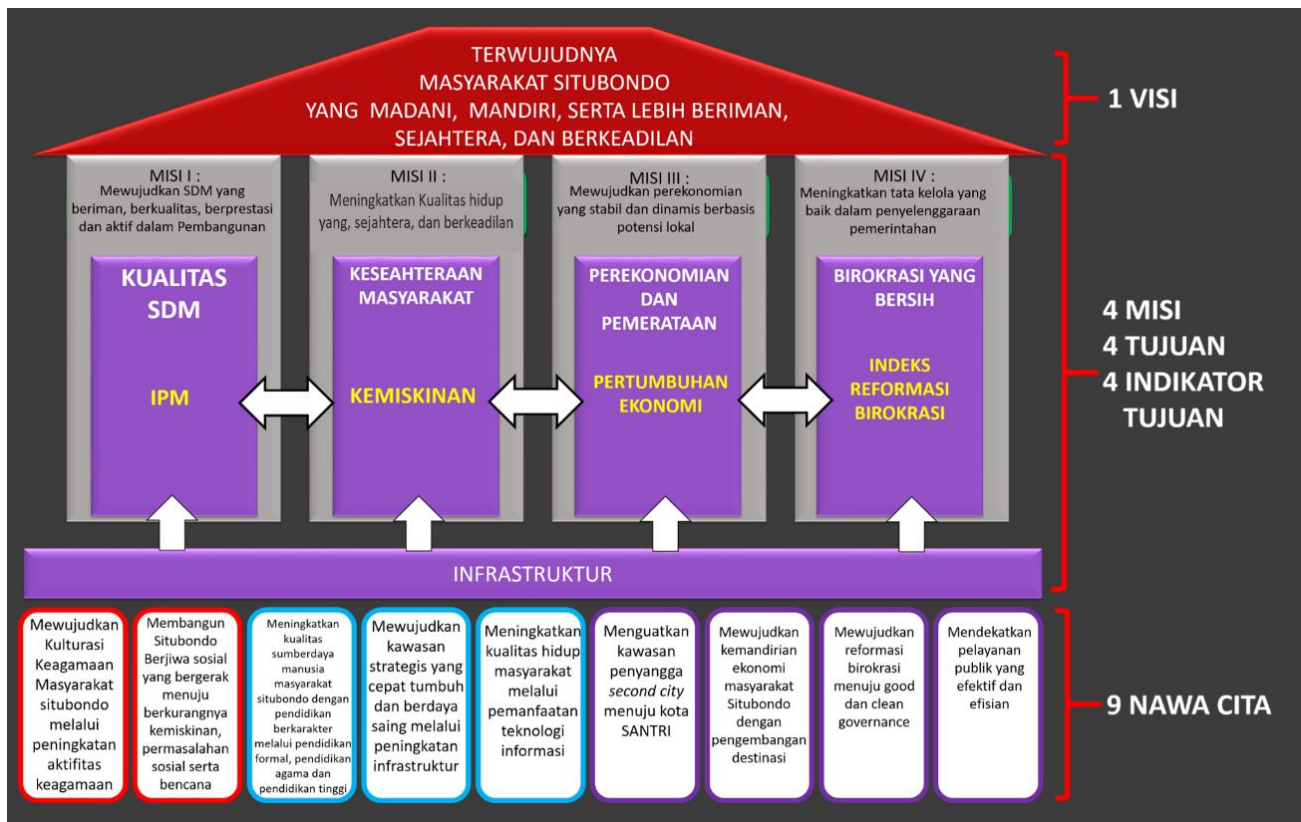
Misi pembangunan Kabupaten Situbondo diatas sangat berkaitan dengan Isu-Isu Strategis Kabupaten Situbondo. Dalam penetapan Misi pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan Visi Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan Isu-Isu Strategis di Kabupaten Situbondo. Keterkaitan Isu-Isu Strategis dengan Misi pembangunan 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 5.5**  
**Keterkaitan Isu-Isu Strategis Kabupaten Situbondo dengan Misi**

No	Isu Strategis	Misi
1	Peningkatan Kualitas SDM	Misi 1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan
2	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan
3	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi	Misi 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal
4	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Misi 4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

**Gambar 5.1**  
**Pondasi dan Misi dalam Pencapaian Visi**



### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Situbondo berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
  - 1) Meningkatkan kualitas pendidikan



- 2) Meningkatnya derajat kesehatan
- 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat

**Gambar 5.2**  
**Desain Logical Framework Pencapaian Misi 1**



2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :
  - 1) Menurunnya angka pengangguran
  - 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
  - 3) Meningkatnya kesejahteraan sosial

**Gambar 5.3**  
**Desain Logical Framework Pencapaian Misi 2**



3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan, dengan sasaran :
  - 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah
  - 2) Meningkatnya investasi daerah





**Tabel 5.6**  
**Matriks Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**(Perubahan RPJMD) Kabupaten Situbondo 2016-2021**

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA			
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan	1	Meningkatkan kualitas SDM	1	IPM	65,08	65,68	68,28	69,42	70,58	71,76
2	Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera, dan berkeadilan	2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2	Persentase Kemiskinan	13,34	13,05	10,46	9,81	9,16	8,5
3	Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal	3	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan.	3	Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,07	5,78	5,98	6,18	6,38
				4	Indeks Gini Ratio	0,35	0,33	0,274	0,27	0,266	0,262
4	Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	4	Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik	5	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	65,91	68,41	70,91	73,41	75,91





**Tabel 5.7**  
**Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**(Perubahan RPJMD) Kabupaten Situbondo 2016-2021**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA				PD PENANGGUNG JAWAB				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	Meningkatkan kualitas SDM	1	IPM	1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Indeks Pendidikan	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	Dispendikbud, DPUPR
				2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	indeks kesehatan	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	Dinkes, DPUPR, DPKP, DLH
				3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Pendapatan per kapita (juta)	24,18	25,93	26,74	28,46	30,18	31,9	Disnaker, Diskop, Disperindag, DPMD, DP3A
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2	Persentase Kemiskinan	4	Menurunnya angka pengangguran	4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,43	1,49	2,31	2,06	1,49	1,57	Disnaker, Disdalduk KB, Dinsos
				5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	5	Jumlah Desa Maju	12	15	31	46	64	83	DPMD, DP3A, Dinsos
				6	Meningkatnya kesejahteraan sosial	6	Persentase Penurunan PMKS	0,98	0,99	0,99	1,04	1,08	1,12	Dinsos, Bappeda





TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA				PD PENANGGUNG JAWAB				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					
3	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan.	3	Pertumbuhan Ekonomi	7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	7	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	2,64%	0,95%	0,91%	1,01%	1,11%	1,21%	DTPHP, Diskan, Disnakeswan
		4	Indeks Gini Ratio	8	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	7,00%	8,23%	8,30%	8,35%	8,57%	8,80%	Disperdagin, DKP		
				9	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran	6,78%	7,79%	8,41%	9,13%	9,85%	10,02%	Disperdagin, Diskop		
				10	Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi	8,78%	9,02%	9,27%	9,51%	9,76%	10,01%	Dispar, DPUPR, BPPKAD, Dispendikbud		
		8	Meningkatnya investasi daerah	11	Nilai investasi PMA dan PMDN	350 M	385 M	423,5 M	465,85 M	512,435 M	563,6785 M	DPMPTSP, Dispar, DPUPR, Bakesbang		
		9	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,39	71,73	72	72,5	73	73,5	DLH, DPUPR, DPKP,		
				13	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	n/a	B (77,3)	B (78)	B (79)	B (80)	B (81)	DPUPR, DPKP, Diskominfo, Dinas perhubungan		



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA				PD PENANGGUNG JAWAB				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					
4	Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik	5	Indeks Reformasi Birokrasi	10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14	IKM	76,13	80,46	81,25	82,00	83,56	84,60	Dispendukcapil, DPMPSTP, Perpustakaan, SETDA, KECAMATAN, Dinkes (RSUD), Dishub, BPBD, SATPOL PP, BKPSDM, SETWAN, Diskominfo, dan
				11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	15	Kategori Evaluasi LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SETDA, Bappeda
				16	Capaian Nilai Sakip Kabupaten	CC (51,2)	B (61,96)	BB (70,50)	BB (75,00)	A (80,00)	A (85,00)	SETDA, Inspektorat, Bappeda		
				12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset	17	Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD, Inspektorat





### **6.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dinamis (*pro-growth*) serta mengedepankan prinsip partisipasi (*participatory based development*), penyediaan lapangan pekerjaan (*pro-job*), dan berwawasan lingkungan (*pro-environment*)
3. Berpusat pada potensi lokal (*local based development*) yang dimiliki oleh masyarakat dan sumberdaya alam.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)



tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun strategi prioritas yang akan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo adalah:

1. Revitalisasi penguatan nilai-nilai agama kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan;
2. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Pemantapan kualitas sumber daya masyarakat melalui pendidikan agama, pendidikan formal, dan pendidikan tinggi;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur jalan, energi, dan komunikasi.
5. Penguatan penerapan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan dan pelayanan dasar;
6. Penguatan fungsi kawasan penyangga *second city* untuk memperluas pemerataan pembangunan daerah;
7. pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi dan produk-produk unggulan daerah;
8. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan teknologi infomasi;
9. Peningkatan cakupan area pelayanan publik bagi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran perubahan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan melalui 4 (Empat) misi, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu 2016-2021 per masing-masing Misi, adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Strategi Kabupaten Situbondo**

<b>VISI: Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>MISI I</b> Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas berprestasi dan aktif dalam Pembangunan		
Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penguatan kualitas dan kuantitas pendidikan, sarana prasarna serta penguatan kualitas tenaga pendidik
	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatkan mutu dan akses setiap bidang pelayanan kesehatan serta mengadvokasi program kependudukan



	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatkan peluang usaha masyarakat melalui optimalisasi kemampuan daya beli masyarakat
<b>MISI II Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan</b>		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan peluang pekerjaan melalui pengembangan ekonomi yang inovatif dalam rangka mengoptimalkan kualitas hidup untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial	
<b>MISI III Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal</b>		
Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan pelayan perizinan dan non perizinan dalam upaya peningkatan jumlah investor
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
<b>MISI IV Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan</b>		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan system akuntabilitas kinerja aparatur, system keuangan, pengawasan dan organisasi pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset	

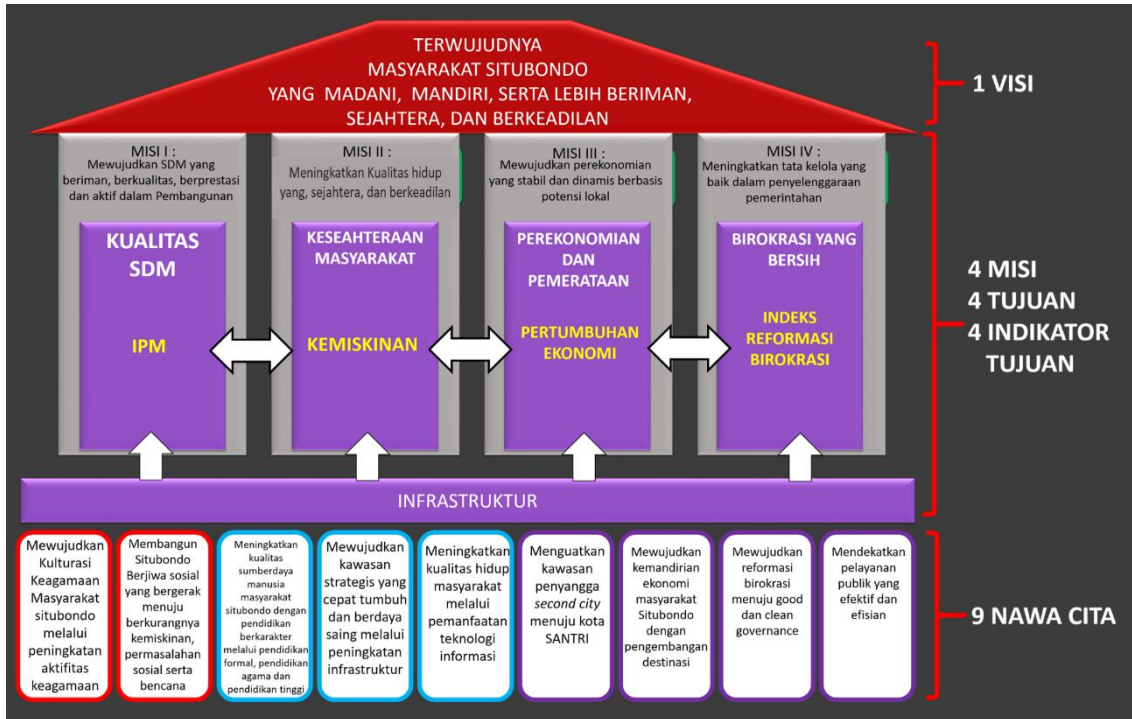
**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo**

TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah	Pemantapan kawasan strategis, Pariwisata dan kemandirian pangan	Pemantapan pariwisata dan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik	Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pariwisata



Arah kebijakan tersebut agar dapat diimplementasikan kedalam program prioritas yang lebih implementatif maka digambarkan pada konsep pembangunan berikut ini:

**Gambar 6.1**  
**Konsep Pondasi dan misi untuk Pencapaian Visi Kabupaten Situbondo**



Berdasarkan konsep pembangunan tersebut Visi dan Misi RPJMD dapat dikategorikan kedalam dua dimensi pembangunan yaitu dimensi utama pembangunan (sumber daya manusia, Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan *Good governance*) dan dimensi pendukung pembangunan (infrastruktur). Keberhasilan kedua jenis pembangunan tersebut didukung sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan yaitu:

1. Memperkuat kulturasasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.
2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia masyarakat situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Menguatkan kawasan penyangga *Second City* untuk mengurangi disparitas wilayah.





7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo dengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat Inovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta peningkatan produktivitas lahan.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean governance*).
9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

#### **6.1.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Situbondo**

Pembangunan wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan daerah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Situbondo berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 adalah **Mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta berbasis mitigasi bencana**

#### **6.1.2 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari;
- b. penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif;
- c. pengendalian fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
- d. pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- f. pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian;
- g. pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan;





- h. pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan;
- i. peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis;
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara

Sedangkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilihat dibawah ini:

1. Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari, meliputi:
  - a. mengembangkan sistem pusat pelayanan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi;
  - b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan dan prospeknya;
  - c. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
  - d. mengembangkan perkotaan Situbondo sebagai pusat pelayanan sosial - ekonomi bagi area yang lebih luas; dan
  - e. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk pengembangan perikanan.
2. Strategi penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif, meliputi:
  - a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan pelayanan jalan, kereta api dan pelabuhan;
  - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti telepon rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler yang menghubungkan seluruh wilayah;
  - c. mengembangkan dan menyediakan tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang digunakan oleh banyak *provider* secara bersama-sama dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata;



- d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir.
3. Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, meliputi:
    - a. memantapkan fungsi hutan lindung dengan cara pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
    - b. memantapkan fungsi lindung pada kawasan resapan air dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
    - c. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar dam, cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi;
    - d. perlindungan kawasan sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria serta penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman diijinkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir;
    - e. memantapkan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dengan memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;
    - f. menjaga dan melindungi kelestarian kawasan taman buru;
    - g. melestarikan kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah; dan
    - h. membatasi kegiatan pada wilayah rawan bencana;
    - i. memberikan perlindungan pada kawasan lindung geologi berupa pembatasan kegiatan;



- j. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa harus dijaga ekosistemnya guna menjaga keaslian serta keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua.
4. Strategi pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana, meliputi:
    - a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut dan ombak besar sebagai kawasan terbangun;
    - b. peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir; dan
    - c. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimasi terjadinya bencana ombak besar dan mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa.
  5. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan, meliputi:
    - a. mengembangkan hutan yang bernilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;
    - b. pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih fungsi pada kawasan budidaya, harus dilakukan pengganti;
    - c. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta mengembangkan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan:
    - d. pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;
    - e. mengembangkan dan mengelolah hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan;
    - f. mengembangkan *cluster* sentra produksi peternakan terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak;
    - g. mengembangkan perikanan darat, mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
    - h. peningkatan kualitas ekosistem, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
    - i. menetapkan kawasan pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian;
    - j. mengembangkan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen Amdal yang menyertainya;
    - k. mengembangkan permukiman perdesaan yang disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
    - l. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;



- m. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan serta mengembangkan perumahan terjangkau dan layak huni;
  - n. melestarikan daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral;
  - o. melakukan reboisasi di daerah sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mempertahankan debit air yang ada;
  - p. menetapkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan; dan
  - q. menetapkan RTH privat pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sangat strategis, bernilai lahan sangat tinggi, dan/atau pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga atau kawasan lindung atau berfungsi konservasi maka komposisi RTH yang dipersyaratkan sebagai komposisi penyediaan RTH privat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya, dapat berupa taman dan hutan kota.
6. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian, meliputi:
- a. menetapkan dan mengendalikan secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. mengembangkan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. mengembangkan sentra produksi dan agropolitan;
  - d. mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian; dan
  - e. menetapkan dan memasarkan sentra hasil produksi pertanian hortikultura.
7. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan, meliputi:
- a. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Kecamatan Mangaran;
  - b. mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan *home industry* untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut;
  - c. peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. pengadaan prasarana wilayah pada kawasan Kecamatan Mangaran yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri untuk menarik investasi; dan
  - e. mengembangkan kawasan pedesaan pusat sentral hasil industri kecil kerajinan hasil laut sebagai penunjang pariwisata bahari.
8. Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan, meliputi:
- a. mengembangkan obyek wisata alam dan buatan berbasis bahari;



- b. membentuk zona wisata yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala nasional dengan disertai mengembangkan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan
  - c. memasarkan hasil industri kecil kerajinan hasil laut dan hasil pengolahan produksi pertanian mangga.
9. Strategi peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Besuki, Kapongan, Panji, Mangaran, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih yang ditunjang dengan mengembangkan kawasan pelabuhan Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar;
  - b. mengembangkan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kawasan *hatchery* yang berada disepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Kendit, Mangaran, Panarukan, Kapongan, Jangkar dan Banyuputih;
  - c. meningkatkan pemanfaatan Bangunan Kuno dan Peninggalan Sejarah di Besuki dan Panarukan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
  - d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan sosial budaya;
  - e. mengendalikan kawasan pendayagunaan sumber daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional berupa zonasi kawasan pemurnian minyak bumi (*Oil Refinery*) di Kecamatan Asembagus atau Mangaran; dan
  - f. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang masuk dalam batas administrasi wilayah kabupaten.
10. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara, meliputi:
- a. menetapkan fungsi dan peran Kawasan Latihan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kecamatan Asembagus dan Banyuputih dengan membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;
  - b. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; serta turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI



### **C. Rencana Struktur Ruang Wilayah**

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo sebagaimana termuat dalam RTRW Kabupaten Situbondo tahun 2013 – 2033 terdiri dari :

- (1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di perkotaan Situbondo Kecamatan Situbondo.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) di perkotaan Besuki dan perkotaan Asembagus.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di perkotaan Banyuglugur, perkotaan Suboh, perkotaan Mlandingan, perkotaan Bungatan, perkotaan Jatibanteng, perkotaan Sumbermalang, perkotaan Kendit, perkotaan Panarukan, perkotaan Mangaran, perkotaan Panji, perkotaan Arjasa, perkotaan Kapongan, perkotaan Jangkar, dan perkotaan Banyuputih.
- (4) Pusat Pelayanan Lokal (PPL) meliputi :
  - a. Desa Kayumas dan Jatisari di Kecamatan Arjasa;
  - b. Desa Patemon di Kecamatan Jatibanteng;
  - c. Desa Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran;
  - d. Desa Gelung di Kecamatan Panarukan;
  - e. Desa Kumbangsari di Kecamatan Jangkar;
  - f. Desa Curahcotok di Kecamatan Kapongan;
  - g. Desa Battal di Kecamatan Panji;
  - h. Desa Dawuan di Kecamatan Suboh;
  - i. Desa Kalirejo di Kecamatan Sumbermalang;
  - j. Desa Kedung Lo di Kecamatan Asembagus;
  - k. Desa Lubawang di Kecamatan Banyuglugur;
  - l. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
  - m. Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;
  - n. Desa Alas Banyur di Kecamatan Mlandingan; dan
  - o. Desa Blimbing di Kecamatan Besuki

### **D. Sistem Jaringan prasarana wilayah daerah**

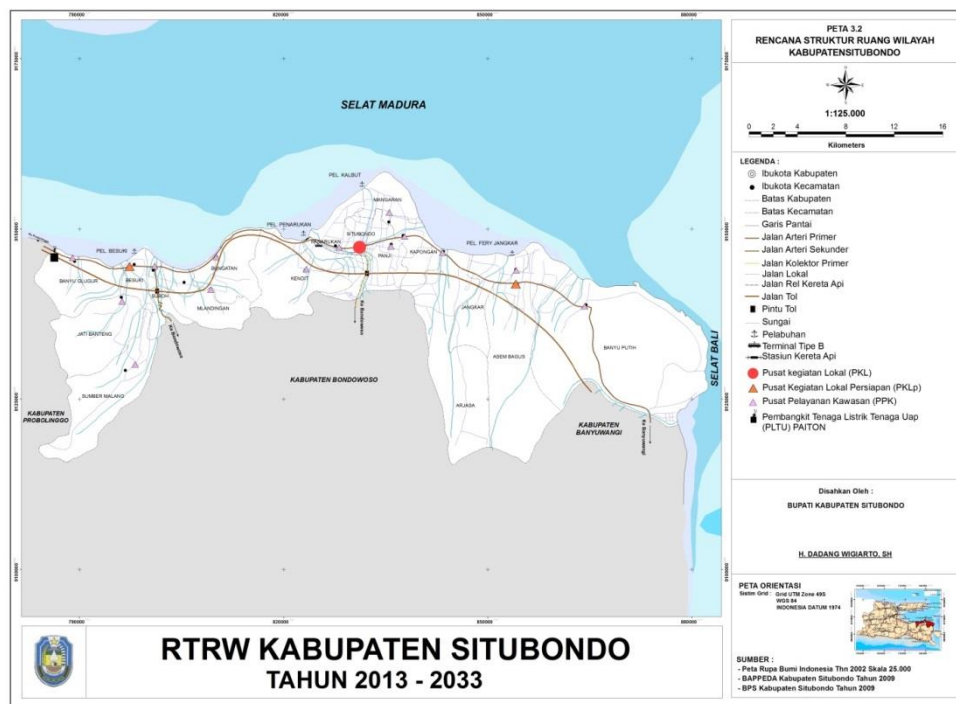
Sistem Jaringan prasarana wilayah daerah terdiri dari:

1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri dari :
  - a. Rencana Sistem Jaringan Prasarana utama yang meliputi Sistem jaringan transportasi darat; Sistem jaringan transportasi laut; dan Sistem jaringan transportasi udara.
  - b. Rencana Jaringan Prasarana lainnya terdiri dari : rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumberdaya air dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

Selengkapnya rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 6.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo**



Sumber: RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033

**E. Rencana Pola Ruang Wilayah**

Rencana pola ruang wilayah daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana termuat dalam RTRW Kabupaten Situbondo 2013-2033 terdiri dari:

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi:

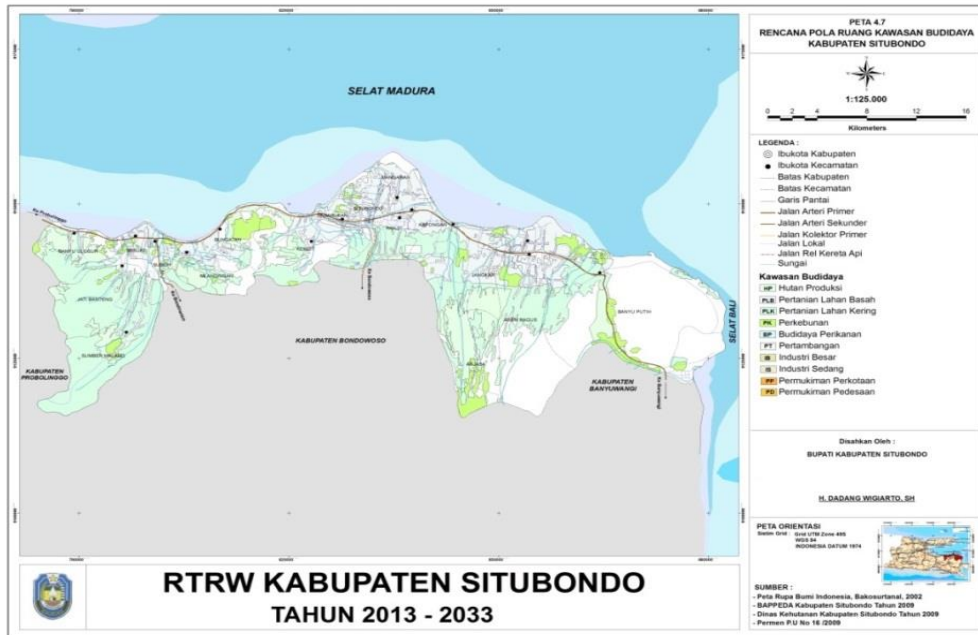
- a. kawasan peruntukan hutan;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan perkebunan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan pemukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.





Selengkapnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Situbondo terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 6.3 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kab. Situbondo**



Sumber: RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033

## 6.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga disebutkan tentang peran Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pada perusahaan daerah. Pada Pasal 24 ayat (4) disebutkan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Dengan dasar tersebut Bupati mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dengan harapan agar BUMD dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan perundangan.

BUMD sebagai institusi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, karakteristik BUMD meliputi:

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:
  - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
  - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
  - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan Bukan Daerah;



- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan aktivitas tersebut antara lain adalah:

- a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. BUMD terdiri atas:
  - perusahaan umum Daerah dengan Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
  - perusahaan perseroan Daerah dengan Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai pemegang saham;
- d. Pengelolaan BUMD memedomani pada 2 (dua) regulasi yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang berkaitan dengan sektor privat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Dengan demikian diharapkan agar di masa mendatang BUMD mampu menjalankan perannya yang strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Situbondo secara profesional dan proporsional.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD agar aktivitas BUMD sesuai dengan tujuan pendirian, maka diperlukan pedoman yang komprehensif. Pedoman yang komprehensif ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan pendirian dan visi misi Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021. Dengan demikian, diharapkan BUMD dapat menyelenggarakan aksi korporasinya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pembinaan BUMD di Pemerintah Kabupaten Situbondo dilaksanakan secara terukur, sistematis, komprehensif, dan holistik. Hal ini dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selama periode 2011-2016, BUMD telah banyak



berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Situbondo. Kontribusi tersebut antara lain dalam hal pengembangan lahan perkebunan, penyediaan sarana rekreasi yang terjangkau, penyediaan air bersih, mendukung aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal modal usaha. Di samping itu BUMD juga telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

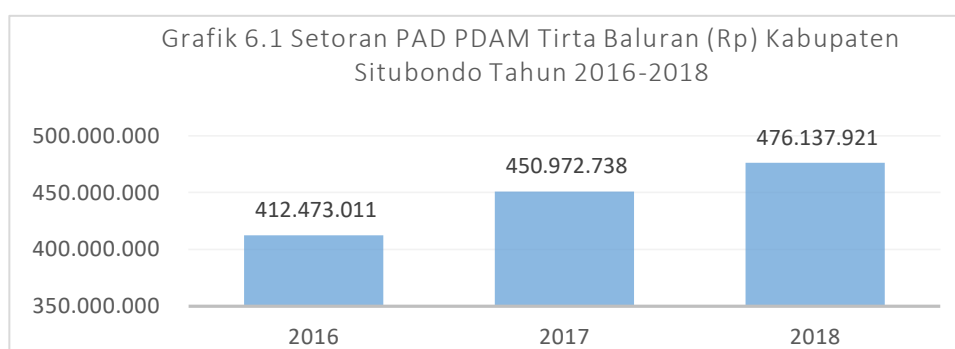
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Situbondo sesuai yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dimana terdapat 4 (empat) badan usaha, yaitu ; Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Baluran, Perusahaan Daerah Pasir Putih, Perusahaan Daerah Banongan serta BPR Syariah. Dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian daerah diperlukan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yg baik pada BUMD dalam rangka meningkatkan kineja BUMD.

## 6.2.1 Kinerja BUMD

### 1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo

PDAM Tirta Baluran Kabupaten Situbondo hingga Bulan Maret 2019, telah memiliki lebih dari 32.000 pelanggan, lebih banyak sekitar 5.073 pelanggan dibanding tahun sebelumnya. Kerjasama PDAM Kabupaten Situbondo dengan Aplikasi BebasBayar dilakukan untuk memudahkan pengguna BebasBayar termasuk pelanggan PDAM Kabupaten Situbondo dalam hal pengecekan serta pembayaran tagihan PDAM.

Penerimaan Asli Daerah PDAM Tirta Baluran sesuai dengan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum terus meningkat seiring bertambahnya pelanggan dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp. 476.137.921,00 pada tahun 2018.

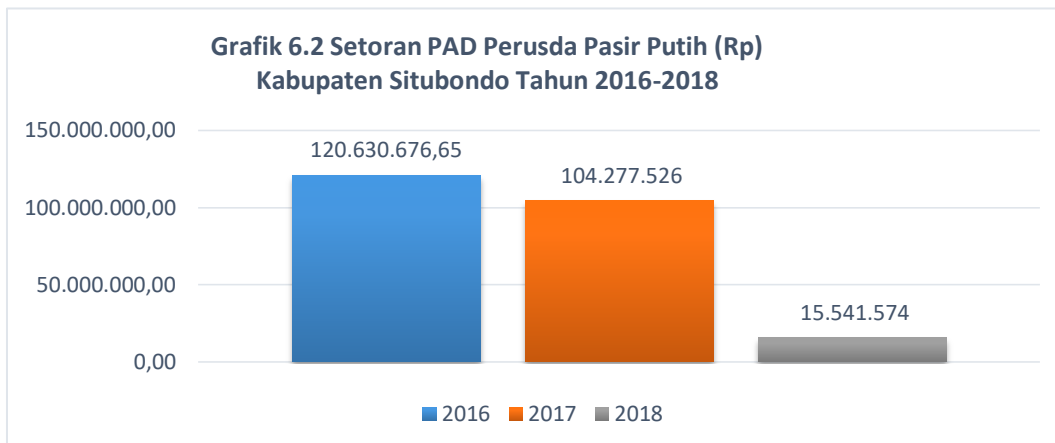


### 2. Perusahaan Daerah Pasir Putih

Perusahaan Daerah Pasir Putih merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pariwisata, temat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan yang menaungi Kawasan Wisata Ikonik Kabupaten Situbondo yaitu Pantai Pasir Putih. Perusda Pasir Putih adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.



Pada Tahun 2018, Perusda Pasir Putih mengalami penurunan PAD yang sangat drastis dimana pada tahun 2018 PAD hanya sebesar Rp. 15. 541.574,00 sangat jauh dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 104.277.526,00.



### 3. Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo

Perusahaan Daerah Banongan merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perkebunan. Perusda Banongan terletak di Desa Wringin Anom, Kecamatan Asembagus dengan luas areal 303.628 Hekar, dengan komoditas utama Tebu dan Kelapa. Dalam pendiriannya, Perusda Banongan memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

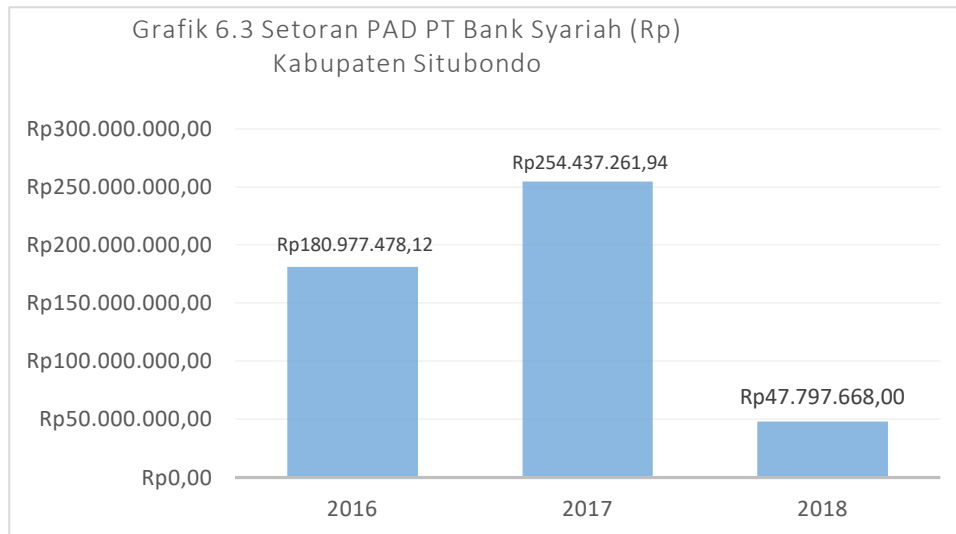
- a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga Kawasan lindung.
- c. Sosial Budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa

Setoran PAD Perusda Banongan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 setoran PAD Perusda Banongan sebesar Rp 85.900.913,00 dan meningkat menjadi Rp 126.284.306,00 pada tahun 2018.

### 4. PT Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah Situbondo

PT BPR Syariah merupakan Badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor perbankan / keuangan yang didirikan pada 20 Agustus 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 05 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo. BPR Syariah Situbondo didirikan dengan tujuan menjadi bank Syariah yang terkemuka, professional dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya di Situbondo. PAD PT Bank. PAD Bank Syariah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 setoran PAD PT Bank Syariah mencapai Rp 254.437.261.92, sedangkan pada tahun 2018 hanya Rp 47.797.668,00 saja.





### 6.2.2 Strategi dan Pengembangan BUMD

Memperhatikan berbagai aspek ekonomi, bisnis, sosial dan teknis, berikut adalah strategi pengembangan BUMD yang dikelompokkan menjadi Strategi Umum dan Strategi Khusus, serta rencana pengembangan BUMD yang dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Strategi Umum

1. Melakukan Restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis.

Perwujudan pengembangan BUMD yang mendukung visi misi Bupati Situbondo 2016-2021 dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi tersebut diarahkan sejalan dengan visi pengembangan BUMD yang dilakukan melalui proses internal dan eksternal.

Di lingkup internal proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD itu sendiri yang meliputi kondisi keuangan, SDM, dan manajemen. Di tingkat eksternal proses restrukturisasi perlu didukung dengan arah kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

2. Meningkatkan Kolaborasi dan Kemitraan BUMD

BUMD perlu memperkuat *customer-minded* dan *stakeholders-minded*. Dengan perluasan tersebut, sesungguhnya kesempatan bagi BUMD untuk berkiprah dan memperkuat bisnisnya menjadi lebih luas, Apalagi saat ini kita berada di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, BUMD juga menghadapi keterbatasan sumber daya dalam rangka memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam konteks ini sangat penting bagi BUMD untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan antarBUMD maupun antara BUMD dengan institusi-institusi



lainnya. Dalam kemitraan, dapat dikembangkan berbagai bentuk kerja sama yang saling mengisi dan memperkuat semua pihak. Namun kemitraan dapat berjalan apabila dilandasi dengan kepercayaan diantara institusi. Untuk itu, perlu dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan dan merawat kepercayaan antar institusi tersebut. Hal ini dapat didukung melalui proses pembinaan dan pengembangan BUMD di lingkungan Kabupaten Situbondo.

3. Melakukan Ekspansi dan Diversifikasi Usaha

Ekspansi merupakan suatu strategi memperbesar atau memperluas bisnis yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekrutmen sumber daya manusia. Dalam pengembangan BUMD 5 (lima) tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain untuk pencapaian tujuan bisnis, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Pemerintah kabupaten Situbondo dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di pasar. Diversifikasi sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat *positioning* perusahaan atau produk perusahaan di pasar. Ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan perlu berlandaskan pada kompetensi yang kuat dalam *core business*-nya. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam *core business*-nya.

4. Menerapkan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan global. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan sangat penting dan strategis untuk tujuan:

- a. Meningkatkan nilai perusahaan;
- b. Mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan;
- d. Serta meningkatkan kontribusi kepada perekonomian daerah.

Langkah yang akan dilakukan adalah: secara internal Pertama melakukan penguatan sumber daya BUMD secara sistematis dan



terstruktur; Kedua, melakukan evaluasi mendalam akan kekuatan, potensi, dan tantangan kelembagaan yang harus dihadapi BUMD sehingga bisa terukur modal organisasi yang dimiliki saat ini, terutama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan; Ketiga, menyehatkan organisasi BUMD dari sisi keuangan, modal, sistem bisnis, dan sebagainya.

Selanjutnya, secara eksternal, Pertama, penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan dengan beberapa cara seperti penerapan standar-standar yang berlaku dalam sistem dan kelembagaan bisnis nasional dan internasional; Kedua, melakukan *benchmarking* kelembagaan BUMD di dalam maupun luar negeri; Ketiga, kolaborasi dan berkolaborasi dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD dengan berbagai modus dan desain.

#### 5. Memperluas Sumber-Sumber Permodalan/Pembiayaan BUMD

Modal merupakan unsur utama untuk menjalankan perusahaan. Sumber Modal pada BUMD berasal dari berbagai asal, dapat berasal dari penyertaan modal maupun dari sumber lain. Dalam hal penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah secara rinci diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pada Peraturan Pemerintah ini penyertaan modal dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor;
- b. penambahan modal dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah; serta
- c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Selama ini, sumber utama permodalan BUMD berasal dari APBD. Lima tahun ke depan, BUMD harus dapat mengurangi ketergantungan kepada APBD. Dengan demikian, diperlukan upaya memperluas sumber permodalan/pembiayaan lain yang berasal dari luar APBD. Perluasan sumber permodalan atau pembiayaan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal, maupun dengan mencari investor strategis. Untuk itu, maka BUMD harus memiliki nilai atau daya jual tinggi di mata investor. Nilai atau daya jual tersebut dapat dicapai apabila BUMD memiliki struktur permodalan yang baik dan prospek usaha yang prospektif.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan hal di atas antara lain adalah:





- a. Melakukan konsolidasi BUMD, sehingga bisa memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus, dan terarah;
  - b. Evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD, sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada;
  - c. Meningkatkan kuantitas produk BUMD yang diminati pasar;
  - d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk;
  - e. Meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor;
  - f. Membentuk BUMD yang berperan dalam mendukung pembiayaan investasi dan pembangunan di Situbondo.
6. Meningkatkan pemberdayaan BUMD
- Pemberdayaan BUMD dimaksud sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD melalui pembinaan pembiayaan, SDM, dan kelembagaan BUMD. Kualitas pengelolaan BUMD akan meningkat jika didukung oleh minimal dua sumber daya organisasi utama: SDM dan sistem. Adapun strateginya pemberdayaan BUMD adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan literasi manajemen resiko SDM BUMD secara berlapis, sistematis, dan terukur;
  - b. memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD;
  - c. melakukan *benchmarking* BUMD;
  - d. membangun sistem kompetisi yang sehat antar BUMD dengan *key performance indicator* (KPI) yang rasional, terukur, dan reliable;
  - e. membina usaha-usaha baru yang difokuskan kepada pengembangan potensi bisnis di Situbondo;
  - f. menyusun regulasi yang pro BUMD guna mendukung aksi korporasi BUMD dalam operasionalnya;
  - g. Pembuatan rencana pelaksanaan investasi BUMD;
  - h. perbaikan menyeluruh aset BUMD secara dinamis berbasis teknologi informasi; dan
  - i. pemantapan pola investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

7. Mengalokasikan PMD secara selektif dan / atau terbatas untuk hanya proyek penugasan tertentu

Sebagai bagian dari upaya kontribusi nyata BUMD terhadap pembangunan Kabupaten Situbondo, pemberian penugasan khusus kepada BUMD merupakan suatu keniscayaan. Namun di sisi lain, sebagai suatu perusahaan, BUMD tetap harus memastikan target labanya dapat



tercapai meski tengah mendapatkan penugasan khusus. Oleh karena itu, pengalokasian PMD secara selektif dan/atau terbatas dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan peran nyata BUMD bagi pembangunan-pembangunan strategis di Kabupaten Situbondo.

8. Mendorong BUMD untuk *Go Public*

Salah satu jalan dalam mendapatkan sumber pendanaan baru dalam rangka mewujudkan kemandirian BUMD dari sisi pemodal adalah dengan menghimpun pembiayaan dari investor luar (non APBD). Dalam hal ini, menerapkan kebijakan *go public* bagi BUMD merupakan satu pilihan yang dapat ditempuh. Selain masalah sumber investasi, proses *go public* merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong kinerja BUMD menjadi lebih baik lagi, karena di dalamnya sudah melibatkan partisipasi masyarakat (publik) secara langsung. Untuk memastikan kesiapan dan kelayakan BUMD dalam proses *go public* tersebut, upaya-upaya penyehatan perusahaan harus terus diarahkan secara intensif, terencana, sistematis, dan terukur. Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagian BUMD Situbondo harus sudah *go public*.

9. Memperjelas mekanisme hubungan antara Pemerintah kabupaten Situbondo dengan BUMD dalam rangka penugasan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya terkait Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

10. Melakukan Transformasi Bisnis BUMD

Transformasi bisnis merupakan seluruh proses perubahan yang diperlukan oleh suatu korporasi untuk memposisikan diri agar lebih baik dalam menyikapi dan menjawab tantangan-tantangan bisnis baru, lingkungan usaha yang berubah secara cepat, maupun keinginan-keinginan baru yang muncul dari dalam perusahaan. Transformasi bisnis BUMD perlu dilakukan dengan mengubah cara pandang dari yang berfokus pada *consumer minded*, ke *stakeholders minded* yang lebih luas.

## **B. Strategi Sektor**

Selain strategi umum yang telah dijabarkan, berikut diuraikan strategi secara sektoral.

### **1. Sektor Pariwisata**

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat rekreasi edukatif terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah;



- b. Melakukan *re-branding* usaha akomodasi yang memperhatikan kearifan lokal dengan tetap berpedoman pada usaha bisnis;
- c. Melakukan inovasi dan kreasi yang berbasikan kepada kearifan lokal untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- d. Melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang kompeten baik dari kalangan Pemerintah maupun dunia usaha.

## **2. Sektor Keuangan**

- a. Mendorong BUMD sektor usaha keuangan untuk memfokuskan kepada aksesibilitas usaha mikro kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan;
- b. Mewujudkan masyarakat Situbondo sebagai masyarakat keuangan non tunai (*cashless society*) melalui produk-produk keuangan;
- c. Melakukan penjaminan kepada pelaku bisnis terutama usaha mikro kecil dan menengah sehingga mereka memperoleh perlindungan dalam melakukan bisnis;
- d. Mendorong BUMD klaster usaha keuangan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sesuai dengan ketentuan perundangan agar BUMD dapat menjadi lebih kompetitif dan kuat.

## **3. Rencana Pengembangan BUMD**

- a. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Pertama (2017)  
Pengembangan BUMD pada tahun 2017 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahap ini kegiatan pengembangan BUMD difokuskan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aksi korporasi BUMD. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi, dan pengembangan struktur bisnis, dan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan BUMD.
- b. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kedua (2018)  
Pengembangan BUMD pada tahun 2018 diarahkan untuk melakukan penguatan sinergi antarBUMD, BUMD dengan SKPD, BUMD dengan BUMN, dan BUMD dengan dunia usaha swasta. Pada tahapan ini pengembangan BUMD difokuskan kepada pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan, baik keuntungan finansial maupun keuntungan ekonomi yang difokuskan kepada pola kemitraan yang bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan



BUMD memperoleh keuntungan secara profesional dan proporsional dengan tetap memperhatikan etika bisnis.

c. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Ketiga (2019)

Pengembangan BUMD pada tahun 2019 diarahkan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh warga Situbondo. Pada tahapan ini setiap BUMD sudah mempunyai *platform* yang pro bisnis dan siap berkompetisi dengan badan usaha lain secara *fair* dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat melakukan aksi korporasinya secara lebih efisien dan efektif dan lebih kompetitif, sehingga BUMD dapat memenangi kompetisi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun global.

d. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Keempat (2020)

Pengembangan BUMD pada tahun 2020 diarahkan untuk melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMD dapat berkelanjutan. Pada tahapan ini setiap BUMD difokuskan untuk memantapkan setiap langkah aksi korporasinya dengan berpedoman pada strategi bisnis yang beretika dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selain itu, BUMD dalam melaksanakan aksinya dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian diharapkan BUMD pada tahapan ini mampu melakukan aksi korporasi dengan dukungan *database* yang akuntabel sehingga aksi korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

e. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kelima (2021)

Pengembangan BUMD pada tahun 2021 diarahkan untuk menjadi BUMD yang berketahanan. Berketahanan dalam aspek keuangan, aspek kepengurusan, aspek Sumber Daya Manusia, aspek operasional. Pada tahapan ini BUMD diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mampu berkompetisi secara *fair* dan beretika baik pada level lokal, regional, nasional, dan global;
- 2) Mempunyai permodalan yang tidak tergantung pada sumber lain;
- 3) Mampu melaksanakan proyek penugasan dari Pemerintah kabupaten Situbondo secara profesional dan proporsional;



- 4) Komposisi kepengurusan didukung oleh para profesional yang kompeten, berintegritas, dan memiliki *track record* yang dipertanggungjawabkan;
- 5) Pengelolaan dan pengurusan BUMD dilakukan secara profesional dan proporsional dengan memedomani prinsip GCG;
- 6) BUMD mampu bersinergi dengan BUMD, BUMN, SKPD, dan dunia usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kontributor pembangunan di Situbondo.

### **6.3 Kebijakan terkait pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dalam hal ini adalah dana-dana bantuan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah Kabupaten Situbondo. Kemitraan dengan perusahaan dalam memanfaatkan dana CSR dapat membantu dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi daerah di Kabupaten Situbondo. Di Kabupaten Situbondo telah dibentuk forum CSR dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/324/P/004.2/2018 tentang Forum pelaksana program tanggung jawab sosial perusahaan kabupaten situbondo periode tahun 2018 – 2021 yang didalamnya mengatur tentang susunan pengurus dan mendorong penajaman penggunaan sumber dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan di Kabupaten Situbondo (poin kedua bagian c).

Pelaksanaan Kebijakan, strategi, program dan kegiatan meliputi bidang UMKM, bidang Pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang sosial, dan bidang sarana dan prasarana. Pada tahun 2018 CSR kabupaten situbondo mempunyai program kerja diantaranya :

1. Pengembangan kehidupan masyarakat pesisir dan *Eco*-wisata Tampora  
Program ini terdiri dari beberapa kegiatan misalnya pengembangan kapasitas kelompok nelayan, pengembangan kelompok perempuan pesisir dan pengembangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pengembangan infrastruktur Wisata Tampora.
2. Konservasi burung blekok dan mangrove di Kampung Blekok  
Program berupa penelitian keanekaragaman hayati, pengembangan kapasitas masyarakat di Kampung Blekok, pengembangan pokdarwis serta penelitian dan pengembangan konservasi burung blekok dan mangrove.
3. Program penguatan kesehatan masyarakat  
Program meliputi dukungan ke Forum Anak Kabupaten Situbondo , Forum Kota Sehat (FKS) Kabupaten Situbondo, Hari Kesehatan Masyarakat (HKM), dukungan rumah pemulihan gizi dan lain-lain.



4. Program Dukungan Budaya Masyarakat  
Dukungan peringatan Hari Santri, Gebyar Anak Nasional, Situbondo Bumi Shalawat (Terak Mancorong), Peringatan Hari Jadi Besuki, Bazar Murah Ramadhan dan Idul Adha.
5. Bantuan yang diberikan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo diantaranya :
  - Pengadaan HI-ACE Pariwisata Senilai Rp. 401.000.000
  - Pengadaan tenda PKL kecamatan Asembagus senilai Rp. 45.000.000
  - Dukungan sarana *Green Eco Park* Kampung Blekok senilai Rp. 300.000.000

#### **6.4 Sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita)**

Pembangunan merupakan proses yang terarah dan terencana untuk menjadikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan fokus pada prioritas-prioritas dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat guna menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. Prioritas-prioritas dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo diwujudkan dalam sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo yang meliputi:

1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.
2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia masyarakat situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Menguatkan kawasan penyangga *Second City* untuk mengurangi disparitas wilayah.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo dengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat Inovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta peningkatan produktivitas lahan.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean governance*).
9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Sembilan agenda pembangunan prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo tersebut akan mengarah kepada program-program prioritas daerah yang menjadi



program pembangunan unggulan dalam 5 tahun ke depan. Adapun rincian program prioritas yang mendukung sembilan agenda pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.**

Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang mempunyai masyarakat yang majemuk atau terdiri dari berbagai macam kultur/budaya. Kemajemukan masyarakat tersebut harus dikuatkan, agar interaksi di dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik. Selain itu agar interaksi di dalam masyarakat bisa berjalan baik perlu adanya revolusi mental. Revolusi mental merupakan gerakan seluruh rakyat bersama Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi yang lebih baik.

Untuk melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat Situbondo, salah satu tindakan pemerintah Kabupaten Situbondo ialah dengan melakukan penguatan kulturisasi keagamaan. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo, merupakan salah satu dari sembilan agenda pembangunan prioritas (Nawa Cita).

Agama merupakan sesuatu keyakinan atau kepercayaan yang di anut oleh seseorang sehingga menggambarkan pada perilaku kesehariannya dalam berinteraksi sesama manusia. Kebebasan masyarakat dalam melaksanakan keyakinannya harus mendapat jaminan dari Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tenteram dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun maksud dari kegiatan keagamaan merupakan segala perbuatan, perkataan, lahir batin seseorang atau individu yang didasarkan pada nilai-nilai atau norma-norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama, yang telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Dengan terfasilitasinya kegiatan keagamaan maka masyarakat bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan secara optimal serta kegiatan keagamaan tersebut akan menjadi budaya atau kultur di dalam masyarakat. Kegiatan keagamaan sendiri banyak macam dan bentuknya misalkan pengajian di agama Islam, Sholawat Nariayah, perayaan natal di agama Kristen dan Katolik, perayaan imlek di agama Tionghoa dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Kultur keagamaan di masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan daerah karena sebagai landasan utama untuk menjadikan masyarakat mencapai kondisi yang lebih baik serta sebagai landasan moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Mengingat pentingnya fungsi agama





ini sehingga kegiatan keagamaan harus menjadi kultur yang kuat agar fungsi dari agama tersebut bisa didapatkan. Oleh sebab itu kulturisasi (membudayakan) ajaran dan aktifitas keagamaan akan memberikan perubahan mental pada masyarakat serta meningkatkan toleransi terhadap kemajemukan masyarakat situbondo.

## **2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.**

Derajat kesehatan masyarakat akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat, sehingga kesehatan merupakan salah satu pondasi utama dalam pembangunan. Masyarakat yang sehat akan mampu beraktivitas dengan optimal sehingga memberikan efek-efek lain bagi masyarakat disekitarnya dengan syarat masyarakat yang sehat tersebut memiliki jiwa sosial untuk menjadi *problem solver* (pemecah masalah) di lingkungannya. Beberapa kendala untuk mewujudkan kesehatan di masyarakat adalah: perilaku sehari-hari yang tidak sehat, kualitas kesehatan lingkungan sekitar dan kualitas pelayanan kesehatan.

Jiwa sosial masyarakat Situbondo akan diarahkan pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dengan cara meningkatkan dan mengembangkan peranmasyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Besarnya kemiskinan akan berdampak pada jumlah kriminalitas yang tinggi, putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan yang kecil sehingga berdampak pada generasi penerus yang buruk, dan juga pada tingkat kesehatan masyarakat buruk. Selain kemiskinan yang mempunyai dampak besar adalah permasalahan sosial. Masalah sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat, yang mana kondisi tersebut tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat, karena sudah bertentangan dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat setempat. Adanya masalah sosial ini akan berakibat pada meningkatnya tingkat kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, dan meningkatkan pengangguran. Bencana alam juga menjadi sesuatu yang mempunyai dampak yang besar. Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia. Adanya bencana alam akan berakibat timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

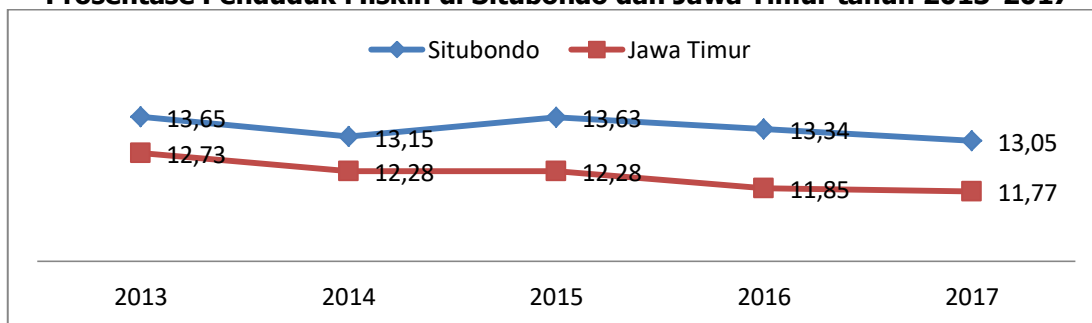


Melihat sangat besarnya dampak dari kemiskinan, masalah sosial, dan bencana alam, pemerintah Kabupaten Situbondo guna mengurangi dampak dari hal tersebut melakukan percepatan penanganan kemiskinan dan masalah sosial serta bencana alam di Kabupaten Situbondo. Percepatan penanganan ini dimaksudkan agar dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan, masalah sosial serta bencana alam baik bidang ekonomi, sosial dan lingkungan tidak semakin bertambah besar dan bisa segera diatasi.

Berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan selama ini telah dilakukan, namun ternyata penurunnya sangat lambat. Dari hasil analisa yang menyebabkan pengurangan ini adalah masing-masing OPD mempunyai indikator kemiskinan yang berbeda-beda, sehingga datanya pun juga berbeda. Dalam rangka mengatasi permasalahan data ini, maka sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya menemukan pola yang tepat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinannya, yaitu dengan membangun data kemiskinan tunggal yang disusun oleh seluruh pengampu kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang melibatkan pula seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin itu sendiri melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat terbawah RT, RW, Dusun dan Desa, yang dikawal pula oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan. Dalam proses pendefinisian kemiskinannya, selain mengedepankan prinsip partisipatif, juga melalui pengujian nilai berbasis computer atas nilai hasil pengisian quisioner indikator kemiskinan yang dilakukan pada masing – masing Rumah Tangga yang telah dikategorikan miskin hasil musyawarah. Hasil komputerisasi tersebut masih harus diuji public kembali melalui musyawarah dan diverifikasi oleh Dinas Sosial baru kemudian ditetapkan oleh Bupati menjadi Daftar Penduduk Miskin Daerah. Data tunggal inilah yang menjadi prioritas utama Program Penanggulangan Kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo di tahun 2017 sedikit menurun dari tahun 2016 dan sudah keluar dari 10 besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur, namun angka kemiskinan di tahun 2017 masih di angka 13.05%. Berikut grafik prosentasenya :

**Grafik 6.4**  
**Prosentase Penduduk Miskin di Situbondo dan Jawa Timur tahun 2013-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim, dan Kab. Situbondo, 2018



Untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan terobosan baru aplikasi data kemiskinan yang diberi nama E-DesaNow (sistem informasi terpadu perencanaan partisipatif supra desa). E-DesaNow merupakan sebuah basis data spasial desa agregat yang disusun dengan metode partisipatif sebagai dasar perencanaan pembangunan desa dan kabupaten. Adanya E-DesaNow pemerintah bisa mengontrol tingkat kemiskinan masyarakat, mulai dari sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Adanya E-DesaNow, data kemiskinan bisa didapatkan dengan valid, sehingga kebijakan dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu upaya nyata dalam mewujudkan masyarakat Situbondo yang sehat. Pemerintah daerah harus mampu menjamin atas ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terutama di rumah sakit daerah dan pukesmas secara memadai. Selain itu, kebutuhan terhadap tenaga kesehatan (dokter dan perawat) yang berkualitas tidak dapat dihindari seiring dengan semakin kompleksnya berbagai jenis penyakit yang berkembang ditengah masyarakat. Penyelenggaraan layanan kesehatan harus lebih memprioritaskan layanan kepada masyarakat miskin seperti penyelenggaraan pengobatan gratis, penyediaan obat-obat yang terjangkau, dan lainnya, sehingga mampu memberikan kontribusi secara tidak langsung terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Upaya tersebut dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi yang meliputi:

- a. Mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya: biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa, dan sebagainya;
- b. Meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.
- c. Pembangunan rumah tidak layak huni merupakan salah satu program unggulan di Kabupaten Situbondo. Di tahun 2017 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Situbondo berhasil merealisasikan pembangunan 1.200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pembangunan RTLH tersebut menggunakan sumber pendanaan dari bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (APBN) 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Situbondo, dan dana CSR perusahaan swasta. Namun pembangunan RTLH di tahun 2017 tersebut secara kualitas belum baik, dikarenakan terbatasnya dana, dana yang disediakan dari DAK hanya 15 juta rupiah untuk setiap unit dan dana dari APBD 10 juta rupiah setiap unitnya. Untuk mengatasi hal tersebut di tahun 2019, agar pembangunan RTLH di Kabupaten Situbondo bisa maksimal dilakukannya inovasi, yaitu pembiayaan pembangunan dengan melibatkan desa atau *cost sharing* antara dana desa dan APBD. Adanya *cost sharing* tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas bangunan RTLH dan menambah jumlah RTLH yang di bangun di Kabupaten Situbondo.

Penanganan masalah sosial dimaksudkan untuk menangani banyaknya permasalahan yang tidak diinginkan dalam masyarakat sehingga tidak semakin besar. Apabila permasalahan sosial bisa ditangani dengan cepat, maka dampak-dampak yang diakibatkan dari permasalahan sosial seperti: kriminalitas, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, dan pengangguran tidak semakin besar dan bisa diatasi. Langkah yang tepat dan bijak oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo seperti menerjunkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penanganan yang bersifat darurat dan segera dapat menjadi salah satu alternatif kegiatan penanganan permasalahan sosial.

Penanganan bencana dimaksudkan untuk mencegah dan mengelola terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap potensi-potensi bencana yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal dan penyediaan alat-alat deteksi dini terhadap potensi bencana seperti deteksi dini tsunami, tanah longsor dan lainnya menjadi langkah antisipatif yang tepat untuk pencegahan bencana. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten terhadap manajemen pengelolaan kebencanaan menjadi unsur utama dalam penanganan permasalahan kebencanaan, tentu hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang.

### **3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia masyarakat Situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan raga dan jiwanya. Kualitas sumber daya



manusia merupakan penggerak dan memegang peran utama yang menentukan bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta prestasi daerah. Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas akhirnya akan membawa bangsa bergerak ke taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Harapan seperti itu sangat memerlukan adanya mekanisme yang sistematis, serta adanya kelembagaan yang mendukung, dan program yang terarah. Karena luasnya dimensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga difokuskan melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.

Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal merupakan perangkat yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pendidikan agama adalah suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pendidikan yang memberikan materi mengenai agama kepada orang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang agama baik dari segi materi akademis maupun dari segi praktik yang dapat dilakukan sehari-hari. Setiap orang pastilah memiliki kepercayaan untuk menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lain sebagainya. Instansi pendidikan agaman bisa berbentuk formal dan nonformal.

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Program yang ada dalam pendidikan tinggi ini tidak hanya sarjana melainkan diploma, pendidikan profesi, magister, bahkan doktor. Meskipun pendidikan tinggi bukan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, namun pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan peluang kepada masyarakat Situbondo agar dapat melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi.

Agenda pembangunan prioritas disamping bertujuan untuk menguatkan pendidikan formal, non formal, dan pendidikan tinggi juga akan mengarahkan pendidikan pada: penyelenggaraan pendidikan 9 tahun, peningkatan kualitas guru melalui pendidikan tingkat lanjut, peningkatan sarana dan prasarana (ruang kelas, laboratorium, dan lainnya), rintisan sekolah menengah pertama berbasis *smart school*, pemberian layanan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan jurusan tertentu bagi siswa tidak mampu yang berprestasi akademis atau berprestasi non akademis, bantuan layanan pendidikan dan pelatihan bagi siswa tidak mampu yang berprestasi non akademik, pemberian layanan rumah singgah/asrama secara bertahap bagi mahasiswa Situbondo di luar daerah, dan



fasilitasi pendidikan karakter antar lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal keagamaan, Penyelenggaraan pelaksanaan kejar A, B dan C, Pelaksanaan keaksaraan fungsional, penyediaan teknologi Informasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan. Saat ini sudah terbentuk data center pendidikan.

Pendidikan di Kabupaten Situbondo harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Situbondo tanpa terkecuali, termasuk warga disabilitas. Sejak tahun 2017 Kabupaten Situbondo telah menerapkan pendidikan inklusi, artinya bahwa bagi warga difabel tidak harus bersekolah di sekolah luar biasa, akan tetapi dapat juga belajar pada sekolah umum yang ada disekitarnya. Saat ini sudah ada 1 TK inklusi, 21 SD inklusi, dan 28 SMP inklusi. Sedangkan untuk tingkat SLTA ada 1 SMK walaupun sekarang menjadi kewenangan Provinsi. Dengan demikian maka seluruh masyarakat Situbondo benar-benar dapat meningkatkan kapasitas sumber dayanya tanpa terkecuali.

Dalam konteks kepentingan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama jenjang Pendidikan Dasar pada khususnya maka sangat diperlukan pengadaan alat /media pembelajaran yang menggunakan pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Tersedianya alat peraga/media pembelajaran diyakini mampu meningkatkan mutu Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Situbondo. Rintisan sekolah menengah pertama berbasis *smart school* difokuskan kepada Sekolah berbasis Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui percontohan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di 3 wilayah yaitu Asembagus, Situbondo, dan Besuki.

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Anak-anak bangsa yang terdidik merupakan asset yang paling berharga untuk menghadapi persaingan global, dan karenanya pendidikan yang berkelanjutan sampai ke Pendidikan Tinggi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan SDM yang berkualitas agar memiliki pengetahuan, keahlian, terampil, kreatif dan inovatif seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan beasiswa kepada lulusan SMA/SMK/MA dari keluarga miskin yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Jenjang Sarjana (S.1). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai saat ini dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Angkatan I tahun 2013 - 2014 sejumlah 207 Mahasiswa.
- b. Angkatan II tahun 2013 - 2015 sejumlah 220 Mahasiswa.



- c. Angkatan III tahun 2013 – 2016 sejumlah 231 Mahasiswa.
- d. Angkatan IV tahun 2014 – 2017 sejumlah 154, karena yang mendapatkan bea siswa hanya yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri, sedangkan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang kuliah di PTN dan PTS.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada RPJMD tahun 2016 –2021 akan memberikan bantuan Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi siswa tidak mampu yang berprestasi non akademik. Bantuan tersebut bisa berupa bantuan biaya sekolah guna meringankan beban atau pun bantuan berupa pelatihan untuk menambah ketrampilan siswa yang kurang mampu tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Situbondo yang tidak mampu, tetapi mempunyai prestasi non akademik tetap bisa menikmati dan merasakan pendidikan dan bisa mendapatkan pelatihan guna meningkatkan kemampuannya. Selain itu pemberian bantuan layanan pendidikan dan pelatihan bagi siswa kurang mampu ini guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk Pemberian layanan rumah singgah/asrama merupakan program pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di daerah lain. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses mahasiswa situbondo yang berada diluar daerah. Dalam program ini diwujudkan dengan cara pemerintah Kabupaten Situbondo menyediakan tempat berupa rumah atau asrama di beberapa daerah yang ada mahasiswa dari daerah situbondo yang nantinya tempat tersebut bisa ditempati oleh mahasiswa asal Situbondo. Untuk rumah singgah yang semula direncanakan disediakan di Kota Malang, Surabaya, dan Bandung saat ini baru terealisasi di Kota Malang.

Selanjutnya pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Pendidikan karakter mempunyai tujuan untuk membentuk kepribadian seseorang individu. Pendidikan karakter sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, karena dengan pendidikan karakter bisa membentuk kepribadian dan identitas bangsa sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter. Pendidikan karakter pun dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga mampu membentuk identitas yang kokoh dari setiap individu dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan karakter ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kearah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan karakter pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen memfasilitasi pendidikan karakter antar lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal agama. Pemfasilitasan pendidikan karakter antara lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal agama ini





dimaksudkan agar setiap individu terutama masyarakat generasi penerus di daerah Situbondo mempunyai karakter yang berpedoman dengan ajaran agama. Karena setiap insan/manusia selain membutuhkan pendidikan secara umum juga membutuhkan pendidikan agama untuk spiritualnya. Dengan adanya pemfasilitasan pendidikan karakter antar lembaga pendidikan formal dan lembaga non formal agama diharapkan mampu mengatasi krisis moral seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dll yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam inovasi sistem informasi di bidang pendidikan adalah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terpadu dalam sebuah sistem informasi. Keseluruhan Dapodik dirangkum melalui sistem informasi pendidikan terpadu. Perangkuman dapodik bertujuan untuk memudahkan pencapaian target kinerja bidang pendidikan. Dengan adanya data dapodik yang teintegrasikan dalam sistem informasi terpadu diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kinerja pendidikan dalam segala bidang. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya. *Maintenance* sistem informasi yang dibangun merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Budaya (Dispendikbud) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Semua data Dispendikbud akan terhubung dengan data di instansi lain. Instansi lain yang terkait diantaranya adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk integrasi data PNS Dispendikbud; Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk integrasi Data Gaji PNS Dispendikbud; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk integrasi seluruh data pokok pendidikan (dapodik); Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk integrasi data kependudukan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk integrasi data kesehatan siswa.

Adanya sistem informasi tersebut maka akses informasi kondisi sekolah dan pegawai secara rinci menjadi lebih mudah. Kondisi bangunan sekolah, jumlah murid, hingga keberadaan guru di saat jam kerja juga dapat dipantau. Hal tersebut dapat menghindari penyalahgunaan wewenang seperti guru ataupun pengawas yang beralasan aneh-aneh ketika jam kerja tidak berada di sekolah. Ketersediaan data yang valid juga semakin mempermudah dalam membuat kebijakan suatu program. Salah satu contohnya adalah bantuan pembangunan sekolah, maka sekolah yang terdata memiliki kondisi yang paling buruk yang akan diperbaiki terlebih dahulu sehingga bangunan sekolah yang tak layak dapat segera teratasi. Manfaat dari Sistem Dapodik yang terpadu ini adalah menciptakan efisiensi dan kontrol pendidikan yang lebih baik sehingga



pembuatan kebijakan dapat lebih tepat sasaran. Salah satu contohnya Beasiswa Unggul Situbondo untuk selanjutnya dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hingga saat ini pembuatan sub-sub data pada aplikasi sistem informasi ini telah ditugaskan terutama yang berhubungan dengan dinas-dinas lain.

#### **4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.**

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh bertujuan untuk 1) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan, 2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan, 3) mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi, 4) mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah provinsi/kabupaten/kota bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan, dan 5) menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

Sedangkan kawasan strategis berdaya saing adalah kesiapan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, guna menghadapi tantangan persaingan pasar baik nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan peningkatan infrastruktur transportasi karena Sistem prasarana dan sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) merupakan prasyarat bagi terjadinya pergerakan ekonomi wilayah, dimana sistem pendukung dan pendorong prasarana transportasi sangat berperan terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi wilayah. Kondisi sarana dan prasarana transportasi berpengaruh pada tingkat aksesibilitas yang ada disuatu kawasan/daerah. Banyaknya masalah kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat aksesibilitas (keterhubungan) pusat-pusat desa dengan daerah-daerah lainnya yang menyebabkan desa-desa tersebut menjadi kurang produktif dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Oleh sebab itu salah satu fokus agenda ini adalah: rintisan pembangunan jalan lingkar utara,



pembangunan akses jalan menuju wisata laut dan gunung, dan peningkatan ruas jalan poros kabupaten dengan hotmix.

Rintisan pembangunan jalan lingkar utara merupakan salah satu upaya penyediaan prasarana infrastruktur jalan yang mantap untuk pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan aksesibilitas berdasarkan kondisi potensi unggulan yang ada yaitu di sektor pertanian. Selain itu, pembangunan jalan lingkar utara ditujukan untuk pengembangan wilayah dan adanya kepadatan lalu lintas di perkotaan dan telah melampaui kapasitas jalan. Serta tujuan yang tidak kalah penting adalah mendukung aksesibilitas antar pedesaan dan kecamatan, Pelabuhan Panarukan, Pelabuhan Kalbut dan Rencana Kawasan Industri Tanjung Pecinan (Situbondo) serta pergerakan komoditas dan orang menuju Pelabuhan Gilimanuk dan Bandara Blimbingsari (Kabupaten Banyuwangi) serta menuju destinasi wisata pulau Bali melalui jalur darat pantai utara (Pantura).

Kepadatan lalu lintas menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan layak atau tidaknya kapasitas suatu jalan. Dengan mengetahui kepadatan suatu jalan dapat ditentukan alternatif perbaikan apakah membatasi kendaraan yang masuk pada ruas jalan tersebut atau dengan menambah jalan baru. Adapun jalan yang tergolong relatif sangat padat adalah jalan di sekitar Kota Situbondo seperti jalan A.Yani, jalan PB.Sudirman, jalan Basuki Rahmat, dan sekitarnya. Bercampurnya berbagai kendaraan seperti becak, sepeda motor, mobil pribadi, truk, bis yang melintasi ruas-ruas jalan disekitar Kota Situbondo menyebabkan kepadatan jalan menjadi bertambah. Kendaraan berat yang melewati ruas jalan di kota Situbondo semakin menimbulkan kepadatan terpusat dan tingkat arus lalu lintas menjadi optimum atau mencapai kapasitasnya sehingga menimbulkan kemacetan. Hal ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan mengarahkan arus lalu lintas yaitu Jalan Lingkar Utara. Berdasar hasil survey tentang Rencana Pengembangan Jalan Lingkar (*Ring Road*) Kabupaten Situbondo maka Rencana Jalan Lingkar (*Ringroad*) Utara dengan melewati 6 (enam) Ruas Jalan Kabupaten sebagai embrio jalan lingkar dengan total panjang 20,546 km antara lain Ruas Jalan Wringin Anom – Gelung (R.177), Ruas Olean – Duwet (R.316), Ruas A. Yani – Kalbut (R.4198), Ruas Mangaran – Trebungan (R.288), Ruas Mangaran – Pokaan (R.289), dan Ruas Jalan Kapongan – Kalbut (R. 279).

Sampai saat ini dalam mewujudkan pengembangan jalan lingkar tersebut telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan struktur jalan dan jembatan di sepanjang jalur Ring Road, sebagaimana data berikut:



**Tabel 6.3**  
**Rencana Jalan Lingkar (Ringroad) Utara**

No	Ruas Jalan dan jembatan	Panjang Ruas	Jumlah Jembatan	Panjang Ruas yang sdh di tangani	Jumlah jembatan yang sudah ditangani
1	Ruas Jalan Wringin Anom – Gelung (R.177)	5,23 km	5 unit	1,90 km	3 unit
2	Ruas Olean – Duwet (R.316)	4,26 km	2 unit	-	-
3	Ruas A. Yani – Kalbut (R.4198)	3,03 km	1 unit	-	-
4	Ruas Mangaran – Trebungan (R.288)	2,68 km	3 unit	1,58 km	-
5	Ruas Mangaran – Pokaan (R.289)	2,55 km	3 unit	0,95 km	1 unit
6	Ruas Jalan Kapongan – Kalbut (R. 279)	2,90 km	3 unit	2,85 km	2 unit
	<b>TOTAL</b>	20,65 km	17 unit	8,28 km (40,09%)	6 unit (35,29 %)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2018 upaya dalam rangka mewujudkan Ring Road di Kabupaten Situbondo sudah mencapai 40,09 % untuk peningkatan kapasitas dan struktur jalan dan 29,41 % untuk peningkatan kapasitas dan struktur jembatan. Dengan total panjang ruas jalan sepanjang 20,65 km. Penyelesaian Ring Road akan ditargetkan selesai dalam tahun 2021.

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan yaitu Jalan Lingkar Kabupaten di Kabupaten Situbondo akan memberikan pengaruh sebagai berikut:

- a. Sebagai penghubung antar kecamatan di perdesaan dan perkotaan dan sebagai jalan sekunder membentuk simpul transportasi jalan dengan jalan primer melalui jalur utara sepanjang 20,546 km serta untuk mencapai waktu tempuh yang pendek dalam melintas Kabupaten Situbondo;
- b. Sebagai penyedia prasarana infrastruktur jalan yang mantap untuk pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan aksesibilitas, terutama untuk mendukung sektor basis Kabupaten Situbondo yaitu di sektor pertanian;
- c. Pengembangan wilayah Kabupaten Situbondo dan mengurangi kepadatan lalu lintas di perkotaan yang telah melampaui kapasitas jalan, terutama di wilayah perkotaan, seperti Jalan A.Yani, Jalan PB.Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, dan sekitarnya;

Selanjutnya rintisan pembangunan jalan lingkar Utara pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN dan tidak mengesampingkan prioritas urusan wajib pada pelayanan dasar.



Pembangunan akses jalan untuk menuju wisata laut dan gunung ini, sebagai upaya untuk mengembangkan wisata laut dan gunung yang berada di Kabupaten Situbondo, karena dengan akses jalan yang memadai membuat para wisatawan berminat untuk berkunjung.

Pengembangan akses jalan dalam rangka menumbuhkan kawasan strategis cepat tumbuh diarahkan pada destinasi wisata gunung (menuju Kawah Ijen dan puncak rengganis).

Selain untuk mengembangkan destinasi wisata sendiri, pengembangan akses jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap daerah sekitar yang dilaluinya.

Pembangunan akses jalan Kayumas menuju destinasi wisata Kawah Ijen menjadi salah satu kegiatan yang memiliki beberapa tujuan meliputi menyediakan prasarana perhubungan berupa jalan dalam rangka menghubungkan wilayah yang tertinggal di Desa Kayumas dengan wilayah cepat tumbuh dan pusat-pusat perdagangan yang strategis. Mendorong dan mengembangkan Kecamatan Arjasa terutama Desa Kayumas yang mempunyai potensi komoditas kopikopi rakyat seluas 1.029 Ha. Tanaman Kopi merupakan tanaman produktif berjenis Kopi Arabika. Tanaman kopi Arabica memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi, dibanding jenis kopi Robusta. Mendorong dan mengembangkan potensi pariwisata kawasan Wisata Kawah Ijen dan Cagar Alam Taman Wisata Ijen tepatnya di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso yang dapat dilalui melalui Kabupaten Situbondo dengan membuka akses jalan (dikenal dengan sebutan Kawasan **Wisata Segi Tiga Emas**). Serta, mendorong pertumbuhan perekonomian disekitar wilayah Kayumas.

Kawasan Agropolitan di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso menuju Kawasan Wisata Gunung Ijen. Kawasan agropolitan ini merupakan wilayah strategis cepat tumbuh dan masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun demikian konektivitas simpul jaringan jalan antar kabupaten tersebut sampai saat ini belum terwujud. Hal ini disebabkan kualitas jalan yang menghubungkan Dusun Pedati Desa Kayumas Kabupaten Situbondo (Ruas PTP.Kayumas – Asmaraan – Pedati) dan Kabupaten Bondowoso menuju Kawasan Wisata Gunung Ijen sampai saat ini belum layak untuk dilewati oleh moda transportasi.

Dengan terbukanya akses jalan tersebut Kawasan Agropolitan Kayumas berpotensi menjadi kawasan pendukung dari Kawasan Wisata Gunung Ijen, hal ini disebabkan jarak tempuh menuju Kawasan Gunung Ijen dari Jalur Pantura



akan semakin pendek bila dibandingkan dengan jalur yang ada selama ini. Disamping itu kawasan ini akan tumbuh menjadi salah satu alternatif destinasi wisata baru yang menyediakan berbagai fasilitas wisata seperti halnya penginapan, *homestay* dan fasilitas pendukung lainnya.

Sedangkan Pembangunan akses jalan dari Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang menuju Gunung Rengganis dengan membuka akses jalan menuju ke kawasan wisata Gunung Rengganis pada lokasi : Mata Air 1, Mata Air 2, dan Padang Sabana.

Selanjutnya kegiatan investasi bidang wisata pantai Pasir Putih juga sangat penting untuk menjadi perhatian diantaranya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum pendukung yang memungkinkan dikembangkan pada kawasan wisata Pasir Putih. Untuk pengembangan kawasan wisata Pasir Putih tidak lepas dari kerjasama dengan Perum Perhutani karena akan memanfaatkan lahan hutan Negara yang berada pada sisi selatan pantai Pasir Putih. Diharapkan pengembangan ini dapat menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan tidak saja pada sector wisata namun juga pada sector pembangunan yang lain seperti sector transportasi, industry daerah, perdagangan, jasa dan investasi lainnya yang saling mendukung keberadaan wisata pantai Pasir Putih sehingga nantinya Pasir Putih menjadi salah satu obyek wisata yang memiliki konsep *edutourism* dan berdaya saing tinggi pada skala regional bahkan internasional.

Dalam rencana pengembangan wisata pantai Pasir Putih tersebut pasti membutuhkan investasi yang bernilai besar sehingga pola kerjasama yang memungkinkan untuk dilaksanakan adalah kerjasama Perusda dengan investor / pihak ketiga.

Secaraurum pola struktur ruang di Kabupaten Situbondo terutama perkembangan jaringan jalannya hampir sama dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, dimana pola jaringan jalan utama pada dasarnya adalah berbentuk koridor linier atau berbentuk *ribbon pattern*, salah satunya adalah jalan arteri primer yang menghubungkan Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi. Koridor jalan ini memanjang dari Kecamatan Banyuglugur yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo hingga sampai Kecamatan Banyuputih yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan menyusuri pantai Selat Madura sepanjang ± 110 km.

Maksud dan tujuan dari penanganan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Situbondo yaitu :

1. Untuk menyediakan prasarana perhubungan berupa jalan dalam rangka menghubungkan wilayah yang tertinggal dengan wilayah cepat tumbuh dan



- pusat-pusat perdagangan dan pariwisata sebagai *economic base* kabupaten yang strategis melalui kinerja prasarana jalan yang mantap, berkualitas, nyaman dan aman;
2. Mendorong dan mengembangkan pusat-pusat wilayah agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain;
  3. Meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecamatan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai '**motor penggerak**' dan pendorong pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya dengan jalan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan dan perdesaan berupa prasarana jalan;
  4. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan secara sinergis dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi melalui Peningkatan Jalan Poros Desa dengan Konstruksi Jalan Hotmix.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka program untuk penanganan jalan poros kabupaten dengan menggunakan konstruksi Hotmix. Peningkatan Struktur Jalan poros kabupaten dari jalan lapen menjadi hotmix mengingat tingginya volume kendaraan dan banyaknya kendaraan berat yang melintasi pada ruas jalan poros kabupaten sehingga dibutuhkan struktur jalan yang mantap, nyaman dan aman.

#### **5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.**

Dua dasawarsa terakhir dunia teknologi informasi berkembang dengan cukup pesat. Banyak inovasi di bidang teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara umum. Tadinya komunikasi antar orang yang dilakukan melalui telepon dan SMS sekarang dapat dilakukan menggunakan paket data melalui perantara aplikasi *chatting* semacam Whatsapp, Line, Telegram, dsb. Selain itu contoh nyata inovasi di Indonesia yaitu Go-Jek yang telah mengubah *mindset* (pola pikir, red) kita semua, tadinya masyarakat yang harus menghampiri penyedia jasa pengantar pribadi (ojek, red) di pangkalannya masing – masing sekarang malah tebalik tukang ojek yang menghampiri penumpangnya. Hal ini merupakan wujud perbaikan pelayanan melalui bantuan aplikasi di ponsel cerdas masing – masing individu.

Namun, teknologi informasi tidak hanya menembus pola interaksi sosial individu di masyarakat, ia juga mendorong otomasi di berbagai sektor mulai dari bisnis, akademisi, komunitas termasuk juga di pemerintahan. Hal ini pada akhirnya membuat pemerintah turut serta beradaptasi dengan kondisi semacam





ini. Proses – proses yang selama ini lazim dilaksanakan secara manual sudah mulai dilakukan otomasi mulai dari pengadaan barang (*e-procurement*), penganggaran (*e-budgeting*), dsb. Hal ini diterapkan di negara – negara di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia tentunya. Pemerintah Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Situbondo juga turut melakukan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui teknologi informasi. Salah satu program prioritasnya yaitu Situbondo Smart Society. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk sektor pelayanan publik Pemkab Situbondo memiliki rumusan model salah satunya di bidang kesehatan yaitu terintegrasinya proses pelayanan mulai dari puskesmas hingga RSUD sehingga proses rujukan, rekam medis, ketersediaan kamar dan dokter tidak perlu lagi dilakukan secara manual yang biasanya berdampak pada pembengkakan biaya, ketidakefektifan waktu, dsb.

Banyak pula inovasi – inovasi lain untuk peningkatan layanan publik yang tentunya menjadi fokus pemerintah seperti pendidikan, perijinan, infrastruktur, kependudukan dan penanaman modal. Selain itu melalui integrasi sistem diharapkan dapat dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan serta administrasi kesekretariatan lainnya dapat dilihat secara transparan dan akuntabel. Kemudian kepala daerah juga dapat mengendalikan pemerintahan daerah lebih mudah karena semua proses dapat dipantau secara *real-time* dan terukur melalui pusat pengendali informasi di ruang Intelligence Room (IR).

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat mendorong tingkat kreativitas dan inovasi untuk mengiringinya. Pemerintah Situbondo serius dalam menyikapi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berfokus pada kecepatan, kemudahan serta berbasis online dan digital. Intelligence Room merupakan salah satu inovasi teknologi dan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang pelayanan publik. Intelligence Room merupakan salah satu perwujudan konsep Situbondo Smart Society yang telah diluncurkan pada 14 Mei 2018. Intelligence Room adalah Ruang Pintar Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan fitur dan fungsi Intelligence 1.0 yang akan terus dikembangkan, terdiri dari 31 aplikasi yang dapat menampilkan 135 informasi eksekutif. Intelligence Room atau titik nol merupakan integrasi data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Situbondo. Seluruh OPD telah memiliki aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi tersebut dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan pihak ketiga. Diskominfo berperan



sebagian besar dan sebagian kecil oleh pihak ketiga namun tetap berdasarkan rekomendasi dari Diskominfo agar data dapat terintegrasi.

Tujuan dari *Intelligence Room* ini adalah memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, efektif dan efisien serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Platform dan Road Map dari *Intelligence Room* telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangan aplikasi. Hingga saat ini kendala yang dihadapi dalam proses membangun dan pelaksanaan *Intelligence Room* adalah sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. *Intelligence Room* ini telah mulai dibangun tahun 2016 yakni diawali dengan membangun jaringan, infrastruktur, sarana prasarana, hardware, software dan brainware serta SDM. Konsep Smart Society melalui *Intelligence Room* ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan perkotaan dimulai dari kemacetan lalu lintas, keamanan kota dan pelayanan publik serta menyajikan tatanan Kota yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. *Intelligence Room* berbentuk ruangan yang berisi layar besar dengan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan OPD pelaksana. Seluruh OPD melakukan transformasi manajemen birokrasi dan pelayanan publik melalui aplikasi pelayanannya masing-masing. Salah satu contohnya di bidang perizinan yang sebelumnya membutuhkan waktu selama tiga hari sekarang menjadi satu hari dalam proses pelayanannya. Di dalam layar besar tersebut terdapat 225 aplikasi dengan rincian 125 layanan "Stempel", 50 website pelayanan dan 45 aplikasi. *Intelligence Room* memiliki 9 fungsi sekaligus yakni sebagai decision support system (ruang analisis pengambilan keputusan), visualisasi demografi daerah, monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan, monitoring pelayanan publik, cctv, tracking information system, video conference, pusat pengaduan masyarakat dan pusat penyusunan strategi. Ruang lingkup yang akan terus dikembangkan saat ini terdiri dari 30 aplikasi *Intelligence 1.0* yang dapat menampilkan 135 informasi, sistem pelayanan masyarakat online yang dinamakan [stempelsitubondo.info](http://stempelsitubondo.info) (sistem pelayanan masyarakat Kabupaten Situbondo) berisi 26 instansi yang memberikan 125 layanan masyarakat, 50 website Pemerintah Kabupaten Situbondo, 45 aplikasi e-government Pemerintah.

Fungsi video conference dari *Intelligence Room* adalah sebagai media komunikasi secara langsung kepada jajaran OPD di Kabupaten Situbondo. Hal yang melatarbelakangi pembangunan *Intelligence Room* ini adalah perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dengan inovasi sistem informasi yang dapat mewujudkan sistem



pemerintahan yang akuntabel dan transparan tersebut maka penyalahgunaan wewenang dapat dihindari dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Situbondo senjadi agen perubahan dan pelayan public berupaya mempersiapkan diri secara internal terlebih dahulu dengan menyediakan infrastruktur guna proses digitalisasi kepada masyarakat kemudian. Bidang yang menjadi skala prioritas terlebih dahulu dalam program Intelligence Room ini adalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik termasuk perizinan serta pemerintahan. Intelligence Room juga memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan oleh Kepala Daerah secara langsung dan aktual guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Melalui Intelligence Room ini setidaknya sudah menjawab salah satu kebutuhan masyarakat Kabupaten Situbondo yakni dengan memperpendek jarak dan mempersempit waktu dalam proses pelayanan publik.

#### **6. Memperkuat kawasan penyangga *Second City* untuk mengurangi disparitas wilayah.**

Disparitas atau kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pinggiran merupakan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, termasuk juga Kabupaten Situbondo. Solusi yang ditempuh oleh Kabupaten Situbondo untuk mengatasi disparitas wilayah melalui penguatan kawasan penyangga *second city*. Kota penyangga adalah daerah yang berada di sekitar atau diluar daerah utama atau daerah yang mempunyai interaksi yang tinggi. Kota penyangga sangat berperan dalam keberlangsungan hidup atau perkembangan kota utama. Karena kota penyangga sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan yang di alami oleh daerah-daerah atau kawasan yang berinteraksi tinggi. Dengan tidak adanya kota penyangga kota yang berinteraksi tinggi tidak akan mampu mendapat tekanan secara terus menerus. Melalui penguatan kota peyangga tersebut harapannya disparitas wilayah di Kabupaten Situbondo dapat dikurang serta meningkatkan cakupan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata.

Sebagaimana Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan untuk mendorong pertumbuhan antar wilayah daerah, perlu dilakukan upaya pengembangan *second city* di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Asembagus.

Agenda pembangunan ini difokuskan pada penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia ini dilakukan dengan cara desentralisasi ke desa-



desa,. Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan sehingga tidak ada desa yang tertinggal dan tidak ada kesenjangan antara di kota dan di desa. Adapun yang menjadi prioritas dalam penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam memenuhi kelayakan kota penyangga ini, terutama di kecamatan Asembagus dan kecamatan Besuki adalah dilakukan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan umum. pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan adalah : Taman alun-alun, RSUD, Sekolah Unggulan, Pasar, Pembangunan Saluran Drainase, Peningkatan Jalan, Penyediaan Air Minum serta Prasarana dan Sarana Transportasi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Peraturan tersebut mewajibkan setiap kabupaten atau kota untuk melakukan penataan kawasan perkotaan yang dimiliki dan Kabupaten Situbondo memiliki 48 desa atau kelurahan yang termasuk dalam wilayah perkotaan yang tersebar dalam 17 Kecamatan.

Penataan kawasan perkotaan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi wilayah pedesaan untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehingga pembangunan perkotaan akan saling mendukung dengan pembangunan perdesaan sehingga pertumbuhan Kabupaten Situbondo akan merata keseluruh wilayah. Fungsi penataan kawasan perkotaan adalah untuk meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pelayanan umum bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya dan sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.

Disamping itu penataan kawasan perkotaan dimasa yang akan datang akan difokuskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan berikut ini:

1. Peningkatan jumlah penduduk kawasan perkotaan yang pesat dari waktu ke waktu akan menyebabkan pengelolaannya semakin berat dan memberikan dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat serta kebutuhan lahan untuk aktivitas perkotaan sebagai "*engine of growth*" pun akan meningkat drastis.
2. Keterkaitan fungsional antara kawasan perkotaan dengan perdesaan (*urban – rural linkages*) belum memberikan dampak yang positif bagi keduanya, bahkan kawasan perdesaan cenderung 'dirugikan' dalam pola-pola keterkaitan yang terbentuk. Fenomena yang terjadi masih ditunjukkan oleh



tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan, akibat minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, pemasaran hasil-hasil produksi, serta akses pada prasarana dan sarana (ekonomi maupun sosial).

**7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo dengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat Inovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta peningkatan produktivitas lahan.**

Kemandirian ekonomi merupakan suatu kondisi masyarakat yang produktif dan mampu memenuhi kebutuhan pribadi untuk menjamin kesejahteraan dan kebutuhan ekonominya. Kondisi perekonomian yang stabil dan dinamis menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemandirian ekonomi di Kabupaten Situbondo difokuskan pada penguatan potensi lokal yang dimiliki, yaitu: pengembangan destinasi pariwisata, pembangunan Kawasan Pusat Inovasi Terpadu Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, pengembangan Kabupaten Situbondo sebagai pusat inovasi ikan kerapu nasional dan percontohan budidaya vaname, serta peningkatan produktivitas lahan agar mampu menunjang kemandirian ekonomi.

Kawasan Pertanian Terpadu terletak di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan seluas ± 15 ha, dibangun mulai akhir 2015 – 2017 secara bertahap yang terbagi menjadi 4 (empat) sektor, yaitu; *cluster* pertanian seluas ± 7.3 ha, *cluster* perikanan seluas ± 3 ha, *cluster* peternakan seluas ± 2,7 ha, serta Pusat Pemberdayaan Masyarakat (Puspemas) seluas ± 2 ha. Keempat sektor tersebut berperan sebagai kawasan pengembangan pertanian terpadu dan diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran / edukasi / percontohan teknologi produksi pertanian terpadu sebagai bagian dari pembangunan ekonomi lokal berbasis kawasan. Kawasan Pertanian Terpadu ini diarahkan sebagai pusat pengembangan komoditas unggulan lokal yang memiliki produksi berkelanjutan dan dapat memiliki nilai tambah yang kompetitif, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

a. *Cluster* Pertanian :

*Cluster* Pertanian difokuskan sebagai kawasan pengembangan dan percontohan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mudah dan murah untuk diterapkan bagi petani. *Cluster* ini terdiri dari lahan sawah/ladang untuk pengembangan varietas padi, jagung, singkong dan tebu, greenhouse sebagai kawasan pengembangan budidaya hortikultura secara hidroponik seperti komoditas kangkung (*Ipomoea aquatica* F.), sawi hijau (*Brassica rapa*



var. *Parachinensis*), sawi pakcoy (*Brassica rapa* var. *Chinensis*), kailan (*Brassica oleraea* var. *Alboglabra*) dan selada (*Lactuca sativa*). Konsep Taman Teknologi Pertanian *cluster* pertanian mengalami pengembangan desain pada Tahun 2018 dengan rencana tindak lanjut pengembangan dem plot pepaya, mangga varietas garifta merah, buah naga, tebu, kakao dan labu madu dengan tujuan menarik minat masyarakat dalam berbudidaya tanaman horti maupun perkebunan yang bernilai ekonomis dengan adopsi teknologi yang mudah dan tidak *high price*. Pengembangan *cluster* pertanian ini sebagai salah satu bentuk pendampingan/kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo dengan Perguruan Tinggi. Seiring dengan konsep edukasi pertanian ini, pengadadaan sarana prasarana pun terus ditingkatkan mulai pembangunan pagar, pengeboran air dalam, pompa air hidroponik, *solar cell*, serta alat pemantau udara (*drone*) yang telah dioperasikan untuk mendukung pengembangan kawasan *cluster* pertanian.

b. *Cluster* Perikanan :

Pengembangan kawasan pertanian terpadu khususnya di sektor perikanan merupakan hasil dari pengembangan masterplan Balai Benih Udang dan Ikan (BBU) yang sudah mulai dibangun pada Tahun 2014 dan difokuskan pada pengembangan budidaya kerapu dan udang vanname, dimana diharapkan dengan adanya BBU ini dapat dimanfaatkan sebagai unit produksi benih kerapu dan udang vaname untuk memasok kebutuhan benih para pembudidaya ikan di Situbondo, maupun di luar Situbondo. Pada BBU tersedia fasilitas kantor, aula, tandon air, laboratorium, petak penggelondongan kerapu, tambak, kolam terpal uji coba budidaya udang vaname pompa air laut, pompa setrifugal, pompa celup blower kincir dan perumahan karyawan serta beberapa sarpras pendukung lainnya. Sejak tahun 2016 pembenihan Udang Vaname dan Ikan Kerapu di BBU mulai dikembangkan dan dibudidayakan melalui program percontohan budidaya kerapu dan udang vaname skala rumah tangga dengan kolam terpal, pengembangan bibit ikan kerapu unggul, serta pengembangan sarana dan prasarana balai benih udang/ikan pada budidaya kerapu dan udang vaname. Diharapkan dengan program ini masyarakat dapat mengadopsi teknologi budidaya Udang Vanname skala rumah tangga dengan system bak terpal (Batervan). Sedangkan untuk benih kerapu, tahun 2018 BBU memproduksi benih kerapu sebanyak  $\pm$  75.000 ekor



benih dan target tahun 2019 sebesar 100.000 ekor.

Dengan demikian akhirnya diharapkan BBU menjadi pusat inovasi pembenihan ikan kerapu untuk memenuhi kebutuhan regional dan nasional serta percontohan budidaya udang vaname, dalam rangka penerapan teknologi dan edukasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya saing dan menunjang kemandirian ekonomi

c. *Cluster* Peternakan :

Kawasan Pertanian Terpadu *cluster* peternakan mulai dibangun akhir Tahun 2015 secara bertahap. Dimulai dengan pembangunan kandang sapi dan kandang ayam, kantor, gudang telur, gudang peralatan, gudang pakan ayam, mess karyawan, Gedung *bio security*, pagar, *mini feed mill*, kandang sapi potong selatan serta kandang sapi perah. Saat ini *cluster* peternakan difokuskan pada pengembangan sapi perah serta ayam petelur. Rata rata produksi telur di cluster peternakan ini setiap bulannya mencapai 200 kg, dengan populasi ayam sekitar 5.000 ekor. Produksi telur di cluster ini sementara hanya bisa mencukupi kebutuhan desa desa sekitar kawasan sehingga belum terpenuhinya kebutuhan pasar di Kabupaten Situbondo juga merupakan salah satu potensi yang bisa mendukung pengembangan budidaya ayam petelur skala rumah tangga melalui percontohan di cluster peternakan ini. Produksi pakan mandiri juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan bahan pakan dan sarana pengolahan pakan. Selain itu, kawasan terpadu pertanian cluster peternakan juga berperan dalam aspek edukasi sebagai fasilitator Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga pemagangan mahasiswa perguruan tinggi.

Produktivitas untuk beberapa tanaman pangan di Kabupaten Situbondo cenderung fluktuatif, misalnya pada tahun 2017 produktivitas padi berada di angka 55,63 kw/ha sedikit menurun dari tahun 2016 yaitu 56,40 kw/ha. Berbeda halnya dengan jagung yang meningkat menjadi 50,02 kw/ha dibanding tahun 2016 yang berada pada angka 49,24 kw/ha. Produktivitas tanaman pangan khususnya menjadi hal yang senantiasa menjadi perhatian Pemerintah mengingat kontribusi sector Pertanian masih dominan pada struktur ekonomi Kabupaten Situbondo yaitu sekitar  $\pm$  34% meski selama 5 tahun terakhir pertumbuhan sector ini melambat. Sehingga usaha peningkatan produktivitas tanaman pangan ini akhirnya harus ditinjau kembali sebagai salah satu pendekatan dalam usaha peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Situbondo. Selain itu factor yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman bermacam macam penyebabnya diantaranya adanya indikasi penurunan kesuburan lahan karena penggunaan





pupuk kimia terus menerus yang merusak unsur hara pada tanah sehingga membutuhkan asupan pupuk organik yang kontinyu/terus menerus untuk mengembalikan kesuburan lahannya. Selain itu pengaplikasian budidaya organik juga menjadi salah satu alternative solusi jangka panjang dalam rangka menjaga keberlanjutan kesuburan lahan dan produktivitas tanaman pangan.

Berlatar belakang hal tersebut maka peningkatan produktivitas lahan di Kabupaten Situbondo diarahkan pada peningkatan kesuburan lahan agar mampu mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan sebuah kondisi dimana ketersediaan pangan cukup dan dapat diakses masyarakat. Ketahanan pangan hanya bisa dicapai dengan stabilnya produktivitas tanaman pangan didukung dengan pendistribusian pangan yang lancar. Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo, pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan program peningkatan kesuburan 10.000 hektar lahan pertanian. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian serta pengembangan lahan padi konversi berbasis organik.

Beberapa tahapan strategi peningkatan kesuburan lahan 10.000 ha menuju konversi padi organik antara lain :

- (1) Pemetaan potensi kesesuaian pengembangan padi organik melalui survey lapang dengan pemetaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang potensial untuk pengembangan padi organik, baik dari faktor sumber daya manusia hingga potensi lahan dengan memberdayakan mantri tani
- (2) Pelatihan dan Bimbingan Teknologi Budidaya Padi Organik, Pasca Panen, Manajemen Usaha dan Pemasaran
- (3) Peningkatan kemampuan *on farm* budidaya padi organik pada ASN dan petani pelaku organik, yang meliputi pelatihan budidaya padi organik dan pelatihan input produksi (pupuk organik, pestisida nabati, benih, dll)
- (4) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia Melalui pelatihan sertifikasi profesi fasilitator pertanian organik
- (5) Pendampingan peningkatan mutu melalui pemberkasan sertifikasi lahan padi organik, serta
- (6) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dari pengembangan kawasan pertanian padi organik, yang dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan hasil dari program yang telah dilaksanakan, mulai dari aspek kesuburan lahan, sumber daya manusia, serta kesesuaian ekonomi.

Program peningkatan kesuburan lahan 10.000 ha ini selaras dengan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Situbondo yang telah dilaksanakan berdasarkan SK Bupati Situbondo Nomor: 188/363/P/006.2/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang lokasi dan komoditas unggulan kawasan



agropolitan yang mana salah satu komoditasnya adalah Padi Organik. Pengembangan Kawasan Agropolitan serta peningkatan kesuburan lahan pertanian dengan penggunaan pupuk organik juga harus ditunjang dengan ketersediaan air irigasi melalui pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Waduk Samir. Pembangunan Waduk Samir diupayakan melalui dana APBN karena sesuai dengan prioritas nasional kedaulatan pangan.

Dari sektor perikanan, Kabupaten Situbondo dikenal sebagai pemasok benih kerapu di Indonesia. Luas perairan potensial yang dapat dikembangkan untuk budidaya kerapu di keramba jaring apung (KJA) seluas 4.000 ha. Potensi luas tambak di Kabupaten Situbondo yang dapat dikembangkan sebesar 1.219,4 ha yang meliputi tambak tradisional (175,40 ha), tambak semi intensif (179,1 ha) dan tambak intensif (864 ha,9), sedangkan total luasan yang dimanfaatkan hanya 841,94 ha (69%) dan sisanya (377,46 ha) belum optimal pemanfaatannya, sehingga potensi produksi masih dapat dioptimalkan 10.000 ton tiap tahunnya.

Mekanisme budidaya benih kerapu dan udang vaname adalah pembenihan ikan kerapu sepenggal yaitu telur dibeli dari BPAP Pecaron/Bali, dipelihara di BBU lalu dijual kembali. Produksi benih kerapu (ukuran 3cm) di Kabupaten Situbondo sebanyak ± 12.000.000 ekor/tahun (termasuk produksi BPPAP, BBU dan HSRT) dan 80% dikirim untuk kebutuhan diluar Kabupaten Situbondo. Sebesar 50% benih digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional antara lain ke Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan serta Pulau Jawa dan sebagian diekspor ke luar negeri seperti ke Malaysia, Thailand, Vietnam dll.

Di Kabupaten Situbondo terdapat 1000 unit Keramba Jaring Apung (KJA) yang beroperasi tersebar di 3 (tiga) wilayah, yaitu; (1) Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, (2) Desa Gelung, Kecamatan Panarukan serta (3) Desa Klatakan, Kecamatan Kendit. Satu unit KJA dapat menghasilkan ikan kerapu rata-rata 500 kg/panen, dengan masa panen 10 - 12 bulan, atau setara ± 500 ton/tahun. Berkaitan dengan hal di atas maka untuk pengembangan industrialisasi kerapu di kabupaten Situbondo memerlukan antara lain :

- a. Pengembangan sarana pembenihan baik skala besar, sedang maupun kecil.
- b. Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana tambak untuk penggelondongan benih kerapu.
- d. Pengembangan keramba jaring apung untuk pembesaran kerapu.

Untuk percontohan pengembangan udang vaname di kolam terpal dilakukan melalui revitalisasi tambak udang yang diharapkan akan dapat



membangkitkan gairah pembudidaya udang vanamei di kabupaten Situbondo, di mana saat ini hampir 90% tambak udang *idlle* telah beroperasi kembali. Agar budidaya udang vaname dapat berkembang pesat dan dapat dilaksanakan oleh para pembudidaya udang skala kecil, maka perlu diseminasi budidaya udang di kolam terpal dengan menggunakan air tawar yang ditingkatkan salinitasnya dengan pemberian garam, sehingga dapat dilakukan di daerah pegunungan dalam skala kecil.

Dalam rangka menyongsong tahun kunjungan wisata 2019 maka pengembangan Destinasi Pariwisata gencar diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wisata yang cukup beragam. Beberapa titik tempat wisata yang telah menjadi destinasi seperti Pantai Pasir Putih, Taman Nasional Baluran, Rafting Samir Adventure, Puncak Rengganis Argopuro, Air Terjun Talempong, Pantai Grand Pathek, *Heritage tourism* PG. Olean, Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo, Makam Pahlawan KHR. As'ad Syamsul Arifin serta Petilasan Syech Maulana Ishaq Pecaron Panarukan. Sedangkan titik tempat wisata yang sedang dikembangkan antara lain: Wisata Embara Rengganis, Boga Bahari Gundil, Kampung Blekok Klatakan, Agrowisata Kopi Kayumas, Pantai Tampora, Pantai Banongan, *Heritage tourism* Kantor Karisidenan Besuki serta Waduk Bajulmati. Adapun masih banyak titik potensi wisata yang belum dikelola oleh pemerintah seperti Pantai Sijile, Pantai Balanan, Pantai Bilik, Pantai Lempuyang dan Pantai Simacan.

Selain titik destinasi wisata, di Kabupaten Situbondo terdapat banyak *event-event* Wisata Seni dan Budaya yang rutin diadakan setiap tahunnya, seperti Festival Ojung, Festival Ayam Sap-sap, Festival Hodo, Festival Petik Laut, Festival Rakat Bumi, Festival Karang Kenek, Festival Fashion BSC (Best Situbondo Carnival), Festival Pate Alos Besuki, Situbondo Retro Festival, Situbondo Nightventure, Festival Kebangsaan, Kirab Budaya Ancak Agung, Festival Tari Topeng Kerte serta event olahraga seperti Traill Hill Run, Triathlon dan Siubondo Funrise Running.

#### **8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean governance*).**

Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (*written procedures*), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dalam bidangnya. Baik buruknya pemerintahan di suatu daerah sangat tergantung oleh birokrasi, karena pemerintahan dijalankan oleh birokrasi, pemerintahan di daerah tersebut akan baik apabila mempunyai birokrasi yang baik juga.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang dijabarkan pelaksanaannya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini kinerja para penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut memberikan implikasi yang sangat signifikan bahwa perubahan dan peningkatan kinerja harus dilakukan pada setiap sektor pemerintahan di Kabupaten Situbondo agar pegawai yang telah dimiliki mampu menyelesaikan setiap tugas yang diemban kepada secara baik dan akan memberikan dampak terhadap perbaikan kondisi Kabupaten Situbondo.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Situbondo telah diatur dengan Peraturan Bupati Situbondo. Hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya merubah dan meningkatkan kinerja adalah 1) menyusun peraturan-peraturan baru yang lebih rinci dan mengikat terhadap setiap kinerja pegawai; 2) Menciptakan budaya organisasi publik baru yang akan merubah tata kinerja yang telah berlangsung lama meskipun hal ini tidak mudah karena akan memunculkan masalah baik pada level orang maupun organisasi dan hal ini akan difokuskan pengaturan manajemen, dan menetapkan struktur atau institusi dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance* agar memenuhi tuntutan publik. 3) *Creative management* dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo terkait penciptaan, dan pengembangan pengelolaan aset serta optimalisasi kerjasama dengan pihak swasta agar memberi kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat.

Mengingat sangat berpengaruhnya birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Kabupaten Situbondo mempunyai agenda pembangunan prioritas yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean governance*). Adanya reformasi di tubuh birokrasi Kabupaten Situbondo guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Situbondo telah diatur dengan Peraturan Bupati Situbondo. Ada 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi yaitu :

1. Penataan struktur organisasi pemerintah
2. Penataan jumlah dan distribusi PNS
3. Pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka
4. Peningkatan profesionalisme PNS
5. Pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi



6. Peningkatan pelayanan publik
7. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur
8. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri
9. Peningkatan efisiensi belanja aparatur

Untuk 9 program tersebut telah dilaksanakan secara bertahap. Penataan SOTK baru, penataan ASN sesuai dengan kompetensi, adanya lelang jabatan ASN, pengembangan sistem informasi hampir disemua PD yang terintegrasi dengan dikelola oleh dinas Kominfo, peningkatan pelayanan publik di semua PD, peningkatan kesejahteraan pegawai dengan meningkatnya besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak tahun 2018 dan direncanakan semakin meningkat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk penghitungan besaran TPP ASN Kabupaten Situbondo telah menggunakan aplikasi yaitu e-Kinerja dengan memperhitungkan :

- a. Tingkat kedisiplinan;
- b. Prestasi Kerja
- c. Produktifitas Kerja

Dan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian maka akan dilakukan pengembangan yang akan diarahkan untuk mengintegrasikan aplikasi e-kinerja dan semua layanan kepegawaian seperti kepangkatan, cuti dll yang dinamakan dengan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). SIMPEG telah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2018

Salah satu strategi dalam reformasi birokrasi serta meningkatkan profesionalisme PNS maka semua PD diharapkan merupakan wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM. Ada 4 tahapan yaitu :

- a. Zona Tertib administrasi : tahun 2018, sebanyak 19 PD
- b. Zona Integritas (ZI), tahun 2018 sebanyak 19 PD
- c. Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK): tahun 2018 sebanyak 9 PD

Yang dipersiapkan untuk dinilai oleh Menpan sebanyak 4 PD yaitu Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Panarukan dan DBMPTSP

- d. Zona Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)

Selanjutnya untuk meningkatkan sistem pencegahan penanggulangan kejahatan masyarakat, telah dirintis suatu sistem yang dinamakan *Criminal Justice System* Situbondo. Sistem ini merupakan sistem yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem dengan mengintegrasikan 5 Pilar di daerah, yaitu Pemerintah daerah, Polres, Kejaksaan Negeri , Pengadilan negeri serta Rumah Tahanan dengan peran masing-masing. Data dasar yang digunakan adalah data



kependudukan berbasis NIK milik pemerintah kabupaten Situbondo dan server terdapat pada dinas Kominfo Kabupaten Situbondo.

#### **9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.**

Pelayanan publik ini menjadi sangat penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap pemerintah baik pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, karena masyarakat atau warga Negara mempunyai hak untuk dilayani. Mengingat kewajiban pemerintah akan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Situbondo mempunyai agenda pembangunan prioritas untuk mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhannya akan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat akan melakukan pembentukan dan pemekaran wilayah desa dan kelurahan.

Rencana pembentukan dan pemekaran wilayah desa dan kelurahan yang dijadikan sebagai sasaran adalah sebagai berikut:1) Desa Besuki Kecamatan Besuki menjadi 1 Kelurahan dan 1 Desa (*Wilayah Second City*); 2) Desa Pesisir Kecamatan Besuki menjadi 1 Kelurahan dan 1 Desa; 3) Desa Kilensari Kecamatan Panarukan menjadi 2 Desa; 4) Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji menjadi 2 Kelurahan; 5) Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa menjadi 2 Desa; 6) Desa Asembagus Kecamatan Asembagus menjadi 2 kelurahan (*Wilayah Second City*); 7) Desa Sopet Kecamatan Jangkar menjadi 2 Desa; 8) Desa Jatisari Kecamatan Arjasa menjadi 2 Desa; 9) Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan menjadi 1 Kelurahan dan 1 Desa; dan 10)Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih menjadi 2 Desa sehingga total perbandingan yang selama ini adalah 1 kelurahan 9 Desa menjadi 7 Kelurahan 13 Desa. Namun sebelum melakukan pembentukan dan pemekaran kelurahan dan desa tentunya akan dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga kelurahan dan desa yang dibentuk dan dimekarkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Perkembangan rencana pemekaran wilayah desa dan kelurahan sebagaimana rencana diatas, ternyata sebagaimana ketentuan dalam Permendagri bahwa yang bisa dilakukan



pemekaran adalah desa/kelurahan yang berpenduduk lebih dari 12.000 penduduk. Dari 4 desa yang diajukan ke kemendagri tahun 2018 yaitu desa curah tatal kec Arjasa, desa Sopet kec Jangkar, Desa Jatisari Kec Arjasa dan desa sumberanyar kec Banyuputih. Maka berdasarkan evaluasi kemendagri hanya desa sumberanyar yang lolos.

Selain pembentukan dan pemekaran wilayah pemerintah juga akan mengoptimalkan jenis dan jangkauan layanan dasar yang diperlukan oleh masyarakat seperti perpustakaan keliling, perijinan kependudukan keliling, penambahan UPT layanan pendidikan dan kesehatan serta pelayanan-pelayanan inovatif lain agar seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo mendapatkan pelayanan tanpa terkecuali dan masyarakat akan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo.

Upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah melalui pemanfaatan sistem informasi yakni dengan dibangunnya *Simpel Puter (Sistem Pelayanan Publik Terpadu)*. *Simpel Puter* merupakan komitmen kerakyatan layanan pemerintah Kabupaten Situbondo dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat setiap minggu sekali secara bersama-sama yang disebut *Mlijo* (fisik) dikembangkan secara online. Melalui aplikasi yang diberi nama *STEMPEL*. *STEMPEL* merupakan aplikasi terbaru hasil kerja sama pemerintah daerah kabupaten Situbondo, Kominfo dan Kejaksaan Negeri Situbondo. Aplikasi ini merupakan terobosan baru Pemkab Situbondo dalam pengembangan sistem pelayanan informasi menuju *Situbondo Smart Society*. Pengembangan Sistem layanan informasi Kabupaten Situbondo dengan nama *STEMPEL* tersebut adalah sistem pelayanan Publik (seluruh SKPD) yang menyediakan kios layanan publik yang tersebar diseluruh pusat keramaian masyarakat, Mall, Kelurahan, Puskesmas, Alun- alun dan lain – lain. Aplikasi *STEMPEL* diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan publik.

Aplikasi ini adalah penyelenggaraan pelayanan sehingga memudahkan pelayanan dan integrasi data bagi publik dalam satu portal. Masyarakat dapat mengakses portal [www.Situbondostempel.info](http://www.Situbondostempel.info) kemudian memilih Dinasnya. Salah satu contohnya Dinas Kesehatan, didalamnya terdapat layanan ibu hamil, pemeriksaan, nantinya masyarakat tidak perlu antri di rumah sakit apabila ingin periksa ke poli, cukup melalui portal "Stempel" mengambil nomor antrian. Saat ini pelayanan yang disediakan dalam aplikasi *STEMPEL* meliputi, Kejaksaan, Dinkes, DPPKB, Perpustakaan dan Arsip, Dispenduk Capil, Kominfo dan DPMPT. Dinas yang tersedia aplikasinya adalah "SiPinter" Dinas perijinan, "Simesssem"





Dinkes, "PPID" informasi publik dan "SIM PPD" untuk pembayaran pajak Dinas pendapatan daerah. Aplikasi yang masih dikembangkan dalam STEMPEL adalah Dinas : DPKP dengan "SLIM" *street light manajemen system*, Diskop dan UMKM, P3A (korban kekerasan), DLH, Dinas perpustakaan dan Arsip, BPBD Satpol PP, DAMKAR (*panic. button*), PMI dan DISHUB. Adapun Dinas yang ada di STEMPEL hanya terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah Disdukcapil, DPPKB, Disnaker, Dinsos, Dinas ketahanan pangan dan kementerian Agama, Sementara yang belum SOP, BKPSDM, LBH NU, BPN dan Polres. Dinas Yang belum ada di STEMPEL adalah Dispendik, Dinas perikanan, Dinas Pariwisata, PUPR, DPMD, Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan serta BAPEDDA,

Sembilan agenda pembangunan prioritas pembangun (Nawa Cita) Kabupaten situbondo bertujuan untuk mengarahkan pembangunan terhadap program-program prioritas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta program aksi kepala daerah. sedangkan kebijakan umum bertujuan untuk memberikan arah bagi program pembangunan Perangkat Daerah (PD) agar konsisten terhadap pencapaian sasaran sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi RPJMD, disamping itu menjaga program pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang bertujuan untuk mencapai mandat dari pemerintah pusat seperti: Standard Pelayanan Minimum (SPM), *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta program lain yang merupakan mandat dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

## **6.5 Program Pembangunan Daerah**

Mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Visi: "Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan", maka dirumuskan program pembangunan daerah tersaji dalam tabel berikut:





Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditelantarkan .

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Situbondo berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

selanjutnya perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka pada tahun 2020-2021 sebagai berikut :



prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%.

Program Prioritas I sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4. Program penyelenggaraan penunjang operasional UPT dan operasional sekolah
5. Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
6. Program Sumber Daya Kesehatan
7. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
8. Program Kesehatan Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular & Tidak Menular
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada UPT
11. Program Pelayanan Rumah Sakit
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
14. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
15. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
16. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
17. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
18. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
19. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
20. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
21. Program Pengendalian Banjir
22. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
24. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
25. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
26. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
27. Program Pengembangan dan pemasaran Destinasi Pariwisata
28. Program peningkatan produksi tanaman pangan
29. Program Peningkatan produksi Hortikultura
30. Program Peningkatan produksi perkebunan
31. Program Penguatan Reformasi birokrasi



- |  |   |
|--|---|
| <p>32. Program Pengembangan Kompetensi aparatur</p> <p>33. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH</p> | <p>34. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</p> |
|--|---|

Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar.

Program Prioritas II sebagai berikut :

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Program pengembangan nilai budaya</p> <p>2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan</p> <p>3. Program perencanaan tata ruang</p> <p>4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</p> <p>5. Program Lingkungan Sehat Perumahan dan permukiman</p> <p>6. Program pengelolaan lingkungan perkotaan</p> <p>7. Program pencegahan dan penanganan konflik sosial</p> <p>8. Program pengembangan wawasan kebangsaan, kerukunan dan pembauran</p> <p>9. Program pemberdayaan organisasi masyarakat dan pengembangan etika politik</p> <p>10. Program Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>11. Program penegakan perundang-undangan daerah dan</p> | <p>pemberantasan penyakit masyarakat</p> <p>12. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>13. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</p> <p>14. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana</p> <p>15. Program penguatan kelembagaan sosial</p> <p>16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>17. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>18. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>19. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>20. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> |
|--|---|



21. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
22. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
23. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
24. Program tata lingkungan dan akses informasi lingkungan hidup
25. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
26. Program Pengembangan Kineja Pengelolaan Persampahan
27. Program Penataan Administrasi Penduduk
28. Program Penataan administrasi pencatatan sipil
29. Program pengembangan jaringan komunikasi data dan informasi administrasi kependudukan
30. Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
31. Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
32. Program peningkatan partisipasi pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa
33. Program pembangunan desa kawasan perdesaan dan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
34. Program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
35. Program pengendalian penduduk dan penggerakan KKBPK di Lini Lapangan
36. Program Pembangunan Prasarana dan Perhubungan
37. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
38. Program peningkatan kapasitas persandian dan pengaman informasi
39. Program peningkatan iklim, realisasi, promosi dan kerjasama investasi
40. Program pelayanan perijinan terpadu
41. Program penyediaan dukungan data/informasi dan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
42. Program peningkatan dan pengembangan peran pemuda dan prestasi olahraga
43. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
44. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
45. Program pengembangan perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir
46. Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengendalian sumber daya perairan
47. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan



48. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
49. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
50. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
51. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
52. Program peningkatan kualitas usaha koperasi
53. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
54. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro
55. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
56. Program pengembangan perindustrian
57. Program pembinaan industri
58. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
59. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
60. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
61. Program Perencanaan Sosial Budaya
62. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
63. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan
64. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
65. Program pengadaan, pengolahan data dan kesejahteraan ASN
66. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
67. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
68. Program Pemanfaatan Dan Penggunaan Barang Milik Daerah
69. Program Peningkatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
70. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
71. Program penggalan potensi dan penatausahaan PAD
72. Program peningkatan kualitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
73. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
74. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
75. Program Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
76. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
77. Program Pengembangan Perekonomian dan Fasilitasi BUMD
78. Program peningkatan penataan daerah otonomi baru
79. Program layanan pengadaan barang dan jasa



80. Program pelayanan publik dan penataan ketatalaksanaan
81. Program fasilitasi penyusunan peraturan daerah dan risalah
82. Program fasilitasi fungsi pengawasan, penganggaran dan alat kelengkapan dewan
83. Program peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan
84. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa





Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa (diluar ADD dan Dana Desa).

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1 sedangkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 2016-2021 secara terperinci dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini:



**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (juta rupiah) Tahun 2016-2021**

No.	Uraian	Tahun 2016 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017 (Perda RPJMD)	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018 (Perda RPJMD)	Raperda P- APBD Tahun 2018	Tahun 2019 (Perda RPJMD)	Raperda APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Rata- rata Pertum- buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	<b>PENERIMAAN</b>	<b>1,757,230.89</b>	<b>1,771,760.45</b>	<b>1,832,958.19</b>	<b>1,731,387.37</b>	<b>1,967,604.01</b>	<b>1,849,288.31</b>	<b>2,067,721.16</b>	<b>1,749,683.32</b>	<b>2,050,144.97</b>	<b>2,115,681.41</b>	<b>3.90%</b>
2	<b>BELANJA</b>	<b>1,757,230.90</b>	<b>1,661,059.13</b>	<b>1,832,958.19</b>	<b>1,611,319.20</b>	<b>1,967,604.01</b>	<b>1,849,288.30</b>	<b>2,067,721.16</b>	<b>1,749,683.32</b>	<b>1,962,594.96</b>	<b>2,020,831.41</b>	<b>4.30%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>980,076.11</b>	<b>892,406.97</b>	<b>1,076,471.71</b>	<b>865,645.56</b>	<b>1,175,335.44</b>	<b>965,422.43</b>	<b>1,251,056.59</b>	<b>1,015,684.55</b>	<b>1,015,326.34</b>	<b>1,033,256.22</b>	<b>3.09%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	783,384.92	682,415.25	813,730.23	616,790.81	863,314.72	708,491.50	917,102.52	720,486.33	739,092.87	746,483.80	2.11%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4	Belanja Hibah	4,496.99	21,802.86	5,061.81	31,224.61	5,697.58	32,646.76	6,413.19	32,421.93	39,502.58	43,452.84	15.78%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,000.00	609.2	1,100.00	7,280.00	1,200.00	8,432.50	1,300.00	14,185.00	10,203.33	11,223.66	232.20%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil ke Pemdes	2,298.25	2,298.25	4,051.35	2,506.98	4,706.32	2,929.19	5,176.95	5,431.76	2,988.07	3,017.95	13.47%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	184,395.95	184,011.66	248,028.32	207,518.97	295,916.84	210,864.47	316,563.93	241,217.39	221,539.49	227,077.97	4.62%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,500.00	1,269.75	4,500.00	324.18	4,500.00	2,058.01	4,500.00	1,942.14	2,000.00	2,000.00	91.54%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>777,154.78</b>	<b>768,652.16</b>	<b>756,486.48</b>	<b>745,673.64</b>	<b>792,268.56</b>	<b>883,865.88</b>	<b>816,664.56</b>	<b>733,998.77</b>	<b>947,268.63</b>	<b>987,575.18</b>	<b>6.38%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	73,055.65	64,674.91	71,112.75	79,553.68	74,476.41	81,727.57	76,769.73	80,915.49	87,930.69	89,689.31	7.08%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293,915.32	287,113.70	286,098.69	320,737.55	299,631.26	386,954.80	308,857.68	370,415.53	412,642.00	428,855.14	8.68%
2.2.3	Belanja Modal	410,183.81	416,863.54	399,275.04	345,382.42	418,160.90	415,183.51	431,037.15	282,667.75	446,695.94	469,030.73	6.83%





Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja daerah ini juga berfungsi untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja pemerintah dalam pembangunan setiap tahunnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk menjaga pembangunan tetap sesuai dengan perencanaan.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Metode yang digunakan dalam penentuan target ini adalah: 1) Metode SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve*). a) *specific* berarti target sangat jelas ruang lingkup dan tidak menimbulkan multi tafsir; b) *measurable* bahwa target tersebut memang dapat diukur oleh berbagai pihak dengan ukuran dan rumus yang jelas; c) *achievable* memiliki makna target yang telah ditetapkan sangat rasional untuk dapat dicapai; d) *relevant* bahwa target yang digunakan memang sesuai dengan kondisi pemerintah dan sesuai dengan indikator yang digunakan; e) *time-bond* berarti target memiliki batasan waktu yang jelas kapan akan dicapai; f) *continuously improve* memiliki makna target tersebut memiliki hubungan dan pengembangan pada setiap tahun. 2) metode *focus group discussion* (FGD) bahwa penentuan target ditetapkan dengan mendiskusikan target dengan berbagai pihak terkait



(*stakeholders*) agar mendapatkan saran dan masukan dalam penentuan target. 3) metode *past and trend* berarti penentuan target didasarkan pada capaian data yang telah dicapai kemudian dibuat sebuah trend untuk menentukan target yang akan datang.

Konsep dan cara hitung tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

**1. Indeks Pembangunan Manusia.** IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dan IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Kemanfaatan IPM sebagai indikator adalah a) Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); dan b) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Cara menghitung setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$



IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

**2. Persentase Penduduk Miskin.** Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: a) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; b) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; dan c) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK)

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan



### **Persentase Penduduk Miskin**

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 0$

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

### **3. Pertumbuhan Ekonomi.**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: a) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; b) Untuk mengetahui struktur perekonomian; c) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; dan d) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.





Rumus menghitung pertumbuhan PDRB:

$$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$$

*Dimana:*

$t+1$  = tahun pengamatan PDRB

$t$  = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

- 4. Indeks Gini Ratio.** Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Rumus untuk menghitung gini ratio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$$

dimana:

$P_i$  : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke- $i$

$Q_i$  : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- $i$

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

$G < 0,3$  = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$  = ketimpangan sedang

$G > 0,5$  = ketimpangan tinggi

- 5. Indeks Reformasi Birokrasi.** Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks Reformasi Birokrasi yang "Baik", yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga Pemerintah. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan





lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan.

**Tabel 8.1**  
**Komponen dan Sub Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi**

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40 %	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)
Total		100 %	

Adapun Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara lebih detail disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8.2**  
**Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 - 2021**  
**Pemerintah Kabupaten Situbondo**

No.	Indikator	Capaian		Target			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,08	65,68	68,28	69,42	70,58	71,76
2	Persentase Kemiskinan	13,34	13,05	10,46	9,81	9,16	8,5
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,07	5,78	5,98	6,18	6,38
4	Indeks Gini Ratio	0,35	0,33	0,274	0,27	0,266	0,262
5	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	65,91	68,41	70,91	73,41	75,91



Perumusan indikator program prioritas dituangkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 8.3**

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Situbondo**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	2016		2017		TARGET KINERJA (K)				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2018	2019	2020	2021	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>									
<b>Otonomi daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
Pertumbuhan Ekonomi	5,38	5,00	5,58	5,07	5,78	5,98	6,18	6,38	6,38
PDRB Perkapita	23,3	24,18	25,02	25,93	26,74	28,46	30,18	31,90	31,90
Indeks Gini Ratio	0,282	0,35	0,278	0,33	0,274	0,270	0,266	0,262	0,262
Persentase Penduduk Miskin	11,77	13,34	11,12	13,05	10,46	9,81	9,16	8,5	8,5
Indeks Pembangunan Manusia	66,06	65,08	67,16	65,68	68,28	69,42	70,58	71,76	71,76
Indeks Kepuasan Masyarakat	B (72)	B ( 76.13 )	B (74)	B ( 80.46 )	B ( 76 )	B ( 78 )	B ( 80 )	A ( 81.26 )	A ( 81.26 )
Indeks Reformasi Birokrasi	-	n/a	-	65,91	68,41	70,91	73,41	75,91	75,91
<i><b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b></i>									
<b>1. Pendidikan</b>									
Indeks Pendidikan	-	0,55	-	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,6
<b>2. Kesehatan</b>									
Indeks Kesehatan	-	0,75	-	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77
<b>3. Ketenagakerjaan</b>									
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,32%	3,43%	3,17%	1,49%	2,31%	2,06%	1,82%	1,49%	1,49%



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	2016		2017		TARGET KINERJA (K)				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2018	2019	2020	2021	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<i>Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib</i>									
<b>1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	n/a	-	B (77,3)	B (78)	B (79)	B (80)	B (81)	B (81)
<b>2. Sosial</b>									
Persentase Penurunan PMKS	-	0,98	-	0,99	0,99	1,04	1,08	1,12	1,12
<b>Fokus Layanan Wajib Non Dasar</b>									
<b>3. Lingkungan Hidup</b>									
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71	71,39	71,5	71,73	72	72,5	73	73,5	73,5
<b>4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
Jumlah Desa Maju	-	12 desa	-	15 desa	31 desa	46 desa	64 desa	83 desa	83 desa
<b>5. Penanaman Modal</b>									
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	350 M	-	385 M	423,5 M	465,85 M	512,435 M	563,6785 M	563,6785 M
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>									
<b>1. Pariwisata</b>									
Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi	-	8,78%	-	9,02%	9,27%	9,51%	9,76%	10,01%	10,01%
<b>2. Pertanian</b>									



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	2016		2017		TARGET KINERJA (K)				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2018	2019	2020	2021	
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	-	2,64%	-	0,95%	0,91%	1,01%	1,11%	1,21%	1,21%
<b>3. Perdagangan</b>									
Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	-	8,47%	-	9,45%	10,16%	10,86%	11,57%	12,28%	12,28%
<b>4. Perindustrian</b>									
Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	-	7,89%	-	8,25%	8,61%	8,97%	9,34%	9,70%	9,70%
<b>Fokus Layanan Urusan Penunjang</b>									
<b>1. Keuangan</b>									
Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>2. Sekretariat Daerah</b>									
Kategori Evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Capaian Nilai Sakip Pemerintah Daerah	B	CC (51,2)	B	B (61,96)	BB (70,50)	BB (75,00)	A (80,00)	A (85,00)	A (85,00)
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
<b>Kemampuan ekonomi</b>									
<b>Otonomi daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN	2016		2017		TARGET KINERJA (K)				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2018	2019	2020	2021	
Pengeluaran per kapita (dalam ribuan)	-	9.106	-	9.178	9.452	9.689	9.927,56	10.165,3	10.165,3





Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD merupakan dokumen yang menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Situbondo periode 2016-2021 yang dipadukan dengan tahapan pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD.

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dari RPJMD Tahun 2016-2021, antara lain sebagai berikut:

### **9.1 Pedoman Transisi**

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2017 hingga tahun 2021. Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2016-2021, perlu disusun RPJMD Tahun 2022-2026 yang menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025.

### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target



yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2016-2021;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021;
4. Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani RPJMD Tahun 2016-2021;
5. Penyusunan RPJMD telah dilakukan melalui penjaringan aspirasi dan konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan kerjasama dan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan target-target RPJMD Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam implementasi RPJMD Tahun 2016-2021.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

